

BUKU AJAR

SEJARAH SOSIAL

**Memahami Dinamika Masyarakat
& Perubahan Sosial**



UNIGAL
press

Penulis:
Egi Nurholis, S.Pd., M.Pd.

**BUKU AJAR
SEJARAH SOSIAL:
Memahami Dinamika Masyarakat
dan Perubahan Sosial**

Penulis:
Egi Nurholis, S.Pd., M.Pd.



Universitas Galuh Press
Penerbit Buku

BUKU AJAR SEJARAH SOSIAL: Memahami Dinamika Masyarakat dan Perubahan Sosial

Penulis:

Egi Nurholis, S.Pd., M.Pd.

ISBN: 978-623-89809-9-4 (PDF)

Editor : Dr. Sudarto, S.Pd., M.Pd.

Desain Cover : Adi Ramdani

Penata Letak : Dadan Ramdani

Cetakan : Pertama, April 2026

Penerbit : **Unigal Press**

I. R. E. Martadinata No. 150, Ds.

Mekarjaya, Kec. Baregbeg, Kab. Ciamis-
Jawa barat 46274, Indonesia

Tlp/SMS/WhatsApp: 0882114951874

Email : unigalpress@unigal.ac.id

Website : www.unigalpress.unigal.ac.id



ANGGOTA APPTI JAWA BARAT

Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini
ke dalam bentuk apapun secara elektronik maupun mekanis,
tanpa izin tertulis dari penerbit.

All Rights Reserved

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Buku Ajar Mata Kuliah Sejarah Sosial ini. Buku ini disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah dalam memahami dinamika sosial masyarakat dari masa prasejarah hingga modern.

Buku ajar ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif dan mendalam, dengan mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Materi yang disajikan mencakup konsep dasar sejarah sosial, metode penelitian, hingga analisis berbagai fenomena sosial dalam konteks sejarah.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan analisis dan pemahaman kritis terhadap peristiwa sosial historis. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ajar ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi proses pembelajaran dan pengembangan ilmu sejarah sosial.

Ciamis, Maret 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran	2
C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).....	3
D. Manfaat Pembelajaran Sejarah Sosial.....	3
BAB II: KONSEP DASAR SEJARAH SOSIAL	5
A. Pengertian Sejarah Sosial.....	5
B. Ruang Lingkup Sejarah Sosial.....	8
C. Pentingnya Mempelajari Sejarah Sosial	12
BAB III: TEORI DAN METODE PENELITIAN SEJARAH SOSIAL	17
A. Pendekatan dalam Sejarah Sosial.....	17
B. Metode Penelitian Sejarah Sosial.....	20
C. Contoh Penerapan Metode Penelitian	22
BAB IV: MASYARAKAT PRASEJARAH DAN AWAL PERADABAN	29
A. Perkembangan Awal Peradaban	29
B. Struktur Sosial Masyarakat Prasejarah	29
C. Analisis Struktur Sosial Masyarakat Prasejarah	30

BAB V: MASYARAKAT KUNO DAN FEODAL	33
A. Dinamika Sosial Masyarakat Kuno	33
B. Sistem Feodalisme	34
C. Perbandingan Sistem Feodal di Berbagai Wilayah	34
BAB VI: KOLONIALISME DAN PERUBAHAN SOSIAL	37
A. Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial ..	37
B. Dampak Kolonialisme di Indonesia.....	38
C. Studi Kasus: Perubahan Sosial akibat Kolonialisme	39
BAB VII: REVOLUSI SOSIAL DAN INDUSTRIALISASI	41
A. Pengertian Revolusi Sosial dan Industrialisasi	41
B. Dampak Industrialisasi terhadap Struktur Sosial ...	43
C. Analisis Perubahan Sosial Akibat Revolusi Industri	45
BAB VIII: GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL MODERN	49
A. Pengaruh Globalisasi terhadap Masyarakat	49
B. Modernisasi dan Identitas Sosial	56
C. Studi Kasus: Dampak Globalisasi di Indonesia	63
BAB IX: GENDER DAN SEJARAH SOSIAL.....	73
A. Peran Gender dalam Sejarah	73
B. Gerakan Feminisme dan Perubahan Sosial.....	80

C. Analisis Peran Gender dalam Sejarah Indonesia ...	88
BAB X: ETNISITAS DAN IDENTITAS SOSIAL.....	97
A. Konsep Etnisitas dan Identitas Sosial	97
B. Konflik Etnis dalam Sejarah	104
C. Pembentukan Identitas Sosial di Indonesia.....	113
BAB XI: MIGRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL	123
A. Faktor Penyebab Migrasi	123
B. Dampak Migrasi terhadap Struktur Sosial.....	131
C. Studi Kasus: Urbanisasi di Indonesia	138
BAB XII: AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL	149
A. Peran Agama dalam Perubahan Sosial	149
B. Konflik dan Harmoni Sosial Berbasis Agama	154
C. Analisis Peran Agama dalam Sejarah Indonesia .	172
BAB XIII: GERAKAN SOSIAL.....	195
A. Konsep Dasar Gerakan Sosial.....	199
B. Perkembangan Pemikiran Teori Gerakan Sosial .	204
C. Gerakan Sosial Dunia Kuno.....	211
D. Gerakan Sosial Abad Pertengahan.....	216
E. Gerakan Sosial Era Modern	221
F. Gerakan Sosial Abad XX.....	227
G. Gerakan Sosial Indonesia.....	233
H. Gerakan Sosial Era Digital.....	244
I. Analisis Gerakan Sosial Kontemporer.....	251

BAB XIV: PRESENTASI HASIL PENELITIAN	272
A. Penyusunan laporan penelitian	272
B. Teknik Presentasi Ilmiah.....	279
C. Diskusi Hasil Penelitian.....	287
BAB XV: REFLEKSI DAN REVIEW MATERI	296
A. Review Materi Semester	296
B. Diskusi Umum	303
C. Jurnal Refleksi Pembelajaran.....	309
PENUTUP.....	319
DAFTAR PUSTAKA	325
Lampiran	Error! Bookmark not defined.

BAB I:

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah sosial merupakan cabang ilmu sejarah yang berfokus pada dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Menurut Burke (2005), sejarah sosial mempelajari "interaksi antara struktur sosial dan pengalaman individu dalam berbagai periode sejarah". Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bagaimana perubahan sosial terjadi dan memengaruhi struktur masyarakat secara mendalam.

Dalam kajian sejarah, perspektif sosial memberikan dimensi baru yang melengkapi narasi politik dan ekonomi. Seperti yang diungkapkan oleh Thompson (1963), sejarah sosial berupaya memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sering kali terabaikan dalam catatan sejarah tradisional, seperti kaum buruh, perempuan, dan kelompok minoritas.

Perkembangan sejarah sosial dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran, seperti materialisme historis yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang menyoroti hubungan antara kelas sosial dan kekuasaan dalam proses sejarah (Marx & Engels, 1848). Selain itu, pendekatan Annales dari Prancis, yang dipelopori oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre, menekankan pentingnya memahami sejarah dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas (Burke, 1990).

Kajian sejarah sosial juga relevan dalam konteks Indonesia. Sejarah bangsa ini tidak hanya dipengaruhi oleh

peristiwa politik, tetapi juga oleh dinamika sosial yang kompleks, seperti migrasi, urbanisasi, serta hubungan antaretnis dan agama (Reid, 2011). Melalui pemahaman sejarah sosial, mahasiswa dapat melihat bagaimana berbagai proses tersebut membentuk struktur sosial Indonesia saat ini.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah pola interaksi sosial secara signifikan. Sejarah sosial memungkinkan kita untuk menempatkan fenomena-fenomena tersebut dalam perspektif historis, sehingga kita dapat memahami akar permasalahan sosial kontemporer dan memprediksi arah perubahan yang mungkin terjadi di masa depan (Giddens, 1990).

Dengan mempelajari sejarah sosial, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman tentang masa lalu, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis kritis yang berguna dalam memahami fenomena sosial masa kini. Oleh karena itu, mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan teoretis dan metodologis yang kuat bagi mahasiswa dalam menganalisis berbagai aspek kehidupan sosial di masa lalu, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman mereka tentang kondisi sosial masa kini dan masa depan.

B. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dalam mata kuliah Sejarah Sosial ini adalah:

1. Memahami konsep dasar dan ruang lingkup sejarah sosial.
2. Mengkaji perubahan struktur sosial dalam berbagai periode sejarah.

3. Menganalisis pengaruh faktor eksternal seperti kolonialisme, globalisasi, dan revolusi sosial terhadap masyarakat.
4. Menerapkan metode penelitian sejarah sosial dalam kajian ilmiah.

C. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis perkembangan struktur sosial masyarakat dalam konteks sejarah.
2. Menjelaskan dinamika sosial, ekonomi, dan politik dalam berbagai periode sejarah.
3. Menerapkan metode penelitian sejarah sosial dalam menganalisis fenomena sosial historis.
4. Mengevaluasi pengaruh kolonialisme, globalisasi, dan perubahan sosial dalam sejarah.

D. Manfaat Pembelajaran Sejarah Sosial

Pembelajaran Sejarah Sosial memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. Membantu mahasiswa memahami proses perubahan sosial yang memengaruhi kehidupan manusia.
2. Melatih kemampuan analisis kritis dalam melihat hubungan antara peristiwa sejarah dan dampaknya pada struktur sosial.
3. Membekali mahasiswa dengan keterampilan penelitian yang dapat digunakan dalam kajian sejarah maupun ilmu sosial lainnya.

4. Membangun kesadaran akan keberagaman budaya dan dinamika sosial dalam masyarakat.

BAB II:

KONSEP DASAR SEJARAH SOSIAL

A. Pengertian Sejarah Sosial

Sejarah sosial adalah cabang ilmu sejarah yang mempelajari berbagai aspek kehidupan sosial masyarakat di masa lampau, termasuk hubungan sosial, struktur masyarakat, dan dinamika perubahan sosial. Menurut Burke (2005), sejarah sosial berfokus pada "hubungan antara individu dan struktur sosial dalam berbagai konteks sejarah". Kajian ini berusaha memahami bagaimana manusia sebagai makhluk sosial berinteraksi dalam lingkungannya dan bagaimana perubahan sosial memengaruhi jalannya sejarah.

Pendekatan sejarah sosial mulai berkembang pesat pada pertengahan abad ke-20, dipengaruhi oleh berbagai aliran pemikiran yang menekankan pentingnya memahami sejarah dari perspektif rakyat biasa. Thompson (1963) menegaskan bahwa sejarah sosial berperan dalam "memberikan suara kepada kelompok yang terpinggirkan dan memahami dinamika sosial yang terjadi di balik peristiwa-peristiwa besar." Dalam konteks ini, sejarah sosial tidak hanya memusatkan perhatian pada tindakan para pemimpin atau peristiwa politik, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan interaksi sosial yang membentuk perjalanan sejarah.

Menurut Tosh (2002), sejarah sosial bertujuan untuk "menggali pengalaman individu dan kelompok yang kerap kali tidak mendapat perhatian dalam narasi sejarah tradisional." Dalam kajian ini, aspek-aspek seperti hubungan

kekuasaan, stratifikasi sosial, dan dinamika budaya menjadi fokus utama untuk memahami struktur masyarakat di berbagai periode.

Historiografi modern mulai mengadopsi pendekatan sejarah sosial untuk memperkaya narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh perspektif politik dan militer. Sejarawan seperti Hobsbawm (1984) menggarisbawahi pentingnya mempelajari peran kelas sosial dan ekonomi dalam membentuk peristiwa sejarah. Lebih lanjut, Scott (1986) menyoroti pentingnya analisis gender dalam sejarah sosial, yang membuka ruang untuk memahami pengalaman perempuan dalam berbagai konteks sosial.

Selain itu, perspektif sejarah sosial juga dipengaruhi oleh pendekatan *Annales* dari Prancis yang dipelopori oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre. Menurut Burke (1990), "pendekatan *Annales* menekankan pentingnya memahami sejarah dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas," sehingga kajian sejarah tidak hanya terfokus pada kronologi peristiwa, melainkan juga pada struktur sosial dan mentalitas kolektif masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Sartono Kartodirdjo (1982) menjadi pelopor dalam penerapan pendekatan sejarah sosial untuk memahami dinamika sosial di Nusantara. Ia menyoroti bagaimana kolonialisme tidak hanya memengaruhi struktur politik, tetapi juga mengubah pola sosial dan budaya masyarakat pribumi. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kolonialisme membentuk struktur sosial yang kompleks hingga saat ini.

Kajian sejarah sosial juga memberikan perhatian pada proses globalisasi yang memengaruhi interaksi sosial di berbagai belahan dunia. Menurut Giddens (1990), globalisasi mempercepat arus informasi, ideologi, dan budaya yang secara langsung berdampak pada struktur sosial masyarakat. Dalam perspektif sejarah sosial, fenomena ini dipelajari untuk memahami bagaimana perubahan global memengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan komunitas lokal.

Lebih jauh, pemikiran Foucault (1977) memberikan kontribusi besar dalam mengkaji hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan dalam sejarah sosial. Ia menyoroti bagaimana wacana dan narasi sejarah dipengaruhi oleh kekuatan dominan yang berkuasa, sehingga pemahaman sejarah menjadi arena perebutan makna dan identitas sosial.

Dengan mengkaji sejarah sosial, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana struktur sosial terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan seiring waktu. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough (1992) yang menekankan pentingnya analisis wacana dalam memahami dinamika kekuasaan dalam sejarah sosial. Selain itu, perspektif sejarah sosial juga memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analisis kritis dalam menilai berbagai sumber sejarah dan membangun pemahaman yang lebih mendalam tentang proses sosial yang membentuk dunia saat ini.

Sejarah sosial menjadi alat yang sangat penting dalam memahami hubungan kompleks antara individu, kelompok sosial, dan struktur kekuasaan yang membentuk kehidupan manusia sepanjang masa. Dengan mempelajari sejarah sosial,

mahasiswa tidak hanya diajak untuk melihat masa lalu, tetapi juga untuk menganalisis berbagai fenomena sosial yang terjadi di sekitar mereka, serta mengkaji dampak dari berbagai peristiwa sosial dalam membentuk identitas dan budaya masyarakat kontemporer.

B. Ruang Lingkup Sejarah Sosial

Ruang lingkup sejarah sosial sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan manusia dalam masyarakat. Sejarah sosial bersifat multidimensional dan menggunakan pendekatan interdisipliner dengan memanfaatkan konsep dari ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, politik, dan ilmu budaya.

Beberapa ruang lingkup utama sejarah sosial antara lain:

1. Struktur Sosial dan Organisasi Masyarakat

Sejarah sosial mengkaji bagaimana masyarakat tersusun dalam berbagai kelompok sosial dan bagaimana hubungan antar kelompok tersebut terbentuk.

Kajian ini mencakup:

- a. stratifikasi sosial;
- b. kelas sosial;
- c. kelompok elite dan masyarakat bawah;
- d. hubungan patron-klien;
- e. organisasi sosial;
- f. perubahan struktur masyarakat.

Sebagai contoh, dalam masyarakat kolonial Indonesia terdapat struktur sosial yang membedakan kelompok Eropa, Timur Asing, dan pribumi. Struktur

tersebut memengaruhi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan kekuasaan.

2. Kehidupan Ekonomi dan Perubahan Sosial

Aspek ekonomi menjadi bagian penting dalam sejarah sosial karena aktivitas ekonomi memengaruhi pola kehidupan masyarakat.

Kajian sejarah sosial ekonomi meliputi:

- a. sistem produksi;
- b. perdagangan;
- c. mata pencaharian masyarakat;
- d. hubungan kerja;
- e. perkembangan industri;
- f. perubahan ekonomi akibat globalisasi.

Sebagai contoh, perubahan dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri menyebabkan perubahan pola pekerjaan, urbanisasi, serta munculnya kelompok sosial baru.

3. Kebudayaan dan Kehidupan Sehari-hari

Sejarah sosial juga mengkaji budaya masyarakat sebagai bagian dari pengalaman manusia.

Aspek yang dikaji meliputi:

- a. tradisi;
- b. nilai dan norma sosial;
- c. bahasa;
- d. seni;
- e. pola konsumsi;
- f. gaya hidup;
- g. praktik kehidupan sehari-hari.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa budaya bukan sesuatu yang statis, tetapi terus mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

4. Agama dan Kehidupan Sosial

Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai, norma, dan identitas masyarakat.

Kajian sejarah sosial agama meliputi:

- a. perkembangan komunitas keagamaan;
- b. hubungan agama dan masyarakat;
- c. lembaga pendidikan agama;
- d. peran agama dalam perubahan sosial;
- e. hubungan antarumat beragama.

Dalam sejarah Indonesia, perkembangan agama Islam, Hindu-Buddha, Kristen, dan kepercayaan lokal menunjukkan bagaimana agama berinteraksi dengan budaya masyarakat serta memengaruhi perkembangan sosial.

5. Gender dan Peran Sosial

Sejarah sosial memberikan perhatian terhadap pengalaman perempuan dan kelompok gender lainnya yang sering kurang terlihat dalam historiografi tradisional.

Kajian gender meliputi:

- a. pembagian peran sosial;
- b. akses pendidikan;
- c. gerakan perempuan;
- d. perubahan posisi perempuan dalam masyarakat;
- e. hubungan gender dengan kekuasaan.

Kajian ini membantu memahami bahwa pengalaman sejarah tidak selalu sama bagi setiap kelompok masyarakat.

6. Migrasi dan Mobilitas Sosial

Migrasi merupakan salah satu fenomena penting dalam sejarah sosial karena perpindahan manusia memengaruhi perkembangan masyarakat.

Kajian migrasi mencakup:

- a. perpindahan penduduk;
- b. urbanisasi;
- c. diaspora;
- d. perubahan identitas sosial;
- e. hubungan antarbudaya.

Contohnya adalah urbanisasi di Indonesia yang menyebabkan perubahan struktur masyarakat desa dan kota.

7. Konflik dan Integrasi Sosial

Sejarah sosial juga mempelajari konflik sebagai bagian dari dinamika masyarakat.

Kajian ini mencakup:

- a. konflik kelas;
- b. konflik etnis;
- c. konflik agama;
- d. gerakan sosial;
- e. proses integrasi masyarakat.

Konflik tidak hanya dipandang sebagai peristiwa negatif, tetapi juga sebagai proses yang dapat menghasilkan perubahan sosial.

8. Perubahan Sosial dan Modernisasi

Perubahan sosial menjadi tema utama dalam sejarah sosial karena masyarakat selalu mengalami perkembangan.

Kajian ini meliputi:

- a. modernisasi;
- b. globalisasi;
- c. perkembangan teknologi;
- d. perubahan nilai sosial;
- e. transformasi budaya.

Sejarah sosial membantu memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap berbagai perubahan tersebut.

C. Pentingnya Mempelajari Sejarah Sosial

Mempelajari sejarah sosial memiliki arti penting dalam memahami kehidupan manusia secara lebih menyeluruh. Sejarah sosial memberikan perspektif bahwa setiap perubahan masyarakat memiliki latar belakang historis yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan hanya melalui peristiwa politik atau keputusan tokoh tertentu.

Beberapa alasan pentingnya mempelajari sejarah sosial antara lain:

1. Memahami Dinamika Kehidupan Masyarakat

Sejarah sosial membantu memahami bagaimana masyarakat terbentuk, berkembang, dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Melalui kajian sejarah sosial, mahasiswa dapat memahami bahwa kehidupan masyarakat masa kini

merupakan hasil dari proses sejarah yang panjang.

2. Memahami Penyebab Perubahan Sosial

Sejarah sosial memberikan kemampuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan masyarakat.

Misalnya, perkembangan teknologi digital saat ini tidak hanya berdampak pada komunikasi, tetapi juga mengubah pola kerja, pendidikan, ekonomi, dan hubungan sosial.

3. Mengembangkan Kesadaran Sejarah

Pemahaman sejarah sosial membantu membangun kesadaran bahwa manusia memiliki hubungan erat dengan masa lalu.

Kesadaran sejarah penting agar masyarakat mampu menghargai pengalaman masa lalu dan mengambil pelajaran untuk menghadapi masa depan.

4. Melatih Kemampuan Berpikir Kritis

Sejarah sosial mengajarkan mahasiswa untuk menganalisis berbagai sumber, memahami berbagai perspektif, serta membangun argumentasi berdasarkan bukti.

Kemampuan tersebut penting dalam menghadapi berbagai informasi sejarah yang berkembang di masyarakat.

5. Memahami Keberagaman Masyarakat

Kajian sejarah sosial menunjukkan bahwa masyarakat selalu memiliki keberagaman dalam hal budaya, agama, etnis, dan identitas sosial.

Pemahaman tersebut dapat memperkuat sikap toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman.

6. Relevan dengan Permasalahan Kontemporer

Sejarah sosial memberikan perspektif untuk memahami berbagai persoalan masa kini, seperti:

- a. ketimpangan sosial;
- b. konflik identitas;
- c. perubahan budaya;
- d. globalisasi;
- e. perkembangan teknologi;
- f. perubahan lingkungan sosial.

Dengan memahami akar sejarah suatu masalah, masyarakat dapat merumuskan solusi yang lebih tepat.

7. Mendukung Kompetensi Calon Pendidik Sejarah

Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, sejarah sosial memiliki nilai strategis karena membantu calon guru memahami bahwa pembelajaran sejarah tidak hanya mengajarkan fakta, tetapi juga membangun kemampuan berpikir historis dan kesadaran sosial peserta didik.

Guru sejarah yang memahami sejarah sosial mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih kontekstual, kritis, dan relevan dengan kehidupan siswa.

Kesimpulan

Sejarah sosial merupakan cabang ilmu sejarah yang mempelajari kehidupan masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kehidupan sehari-hari. Pendekatan sejarah sosial memperluas

pemahaman sejarah dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses perubahan sejarah.

Ruang lingkup sejarah sosial mencakup berbagai bidang, seperti struktur sosial, ekonomi, budaya, agama, gender, migrasi, konflik, integrasi, serta modernisasi. Melalui kajian tersebut, sejarah sosial mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat berkembang dan mengalami perubahan.

Mempelajari sejarah sosial memiliki manfaat penting dalam membangun kemampuan berpikir kritis, memahami keberagaman, meningkatkan kesadaran sejarah, serta menganalisis berbagai persoalan sosial kontemporer. Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, pemahaman sejarah sosial menjadi fondasi penting untuk menghasilkan pembelajaran sejarah yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan masyarakat.

Studi Reflektif

1. Apa perbedaan utama antara sejarah sosial dengan sejarah politik tradisional?
2. Mengapa masyarakat biasa menjadi fokus penting dalam kajian sejarah sosial?
3. Bagaimana hubungan antara perubahan ekonomi dengan perubahan sosial masyarakat?
4. Jelaskan mengapa sejarah sosial menggunakan pendekatan multidisipliner.
5. Bagaimana manfaat mempelajari sejarah sosial bagi calon pendidik sejarah?

BAB III:

TEORI DAN METODE PENELITIAN

SEJARAH SOSIAL

A. Pendekatan dalam Sejarah Sosial

Pendekatan dalam sejarah sosial bertujuan untuk memahami kehidupan sosial masyarakat di masa lalu dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Menurut Burke (2005), pendekatan ini menyoroti hubungan antara individu, kelompok sosial, dan struktur sosial dalam konteks historis. Pendekatan ini membuka ruang untuk mengkaji bagaimana perubahan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang membentuk dinamika masyarakat sepanjang masa.

Salah satu pendekatan utama dalam sejarah sosial adalah Materialisme Historis, yang dikembangkan oleh Karl Marx. Pendekatan ini menyoroti peran kelas sosial dan hubungan produksi dalam membentuk dinamika sosial dan perubahan sejarah (Marx & Engels, 1848). Menurut Marx, "Sejarah seluruh masyarakat yang ada hingga kini adalah sejarah perjuangan kelas." Materialisme historis menempatkan hubungan produksi sebagai faktor utama yang memengaruhi struktur sosial dan hubungan antarindividu.

Pendekatan lain yang sangat berpengaruh adalah Annales School, yang dipelopori oleh Marc Bloch dan Lucien Febvre. Pendekatan ini menekankan studi jangka panjang tentang struktur sosial dan budaya, bukan hanya peristiwa besar atau narasi politik. Bloch (2014) berpendapat bahwa "sejarah tidak hanya tentang tindakan para pahlawan

dan raja, tetapi juga tentang kebiasaan, ekonomi, dan pola pikir masyarakat." *Annales School* membawa perspektif baru dengan menitikberatkan pada analisis mendalam mengenai aspek sosial dan budaya yang membentuk kehidupan masyarakat.

Pendekatan Sejarah dari Bawah (*History from Below*), yang ditekankan oleh E.P. Thompson, memberikan fokus pada pengalaman dan perjuangan kelompok marjinal dalam masyarakat. Thompson (1963) berargumen bahwa "penting untuk memahami sejarah dari perspektif rakyat biasa, bukan hanya dari sudut pandang elite." Melalui pendekatan ini, sejarah sosial mencoba mengangkat narasi kaum buruh, petani, dan kelompok-kelompok minoritas lainnya yang sering kali terabaikan dalam catatan sejarah tradisional.

Selain itu, ada pula pendekatan Sejarah Mikro yang menitikberatkan pada kajian mendalam mengenai komunitas atau individu tertentu untuk memahami dinamika sosial yang lebih luas. Menurut Carlo Ginzburg (1976), sejarah mikro menawarkan "pemahaman yang lebih intim tentang kehidupan sehari-hari masyarakat, yang sering kali luput dari perhatian dalam narasi besar." Kajian ini berfokus pada analisis kasus-kasus spesifik yang dianggap mewakili kondisi sosial pada suatu periode tertentu.

Pendekatan Feminisme juga menjadi elemen penting dalam sejarah sosial, yang menyoroti peran gender dalam membentuk struktur sosial. Joan Scott (1986) menekankan bahwa "gender adalah kategori analisis yang sangat penting dalam memahami relasi kekuasaan di dalam masyarakat." Melalui pendekatan ini, sejarah sosial berusaha menggali

pengalaman perempuan dalam berbagai konteks sejarah yang sebelumnya terpinggirkan.

Dalam konteks globalisasi, Teori Modernisasi yang dikembangkan oleh Rostow (1960) memberikan pandangan tentang bagaimana masyarakat berkembang melalui berbagai tahapan menuju modernitas. Teori ini menyoroti peran teknologi, pendidikan, dan industrialisasi dalam merubah struktur sosial secara signifikan.

Pendekatan lain yang patut dicatat adalah Postkolonialisme, yang berfokus pada dampak kolonialisme terhadap struktur sosial masyarakat yang dijajah. Edward Said (1978) berpendapat bahwa "warisan kolonial terus membentuk identitas dan dinamika sosial masyarakat pascakolonial." Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik kolonialisme memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan budaya di negara-negara bekas jajahan.

Sementara itu, Pendekatan Globalisasi menyoroti proses integrasi global yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial. Menurut Giddens (1990), globalisasi mempercepat arus informasi, ideologi, dan budaya yang secara langsung berdampak pada struktur sosial masyarakat.

Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan sejarawan sosial untuk memahami perubahan sosial secara lebih komprehensif. Setiap pendekatan memberikan perspektif yang unik dalam mengkaji dinamika sosial, sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana masyarakat berkembang dan berubah seiring waktu.

B. Metode Penelitian Sejarah Sosial

Metode penelitian sejarah sosial bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa sosial di masa lalu dengan menitikberatkan pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang melingkupinya. Menurut Tosh (2002), penelitian sejarah sosial memerlukan pendekatan multidisipliner untuk memahami dinamika sosial yang kompleks. Berbagai metode digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kehidupan sosial di masa lalu.

1. Studi Arsip dan Dokumen

Metode ini menjadi dasar dalam penelitian sejarah sosial, di mana peneliti menganalisis dokumen-dokumen tertulis seperti surat kabar, catatan pemerintahan, arsip pribadi, serta laporan organisasi. Bloch (2014) menekankan bahwa "arsip adalah saksi bisu dari masa lalu yang memberikan gambaran otentik tentang kehidupan sosial yang terjadi kala itu." Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola sosial, hubungan kekuasaan, serta dinamika sosial yang terjadi.

2. Sejarah Lisan (Oral History)

Metode ini melibatkan wawancara dengan individu yang memiliki pengalaman langsung terhadap suatu peristiwa sosial tertentu. Paul Thompson (1988) menyatakan bahwa "sejarah lisan memberikan suara kepada mereka yang sering diabaikan dalam catatan sejarah tertulis." Melalui sejarah lisan, peneliti dapat menggali memori kolektif serta memahami perspektif personal yang sering kali luput dari arsip resmi.

3. Analisis Data Kuantitatif

Dalam sejarah sosial, data kuantitatif seperti sensus, catatan ekonomi, atau statistik populasi digunakan untuk mengidentifikasi pola sosial dan ekonomi dalam jangka waktu tertentu. Hobsbawm (1984) berpendapat bahwa "analisis statistik dalam sejarah sosial memungkinkan peneliti untuk mengukur perubahan sosial dalam skala yang lebih luas." Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memetakan transformasi sosial, migrasi, atau perubahan ekonomi yang memengaruhi struktur masyarakat.

4. Interpretasi Budaya

Pendekatan ini menyoroti simbol, ritual, dan praktik budaya yang mencerminkan dinamika sosial dalam suatu komunitas. Clifford Geertz (1973) menekankan bahwa "budaya adalah jaringan makna yang ditenun oleh manusia sendiri, dan memahami budaya berarti menafsirkan makna di balik tindakan sosial." Melalui interpretasi budaya, peneliti dapat mengkaji hubungan sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu.

5. Analisis Wacana

Metode ini berfokus pada cara bahasa digunakan untuk membentuk dan mencerminkan kekuasaan dalam masyarakat. Fairclough (1992) mengemukakan bahwa "wacana tidak hanya merepresentasikan realitas sosial, tetapi juga berkontribusi dalam membentuknya." Analisis wacana dalam sejarah sosial digunakan untuk menyoroti narasi dominan yang membentuk pemahaman kolektif tentang peristiwa sosial.

6. Metode Komparatif

Metode ini melibatkan perbandingan antara dua atau lebih masyarakat atau periode waktu untuk memahami pola sosial yang muncul. Menurut Skocpol (1979), "metode komparatif memungkinkan peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan sosial di berbagai konteks." Melalui metode ini, peneliti dapat mengkaji persamaan dan perbedaan dinamika sosial di berbagai wilayah.

Dengan menerapkan berbagai metode ini, peneliti sejarah sosial tidak hanya mampu merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga memahami dinamika sosial yang membentuk peristiwa tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Tosh (2002), "keberagaman metode dalam sejarah sosial mencerminkan kompleksitas hubungan sosial yang membentuk perjalanan sejarah manusia."

C. Contoh Penerapan Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah sosial telah diterapkan dalam berbagai studi untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di masa lalu. Penerapan metode ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam tentang hubungan sosial, budaya, dan ekonomi yang membentuk kehidupan masyarakat. Berikut beberapa contoh penerapan metode penelitian sejarah sosial oleh para ahli yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian sejarah sosial.

1. Studi Arsip dan Dokumen: Sartono Kartodirdjo dan Analisis Kolonialisme

Salah satu contoh penerapan metode penelitian sejarah sosial melalui studi arsip adalah karya Sartono Kartodirdjo tentang kolonialisme di Indonesia. Dalam bukunya "Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah" (1982), Kartodirdjo memanfaatkan berbagai dokumen kolonial, laporan pemerintah Belanda, serta catatan lokal untuk menganalisis dampak sistem tanam paksa terhadap struktur sosial masyarakat Jawa. Kartodirdjo menyoroti bagaimana kebijakan kolonial menyebabkan stratifikasi sosial yang tajam dan memperkuat ketimpangan sosial di kalangan masyarakat pribumi. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya analisis dokumen sejarah sebagai alat untuk merekonstruksi peristiwa sosial dan memahami hubungan kekuasaan yang membentuk dinamika masyarakat kolonial.

2. Sejarah Lisan: Paul Thompson dan Pengalaman Individu

Paul Thompson (1988) dalam bukunya "The Voice of the Past: Oral History" menekankan pentingnya sejarah lisan dalam merekonstruksi pengalaman individu yang sering kali terabaikan dalam catatan sejarah resmi. Melalui wawancara dengan para saksi sejarah, Thompson berhasil mengungkap perspektif personal tentang perubahan sosial yang terjadi di Inggris selama periode industrialisasi. Metode ini memberikan ruang bagi suara-suara yang selama ini terpinggirkan, serta memperkaya

pemahaman tentang dampak revolusi industri terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

3. Analisis Data Kuantitatif: E.P. Thompson dan Kelas Pekerja Inggris

Dalam karya monumentalnya "The Making of the English Working Class" (1963), E.P. Thompson menggunakan data kuantitatif seperti catatan upah, sensus penduduk, dan laporan pabrik untuk menganalisis kondisi kelas pekerja selama revolusi industri di Inggris. Thompson menunjukkan bagaimana perubahan struktur ekonomi akibat industrialisasi memengaruhi hubungan sosial dan membentuk kesadaran kelas di kalangan buruh. Pendekatan ini menyoroti pentingnya data kuantitatif dalam mengidentifikasi pola sosial dan ekonomi yang memengaruhi struktur masyarakat.

4. Interpretasi Budaya: Clifford Geertz dan Kajian Budaya Jawa

Clifford Geertz (1973) dalam karyanya "The Interpretation of Cultures" menggunakan metode interpretasi budaya untuk menganalisis kehidupan sosial masyarakat Jawa. Melalui studi etnografi, Geertz mengkaji simbol-simbol budaya, ritual keagamaan, dan praktik sosial yang mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat Jawa. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana budaya membentuk identitas sosial dan memperkuat hubungan antarkelompok dalam masyarakat.

5. Analisis Wacana: Michel Foucault dan Relasi Kekuasaan

Foucault (1977) dalam bukunya "Discipline and Punish: The Birth of the Prison" menerapkan analisis wacana untuk mengkaji bagaimana institusi sosial seperti penjara membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat modern. Melalui kajian dokumen hukum dan catatan institusi, Foucault menyoroti bagaimana praktik pengawasan dan hukuman menciptakan disiplin sosial yang membentuk struktur kekuasaan. Penerapan metode ini memberikan perspektif baru tentang hubungan antara kekuasaan, pengetahuan, dan kontrol sosial.

6. Metode Komparatif: Theda Skocpol dan Revolusi Sosial

Theda Skocpol (1979) dalam karyanya "States and Social Revolutions" menggunakan metode komparatif untuk menganalisis revolusi sosial di Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Skocpol membandingkan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang memicu terjadinya revolusi di ketiga negara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi pola umum yang melatarbelakangi perubahan sosial yang terjadi dalam konteks yang berbeda.

Dengan memahami berbagai contoh penerapan metode penelitian sejarah sosial, mahasiswa diharapkan mampu mengadopsi pendekatan yang sesuai dalam menganalisis fenomena sosial historis. Penerapan metode ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang proses sosial di masa lalu,

tetapi juga memberikan wawasan baru tentang dinamika sosial yang membentuk masyarakat kontemporer.

Kesimpulan

Teori dan metode penelitian sejarah sosial memberikan dasar untuk memahami kehidupan masyarakat masa lalu dari berbagai sudut pandang. Pendekatan seperti materialisme historis, *Annales School*, *history from below*, sejarah mikro, feminisme, modernisasi, postkolonialisme, dan globalisasi membantu melihat perubahan sejarah melalui struktur sosial, kelas, budaya, gender, hingga pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian sejarah sosial juga menggunakan beragam metode, seperti studi arsip dan dokumen, sejarah lisan, analisis data kuantitatif, interpretasi budaya, analisis wacana, dan metode komparatif. Setiap metode memiliki cara dan kegunaan yang berbeda sehingga pemilihannya perlu disesuaikan dengan objek, sumber, dan tujuan penelitian.

Penerapan berbagai metode tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masa lalu dapat dikaji melalui sumber dan cara analisis yang beragam. Bagi mahasiswa, pemahaman terhadap teori, metode, dan penerapannya menjadi dasar penting untuk melakukan penelitian sejarah sosial secara lebih kritis, sistematis, dan sesuai dengan karakter permasalahan yang dikaji.

Studi Reflektif

1. Mengapa sejarah sosial membutuhkan berbagai pendekatan untuk memahami kehidupan masyarakat pada masa lalu?

2. Bagaimana perbedaan studi arsip dan dokumen dengan sejarah lisan dalam memperoleh informasi mengenai kehidupan sosial masyarakat?
3. Mengapa data kuantitatif dan interpretasi budaya dapat digunakan untuk melengkapi penelitian sejarah sosial?
4. Bagaimana pemilihan pendekatan dan metode penelitian dapat memengaruhi hasil analisis terhadap suatu peristiwa sosial?
5. Jika Anda akan meneliti fenomena sejarah sosial di lingkungan sekitar, pendekatan dan metode apa yang paling sesuai digunakan? Jelaskan alasannya.

BAB IV:

MASYARAKAT PRASEJARAH DAN AWAL PERADABAN

A. Perkembangan Awal Peradaban

Perkembangan awal peradaban ditandai dengan munculnya pertanian dan domestikasi hewan, yang memicu perubahan besar dalam pola hidup manusia. Childe (1950) menyebut fenomena ini sebagai "Revolusi Neolitik," di mana manusia mulai beralih dari pola hidup nomaden menjadi menetap.

Dengan adanya pertanian, produksi pangan menjadi lebih stabil, memungkinkan pertumbuhan populasi yang pesat. Hal ini menciptakan kebutuhan akan sistem pengaturan yang lebih kompleks, melahirkan kepemimpinan politik dan institusi sosial (Diamond, 1997). Seiring dengan itu, muncul pula spesialisasi pekerjaan seperti tukang batu, pandai besi, dan pedagang, yang memperkaya struktur sosial.

Peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir Kuno, dan Lembah Indus menunjukkan adanya sistem hierarki sosial yang jelas. Di Mesopotamia, misalnya, masyarakat terbagi menjadi kelas penguasa, pendeta, pedagang, dan petani (Postgate, 1992). Selain itu, sistem tulisan pertama kali dikembangkan di kawasan ini, yang menandai dimulainya era pencatatan sejarah dan administrasi yang lebih kompleks.

B. Struktur Sosial Masyarakat Prasejarah

Masyarakat prasejarah merujuk pada periode sebelum manusia mengenal sistem tulisan. Dalam masyarakat ini,

struktur sosial terbentuk berdasarkan hubungan kekerabatan, pembagian kerja, serta kepercayaan spiritual. Menurut Renfrew dan Bahn (2016), "struktur sosial prasejarah tercermin dalam pola pemukiman, praktik penguburan, dan artefak yang ditemukan dalam situs arkeologi".

Pada masa ini, kehidupan manusia sangat bergantung pada aktivitas berburu dan meramu. Peran dalam masyarakat dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin; laki-laki umumnya bertugas berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan tanaman liar dan merawat anak-anak (Kelly, 2013). Pembagian kerja yang jelas ini menjadi fondasi awal dari struktur sosial yang lebih kompleks di kemudian hari.

Selain itu, praktik penguburan memberikan petunjuk penting tentang hierarki sosial. Di beberapa situs prasejarah, seperti di Göbekli Tepe di Turki, ditemukan bukti adanya pemimpin spiritual atau kepala suku yang dihormati dalam ritual-ritual khusus (Schmidt, 2000). Dengan demikian, struktur sosial masyarakat prasejarah mulai membentuk stratifikasi awal yang berbasis pada peran dan kontribusi individu terhadap kelompok.

C. Analisis Struktur Sosial Masyarakat Prasejarah

Analisis struktur sosial masyarakat prasejarah memanfaatkan bukti arkeologis, seperti tata letak pemukiman, alat-alat yang digunakan, dan sisa-sisa makanan. Menurut Trigger (2003), "arkeologi sosial memungkinkan kita merekonstruksi pola interaksi sosial dan dinamika kekuasaan di masyarakat prasejarah."

Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat prasejarah tidak sepenuhnya egaliter. Di beberapa situs seperti Çatalhöyük di Turki, ditemukan adanya perbedaan ukuran rumah dan barang-barang mewah, yang mengindikasikan adanya stratifikasi sosial (Hodder, 2006). Selain itu, praktik ritual dan simbolisme yang ditemukan pada artefak menunjukkan adanya pemimpin spiritual atau kepala suku yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan kolektif.

Kesimpulannya, struktur sosial masyarakat prasejarah berkembang dari hubungan kekerabatan yang sederhana menuju sistem yang lebih kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan pola kehidupan yang menetap. Analisis mendalam terhadap bukti arkeologis memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana masyarakat prasejarah membentuk fondasi bagi peradaban manusia yang kita kenal saat ini.

Kesimpulan

Masyarakat prasejarah memiliki struktur sosial yang terbentuk melalui hubungan kekerabatan, pembagian kerja, dan kepercayaan spiritual. Kehidupan yang pada awalnya bergantung pada berburu dan meramu secara bertahap mengalami perubahan ketika manusia mulai mengenal pertanian, domestikasi hewan, dan pola hidup menetap.

Perkembangan pertanian mendorong pertumbuhan penduduk, spesialisasi pekerjaan, serta munculnya kepemimpinan dan pembagian sosial yang semakin kompleks. Perubahan tersebut menjadi salah satu dasar

berkembangnya peradaban awal seperti Mesopotamia, Mesir Kuno, dan Lembah Indus yang telah memiliki sistem sosial, ekonomi, politik, dan administrasi yang lebih terorganisasi.

Melalui bukti arkeologis seperti pola permukiman, artefak, praktik penguburan, dan sisa kehidupan sehari-hari, struktur sosial masyarakat prasejarah dapat dianalisis secara lebih mendalam. Dengan demikian, perkembangan masyarakat prasejarah menunjukkan proses perubahan dari kehidupan sosial yang relatif sederhana menuju struktur masyarakat yang semakin kompleks dan menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban manusia.

Studi Reflektif

1. Bagaimana hubungan antara pola hidup berburu dan meramu dengan struktur sosial masyarakat prasejarah?
2. Mengapa perkembangan pertanian dan domestikasi hewan membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat?
3. Bagaimana kehidupan menetap dan spesialisasi pekerjaan mendorong terbentuknya struktur sosial yang semakin kompleks?
4. Apa yang dapat diketahui tentang kehidupan dan stratifikasi sosial masyarakat prasejarah melalui bukti-bukti arkeologis?
5. Bagaimana perkembangan struktur sosial masyarakat prasejarah menjadi dasar bagi munculnya peradaban awal?

BAB V:

MASYARAKAT KUNO DAN FEODAL

A. Dinamika Sosial Masyarakat Kuno

Masyarakat kuno ditandai dengan munculnya peradaban yang memiliki struktur sosial yang kompleks, sistem pemerintahan terpusat, serta perkembangan budaya dan agama yang signifikan. Menurut Childe (1950), "peradaban kuno berkembang seiring dengan meningkatnya surplus pertanian yang memungkinkan terbentuknya kelas sosial yang lebih beragam, seperti bangsawan, pendeta, pedagang, dan petani."

Dalam masyarakat Mesopotamia, misalnya, struktur sosial didominasi oleh kaum elit yang terdiri dari keluarga kerajaan dan pendeta yang memiliki akses terhadap kekayaan dan kekuasaan (Postgate, 1992). Sementara itu, rakyat biasa berperan sebagai petani, pedagang, dan pekerja kerajinan. Peran gender juga sangat terstruktur, di mana laki-laki memegang kekuasaan politik dan ekonomi, sedangkan perempuan umumnya berperan dalam ranah domestik (Lerner, 1986).

Selain itu, dinamika sosial dalam masyarakat kuno juga dipengaruhi oleh hubungan antara pusat kekuasaan dan daerah-daerah di sekitarnya. Menurut Trigger (2003), "sistem administrasi yang terpusat memungkinkan kontrol yang ketat terhadap produksi, distribusi, dan tenaga kerja, yang pada akhirnya membentuk hierarki sosial yang kuat." Dinamika ini tercermin dalam praktik upeti dan kerja paksa yang menjadi ciri khas banyak peradaban kuno.

B. Sistem Feodalisme

Feodalisme adalah sistem sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di Eropa pada Abad Pertengahan, di mana kekuasaan politik dan ekonomi terpusat pada tangan kaum bangsawan. Bloch (2014) mendefinisikan feodalisme sebagai "suatu hubungan sosial yang didasarkan pada pemberian tanah sebagai imbalan atas kesetiaan dan pelayanan militer." Sistem ini menciptakan hierarki sosial yang kaku, dengan raja atau penguasa tertinggi di puncak, diikuti oleh para bangsawan, ksatria, dan petani.

Dalam sistem feodal, tanah menjadi sumber kekuasaan utama. Para bangsawan memberikan perlindungan kepada petani atau serf, yang sebagai gantinya harus bekerja di tanah mereka dan memberikan hasil panen sebagai upeti (Duby, 1978). Hubungan patron-klien ini menjadi fondasi utama dalam struktur sosial feodal, di mana loyalitas kepada tuan tanah dianggap sebagai kewajiban utama.

Selain di Eropa, sistem serupa juga berkembang di Jepang pada periode Kamakura hingga Edo, dengan samurai yang berperan sebagai kelas militer yang melayani daimyo (penguasa wilayah) dalam sistem hierarki yang sangat mirip dengan feodalisme Eropa (Hall, 1966). Di China, praktik pemberian tanah kepada pejabat yang setia kepada kaisar juga menciptakan hubungan kekuasaan yang menyerupai sistem feodal (Fairbank, 1978).

C. Perbandingan Sistem Feodal di Berbagai Wilayah

Meski feodalisme di Eropa, Jepang, dan China memiliki beberapa kesamaan dalam struktur sosialnya,

terdapat perbedaan mendasar dalam praktik dan nilai-nilai yang mendasarinya. Di Eropa, feodalisme sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Romawi dan ajaran Gereja Katolik yang menempatkan raja sebagai wakil Tuhan di bumi (Bloch, 2014). Sementara itu, di Jepang, sistem feodal dipengaruhi oleh kode kehormatan Bushido, yang menekankan loyalitas, keberanian, dan kehormatan pribadi (Nitobe, 1905).

Perbedaan lainnya terletak pada sistem militer. Di Eropa, ksatria berperang demi tanah dan kehormatan, sedangkan di Jepang, samurai memiliki kode etik yang ketat yang mengatur cara mereka bertarung dan menjalani kehidupan sehari-hari (Hall, 1966). Selain itu, di China, kekuasaan terpusat tetap berada di tangan kaisar, yang membatasi kekuatan bangsawan feodal dan memastikan kendali pusat yang lebih kuat (Fairbank, 1978).

Dengan memahami dinamika sosial masyarakat kuno dan sistem feodal di berbagai wilayah, mahasiswa dapat mengidentifikasi pola-pola kekuasaan dan hubungan sosial yang membentuk peradaban di masa lalu. Analisis perbandingan ini juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana struktur sosial memengaruhi perkembangan budaya, politik, dan ekonomi dalam berbagai konteks sejarah.

Kesimpulan

Masyarakat kuno memiliki struktur sosial yang semakin kompleks dengan munculnya pembagian kelas, pemerintahan terpusat, dan perkembangan ekonomi. Dalam masyarakat feodal, tanah menjadi sumber utama kekuasaan

yang membentuk hubungan antara penguasa, bangsawan, kelompok militer, dan petani.

Sistem feodal di Eropa, Jepang, dan China memiliki persamaan dalam hierarki sosial, tetapi berbeda dalam sistem politik, militer, dan nilai budaya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa struktur sosial berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing wilayah.

Studi Reflektif

1. Bagaimana surplus pertanian memengaruhi struktur sosial masyarakat kuno?
2. Mengapa tanah menjadi sumber kekuasaan dalam sistem feodal?
3. Bagaimana hubungan antara penguasa, bangsawan, dan petani dalam masyarakat feodal?
4. Apa perbedaan utama feodalisme di Eropa, Jepang, dan China?
5. Bagaimana sistem feodal memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat?

BAB VI:

KOLONIALISME DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Pengaruh Kolonialisme terhadap Struktur Sosial

Kolonialisme telah membawa perubahan mendalam terhadap struktur sosial di berbagai belahan dunia. Menurut Sartono Kartodirdjo (1982), "kolonialisme bukan sekadar dominasi politik, melainkan juga upaya untuk membentuk tatanan sosial yang baru demi kepentingan kolonial." Salah satu dampak utama kolonialisme adalah terciptanya stratifikasi sosial yang tajam, di mana kaum pribumi ditempatkan dalam posisi subordinat dibandingkan dengan kaum kolonial.

Di banyak wilayah jajahan, sistem kasta atau kelas sosial yang sebelumnya ada diperkuat oleh kebijakan kolonial. Misalnya, di India, Inggris menerapkan sistem kasta sebagai alat kontrol sosial (Chatterjee, 1993). Sementara itu, di Afrika, sistem apartheid di Afrika Selatan menjadi contoh ekstrem dari stratifikasi sosial yang dilembagakan oleh kekuatan kolonial (Mandela, 1994).

Kolonialisme juga mengubah struktur ekonomi masyarakat. Menurut Gunder Frank (1969), "kolonialisme menciptakan ketergantungan ekonomi yang menempatkan negara jajahan sebagai penyedia bahan mentah dan pasar bagi produk-produk kolonial." Dampaknya, tercipta struktur sosial yang memisahkan kelompok elit kolonial, pedagang perantara, dan rakyat jelata, yang bertahan lama bahkan setelah era kolonial berakhir.

B. Dampak Kolonialisme di Indonesia

Di Indonesia, dampak kolonialisme sangat terasa dalam struktur sosial masyarakat. Kebijakan tanam paksa yang diberlakukan oleh Belanda pada abad ke-19, misalnya, menciptakan hierarki sosial yang menguntungkan kaum priyayi dan merugikan rakyat jelata (Kartodirdjo, 1982). Priyayi menjadi perpanjangan tangan pemerintah kolonial dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga memperkuat posisi mereka dalam struktur sosial.

Selain itu, kolonialisme memperkenalkan sistem pendidikan yang bersifat eksklusif. Menurut Anderson (1991), "pendidikan kolonial tidak dimaksudkan untuk memberdayakan rakyat, melainkan untuk menciptakan birokrasi yang mendukung administrasi kolonial." Hal ini menciptakan lapisan sosial baru di kalangan pribumi, yaitu mereka yang mendapat pendidikan kolonial dan mampu beradaptasi dengan sistem Barat.

Perubahan lain yang signifikan adalah munculnya nasionalisme sebagai respons terhadap ketidakadilan kolonial. Pemuda-pemuda terdidik mulai membentuk organisasi pergerakan nasional yang berjuang melawan penjajahan. Menurut Reid (2011), "kesadaran nasional yang tumbuh di kalangan kaum terdidik menjadi pendorong utama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia." Kolonialisme, dengan demikian, tidak hanya memicu ketimpangan sosial, tetapi juga melahirkan perlawanan yang pada akhirnya mengarah pada kemerdekaan.

C. Studi Kasus: Perubahan Sosial akibat Kolonialisme

Salah satu contoh konkret dari perubahan sosial akibat kolonialisme di Indonesia adalah transformasi sistem agraria di Jawa. Sebelum kolonialisme, masyarakat Jawa mengenal sistem pertanian komunal yang berbasis gotong royong. Namun, kebijakan tanam paksa dan sistem sewa tanah yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mengubah pola kepemilikan lahan secara drastis (Breman, 1983).

Breman menunjukkan bahwa "dampak dari kebijakan kolonial ini adalah munculnya kelompok petani tak bertanah dan buruh tani yang bergantung pada sistem upah." Sebelumnya, petani memiliki akses terhadap lahan secara kolektif, tetapi setelah kolonialisme, akses ini dibatasi oleh regulasi kolonial yang memprioritaskan produksi komoditas ekspor seperti gula dan kopi.

Dampak lain yang terlihat adalah perubahan dalam struktur keluarga. Sebelum kolonialisme, keluarga di Jawa memiliki struktur yang lebih egaliter. Namun, dengan masuknya sistem ekonomi kapitalis, peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama semakin ditekankan, sementara perempuan terpinggirkan ke ranah domestik (Elson, 1999). Hal ini memperkuat pembagian kerja berdasarkan gender yang bertahan hingga masa pascakolonial.

Dengan mempelajari pengaruh kolonialisme terhadap struktur sosial, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana kolonialisme tidak hanya memengaruhi aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk dinamika sosial yang kompleks dan bertahan lama. Pengetahuan ini penting

untuk menganalisis fenomena sosial kontemporer yang masih dipengaruhi oleh warisan kolonial.

Kesimpulan

Kolonialisme membawa perubahan besar terhadap struktur sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Di Indonesia, kebijakan kolonial menciptakan ketimpangan sosial, mengubah sistem agraria, memperkenalkan pendidikan kolonial, serta membentuk kelompok sosial baru.

Di sisi lain, tekanan dan ketidakadilan kolonial turut mendorong munculnya kaum terdidik, organisasi pergerakan, dan kesadaran nasional. Dengan demikian, kolonialisme tidak hanya meninggalkan perubahan ekonomi dan politik, tetapi juga warisan sosial yang pengaruhnya dapat bertahan hingga masa pascakolonial.

Studi Reflektif

1. Bagaimana kolonialisme mengubah struktur sosial masyarakat di wilayah jajahan?
2. Apa dampak sistem tanam paksa terhadap kehidupan masyarakat Indonesia?
3. Bagaimana pendidikan kolonial memengaruhi terbentuknya kelompok sosial baru?
4. Mengapa kolonialisme turut mendorong munculnya nasionalisme di Indonesia?
5. Bagaimana perubahan sistem agraria pada masa kolonial memengaruhi kehidupan petani?

BAB VII:

REVOLUSI SOSIAL DAN INDUSTRIALISASI

A. Pengertian Revolusi Sosial dan Industrialisasi

1. Definisi Revolusi Sosial

Revolusi sosial merupakan perubahan mendasar dan radikal yang terjadi dalam struktur masyarakat, lembaga sosial, dan hubungan kekuasaan dalam waktu yang relatif singkat. Revolusi sosial ditandai dengan perubahan sistemik yang signifikan, bukan sekadar reformasi bertahap (Skocpol, 1979). Berbeda dengan revolusi politik yang berfokus pada perubahan rezim, revolusi sosial mencakup transformasi yang lebih luas dalam tatanan sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Theda Skocpol dalam karyanya "States and Social Revolutions" (1979), revolusi sosial merupakan "transformasi cepat dan mendasar dari struktur kelas dan negara suatu masyarakat, disertai dan sebagian didorong oleh pemberontakan kelas dari bawah." Karakter revolusi sosial meliputi:

- a. Perubahan struktur kelas yang fundamental
- b. Transformasi institusi politik
- c. Mobilisasi massa yang luas
- d. Ideologi yang menggerakkan perubahan

2. Definisi Industrialisasi

Industrialisasi adalah proses transformasi ekonomi dan sosial di mana masyarakat beralih dari ekonomi berbasis pertanian tradisional menuju ekonomi berbasis manufaktur modern. Industrialisasi ditandai dengan:

- a. Mekanisasi produksi
- b. Pembagian kerja yang lebih khusus
- c. Pembentukan pabrik sebagai unit produksi utama
- d. Penggunaan sumber energi baru (uap, listrik, minyak bumi)
- e. Urbanisasi dan pertumbuhan kota

Menurut E.J. Hobsbawm dalam "The Age of Revolution: 1789-1848" (1962), industrialisasi merupakan "transformasi paling fundamental dalam sejarah manusia yang tercatat, yang mengubah setiap aspek kehidupan manusia dengan cara yang tidak dapat dibandingkan dengan perubahan sebelumnya."

3. Hubungan antara Revolusi Sosial dan Industrialisasi

Revolusi Industri yang bermula di Inggris pada akhir abad ke-18 menjadi pendorong utama revolusi sosial yang mengubah struktur masyarakat Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Industrialisasi menciptakan kelas-kelas sosial baru (borjuasi industri dan proletariat), mengubah relasi produksi, dan melahirkan ketegangan sosial yang memicu gerakan-gerakan sosial.

Menurut Karl Marx dan Friedrich Engels dalam "Manifesto Komunis" (1848), industrialisasi kapitalis menciptakan kontradiksi dalam hubungan produksi yang pada akhirnya akan memicu revolusi sosial oleh kelas pekerja. Meskipun prediksi Marx tentang revolusi proletariat tidak terjadi di negara-negara industri maju, analisisnya tentang dampak industrialisasi terhadap struktur sosial tetap relevan.

B. Dampak Industrialisasi terhadap Struktur Sosial

1. Pembentukan Kelas Sosial Baru

Industrialisasi mengubah struktur kelas feodal menjadi struktur kelas kapitalis dengan terbentuknya:

- a. Borjuasi industri: Pemilik modal dan sarana produksi yang muncul sebagai kelas dominan baru menggantikan aristokrasi tanah.
- b. Proletariat industri: Kelas pekerja pabrik yang menjual tenaga kerjanya untuk upah.
- c. Kelas menengah baru: Profesional, manajer, teknisi, dan pekerja administrasi yang muncul seiring kompleksitas ekonomi industrial.

Menurut E.P. Thompson dalam "The Making of the English Working Class" (1963), pembentukan kelas pekerja bukanlah sekadar hasil dari kekuatan ekonomi, tetapi merupakan proses sosial dan budaya dimana pekerja mengembangkan kesadaran kolektif dan identitas bersama.

2. Urbanisasi dan Transformasi Pemukiman

Industrialisasi mendorong perpindahan penduduk besar-besaran dari desa ke kota, menciptakan:

- a. Kota-kota industri: Pusat-pusat manufaktur seperti Manchester, Birmingham, dan Glasgow di Inggris, yang tumbuh pesat dalam beberapa dekade.
- b. Pemukiman kumuh: Kondisi hidup yang padat dan tidak sehat bagi kelas pekerja.
- c. Segregasi spasial: Pemisahan tempat tinggal berdasarkan kelas sosial.

Friedrich Engels dalam "The Condition of the Working Class in England" (1845) mendokumentasikan dengan detail kondisi kehidupan yang mengesankan di daerah pemukiman pekerja di Manchester, yang mencerminkan dampak negatif urbanisasi industri.

3. Perubahan dalam Keluarga dan Gender

Industrialisasi mengubah struktur keluarga dan peran gender:

- a. Pemisahan ruang domestik dan produktif: Pekerjaan terpisah dari rumah tangga.
- b. Feminisasi sektor tertentu: Wanita masuk ke tenaga kerja pabrik, terutama di tekstil.
- c. Perubahan pada institusi perkawinan: Pola pernikahan yang lebih didasarkan pada pilihan individual.

Louise Tilly dan Joan Scott dalam "Women, Work, and Family" (1978) menganalisis bagaimana industrialisasi mengubah kehidupan perempuan pekerja dan dinamika keluarga, dengan dampak yang berbeda-beda berdasarkan kelas sosial.

4. Transformasi Modal Sosial dan Jaringan Komunitas

Industrialisasi mengikis struktur komunitas tradisional dan menciptakan bentuk solidaritas baru:

- a. Melemahnya ikatan komunal: Hilangnya ekonomi moral yang berdasarkan kewajiban mutual.
- b. Munculnya asosiasi sukarela: Serikat pekerja, koperasi, kelompok mutual aid.

- c. Solidaritas kelas: Terbentuknya identitas kolektif berdasarkan posisi dalam sistem produksi.

Émile Durkheim dalam "The Division of Labor in Society" (1893) menggambarkan transisi dari "solidaritas mekanis" masyarakat tradisional ke "solidaritas organik" masyarakat industrial yang ditandai dengan interdependensi fungsional yang tinggi.

C. Analisis Perubahan Sosial Akibat Revolusi Industri

1. Revolusi Industri Pertama (1760-1840)

Dimulai di Inggris dengan inovasi mesin uap dan mekanisasi industri tekstil, Revolusi Industri pertama berdampak pada:

- a. Sistem produksi: Beralih dari manufaktur rumahan ke sistem pabrik.
- b. Struktur kerja: Disiplin waktu, spesialisasi, dan subordinasi pekerja pada mesin.
- c. Mobilitas sosial: Peluang akumulasi kekayaan bagi pengusaha dan inovator.

E.P. Thompson dalam "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism" (1967) menganalisis bagaimana industrialisasi mengubah konsepsi waktu dan kerja, memperkenalkan disiplin waktu yang ketat yang mengubah ritme kehidupan sehari-hari.

2. Revolusi Industri Kedua (1870-1914)

Ditandai dengan elektrifikasi, produksi massal, dan manajemen ilmiah, dampaknya meliputi:

- a. Rasionalisasi produksi: Taylorisme dan Fordisme sebagai sistem produksi massal.

- b. Konsumerisme: Kemunculan masyarakat konsumsi dan budaya konsumen.
- c. Imperialisme industri: Ekspansi ke pasar global dan pencarian bahan mentah.

Harry Braverman dalam "Labor and Monopoly Capital" (1974) mengkritisi bagaimana manajemen ilmiah menghasilkan deskilling pekerja dan meningkatkan kontrol kapitalis atas proses kerja.

3. Gerakan Sosial Sebagai Respons terhadap Industrialisasi

Industrialisasi memicu berbagai gerakan sosial sebagai bentuk perlawanan dan adaptasi:

- a. Ludisme: Perlawanan pekerja terhadap mekanisasi di awal industrialisasi.
- b. Trade unionisme: Pembentukan serikat pekerja untuk negosiasi upah dan kondisi kerja.
- c. Sosialisme dan Marxisme: Kritik sistematis terhadap kapitalisme industrial.
- d. Gerakan reformasi sosial: Kampanye untuk regulasi pabrik, pendidikan publik, kesehatan, dan perumahan.

Charles Tilly dalam "Social Movements, 1768–2004" (2004) menjelaskan bagaimana industrialisasi menciptakan kondisi bagi munculnya gerakan sosial modern dengan repertoar aksi kolektif yang khas.

4. Dampak Industrialisasi di Indonesia pada Masa Kolonial

Indonesia mengalami industrialisasi dalam konteks kolonial dengan karakteristik berbeda:

- a. Ekonomi enclave: Industrialisasi terbatas pada sektor ekstraktif untuk kepentingan kolonial.
- b. Sistem tanam paksa dan cultuurstelsel: Memaksa petani beralih ke tanaman ekspor.
- c. Dualisme ekonomi: Sektor modern berorientasi ekspor berdampingan dengan ekonomi subsisten tradisional.

J.S. Furnivall dalam "Netherlands India: A Study of Plural Economy" (1939) dan Clifford Geertz dalam "Agricultural Involution" (1963) memberikan analisis tentang transformasi ekonomi dan sosial di Indonesia selama periode kolonial.

Kesimpulan

Revolusi sosial dan industrialisasi membawa perubahan besar terhadap struktur masyarakat, terutama dalam pembentukan kelas sosial, pola kerja, urbanisasi, kehidupan keluarga, dan hubungan sosial. Perkembangan industri juga melahirkan kelas borjuasi, proletariat, serta berbagai bentuk solidaritas dan organisasi baru dalam masyarakat.

Perkembangan Revolusi Industri dari tahap pertama hingga kedua semakin mengubah sistem produksi dan kehidupan masyarakat serta mendorong munculnya berbagai gerakan sosial. Di Indonesia, industrialisasi pada masa kolonial memiliki karakter berbeda karena lebih diarahkan pada kepentingan ekonomi kolonial dan produksi komoditas ekspor.

Studi Reflektif

1. Bagaimana industrialisasi mengubah struktur kelas dalam masyarakat?
2. Mengapa industrialisasi mendorong terjadinya urbanisasi dan perubahan pola kehidupan masyarakat?
3. Bagaimana industrialisasi memengaruhi kehidupan keluarga dan pembagian peran gender?
4. Mengapa berbagai gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap perkembangan industrialisasi?
5. Apa perbedaan karakter industrialisasi di Eropa dengan industrialisasi di Indonesia pada masa kolonial?

BAB VIII:

GLOBALISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL MODERN

A. Pengaruh Globalisasi terhadap Masyarakat

Globalisasi merupakan proses meningkatnya keterhubungan antarmasyarakat di berbagai belahan dunia melalui arus barang, jasa, manusia, modal, informasi, teknologi, dan budaya. Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi tidak dipahami sebagai fenomena yang muncul secara tiba-tiba pada abad ke-20, melainkan sebagai kelanjutan dari proses interaksi antarmasyarakat yang telah berlangsung sejak perdagangan lintas benua, kolonialisme, revolusi industri, hingga perkembangan teknologi informasi pada era digital. Namun demikian, globalisasi kontemporer memiliki karakter yang berbeda karena didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi, internet, dan transportasi yang mempercepat intensitas hubungan antarmasyarakat di tingkat global.

Anthony Giddens (1990) mendefinisikan globalisasi sebagai *“intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan lokasi-lokasi yang berjauhan sedemikian rupa sehingga peristiwa lokal dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di tempat lain.”* Definisi tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat modern tidak lagi hanya dipengaruhi oleh kondisi lokal, tetapi juga oleh dinamika ekonomi, politik, budaya, dan teknologi yang berkembang secara global. Dalam konteks sejarah sosial, globalisasi

menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat perubahan struktur sosial masyarakat.

1. Globalisasi sebagai Agen Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan transformasi yang terjadi pada struktur sosial, pola hubungan, nilai, norma, maupun institusi masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Menurut Sztompka (1993), perubahan sosial merupakan proses yang terus berlangsung sebagai akibat interaksi antara faktor internal dan eksternal masyarakat. Globalisasi menjadi salah satu faktor eksternal yang paling dominan dalam membentuk perubahan sosial masyarakat modern.

Dalam sejarah, perubahan sosial akibat globalisasi dapat diamati melalui beberapa fase. Fase pertama terjadi ketika jalur perdagangan internasional menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa sejak abad pertengahan. Fase kedua berkembang pada masa kolonialisme yang memperluas jaringan ekonomi dunia melalui eksploitasi sumber daya dan tenaga kerja. Fase ketiga berlangsung sejak Revolusi Industri yang mempercepat produksi, distribusi, dan mobilitas manusia. Saat ini, dunia memasuki fase globalisasi digital yang ditandai oleh internet, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), media sosial, serta ekonomi berbasis data.

Perubahan tersebut mengubah cara masyarakat bekerja, belajar, berkomunikasi, bahkan membangun identitas sosialnya. Sejarah sosial memandang bahwa perubahan ini tidak hanya berdampak pada kelompok

elite, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat biasa dalam aktivitas sehari-hari.

2. Pengaruh Globalisasi terhadap Struktur Sosial

Globalisasi membawa perubahan signifikan terhadap struktur sosial masyarakat. Struktur sosial yang sebelumnya didominasi oleh hubungan-hubungan lokal kini berkembang menjadi jaringan sosial yang bersifat global. Mobilitas penduduk meningkat melalui migrasi internasional, pendidikan lintas negara, serta peluang kerja di berbagai kawasan dunia.

Menurut Manuel Castells (1996), masyarakat modern berkembang menjadi *network society*, yaitu masyarakat yang hubungan sosialnya dibangun melalui jaringan informasi dan teknologi digital. Dalam masyarakat jaringan, batas geografis menjadi semakin kabur sehingga individu dapat bekerja, belajar, maupun berinteraksi tanpa harus berada pada lokasi yang sama.

Perubahan struktur sosial juga terlihat pada munculnya kelas sosial baru, seperti pekerja ekonomi digital (*digital workers*), kreator konten (*content creator*), pekerja lepas (*freelancer*), serta wirausahawan berbasis teknologi (*startup entrepreneur*). Di sisi lain, globalisasi juga memperlebar kesenjangan sosial karena tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, teknologi, dan informasi. Kondisi ini dikenal sebagai *digital divide* atau kesenjangan digital.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan struktur sosial akibat globalisasi menunjukkan bahwa stratifikasi masyarakat tidak lagi hanya ditentukan oleh kepemilikan

tanah atau modal industri sebagaimana pada era Revolusi Industri, tetapi juga oleh penguasaan informasi, teknologi, dan pengetahuan.

3. Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Ekonomi

Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi adalah integrasi ekonomi dunia. Arus perdagangan bebas, investasi internasional, dan perkembangan perusahaan multinasional menciptakan peluang ekonomi baru sekaligus meningkatkan persaingan global.

Menurut Thomas L. Friedman (2005), dunia menjadi semakin "datar" (*The World is Flat*) karena kemajuan teknologi memungkinkan individu maupun perusahaan bersaing dalam pasar global tanpa dibatasi wilayah geografis.

Dalam kehidupan masyarakat, globalisasi ekonomi memberikan beberapa dampak positif, antara lain:

- a. meningkatnya kesempatan kerja pada sektor industri dan jasa;
- b. berkembangnya perdagangan elektronik (*e-commerce*);
- c. bertambahnya investasi asing;
- d. meningkatnya inovasi teknologi produksi.

Namun demikian, globalisasi juga membawa dampak negatif berupa ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap pasar internasional, serta melemahnya usaha-usaha lokal yang kurang mampu bersaing dengan produk global.

Dalam sejarah Indonesia, perubahan struktur ekonomi akibat globalisasi mulai terlihat secara nyata sejak liberalisasi ekonomi pada dekade 1980-an hingga berkembangnya ekonomi digital pada abad ke-21. Munculnya perusahaan berbasis aplikasi digital mengubah pola konsumsi maupun pola kerja masyarakat secara signifikan.

4. Pengaruh Globalisasi terhadap Budaya

Globalisasi mempercepat pertukaran budaya antarbangsa melalui media massa, internet, film, musik, olahraga, serta berbagai platform digital. Arus budaya global menciptakan proses difusi budaya yang berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan periode-periode sebelumnya dalam sejarah.

Roland Robertson (1992) memperkenalkan konsep *glocalization*, yaitu proses ketika budaya global dipadukan dengan budaya lokal sehingga menghasilkan bentuk budaya baru. Oleh karena itu, globalisasi tidak selalu menghilangkan budaya lokal, tetapi sering kali menghasilkan adaptasi budaya yang unik.

Sebagai contoh, makanan cepat saji internasional di Indonesia sering disesuaikan dengan cita rasa lokal. Demikian pula penggunaan media sosial dimanfaatkan untuk memperkenalkan budaya daerah, bahasa lokal, maupun destinasi wisata berbasis sejarah.

Di sisi lain, globalisasi juga dapat mendorong homogenisasi budaya, yaitu kecenderungan masyarakat mengadopsi gaya hidup global sehingga tradisi lokal mulai ditinggalkan. Fenomena tersebut tampak pada

perubahan pola berpakaian, bahasa sehari-hari, hiburan, hingga pola konsumsi masyarakat perkotaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan budaya akibat globalisasi menunjukkan bahwa identitas budaya selalu mengalami proses negosiasi antara nilai-nilai lokal dan pengaruh global.

5. Pengaruh Globalisasi terhadap Pendidikan dan Pengetahuan

Kemajuan teknologi informasi menjadikan pendidikan sebagai salah satu sektor yang mengalami transformasi paling cepat. Akses terhadap sumber belajar kini tidak lagi terbatas pada ruang kelas, tetapi tersedia melalui berbagai platform digital, perpustakaan elektronik, jurnal ilmiah, dan kursus daring (*online learning*).

Globalisasi memungkinkan pertukaran ilmu pengetahuan berlangsung secara lebih cepat melalui kolaborasi internasional antaruniversitas maupun lembaga penelitian. Mahasiswa dapat mengikuti kuliah dari universitas luar negeri, sedangkan dosen dapat membangun jejaring akademik secara global.

Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa banjir informasi (*information overload*), penyebaran hoaks, plagiarisme, serta ketimpangan akses teknologi di berbagai wilayah.

Bagi disiplin sejarah sosial, perkembangan ini membuka peluang baru dalam penelitian sejarah digital (*digital history*), digitalisasi arsip, pemanfaatan

kecerdasan buatan dalam analisis sumber sejarah, serta penyebaran pengetahuan sejarah kepada masyarakat luas.

6. Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai dan Hubungan Sosial

Globalisasi mengubah pola interaksi sosial masyarakat. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini semakin banyak berlangsung melalui media digital. Hubungan sosial menjadi lebih luas karena individu dapat membangun jaringan pertemanan maupun komunitas lintas negara.

Menurut Ulrich Beck (2000), masyarakat modern memasuki era *risk society*, yaitu masyarakat yang menghadapi berbagai risiko global seperti krisis ekonomi, pandemi, perubahan iklim, dan keamanan siber. Risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial tidak lagi bersifat lokal, tetapi menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dunia.

Selain memperluas hubungan sosial, globalisasi juga memunculkan kecenderungan individualisme, menurunnya interaksi langsung, serta perubahan pola solidaritas masyarakat. Oleh karena itu, tantangan terbesar masyarakat modern adalah menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, toleransi, dan kepedulian sosial.

7. Analisis Sejarah Sosial terhadap Globalisasi

Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi tidak hanya dipandang sebagai perkembangan teknologi atau ekonomi, tetapi sebagai proses historis yang mengubah kehidupan manusia secara menyeluruh. Sejarah sosial

menempatkan masyarakat sebagai aktor utama yang mengalami, menyesuaikan, sekaligus membentuk proses globalisasi.

Pendekatan sejarah sosial memungkinkan peneliti memahami bagaimana kelompok petani, buruh, perempuan, masyarakat adat, pelajar, hingga komunitas digital mengalami dampak globalisasi secara berbeda-beda. Oleh karena itu, globalisasi tidak menghasilkan perubahan yang seragam, melainkan bergantung pada kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik masing-masing masyarakat.

Bagi Indonesia, globalisasi menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas kerja sama internasional, dan memperkuat inovasi. Namun, globalisasi juga menuntut kemampuan masyarakat dalam mempertahankan identitas budaya, memperkuat literasi digital, serta mengurangi kesenjangan sosial agar manfaat globalisasi dapat dirasakan secara lebih merata.

B. Modernisasi dan Identitas Sosial

Modernisasi merupakan proses transformasi masyarakat dari pola kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih rasional, kompleks, dan berbasis ilmu pengetahuan serta teknologi. Dalam perspektif sejarah sosial, modernisasi bukan sekadar perubahan teknologi, tetapi juga perubahan dalam sistem nilai, struktur sosial, pola pikir, institusi, dan identitas masyarakat. Modernisasi telah menjadi salah satu kekuatan utama yang membentuk

masyarakat kontemporer, terutama sejak Revolusi Industri hingga era digital saat ini.

Menurut Anthony Giddens (1990), modernitas merupakan suatu tatanan sosial yang lahir setelah abad ke-17 di Eropa dan kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia melalui perkembangan kapitalisme, industrialisasi, birokrasi, dan negara-bangsa (*nation-state*). Dalam proses tersebut, masyarakat mengalami perubahan cara berpikir dari yang semula berlandaskan tradisi menuju rasionalitas, efisiensi, dan inovasi.

Dalam kajian sejarah sosial, modernisasi dipandang sebagai proses historis yang mengubah cara manusia memahami dirinya sendiri, hubungan sosial, serta posisinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan identitas sosial menjadi salah satu konsekuensi utama dari modernisasi.

1. Konsep Modernisasi dalam Perspektif Sejarah Sosial

Teori modernisasi berkembang pesat setelah Perang Dunia II sebagai upaya menjelaskan perubahan masyarakat menuju pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial. Salah satu tokohnya, Walt Whitman Rostow (1960), mengemukakan bahwa setiap masyarakat akan melewati lima tahap pertumbuhan ekonomi, mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat dengan konsumsi massal yang tinggi (*high mass consumption*).

Meskipun teori Rostow banyak dikritik karena dianggap terlalu berorientasi pada pengalaman negara-negara Barat, konsep modernisasi tetap memberikan

kontribusi penting dalam memahami perubahan sosial. Modernisasi tidak hanya berkaitan dengan pembangunan ekonomi, tetapi juga meliputi perubahan dalam sistem pendidikan, birokrasi, teknologi, komunikasi, dan budaya.

Dalam sejarah sosial, modernisasi dipahami sebagai proses yang berlangsung secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi historis masing-masing masyarakat. Dengan demikian, tidak semua negara mengalami modernisasi melalui jalur yang sama. Pengalaman Jepang, Korea Selatan, Indonesia, maupun negara-negara Eropa menunjukkan bahwa modernisasi memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politiknya.

2. Pengertian Identitas Sosial

Identitas sosial adalah pemahaman individu mengenai dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial tertentu. Identitas tersebut dapat dibentuk berdasarkan etnis, agama, bahasa, profesi, gender, kelas sosial, kewarganegaraan, maupun komunitas budaya.

Henri Tajfel dan John Turner (1979) menjelaskan melalui *Social Identity Theory* bahwa identitas sosial terbentuk ketika seseorang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota suatu kelompok dan memberikan makna terhadap keanggotaannya tersebut. Identitas sosial tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan lingkungan sosial dan pengalaman individu.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas masyarakat selalu mengalami perubahan sebagai akibat interaksi antarkelompok, migrasi, kolonialisme,

modernisasi, hingga globalisasi. Oleh sebab itu, identitas sosial merupakan hasil konstruksi sejarah yang terus berkembang.

Sebagai contoh, identitas masyarakat Indonesia tidak hanya dibentuk oleh budaya lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi panjang dengan India, Arab, Tiongkok, Eropa, hingga perkembangan budaya global pada abad ke-21.

3. Modernisasi dan Transformasi Identitas Sosial

Modernisasi telah mengubah cara masyarakat membangun identitasnya. Pada masyarakat tradisional, identitas seseorang umumnya ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat turun-temurun, seperti asal daerah, keluarga, pekerjaan orang tua, atau status sosial.

Namun, dalam masyarakat modern identitas semakin bersifat dinamis. Pendidikan, profesi, kompetensi, gaya hidup, hingga aktivitas di ruang digital menjadi faktor penting dalam pembentukan identitas sosial.

Anthony Giddens (1991) menyebut kondisi ini sebagai *reflexive identity*, yaitu identitas yang terus dibangun dan dinegosiasikan oleh individu sepanjang hidupnya. Individu modern memiliki kebebasan lebih besar untuk menentukan pilihan pendidikan, pekerjaan, komunitas, bahkan cara menampilkan dirinya di ruang publik maupun media sosial.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa Pendidikan Sejarah tidak hanya dikenal sebagai anggota masyarakat lokal, tetapi juga dapat membangun identitas sebagai

peneliti muda, kreator konten sejarah, pegiat literasi digital, atau pengelola museum virtual. Identitas tersebut dibentuk melalui pengalaman sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan masyarakat tradisional.

4. Modernisasi dan Perubahan Nilai Sosial

Modernisasi juga membawa perubahan terhadap sistem nilai dalam masyarakat. Ronald Inglehart (1997) menjelaskan bahwa masyarakat modern mengalami pergeseran dari nilai-nilai material (*materialist values*) menuju nilai-nilai pascamaterial (*post-materialist values*), seperti kebebasan berekspresi, kualitas hidup, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat.

Perubahan tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, antara lain:

- a. meningkatnya penghargaan terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- b. berkembangnya budaya inovasi dan kreativitas;
- c. meningkatnya kesadaran terhadap hak asasi manusia;
- d. perubahan pola hubungan antara laki-laki dan perempuan;
- e. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Di sisi lain, modernisasi juga memunculkan tantangan berupa meningkatnya individualisme, menurunnya solidaritas komunal, serta melemahnya nilai-nilai tradisional seperti gotong royong dan musyawarah apabila tidak diimbangi dengan penguatan karakter sosial.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan nilai tersebut menunjukkan bahwa modernisasi bukan hanya menghasilkan kemajuan teknologi, tetapi juga mentransformasikan budaya masyarakat secara menyeluruh.

5. Modernisasi, Media Digital, dan Identitas Generasi Muda

Perkembangan teknologi digital menjadi salah satu karakter utama modernisasi pada abad ke-21. Media sosial, internet, dan kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat membangun hubungan sosial dan mengekspresikan identitasnya.

Manuel Castells (1996) menjelaskan bahwa masyarakat modern berkembang menjadi *network society*, yaitu masyarakat yang membangun relasi melalui jaringan informasi digital. Dalam kondisi ini, identitas sosial tidak lagi hanya dibentuk melalui lingkungan keluarga atau komunitas lokal, tetapi juga melalui komunitas virtual yang melampaui batas negara.

Generasi muda memiliki kesempatan lebih luas untuk mengakses berbagai budaya dunia, membangun jejaring internasional, serta mengembangkan identitas profesional melalui platform digital. Namun, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi palsu (*hoaks*), budaya konsumtif, tekanan sosial di media digital, hingga krisis identitas akibat derasnya arus budaya global.

Oleh karena itu, literasi digital menjadi salah satu kompetensi penting dalam masyarakat modern agar

individu mampu memanfaatkan teknologi secara kritis, bertanggung jawab, dan produktif.

6. Modernisasi dan Pelestarian Identitas Budaya

Salah satu kritik terhadap modernisasi adalah kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal akibat dominasi budaya global. Namun, dalam kenyataannya modernisasi tidak selalu menghapus budaya lokal. Banyak masyarakat justru mampu mengintegrasikan unsur-unsur modern dengan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Dalam konteks Indonesia, berbagai tradisi lokal tetap bertahan melalui proses adaptasi terhadap perkembangan zaman. Upacara adat, seni pertunjukan, bahasa daerah, kuliner tradisional, hingga warisan sejarah kini dipromosikan melalui media digital, museum virtual, platform pembelajaran daring, serta industri kreatif berbasis budaya.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa modernisasi dapat menjadi sarana pelestarian budaya apabila dimanfaatkan secara tepat. Identitas budaya tidak dipertahankan dengan menolak perubahan, tetapi melalui proses inovasi yang tetap menghargai nilai-nilai lokal.

Dalam kajian sejarah sosial, proses tersebut dikenal sebagai bentuk adaptasi sosial, yaitu kemampuan masyarakat mempertahankan identitasnya sambil menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

7. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Modernisasi

Sejarah sosial memandang modernisasi sebagai proses yang memengaruhi seluruh lapisan masyarakat,

bukan hanya kelompok elite. Perubahan pola kerja, sistem pendidikan, hubungan keluarga, peran perempuan, organisasi masyarakat, hingga aktivitas ekonomi merupakan bagian dari transformasi sosial yang dapat dianalisis melalui pendekatan sejarah sosial.

Pendekatan ini juga menunjukkan bahwa modernisasi menghasilkan pengalaman yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Masyarakat perkotaan umumnya mengalami modernisasi lebih cepat dibandingkan masyarakat pedesaan. Demikian pula kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan teknologi cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan kelompok yang kurang memiliki akses.

Bagi Indonesia, modernisasi harus dipahami sebagai proses pembangunan yang tetap memperhatikan keberagaman budaya, nilai Pancasila, serta semangat persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Dengan demikian, kemajuan teknologi dan ekonomi tidak menghilangkan identitas nasional, melainkan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

C. Studi Kasus: Dampak Globalisasi di Indonesia

Globalisasi merupakan salah satu kekuatan yang membentuk perubahan sosial Indonesia sejak akhir abad ke-20 hingga era digital saat ini. Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi dipahami sebagai proses historis yang memengaruhi kehidupan masyarakat melalui perubahan struktur ekonomi, pola interaksi sosial, perkembangan

budaya, teknologi, pendidikan, hingga pembentukan identitas nasional. Berbeda dengan kajian politik yang lebih menitikberatkan pada hubungan antarnegara atau kebijakan pemerintah, sejarah sosial memusatkan perhatian pada pengalaman masyarakat dalam menghadapi perubahan tersebut.

Indonesia sebenarnya telah mengalami proses globalisasi sejak masa perdagangan internasional di Nusantara. Hubungan dagang dengan India, Tiongkok, Timur Tengah, dan Eropa memperlihatkan bahwa masyarakat Nusantara telah lama menjadi bagian dari jaringan global. Namun, globalisasi kontemporer yang berkembang setelah kemajuan teknologi informasi memiliki karakteristik yang berbeda karena berlangsung jauh lebih cepat, melibatkan hampir seluruh lapisan masyarakat, dan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan.

Menurut Anthony Giddens (1990), globalisasi menyebabkan hubungan sosial lokal dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam konteks Indonesia, fenomena tersebut terlihat pada perubahan gaya hidup masyarakat, perkembangan ekonomi digital, meningkatnya mobilitas penduduk, hingga transformasi budaya yang berlangsung secara masif.

1. Transformasi Struktur Sosial Masyarakat Indonesia

Salah satu dampak terbesar globalisasi adalah perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia. Sebelum era globalisasi digital, sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor pertanian dan ekonomi berbasis sumber daya

alam. Namun sejak dekade 1990-an, struktur ekonomi Indonesia mengalami pergeseran menuju sektor industri, jasa, dan ekonomi berbasis informasi.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan ini mengubah pola hubungan antarkelompok masyarakat. Muncul kelas menengah baru yang memperoleh akses lebih besar terhadap pendidikan tinggi, teknologi, dan pekerjaan profesional. Di sisi lain, muncul pula kelompok pekerja digital seperti pengemudi transportasi daring, pekerja lepas (*freelancer*), pengembang perangkat lunak, kreator konten, serta pelaku usaha berbasis platform digital.

Perubahan struktur sosial tersebut memperlihatkan bahwa posisi sosial masyarakat tidak lagi hanya ditentukan oleh kepemilikan tanah atau keturunan, tetapi semakin dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, penguasaan teknologi, kemampuan inovasi, dan akses terhadap jaringan ekonomi global.

Namun demikian, globalisasi juga melahirkan kesenjangan sosial baru. Wilayah perkotaan berkembang lebih cepat dibandingkan wilayah pedesaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap internet, pendidikan, dan investasi. Dalam sejarah sosial Indonesia, fenomena ini menjadi bentuk baru dari ketimpangan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.

2. Perubahan Pola Kehidupan Masyarakat

Globalisasi telah mengubah pola kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perubahan tersebut terlihat

pada cara masyarakat bekerja, belajar, berkomunikasi, hingga memperoleh informasi.

Perkembangan internet memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Pendidikan berlangsung melalui pembelajaran daring, transaksi ekonomi dilakukan melalui *e-commerce*, komunikasi dilakukan melalui media sosial, sedangkan pekerjaan banyak dilakukan secara fleksibel melalui sistem kerja jarak jauh (*remote working*).

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut menunjukkan transformasi dari masyarakat yang berorientasi pada interaksi langsung menuju masyarakat digital (*digital society*). Hubungan sosial menjadi semakin luas, tetapi pada saat yang sama intensitas interaksi tatap muka dalam komunitas lokal mengalami penurunan.

Perubahan pola kehidupan ini juga memengaruhi hubungan keluarga. Sebelumnya, keluarga menjadi pusat utama pewarisan nilai dan budaya. Kini, media digital menjadi salah satu agen sosialisasi yang sangat dominan dalam membentuk pola pikir generasi muda. Kondisi tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam menjaga nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia.

3. Globalisasi dan Perubahan Budaya Lokal

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa budaya Nusantara selalu berkembang melalui interaksi dengan budaya luar. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha, Islam, kolonialisme Barat, hingga budaya populer modern merupakan bagian dari proses sejarah yang panjang.

Pada era globalisasi, proses pertukaran budaya berlangsung jauh lebih cepat melalui internet, film, musik, media sosial, dan industri hiburan global. Budaya Korea (*Korean Wave*), budaya Jepang, budaya Barat, hingga berbagai tren global dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif sejarah sosial, fenomena tersebut tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap budaya lokal. Justru banyak komunitas lokal mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkenalkan budaya daerah kepada masyarakat dunia.

Sebagai contoh, pertunjukan wayang, angklung, tari tradisional, batik, hingga situs-situs sejarah kini dipromosikan melalui media sosial, kanal YouTube, museum virtual, maupun platform digital lainnya. Banyak generasi muda memproduksi konten sejarah lokal sehingga warisan budaya tidak hanya bertahan, tetapi juga memperoleh ruang baru dalam masyarakat digital.

Meskipun demikian, globalisasi juga mendorong munculnya budaya konsumtif, gaya hidup instan, serta kecenderungan homogenisasi budaya apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya lokal.

4. Dampak Globalisasi terhadap Dunia Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mengalami transformasi besar akibat globalisasi. Kemajuan teknologi memungkinkan mahasiswa Indonesia mengakses jurnal internasional, mengikuti

kuliah daring dari universitas luar negeri, serta membangun kolaborasi akademik lintas negara.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan ini memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pengetahuan yang sebelumnya hanya dapat diakses oleh kelompok tertentu. Demokratisasi informasi menjadi salah satu ciri penting masyarakat modern.

Namun demikian, sejarah sosial juga menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum sepenuhnya merata. Kesenjangan infrastruktur digital masih terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga tidak seluruh masyarakat memperoleh manfaat globalisasi secara setara.

Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada penyediaan teknologi, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan akses, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan literasi digital.

5. Globalisasi, Identitas Nasional, dan Solidaritas Sosial

Globalisasi menghadirkan tantangan bagi identitas nasional Indonesia. Arus informasi yang sangat cepat memungkinkan masyarakat mengadopsi berbagai nilai, gaya hidup, dan budaya dari berbagai negara.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas nasional Indonesia sesungguhnya dibangun melalui proses sejarah yang panjang, mulai dari pengalaman kolonialisme, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda 1928, hingga Proklamasi Kemerdekaan 1945. Oleh karena itu, identitas

nasional bukanlah sesuatu yang statis, tetapi hasil interaksi berbagai kelompok masyarakat selama berabad-abad.

Globalisasi memberikan peluang untuk memperkenalkan identitas Indonesia kepada dunia melalui diplomasi budaya, industri kreatif, maupun pariwisata sejarah. Di sisi lain, globalisasi juga dapat melemahkan rasa kebangsaan apabila masyarakat lebih mengidentifikasi dirinya dengan budaya global daripada identitas nasional.

Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kebhinekaan menjadi modal sosial (*social capital*) yang perlu dipertahankan agar modernisasi tidak menghilangkan karakter masyarakat Indonesia.

6. Studi Kasus: Digitalisasi UMKM dan Transformasi Sosial

Salah satu contoh konkret dampak globalisasi di Indonesia adalah berkembangnya digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sejak berkembangnya internet dan perdagangan elektronik, ribuan pelaku UMKM memasarkan produknya melalui berbagai platform digital.

Dalam perspektif sejarah sosial, fenomena ini menunjukkan perubahan hubungan antara produsen dan konsumen. Jika sebelumnya perdagangan bergantung pada pasar tradisional dan toko fisik, kini transaksi dapat dilakukan secara daring dengan jangkauan pasar nasional bahkan internasional.

Transformasi tersebut meningkatkan mobilitas ekonomi masyarakat sekaligus mengubah struktur

pekerjaan. Banyak masyarakat yang sebelumnya bekerja secara informal kini memperoleh peluang usaha baru melalui ekonomi digital.

Namun demikian, digitalisasi juga menghadirkan tantangan berupa persaingan global yang semakin ketat, perlunya peningkatan kompetensi digital, serta perlindungan terhadap produk lokal agar mampu bersaing dengan produk impor.

7. Analisis Sejarah Sosial terhadap Globalisasi di Indonesia

Pendekatan sejarah sosial menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya menghasilkan perubahan ekonomi, tetapi juga mengubah struktur masyarakat secara menyeluruh. Perubahan tersebut meliputi pola hubungan sosial, sistem nilai, budaya, pendidikan, pekerjaan, hingga identitas masyarakat.

Berbeda dengan pendekatan ekonomi yang menilai globalisasi dari pertumbuhan investasi atau perdagangan, sejarah sosial menempatkan masyarakat sebagai fokus utama analisis. Pertanyaan yang diajukan bukan hanya *berapa besar pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan*, tetapi juga *bagaimana perubahan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan antarkelompok, dan keberlanjutan budaya lokal*.

Dalam konteks Indonesia, sejarah sosial memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan global. Berbagai budaya lokal mampu bertahan melalui inovasi, teknologi dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan, dan

ekonomi digital membuka peluang baru bagi masyarakat. Namun demikian, keberhasilan globalisasi sangat bergantung pada kemampuan bangsa Indonesia menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi, keadilan sosial, pelestarian budaya, dan penguatan identitas nasional.

Kesimpulan

Globalisasi dan modernisasi membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam struktur sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun pola hubungan sosial. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi membuat masyarakat semakin terhubung secara global serta mendorong munculnya pola kerja, gaya hidup, dan identitas sosial yang semakin beragam dan dinamis. Modernisasi juga mengubah cara masyarakat memperoleh pengetahuan, membangun hubungan, serta menyesuaikan nilai dan budaya dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi memberikan peluang melalui perkembangan ekonomi digital, pendidikan, teknologi, dan promosi budaya lokal. Di sisi lain, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital, perubahan nilai sosial, persaingan ekonomi, serta derasnya pengaruh budaya global. Karena itu, masyarakat perlu mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa meninggalkan identitas budaya, solidaritas sosial, dan nilai-nilai yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Studi Reflektif

1. Bagaimana globalisasi memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat?
2. Mengapa modernisasi dapat menyebabkan perubahan identitas sosial dalam masyarakat?
3. Bagaimana perkembangan teknologi digital mengubah pola interaksi dan kehidupan generasi muda?
4. Apa dampak positif dan negatif globalisasi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia?
5. Bagaimana masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan globalisasi sekaligus mempertahankan budaya lokal dan identitas nasional?

BAB IX:

GENDER DAN SEJARAH SOSIAL

A. Peran Gender dalam Sejarah

Gender merupakan salah satu aspek penting dalam kajian sejarah sosial karena berkaitan dengan pembagian peran, hak, kewajiban, serta hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam sejarah, relasi gender tidak bersifat tetap, melainkan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan ekonomi, politik, budaya, agama, dan teknologi. Oleh karena itu, sejarah sosial memandang gender sebagai konstruksi sosial yang dibentuk oleh pengalaman historis masyarakat, bukan semata-mata ditentukan oleh perbedaan biologis.

Kajian sejarah tradisional selama bertahun-tahun lebih banyak menampilkan tokoh-tokoh laki-laki sebagai pelaku utama sejarah, seperti raja, panglima perang, politikus, atau pemimpin pemerintahan. Akibatnya, pengalaman perempuan dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering kali kurang memperoleh perhatian dalam penulisan sejarah. Sejarah sosial kemudian hadir untuk memperluas perspektif tersebut dengan mengkaji kehidupan masyarakat secara lebih menyeluruh, termasuk pengalaman perempuan dalam keluarga, ekonomi, pendidikan, budaya, maupun gerakan sosial.

Menurut Joan W. Scott (1986), gender merupakan kategori analisis yang penting dalam sejarah karena membantu menjelaskan bagaimana relasi kekuasaan dibentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Dengan

demikian, kajian gender dalam sejarah sosial tidak hanya membahas perempuan, tetapi juga mengkaji hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks sejarah.

1. Konsep Gender dalam Perspektif Sejarah Sosial

Istilah gender berbeda dengan jenis kelamin (sex). Jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender merupakan seperangkat peran, nilai, norma, dan harapan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.

Menurut Ann Oakley (1972), gender adalah konstruksi sosial yang menjelaskan bagaimana masyarakat memberikan peran tertentu kepada laki-laki maupun perempuan. Karena merupakan hasil konstruksi sosial, peran gender dapat berubah sesuai perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan peran gender dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. perubahan sistem ekonomi;
- b. perkembangan teknologi;
- c. perubahan sistem pendidikan;
- d. transformasi politik;
- e. perkembangan agama dan budaya;
- f. globalisasi.

Oleh karena itu, peran laki-laki maupun perempuan dalam masyarakat tidak selalu sama pada setiap periode sejarah.

2. Peran Gender pada Masyarakat Tradisional

Dalam masyarakat agraris tradisional, pembagian kerja umumnya didasarkan pada kebutuhan ekonomi keluarga dan kondisi lingkungan. Laki-laki lebih banyak melakukan pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik, seperti berburu, membuka lahan, atau menjaga keamanan komunitas. Sementara itu, perempuan berperan dalam mengelola rumah tangga, mengasuh anak, mengolah hasil pertanian, serta menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

Namun demikian, sejarah sosial menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak selalu bersifat mutlak. Banyak penelitian memperlihatkan bahwa perempuan juga memiliki kontribusi penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat tradisional.

Di berbagai wilayah Nusantara, perempuan terlibat aktif dalam kegiatan perdagangan lokal. Di pasar-pasar tradisional Jawa, Minangkabau, Bugis, maupun Bali, perempuan menjadi pelaku utama distribusi hasil pertanian dan perdagangan kebutuhan sehari-hari. Bahkan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, perempuan memiliki kedudukan penting dalam kepemilikan harta pusaka dan pengelolaan rumah gadang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sejarah sosial tidak dapat dipahami hanya melalui pembagian kerja yang bersifat normatif, tetapi harus melihat praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

3. Perubahan Peran Gender pada Masa Kolonial

Masuknya kolonialisme membawa perubahan besar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia, termasuk dalam relasi gender. Pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pendidikan modern, birokrasi, ekonomi uang, dan pembagian kerja yang berbeda dengan masyarakat tradisional.

Pada awal masa kolonial, akses pendidikan bagi perempuan masih sangat terbatas. Pendidikan lebih banyak diperuntukkan bagi laki-laki yang dipersiapkan menjadi pegawai administrasi kolonial. Akibatnya, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan formal jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki.

Namun, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mulai muncul tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan hak, salah satunya adalah Raden Ajeng Kartini. Melalui surat-suratnya yang kemudian diterbitkan dalam buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Kartini mengkritik keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan pribumi dan mendorong pentingnya pendidikan sebagai sarana kemajuan masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, perjuangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan gender tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah kolonial, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan perubahan sosial.

4. Gender dalam Perubahan Ekonomi dan Industrialisasi

Perkembangan industri pada abad ke-19 dan abad ke-20 turut mengubah pembagian kerja berdasarkan gender. Industrialisasi menciptakan berbagai jenis pekerjaan baru yang memungkinkan perempuan memasuki sektor produksi di luar rumah tangga.

Menurut Louise Tilly dan Joan Scott (1978), industrialisasi mengubah hubungan antara keluarga dan pekerjaan. Jika sebelumnya rumah tangga menjadi pusat produksi ekonomi, maka setelah industrialisasi pekerjaan semakin terpusat di pabrik, kantor, dan perusahaan.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan industri tekstil, makanan, elektronik, hingga sektor jasa membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, kondisi tersebut juga mengubah posisi sosial perempuan dalam masyarakat.

Namun demikian, sejarah sosial juga mencatat bahwa perempuan sering menghadapi berbagai bentuk ketimpangan, seperti perbedaan upah, beban kerja ganda (*double burden*), serta keterbatasan akses terhadap posisi kepemimpinan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa modernisasi tidak secara otomatis menghapus ketidaksetaraan gender, tetapi justru menghadirkan tantangan baru dalam hubungan sosial.

5. Peran Gender dalam Pendidikan dan Kehidupan Publik

Perkembangan pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mengubah relasi gender dalam masyarakat modern. Meningkatnya akses pendidikan memungkinkan perempuan memperoleh kesempatan yang lebih luas dalam berbagai bidang kehidupan.

Di Indonesia, perempuan kini berperan sebagai pendidik, akademisi, ilmuwan, diplomat, hakim, anggota legislatif, kepala daerah, menteri, hingga pemimpin organisasi masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut menunjukkan bahwa identitas sosial seseorang semakin ditentukan oleh kompetensi, pendidikan, dan kemampuan profesional dibandingkan oleh jenis kelamin semata.

Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa stereotip gender yang memengaruhi pembagian pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, sejarah sosial tidak hanya mengkaji perubahan yang telah terjadi, tetapi juga menganalisis proses sosial yang menyebabkan ketimpangan tersebut tetap bertahan dalam beberapa sektor kehidupan.

6. Gender dalam Perspektif Budaya dan Kehidupan Sehari-hari

Budaya memiliki pengaruh besar dalam membentuk peran gender. Nilai, adat istiadat, agama, dan tradisi menjadi dasar masyarakat dalam menentukan harapan terhadap laki-laki maupun perempuan.

Dalam sejarah Indonesia, setiap daerah memiliki konstruksi gender yang berbeda-beda. Masyarakat Minangkabau, misalnya, mengenal sistem matrilineal yang memberikan posisi penting kepada perempuan dalam pewarisan harta. Sebaliknya, beberapa masyarakat lain lebih menekankan sistem patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus garis keturunan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa relasi gender selalu dipengaruhi oleh konteks budaya masing-masing masyarakat. Oleh karena itu, sejarah sosial tidak melihat satu model hubungan gender sebagai sesuatu yang berlaku universal.

Globalisasi juga membawa perubahan terhadap budaya gender melalui media massa, pendidikan, dan teknologi informasi. Masyarakat semakin terbuka terhadap berbagai bentuk pembagian peran yang lebih fleksibel dibandingkan masa-masa sebelumnya.

7. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Peran Gender

Dalam sejarah sosial, gender dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan masyarakat. Analisis sejarah tidak lagi hanya menyoroti tokoh-tokoh besar, tetapi juga pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, pekerja, petani, dan kelompok marginal lainnya.

Pendekatan ini berkembang pesat sejak munculnya aliran *History from Below* yang dipelopori oleh Edward Palmer Thompson. Pendekatan tersebut menekankan pentingnya memahami sejarah dari perspektif masyarakat biasa, bukan hanya dari sudut pandang elite politik.

Melalui perspektif sejarah sosial, peran perempuan dipahami sebagai bagian integral dari perkembangan masyarakat. Perempuan tidak hanya menjadi pelengkap dalam sejarah, tetapi juga aktor penting dalam bidang pendidikan, ekonomi, budaya, kesehatan, gerakan sosial, hingga perjuangan kemerdekaan bangsa.

Pendekatan sejarah sosial juga memperlihatkan bahwa perubahan relasi gender berlangsung secara bertahap sebagai hasil interaksi antara perubahan ekonomi, pendidikan, kebijakan negara, perkembangan teknologi, dan transformasi budaya.

B. Gerakan Feminisme dan Perubahan Sosial

Gerakan feminisme merupakan salah satu gerakan sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat modern. Dalam perspektif sejarah sosial, feminisme dipahami bukan sekadar perjuangan memperoleh hak-hak perempuan, melainkan bagian dari proses perubahan struktur sosial yang lebih luas. Gerakan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang dialami perempuan dalam berbagai periode sejarah.

Kajian sejarah sosial memandang feminisme sebagai fenomena historis yang berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Oleh karena itu, sejarah feminisme tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur masyarakat, perkembangan ekonomi, industrialisasi, kolonialisme, demokratisasi, hingga globalisasi. Setiap periode sejarah

menghadirkan bentuk perjuangan yang berbeda sesuai dengan tantangan sosial yang dihadapi.

Menurut Joan Wallach Scott (1986), gender merupakan kategori analisis yang penting dalam memahami hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, perkembangan gerakan feminisme menjadi salah satu pintu masuk untuk menjelaskan bagaimana perubahan relasi gender berlangsung sepanjang sejarah.

1. Pengertian Gerakan Feminisme

Secara umum, feminisme adalah gerakan sosial dan intelektual yang bertujuan memperjuangkan persamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme berangkat dari kesadaran bahwa berbagai ketimpangan yang dialami perempuan bukan hanya disebabkan oleh faktor biologis, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Menurut Bell Hooks (2000), feminisme merupakan gerakan untuk menghapus praktik seksisme, eksploitasi, dan penindasan terhadap perempuan. Definisi tersebut menegaskan bahwa tujuan feminisme bukan untuk menempatkan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, melainkan menciptakan hubungan sosial yang lebih adil dan setara.

Dalam perspektif sejarah sosial, feminisme dipahami sebagai bagian dari gerakan sosial yang mendorong transformasi nilai, norma, institusi, dan struktur masyarakat menuju kehidupan yang lebih inklusif.

2. Lahirnya Gerakan Feminisme

Gerakan feminisme modern mulai berkembang di Eropa dan Amerika Utara pada akhir abad ke-18 sebagai dampak dari Pencerahan (*Enlightenment*) dan Revolusi Prancis. Ide mengenai kebebasan, persamaan, dan hak asasi manusia mendorong munculnya kritik terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan.

Salah satu tokoh awal feminisme adalah Mary Wollstonecraft, yang melalui bukunya *A Vindication of the Rights of Woman* (1792) menegaskan bahwa perempuan memiliki kemampuan intelektual yang sama dengan laki-laki sehingga berhak memperoleh pendidikan yang setara.

Dalam perspektif sejarah sosial, lahirnya feminisme tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat, tetapi juga oleh perubahan sosial akibat Revolusi Industri. Industrialisasi mengubah struktur pekerjaan, memperluas partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, sekaligus memperlihatkan berbagai bentuk ketimpangan upah, kondisi kerja, dan perlindungan hukum.

Perubahan tersebut menjadi salah satu faktor yang memperkuat lahirnya organisasi-organisasi perempuan di berbagai negara.

3. Gelombang Perkembangan Feminisme

Dalam sejarah, gerakan feminisme berkembang melalui beberapa gelombang (*waves*) yang masing-masing memiliki fokus perjuangan berbeda.

a. Feminisme Gelombang Pertama

Gelombang pertama berlangsung pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 dengan fokus utama memperjuangkan hak-hak sipil perempuan.

Beberapa tuntutan utama meliputi:

- 1) hak memperoleh pendidikan;
- 2) hak memiliki harta;
- 3) hak bekerja;
- 4) hak memilih dalam pemilihan umum (*women's suffrage*).

Gerakan ini berhasil mendorong berbagai negara memberikan hak politik kepada perempuan, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.

b. Feminisme Gelombang Kedua

Gelombang kedua berkembang pada dekade 1960–1980-an.

Perjuangan tidak lagi hanya berfokus pada hak hukum, tetapi juga pada kesetaraan dalam kehidupan sosial dan budaya.

Isu yang diperjuangkan meliputi:

- 1) kesempatan kerja;
- 2) kesetaraan upah;
- 3) kesehatan reproduksi;
- 4) pendidikan tinggi;
- 5) penghapusan diskriminasi gender.

Menurut Simone de Beauvoir dalam *The Second Sex* (1949), perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan dalam pengertian sosial, tetapi "menjadi perempuan" melalui proses konstruksi budaya.

Pandangan tersebut memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori gender dalam sejarah sosial.

c. Feminisme Gelombang Ketiga

Sejak dekade 1990-an, feminisme mulai memperhatikan keberagaman pengalaman perempuan.

Gerakan ini menyadari bahwa perempuan memiliki latar belakang sosial, budaya, agama, etnis, dan ekonomi yang berbeda sehingga pengalaman mereka terhadap ketidakadilan juga berbeda.

Konsep *intersectionality* yang diperkenalkan oleh Kimberlé Crenshaw menjelaskan bahwa diskriminasi sering kali terjadi melalui pertemuan berbagai identitas sosial, seperti gender, ras, kelas sosial, dan etnis.

Dalam perspektif sejarah sosial, pendekatan ini memperkaya analisis karena melihat masyarakat sebagai kelompok yang majemuk.

4. Feminisme sebagai Gerakan Perubahan Sosial

Sejarah sosial memandang feminisme sebagai salah satu bentuk gerakan sosial modern yang mampu mendorong perubahan institusi masyarakat.

Menurut Charles Tilly (2004), gerakan sosial merupakan upaya kolektif masyarakat untuk memperjuangkan perubahan melalui organisasi, kampanye, dan aksi publik.

Feminisme telah memengaruhi berbagai bidang kehidupan, antara lain:

a. Bidang Pendidikan

Perempuan memperoleh akses yang lebih luas terhadap pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Perubahan ini meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas partisipasi perempuan dalam dunia akademik maupun penelitian.

b. Bidang Politik

Banyak negara mulai memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, parlemen, dan kepemimpinan publik.

Di Indonesia, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif terus mengalami peningkatan meskipun masih menghadapi berbagai tantangan.

c. Bidang Ekonomi

Gerakan feminisme mendorong kesempatan kerja yang lebih luas bagi perempuan serta memperjuangkan prinsip upah yang adil.

Selain itu, perempuan semakin banyak berperan sebagai wirausahawan, profesional, dan pemimpin perusahaan.

d. Bidang Hukum

Perubahan berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan, kekerasan berbasis gender, hak pekerja perempuan, dan perlindungan anak merupakan bagian dari dampak perubahan sosial yang dipengaruhi oleh gerakan feminisme.

5. Feminisme dalam Perspektif Sejarah Sosial Indonesia

Dalam sejarah Indonesia, perjuangan perempuan berkembang melalui konteks yang berbeda dibandingkan negara-negara Barat.

Pada masa kolonial, fokus utama perjuangan perempuan adalah memperoleh pendidikan, meningkatkan martabat keluarga, dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Rasuna Said memperlihatkan bahwa perjuangan perempuan Indonesia sejak awal memiliki keterkaitan erat dengan pendidikan, nasionalisme, dan pembangunan masyarakat.

Berbeda dengan feminisme liberal di Barat, gerakan perempuan Indonesia berkembang bersama perjuangan kebangsaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa gerakan perempuan Indonesia merupakan bagian dari transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih adil sekaligus merdeka.

6. Tantangan Gerakan Feminisme pada Era Globalisasi

Globalisasi menghadirkan peluang baru bagi gerakan perempuan melalui perkembangan teknologi informasi.

Media sosial memungkinkan perempuan membangun jaringan internasional, menyuarakan

aspirasi, serta memperluas kampanye mengenai kesetaraan gender.

Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan baru, seperti:

- a. kekerasan berbasis digital;
- b. stereotip gender di media sosial;
- c. eksploitasi ekonomi;
- d. ketimpangan akses teknologi;
- e. diskriminasi di dunia kerja digital.

Dalam perspektif sejarah sosial, tantangan tersebut menunjukkan bahwa perubahan sosial selalu melahirkan bentuk ketidaksetaraan baru yang memerlukan adaptasi masyarakat.

7. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Gerakan Feminisme

Sejarah sosial memandang feminisme sebagai bagian dari proses perubahan masyarakat yang berlangsung secara bertahap.

Perubahan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar, tetapi juga oleh pengalaman kehidupan sehari-hari masyarakat, organisasi perempuan, komunitas lokal, lembaga pendidikan, hingga kebijakan negara.

Pendekatan sejarah sosial memperlihatkan bahwa keberhasilan gerakan feminisme bukan hanya diukur dari perubahan hukum, tetapi juga dari perubahan budaya, meningkatnya akses pendidikan, bertambahnya partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, serta berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip keadilan sosial.

Dengan demikian, feminisme menjadi salah satu contoh bagaimana gerakan sosial mampu mengubah struktur masyarakat melalui proses sejarah yang panjang.

C. Analisis Peran Gender dalam Sejarah Indonesia

Perkembangan peran gender di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa yang panjang. Hubungan antara laki-laki dan perempuan mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, agama, dan pendidikan. Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut tidak hanya dipahami sebagai perubahan posisi perempuan dalam masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi struktur sosial yang memengaruhi kehidupan seluruh anggota masyarakat.

Pendekatan sejarah sosial memungkinkan kita memahami bahwa pengalaman perempuan dan laki-laki dalam sejarah Indonesia sangat beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor wilayah, etnis, agama, kelas sosial, pekerjaan, hingga kebijakan negara. Oleh karena itu, analisis gender dalam sejarah Indonesia harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat pada setiap periode sejarah.

1. Peran Gender pada Masa Pra-Kolonial

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem sosial yang beragam. Berbagai kerajaan dan komunitas adat menunjukkan pola hubungan gender yang berbeda-beda sesuai dengan budaya masing-masing.

Di beberapa wilayah, seperti Minangkabau, berkembang sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan melalui pihak ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi penting dalam kepemilikan harta pusaka, pengelolaan rumah gadang, dan pelestarian garis keturunan.

Sebaliknya, pada masyarakat Jawa, Bugis, Sunda, Bali, maupun kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, hubungan gender lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kerajaan, adat, serta ajaran keagamaan. Meskipun laki-laki umumnya menduduki jabatan politik formal, perempuan tetap memiliki kontribusi yang besar dalam bidang ekonomi, perdagangan, pertanian, dan kehidupan keluarga.

Dalam perspektif sejarah sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran gender di Nusantara sebelum kolonialisme bersifat dinamis dan tidak sepenuhnya didasarkan pada subordinasi perempuan. Banyak perempuan memiliki ruang ekonomi dan sosial yang cukup luas dalam kehidupan masyarakat.

2. Perubahan Peran Gender pada Masa Kolonial

Kedatangan pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan mendasar terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Sistem pendidikan Barat, birokrasi kolonial, ekonomi perkebunan, dan industrialisasi mengubah pola hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Pada masa ini, akses pendidikan formal bagi perempuan masih sangat terbatas. Sebagian besar sekolah diperuntukkan bagi laki-laki atau kalangan elite pribumi.

Akibatnya, kesempatan perempuan untuk memperoleh pendidikan dan memasuki dunia kerja modern menjadi lebih sempit.

Namun demikian, akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadi titik awal munculnya kesadaran baru mengenai pentingnya pendidikan perempuan. Tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis memelopori gerakan pendidikan perempuan di berbagai daerah.

Dalam perspektif sejarah sosial, perjuangan mereka bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup perempuan, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih maju melalui pendidikan keluarga. Perubahan tersebut menjadi fondasi penting bagi lahirnya organisasi-organisasi perempuan pada awal abad ke-20.

3. Perempuan dalam Pergerakan Nasional

Perkembangan organisasi modern pada awal abad ke-20 membuka kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Organisasi perempuan mulai bermunculan sebagai wadah perjuangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kebangsaan.

Penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I pada tahun 1928 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perempuan Indonesia. Kongres tersebut mempertemukan berbagai organisasi perempuan dari berbagai daerah untuk membahas pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan, dan peran perempuan dalam perjuangan bangsa.

Dalam perspektif sejarah sosial, keterlibatan perempuan dalam organisasi menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak hanya dipelopori oleh elite politik laki-laki, tetapi juga oleh perempuan yang aktif membangun kesadaran masyarakat melalui pendidikan dan organisasi sosial.

Perempuan pada masa pergerakan nasional berperan sebagai guru, penulis, jurnalis, aktivis, serta penggerak organisasi kemasyarakatan. Kontribusi tersebut memperlihatkan bahwa perjuangan menuju kemerdekaan merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen masyarakat.

4. Peran Gender pada Masa Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, perempuan Indonesia memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Konstitusi Indonesia menjamin persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum tanpa membedakan jenis kelamin.

Pada masa revolusi fisik (1945–1949), perempuan tidak hanya berperan sebagai tenaga kesehatan, penyedia logistik, dan pendidik, tetapi juga terlibat langsung dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai organisasi perjuangan.

Memasuki masa pembangunan nasional, perempuan semakin banyak memasuki dunia pendidikan, birokrasi, kesehatan, ekonomi, dan profesi lainnya. Meskipun demikian, sejarah sosial menunjukkan bahwa pembagian peran domestik masih cukup kuat sehingga banyak

perempuan menghadapi beban ganda (*double burden*), yaitu menjalankan peran sebagai pekerja sekaligus pengelola rumah tangga.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa perubahan hukum tidak selalu diikuti oleh perubahan budaya secara cepat.

5. Peran Gender pada Era Reformasi dan Globalisasi

Era Reformasi sejak tahun 1998 membawa perubahan besar dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Meningkatnya kebebasan berpendapat memungkinkan berbagai organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, berkembang lebih aktif dalam memperjuangkan kesetaraan gender.

Perempuan kini memiliki kesempatan yang lebih luas untuk menjadi akademisi, peneliti, hakim, diplomat, kepala daerah, anggota legislatif, menteri, maupun pemimpin organisasi masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi juga memperluas ruang partisipasi perempuan melalui media digital, kewirausahaan berbasis teknologi, ekonomi kreatif, hingga aktivitas advokasi di media sosial.

Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi telah mengubah identitas perempuan Indonesia dari yang semula lebih banyak dibatasi oleh ruang domestik menjadi aktor sosial yang aktif dalam berbagai sektor kehidupan.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, seperti kekerasan berbasis gender di ruang digital, kesenjangan akses teknologi,

diskriminasi di tempat kerja, dan stereotip sosial yang masih berkembang dalam sebagian masyarakat.

6. Analisis Sejarah Sosial terhadap Perubahan Peran Gender

Pendekatan sejarah sosial menempatkan perubahan gender sebagai bagian dari perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

- a. Pendidikan, yang meningkatkan akses perempuan terhadap ilmu pengetahuan dan profesi.
- b. Perubahan ekonomi, yang membuka kesempatan kerja di sektor industri, jasa, dan ekonomi digital.
- c. Kebijakan pemerintah, yang memberikan perlindungan hukum dan kesempatan politik yang lebih luas.
- d. Globalisasi, yang mempercepat pertukaran gagasan mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender.
- e. Perubahan budaya, yang mendorong pembagian peran yang lebih fleksibel antara laki-laki dan perempuan.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut berlangsung secara bertahap melalui proses negosiasi antara tradisi dan modernitas. Oleh karena itu, relasi gender di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai hasil adopsi pemikiran Barat semata, melainkan sebagai hasil perkembangan sejarah bangsa yang dipengaruhi oleh budaya lokal, agama, pendidikan, kolonialisme, nasionalisme, dan pembangunan nasional.

7. Refleksi Sejarah Sosial terhadap Masa Depan Relasi Gender

Sejarah sosial memberikan pelajaran bahwa perubahan masyarakat selalu melibatkan kontribusi seluruh kelompok sosial, baik laki-laki maupun perempuan. Kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat membangun hubungan sosial yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong, musyawarah, dan persatuan menjadi landasan penting dalam membangun relasi gender yang harmonis. Kesenjangan gender tidak dimaknai sebagai penghapusan perbedaan biologis ataupun pertentangan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai upaya memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan potensi dan kompetensinya.

Bagi mahasiswa sejarah, memahami perkembangan peran gender berarti memahami bagaimana perubahan sosial terbentuk melalui interaksi berbagai kelompok masyarakat dalam rentang waktu yang panjang. Analisis ini membantu melihat sejarah Indonesia secara lebih utuh, karena tidak hanya menyoroti tokoh-tokoh politik, tetapi juga memperhatikan pengalaman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Gender merupakan bagian penting dalam sejarah sosial karena menunjukkan bagaimana peran, hubungan, dan kedudukan laki-laki serta perempuan berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Perubahan ekonomi, pendidikan, budaya, politik, dan teknologi turut membentuk relasi gender dari masyarakat tradisional, masa kolonial, pergerakan nasional, hingga kehidupan masyarakat modern.

Gerakan feminisme menjadi salah satu bagian dari perubahan tersebut dengan mendorong kesempatan yang lebih luas dalam pendidikan, pekerjaan, politik, dan kehidupan publik. Dalam sejarah Indonesia, perubahan peran gender juga berkembang melalui perjuangan perempuan, organisasi sosial, pendidikan, serta perubahan kebijakan dan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kajian gender membantu memahami sejarah secara lebih utuh dengan melihat pengalaman dan kontribusi berbagai kelompok dalam proses perubahan sosial.

Studi Reflektif

1. Mengapa gender penting digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat dalam kajian sejarah sosial?
2. Bagaimana perubahan ekonomi dan pendidikan memengaruhi peran gender dalam masyarakat?
3. Bagaimana gerakan feminisme mendorong terjadinya perubahan sosial?
4. Bagaimana peran perempuan Indonesia mengalami perubahan dari masa kolonial hingga era Reformasi?

5. Mengapa pengalaman perempuan perlu diperhatikan dalam memahami sejarah Indonesia secara lebih menyeluruh?

BAB X:

ETNISITAS DAN IDENTITAS SOSIAL

A. Konsep Etnisitas dan Identitas Sosial

Etnisitas merupakan salah satu unsur penting dalam kajian sejarah sosial karena berkaitan dengan bagaimana suatu kelompok masyarakat membangun identitas kolektif berdasarkan kesamaan asal-usul, budaya, bahasa, adat istiadat, sejarah, maupun pengalaman hidup bersama. Dalam perspektif sejarah sosial, etnisitas tidak dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau diwariskan secara biologis, melainkan sebagai konstruksi sosial yang berkembang melalui proses sejarah yang panjang.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keberagaman etnis yang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman tersebut merupakan hasil dari proses migrasi, perdagangan, penyebaran agama, kolonialisme, serta interaksi antarkelompok masyarakat yang berlangsung selama berabad-abad.

Dalam kajian sejarah sosial, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor yang membentuk struktur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, memahami konsep etnisitas dan identitas sosial sangat penting untuk menjelaskan bagaimana masyarakat Indonesia berkembang sebagai bangsa yang majemuk sekaligus mampu membangun identitas nasional.

1. Pengertian Etnisitas

Istilah etnisitas (ethnicity) berasal dari kata Yunani *ethnos* yang berarti bangsa atau kelompok masyarakat yang memiliki kesamaan budaya. Dalam ilmu sosial, etnisitas mengacu pada identitas suatu kelompok yang dibangun berdasarkan kesamaan bahasa, adat istiadat, tradisi, sejarah, agama, wilayah asal, maupun pengalaman kolektif.

Menurut Fredrik Barth (1969), etnisitas tidak terutama ditentukan oleh kesamaan budaya, melainkan oleh **batas-batas sosial (ethnic boundaries)** yang dibangun melalui interaksi dengan kelompok lain. Dengan kata lain, suatu kelompok etnis mempertahankan identitasnya karena anggotanya menyadari adanya perbedaan dengan kelompok lain.

Pandangan Barth membawa perubahan besar dalam kajian etnisitas. Sebelumnya, etnis dipahami sebagai kelompok yang memiliki budaya yang tetap. Namun, Barth menunjukkan bahwa identitas etnis bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam perspektif sejarah sosial, etnisitas merupakan hasil proses historis yang berlangsung melalui migrasi, perkawinan antaretnis, perdagangan, kolonialisme, serta pembentukan negara modern.

2. Pengertian Identitas Sosial

Identitas sosial adalah pemahaman individu mengenai dirinya sebagai bagian dari suatu kelompok sosial tertentu. Kelompok tersebut dapat dibentuk

berdasarkan etnis, agama, profesi, bahasa, kebangsaan, kelas sosial, maupun komunitas budaya.

Henri Tajfel dan John Turner (1979) melalui Social Identity Theory menjelaskan bahwa seseorang membangun identitas sosial melalui proses:

- a. Kategorisasi sosial (social categorization), yaitu mengelompokkan individu ke dalam kelompok tertentu.
- b. Identifikasi sosial (social identification), yaitu individu menerima dirinya sebagai anggota kelompok tersebut.
- c. Perbandingan sosial (social comparison), yaitu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain.

Dalam kehidupan masyarakat, identitas sosial berfungsi sebagai dasar terbentuknya solidaritas, rasa memiliki (*sense of belonging*), serta kerja sama antarsesama anggota kelompok.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas sosial selalu mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat, perubahan politik, modernisasi, serta globalisasi.

3. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Etnisitas

Kajian sejarah tradisional cenderung memusatkan perhatian pada kerajaan, peperangan, pergantian penguasa, dan tokoh-tokoh besar. Sebaliknya, sejarah sosial menempatkan masyarakat sebagai fokus utama kajian.

Dalam perspektif sejarah sosial, etnisitas dipahami sebagai hasil interaksi antarkelompok masyarakat yang berlangsung dalam waktu yang panjang. Identitas etnis tidak lahir secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui pengalaman sejarah bersama.

Sebagai contoh, identitas etnis Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Minangkabau, Dayak, Bali, dan Papua terbentuk melalui perkembangan kerajaan, sistem kekerabatan, bahasa, mata pencaharian, kepercayaan, serta hubungan dengan kelompok lain selama berabad-abad.

Pendekatan sejarah sosial juga menunjukkan bahwa identitas etnis tidak bersifat tertutup. Interaksi melalui perdagangan, migrasi, perkawinan antaretnis, pendidikan, dan urbanisasi menyebabkan terjadinya pertukaran budaya yang memperkaya identitas masyarakat Indonesia.

4. Teori-teori Etnisitas

Dalam kajian sejarah sosial dan sosiologi, terdapat beberapa pendekatan utama dalam memahami etnisitas.

a. Pendekatan Primordialisme

Pendekatan primordialisme memandang bahwa identitas etnis berasal dari ikatan-ikatan yang telah dimiliki sejak lahir, seperti bahasa, agama, adat istiadat, serta hubungan kekerabatan.

Menurut Clifford Geertz (1963), ikatan primordial memiliki kekuatan emosional yang sangat besar sehingga menjadi dasar loyalitas seseorang terhadap kelompok etnisnya.

Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa masyarakat tetap mempertahankan tradisi dan identitas etnis meskipun mengalami perubahan sosial.

b. Pendekatan Instrumentalisme

Pendekatan instrumentalisme berpendapat bahwa identitas etnis dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan politik, ekonomi, maupun sosial.

Dalam perspektif ini, identitas etnis dapat diperkuat atau dilemahkan sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Pendekatan ini banyak digunakan untuk menjelaskan munculnya mobilisasi etnis dalam berbagai konflik politik maupun pemilihan umum.

c. Pendekatan Konstruktivisme

Pendekatan konstruktivisme memandang bahwa etnisitas dibentuk melalui proses sejarah dan interaksi sosial.

Fredrik Barth (1969) menjelaskan bahwa identitas etnis terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, pendekatan ini dianggap paling relevan karena mampu menjelaskan bahwa identitas etnis selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sejarah.

5. Faktor-faktor Pembentuk Etnisitas

Identitas etnis berkembang melalui berbagai faktor historis yang saling berkaitan.

Beberapa faktor tersebut antara lain:

a. Bahasa

Bahasa merupakan simbol utama identitas suatu kelompok etnis. Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga menjadi media pewarisan nilai, tradisi, dan sejarah.

b. Budaya

Adat istiadat, kesenian, pakaian tradisional, kuliner, sistem kekerabatan, dan upacara adat menjadi unsur penting pembentuk identitas etnis.

c. Sejarah Bersama

Pengalaman sejarah seperti migrasi, peperangan, kolonialisme, maupun perjuangan mempertahankan wilayah membentuk memori kolektif suatu kelompok masyarakat.

d. Wilayah Geografis

Lingkungan alam turut memengaruhi mata pencaharian, pola permukiman, dan kebudayaan sehingga membentuk karakteristik etnis tertentu.

e. Agama dan Kepercayaan

Nilai-nilai keagamaan sering kali menjadi bagian penting dalam identitas suatu kelompok masyarakat, terutama dalam membentuk norma dan tradisi sosial.

6. Etnisitas dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia

Indonesia merupakan contoh nyata masyarakat multietnis. Keberagaman etnis telah berkembang jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejarah mencatat bahwa jalur perdagangan Nusantara mempertemukan berbagai kelompok masyarakat dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa.

Interaksi tersebut menghasilkan proses akulturasi budaya yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif sejarah sosial, keberagaman etnis menjadi modal sosial (*social capital*) yang memperkuat kehidupan masyarakat apabila dikelola melalui prinsip toleransi, kerja sama, dan saling menghormati.

Sebaliknya, apabila keberagaman dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau ekonomi yang sempit, identitas etnis dapat menjadi sumber konflik sosial.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah perkembangan etnisitas menjadi penting untuk membangun kehidupan masyarakat yang harmonis.

7. Etnisitas, Nasionalisme, dan Identitas Indonesia

Pembentukan identitas nasional Indonesia merupakan proses sejarah yang melibatkan berbagai kelompok etnis.

Sebelum abad ke-20, identitas masyarakat lebih banyak didasarkan pada kerajaan, daerah asal, atau kelompok etnis masing-masing.

Namun, perkembangan organisasi modern, pendidikan, pers, dan pergerakan nasional melahirkan kesadaran baru sebagai satu bangsa Indonesia.

Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional. Para pemuda dari berbagai latar belakang etnis menyatakan komitmennya terhadap satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas nasional Indonesia bukanlah identitas yang menghapus keberagaman etnis, melainkan identitas bersama yang dibangun di atas penghormatan terhadap kemajemukan.

Dengan demikian, identitas etnis dan identitas nasional tidak harus dipertentangkan, tetapi dapat berkembang secara berdampingan dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

8. Relevansi Kajian Etnisitas dalam Sejarah Sosial

Kajian etnisitas memiliki peran penting dalam memahami dinamika masyarakat Indonesia masa kini. Melalui pendekatan sejarah sosial, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana identitas etnis terbentuk, berubah, dan berinteraksi dengan identitas nasional.

Pemahaman tersebut membantu menjelaskan berbagai fenomena sosial, seperti migrasi penduduk, urbanisasi, perkawinan antaretnis, konflik sosial, integrasi nasional, hingga perkembangan masyarakat multikultural pada era globalisasi.

Selain itu, kajian etnisitas juga memberikan dasar bagi pengembangan sikap toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan penguatan persatuan bangsa di tengah masyarakat yang semakin kompleks.

B. Konflik Etnis dalam Sejarah

Konflik etnis merupakan salah satu fenomena sosial yang telah mewarnai perjalanan sejarah berbagai bangsa, termasuk Indonesia. Dalam perspektif sejarah sosial, konflik etnis tidak dipandang sebagai akibat dari perbedaan budaya

semata, tetapi sebagai hasil interaksi yang kompleks antara faktor sejarah, ekonomi, politik, sosial, dan identitas kelompok. Perbedaan etnis pada dasarnya merupakan bagian dari keragaman masyarakat. Namun, ketika perbedaan tersebut dikaitkan dengan perebutan sumber daya, kekuasaan, atau kepentingan politik, potensi konflik dapat meningkat.

Sejarah sosial menempatkan konflik etnis sebagai bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai konflik etnis tidak hanya bertujuan mengetahui penyebab terjadinya konflik, tetapi juga memahami bagaimana masyarakat berupaya membangun kembali hubungan sosial, menciptakan rekonsiliasi, dan memperkuat integrasi setelah konflik berakhir.

Menurut Lewis A. Coser (1956), konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial dan dalam kondisi tertentu dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif apabila dikelola secara konstruktif. Dalam konteks sejarah sosial, konflik dipahami sebagai proses yang mampu mengubah struktur masyarakat, hubungan antarkelompok, serta identitas sosial.

1. Pengertian Konflik Etnis

Konflik etnis adalah pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang memiliki identitas etnis berbeda dan dipicu oleh perbedaan kepentingan, distribusi sumber daya, kekuasaan, maupun persepsi mengenai identitas kelompok.

Konflik etnis tidak selalu berupa kekerasan fisik. Konflik dapat muncul dalam bentuk diskriminasi,

segregasi sosial, persaingan ekonomi, konflik politik, hingga prasangka sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif sejarah sosial, konflik etnis merupakan proses historis yang berkembang melalui interaksi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penyebab konflik tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor, melainkan harus dianalisis secara multidimensional.

2. Perspektif Teori tentang Konflik Etnis

Beberapa teori dalam ilmu sosial membantu menjelaskan munculnya konflik etnis.

a. Teori Konflik

Menurut Lewis A. Coser, konflik merupakan bagian alami dari kehidupan masyarakat. Konflik muncul akibat adanya perbedaan kepentingan, distribusi kekuasaan, maupun akses terhadap sumber daya.

Dalam perspektif sejarah sosial, teori ini menjelaskan bahwa konflik etnis sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan sosial yang telah berkembang dalam waktu lama.

b. Teori Identitas Sosial

Henri Tajfel dan John Turner (1979) menjelaskan bahwa individu cenderung mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok tertentu (*ingroup*) dan membedakannya dengan kelompok lain (*outgroup*). Identifikasi tersebut dapat memperkuat solidaritas

internal, tetapi juga berpotensi melahirkan prasangka apabila tidak disertai sikap saling menghargai.

Dalam masyarakat multietnis, identitas sosial menjadi penting sebagai sumber solidaritas, tetapi dapat menjadi sumber konflik apabila dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau ekonomi.

c. Teori Instrumentalisme

Pendekatan instrumentalisme berpendapat bahwa identitas etnis sering kali dimobilisasi oleh elite politik atau kelompok tertentu untuk memperoleh dukungan, legitimasi, atau kekuasaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, konflik etnis sering kali tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh proses mobilisasi identitas yang dilakukan dalam situasi sosial dan politik tertentu.

3. Faktor-faktor Penyebab Konflik Etnis

Konflik etnis umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

a. Ketimpangan Ekonomi

Perbedaan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, kepemilikan lahan, maupun sumber daya ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara kelompok masyarakat.

Apabila ketimpangan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, konflik ekonomi dapat berkembang menjadi konflik yang menggunakan identitas etnis sebagai simbol perjuangan kelompok.

b. Persaingan Politik

Kompetisi memperoleh kekuasaan sering kali memanfaatkan identitas etnis sebagai alat mobilisasi massa.

Dalam sejarah berbagai negara, elite politik kerap menggunakan sentimen etnis untuk memperoleh dukungan masyarakat, terutama pada masa pemilihan umum atau pergantian kekuasaan.

c. Migrasi Penduduk

Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dapat memperkaya kehidupan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan, lahan, maupun pelayanan publik.

Apabila tidak dikelola secara baik, kondisi tersebut dapat memunculkan konflik antarkelompok masyarakat.

d. Perbedaan Budaya

Perbedaan bahasa, adat istiadat, agama, maupun nilai-nilai budaya kadang menimbulkan kesalahpahaman apabila masyarakat tidak memiliki sikap saling menghormati.

Namun, dalam perspektif sejarah sosial, perbedaan budaya bukanlah penyebab utama konflik, melainkan menjadi faktor yang memperkuat konflik ketika dikombinasikan dengan persoalan ekonomi dan politik.

4. Konflik Etnis dalam Sejarah Dunia

Sejarah dunia memperlihatkan berbagai konflik etnis yang memberikan dampak besar terhadap perubahan masyarakat.

Konflik di kawasan Balkan pada dekade 1990-an, konflik Rwanda tahun 1994, maupun berbagai konflik etnis di Afrika dan Asia menunjukkan bahwa identitas etnis dapat menjadi faktor penting dalam dinamika sosial apabila dipengaruhi oleh ketimpangan politik dan ekonomi.

Dalam perspektif sejarah sosial, konflik-konflik tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antarkelompok masyarakat dibentuk oleh pengalaman sejarah yang panjang, bukan hanya oleh perbedaan budaya.

Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan pentingnya rekonsiliasi, dialog, serta pembangunan institusi yang adil dalam membangun perdamaian pascakonflik.

5. Konflik Etnis dalam Sejarah Indonesia

Indonesia sebagai negara multietnis memiliki sejarah panjang dalam mengelola keberagaman. Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup secara berdampingan dalam suasana yang harmonis. Namun demikian, beberapa daerah pernah mengalami konflik sosial yang melibatkan identitas etnis.

Sebagai contoh, konflik yang terjadi di Sambas (1999) dan Sampit (2001) menunjukkan bagaimana persoalan ekonomi, migrasi penduduk, ketimpangan

sosial, serta lemahnya komunikasi antarkelompok dapat berkembang menjadi konflik terbuka.

Dalam perspektif sejarah sosial, konflik tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pertentangan antara dua kelompok etnis. Konflik berkembang melalui akumulasi persoalan sosial, perubahan demografi, persaingan ekonomi, serta lemahnya mekanisme penyelesaian konflik pada tingkat lokal.

Oleh karena itu, analisis sejarah sosial lebih menekankan proses historis yang melatarbelakangi konflik daripada sekadar mendeskripsikan peristiwa kekerasannya.

6. Dampak Konflik Etnis terhadap Kehidupan Sosial

Konflik etnis memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.

a. Dampak Sosial

- 1) Menurunnya kepercayaan antarkelompok masyarakat.
- 2) Terjadinya segregasi sosial dan pemisahan permukiman.
- 3) Hilangnya modal sosial berupa gotong royong dan solidaritas.

b. Dampak Ekonomi

- 1) Kerusakan sarana ekonomi dan infrastruktur.
- 2) Menurunnya aktivitas perdagangan.
- 3) Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Dampak Budaya

- 1) Berkurangnya interaksi antarbudaya.

- 2) Meningkatnya stereotip negatif terhadap kelompok lain.
- 3) Hilangnya sebagian tradisi yang sebelumnya menjadi ruang interaksi bersama.

d. Dampak Politik

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- 2) Menguatnya politik identitas.
- 3) Perlunya reformasi kelembagaan dalam penyelesaian konflik.

Dalam perspektif sejarah sosial, dampak tersebut tidak berhenti ketika konflik berakhir, tetapi dapat memengaruhi hubungan sosial antargenerasi apabila tidak diselesaikan melalui proses rekonsiliasi.

7. Rekonsiliasi dan Integrasi Sosial

Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk membangun kembali hubungan sosial setelah konflik.

Rekonsiliasi dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

- a. dialog antarkelompok masyarakat;
- b. penyelesaian konflik berbasis hukum;
- c. penguatan lembaga adat;
- d. pendidikan multikultural;
- e. pembangunan ekonomi yang inklusif;
- f. penguatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam sejarah Indonesia, berbagai mekanisme penyelesaian konflik memanfaatkan nilai musyawarah,

gotong royong, dan kearifan lokal sebagai sarana membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Pendekatan sejarah sosial menunjukkan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, bukan hanya pada kebijakan pemerintah.

8. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Konflik Etnis

Kajian sejarah sosial menempatkan konflik etnis sebagai bagian dari dinamika perubahan masyarakat.

Pendekatan ini menekankan beberapa prinsip penting.

Pertama, konflik merupakan hasil proses sejarah yang panjang, bukan peristiwa yang muncul secara tiba-tiba.

Kedua, identitas etnis bukan penyebab utama konflik, melainkan salah satu unsur yang dapat dimobilisasi ketika terjadi ketimpangan ekonomi, politik, atau sosial.

Ketiga, penyelesaian konflik harus memperhatikan pengalaman historis masyarakat, hubungan sosial yang telah terbentuk, serta nilai-nilai lokal yang mendukung perdamaian.

Keempat, keberagaman etnis merupakan modal sosial yang dapat memperkuat integrasi nasional apabila dikelola melalui keadilan sosial, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan pembangunan yang merata.

Dengan demikian, sejarah sosial tidak memandang konflik sebagai akhir dari kehidupan bersama, melainkan

sebagai proses yang dapat melahirkan pembelajaran sosial menuju masyarakat yang lebih inklusif dan demokratis.

C. Pembentukan Identitas Sosial di Indonesia

Identitas sosial merupakan salah satu unsur fundamental dalam kehidupan masyarakat karena menjadi dasar bagi individu maupun kelompok untuk memahami posisi, peran, dan hubungan mereka dalam lingkungan sosial. Dalam perspektif sejarah sosial, identitas sosial tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat tetap atau diwariskan secara turun-temurun, melainkan sebagai hasil proses historis yang terbentuk melalui interaksi sosial, pengalaman kolektif, perubahan politik, perkembangan ekonomi, serta dinamika budaya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari segi etnis, bahasa, agama, budaya, maupun kondisi geografis. Keberagaman tersebut menjadikan proses pembentukan identitas sosial di Indonesia berlangsung secara kompleks. Identitas masyarakat Indonesia tidak hanya dibentuk oleh faktor lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai peradaban dunia, kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, pembangunan nasional, hingga arus globalisasi.

Dalam kajian sejarah sosial, pembentukan identitas sosial merupakan proses yang terus berkembang (*historically constructed identity*). Oleh karena itu, identitas masyarakat Indonesia harus dipahami sebagai hasil perjalanan sejarah yang panjang, bukan sebagai sesuatu yang terbentuk secara instan.

1. Konsep Identitas Sosial dalam Perspektif Sejarah

Henri Tajfel dan John Turner (1979) menjelaskan bahwa identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang diperoleh melalui keanggotaannya dalam suatu kelompok sosial tertentu. Identitas tersebut memberikan rasa memiliki (*sense of belonging*), solidaritas, serta menjadi dasar dalam membangun hubungan dengan kelompok lain.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas sosial berkembang melalui pengalaman bersama yang dialami masyarakat, seperti:

- a. asal-usul etnis;
- b. bahasa;
- c. agama;
- d. wilayah geografis;
- e. pekerjaan;
- f. pengalaman sejarah;
- g. perjuangan bersama.

Identitas tersebut tidak bersifat tunggal. Seorang individu dapat memiliki berbagai identitas sekaligus, misalnya sebagai orang Sunda, warga Jawa Barat, dosen, muslim, dan warga negara Indonesia. Berbagai identitas tersebut saling berinteraksi dan berkembang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat.

2. Pembentukan Identitas Lokal pada Masa Pra-Kolonial

Sebelum terbentuknya negara Indonesia, masyarakat Nusantara lebih mengenal identitas

berdasarkan kerajaan, wilayah, atau komunitas adat masing-masing.

Pada masa kerajaan Hindu-Buddha maupun Islam, masyarakat membangun identitas melalui beberapa unsur, antara lain:

- a. bahasa daerah;
- b. sistem kekerabatan;
- c. adat istiadat;
- d. kepercayaan;
- e. kerajaan tempat mereka berada;
- f. mata pencaharian.

Sebagai contoh, masyarakat Minangkabau mengembangkan identitas melalui sistem kekerabatan matrilineal, masyarakat Bugis dikenal dengan budaya maritim dan nilai *siri' na pacce*, masyarakat Bali membangun identitas melalui tradisi Hindu Bali, sedangkan masyarakat Jawa mengembangkan identitas yang dipengaruhi oleh tradisi kerajaan, nilai harmoni, dan struktur sosial.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas lokal tersebut bukanlah penghalang interaksi. Jalur perdagangan Nusantara justru mempertemukan berbagai kelompok masyarakat sehingga terjadi proses akulturasi budaya yang memperkaya kehidupan sosial.

3. Kolonialisme dan Transformasi Identitas Sosial

Kedatangan bangsa Eropa membawa perubahan besar terhadap struktur sosial masyarakat Nusantara. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan administrasi yang secara tidak langsung

membentuk kategori-kategori sosial berdasarkan ras, etnis, dan status hukum.

Pada masa kolonial, masyarakat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti:

- a. golongan Eropa;
- b. golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India);
- c. golongan Pribumi.

Pengelompokan tersebut merupakan bagian dari kebijakan kolonial yang dikenal sebagai *divide et impera* (politik pecah belah). Kebijakan ini tidak hanya bertujuan mempermudah administrasi pemerintahan, tetapi juga mengurangi potensi persatuan antarkelompok masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, kebijakan kolonial tersebut memperkuat batas-batas identitas sosial dan memengaruhi pola hubungan antarkelompok. Namun, pada saat yang sama, kolonialisme juga melahirkan kesadaran bersama sebagai masyarakat yang mengalami penindasan, yang kemudian menjadi fondasi bagi tumbuhnya identitas kebangsaan Indonesia.

4. Kebangkitan Nasional dan Lahirnya Identitas Indonesia

Awal abad ke-20 menjadi titik balik dalam pembentukan identitas sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan pendidikan modern, organisasi kemasyarakatan, pers, dan mobilitas penduduk memperluas interaksi antaretnis dan antardaerah.

Berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Perhimpunan Indonesia menunjukkan bahwa

masyarakat mulai membangun solidaritas yang melampaui batas etnis maupun daerah.

Puncak proses tersebut terjadi melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia menjadi tonggak penting dalam pembentukan identitas nasional.

Dalam perspektif sejarah sosial, Sumpah Pemuda merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang panjang antarkelompok masyarakat. Identitas "Indonesia" lahir bukan untuk menghapus identitas etnis, melainkan menjadi identitas kolektif yang menyatukan berbagai keberagaman.

5. Identitas Sosial pada Masa Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, pembentukan identitas sosial Indonesia memasuki tahap baru. Negara berupaya membangun persatuan nasional melalui berbagai kebijakan di bidang pendidikan, bahasa, hukum, dan pemerintahan.

Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi antaretnis sekaligus simbol persatuan bangsa. Di sisi lain, keberagaman budaya daerah tetap diakui sebagai bagian dari identitas nasional.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam membangun kehidupan masyarakat yang menghargai keberagaman tanpa menghilangkan rasa kebangsaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas nasional berkembang melalui pengalaman bersama

mempertahankan kemerdekaan, pembangunan negara, serta berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan.

6. Globalisasi dan Transformasi Identitas Sosial

Memasuki abad ke-21, globalisasi membawa perubahan besar terhadap pembentukan identitas sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, media digital, migrasi internasional, dan pertukaran budaya memperluas ruang interaksi masyarakat dengan dunia global.

Generasi muda kini memiliki berbagai identitas yang bersifat multidimensional. Selain sebagai anggota komunitas lokal dan warga negara Indonesia, mereka juga menjadi bagian dari komunitas global melalui media sosial, pendidikan internasional, maupun budaya populer.

Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi tidak menghapus identitas nasional, tetapi mengubah cara masyarakat memaknainya. Identitas menjadi lebih dinamis karena individu dapat berinteraksi dengan berbagai budaya tanpa harus kehilangan akar budayanya sendiri.

Namun demikian, globalisasi juga menghadirkan tantangan berupa menguatnya individualisme, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, polarisasi di ruang digital, dan munculnya politik identitas yang dapat memengaruhi kohesi sosial.

7. Faktor-faktor yang Membentuk Identitas Sosial Indonesia

Pembentukan identitas sosial di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

a. Sejarah Bersama

Pengalaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan, dan pembangunan nasional membentuk memori kolektif sebagai bangsa Indonesia.

b. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia menjadi media komunikasi lintas etnis sekaligus simbol persatuan nasional.

c. Nilai Budaya

Nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan solidaritas menjadi modal sosial yang memperkuat identitas masyarakat Indonesia.

d. Pendidikan

Pendidikan berperan dalam menanamkan nilai kebangsaan, menghargai keberagaman, dan membangun kesadaran sejarah.

e. Pancasila

Pancasila menjadi dasar ideologis yang menyatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial menjadi pedoman dalam membangun identitas nasional.

8. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Identitas Indonesia

Pendekatan sejarah sosial menempatkan identitas sebagai hasil interaksi antara individu, kelompok, dan

struktur sosial dalam perjalanan sejarah. Identitas Indonesia bukanlah produk dari satu kelompok etnis, agama, atau wilayah tertentu, tetapi merupakan hasil negosiasi, kerja sama, dan pengalaman kolektif seluruh masyarakat Nusantara.

Sejarah sosial menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah hambatan dalam pembentukan bangsa, melainkan sumber kekuatan yang memungkinkan lahirnya identitas nasional yang inklusif. Identitas nasional Indonesia dibangun di atas prinsip menghormati perbedaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa yang sama.

Oleh karena itu, pemahaman sejarah sosial menjadi penting agar masyarakat mampu melihat identitas sebagai sesuatu yang terus berkembang, adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada nilai-nilai budaya dan sejarah bangsa.

Kesimpulan

Etnisitas dan identitas sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Bahasa, budaya, adat istiadat, agama, wilayah, serta pengalaman bersama menjadi unsur yang membentuk identitas suatu kelompok. Identitas tersebut tidak bersifat tetap, tetapi dapat berkembang dan berubah melalui migrasi, perdagangan, kolonialisme, interaksi antarkelompok, modernisasi, dan globalisasi.

Keberagaman etnis dapat menjadi kekuatan dalam membangun solidaritas dan kehidupan masyarakat, tetapi juga dapat memunculkan konflik ketika berkaitan dengan

ketimpangan ekonomi, persaingan politik, migrasi, atau mobilisasi identitas. Karena itu, konflik etnis tidak cukup dipahami sebagai akibat dari perbedaan budaya, melainkan perlu dilihat melalui kondisi sosial dan proses sejarah yang melatarbelakanginya. Rekonsiliasi, keadilan sosial, serta dialog antarkelompok menjadi bagian penting dalam membangun kembali hubungan masyarakat setelah konflik.

Dalam sejarah Indonesia, identitas nasional tumbuh melalui interaksi berbagai kelompok masyarakat, pengalaman kolonial, pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, kemerdekaan, hingga perkembangan masyarakat pada era globalisasi. Identitas nasional tidak menghapus identitas lokal dan etnis, tetapi menjadi identitas bersama yang menyatukan keberagaman tersebut. Pemahaman terhadap etnisitas dan identitas sosial membantu mahasiswa melihat bahwa persatuan Indonesia merupakan hasil proses sejarah yang terus berkembang dan perlu dipelihara melalui toleransi, keadilan, serta penghargaan terhadap keberagaman.

Studi Reflektif

1. Mengapa identitas etnis dan identitas sosial dapat mengalami perubahan sepanjang sejarah?
2. Bagaimana keberagaman etnis dapat menjadi kekuatan sekaligus berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat?
3. Mengapa konflik etnis perlu dipahami melalui faktor sejarah, sosial, ekonomi, dan politik?
4. Bagaimana pengalaman kolonial dan pergerakan nasional memengaruhi terbentuknya identitas Indonesia?

5. Bagaimana masyarakat dapat mempertahankan identitas lokal dan etnis tanpa mengurangi rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia?

BAB XI:

MIGRASI DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Faktor Penyebab Migrasi

Migrasi merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat sepanjang sejarah. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain telah berlangsung sejak manusia mengenal kehidupan menetap dan membangun peradaban. Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi dipahami bukan sekadar perpindahan fisik individu atau kelompok, tetapi sebagai proses historis yang mengubah struktur sosial, ekonomi, budaya, politik, bahkan identitas masyarakat.

Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa migrasi menjadi salah satu faktor utama dalam penyebaran peradaban, perkembangan perdagangan, penyebaran agama, pertukaran budaya, serta pembentukan masyarakat multietnis. Di Indonesia, migrasi telah berlangsung sejak masa prasejarah, berkembang pada masa kerajaan, semakin intensif pada masa kolonial, dan terus mengalami transformasi hingga era globalisasi. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor penyebab migrasi menjadi penting dalam kajian sejarah sosial karena membantu menjelaskan bagaimana masyarakat berkembang melalui mobilitas penduduk.

Menurut Everett S. Lee (1966), migrasi terjadi karena adanya interaksi antara faktor-faktor yang mendorong seseorang meninggalkan daerah asal (*push factors*) dan

faktor-faktor yang menarik seseorang menuju daerah tujuan (*pull factors*). Perspektif ini menunjukkan bahwa keputusan untuk bermigrasi tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi individu, tetapi juga oleh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.

1. Pengertian Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap sementara atau permanen. Perpindahan tersebut dapat berlangsung dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional.

Dalam kajian sejarah sosial, migrasi dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan, politik, budaya, dan perkembangan teknologi. Migrasi bukan hanya menghasilkan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah, tetapi juga menciptakan perubahan hubungan sosial, pola permukiman, struktur ekonomi, hingga identitas budaya masyarakat.

Migrasi memiliki beberapa bentuk, antara lain:

- a. Migrasi internal, yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara, misalnya perpindahan dari desa ke kota atau antardaerah.
- b. Migrasi internasional, yaitu perpindahan penduduk melintasi batas negara.
- c. Migrasi permanen, yaitu perpindahan dengan tujuan menetap.
- d. Migrasi sementara, yaitu perpindahan dalam jangka waktu tertentu, misalnya pekerja musiman.

- e. Migrasi sirkuler, yaitu perpindahan yang dilakukan secara berulang antara daerah asal dan daerah tujuan.

Dalam sejarah Indonesia, bentuk migrasi tersebut berkembang sesuai dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada setiap periode sejarah.

2. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Migrasi

Sejarah sosial memandang migrasi sebagai salah satu penggerak utama perubahan masyarakat. Perpindahan penduduk memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, penyebaran teknologi, perubahan mata pencaharian, serta terbentuknya komunitas baru.

Sebagai contoh, migrasi pedagang Gujarat ke Nusantara pada abad ke-13 tidak hanya membawa aktivitas perdagangan, tetapi juga mempercepat penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Demikian pula migrasi bangsa Eropa pada masa kolonial membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan struktur sosial masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi merupakan proses yang memperlihatkan hubungan erat antara mobilitas manusia dengan perubahan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, migrasi menjadi salah satu tema penting dalam memahami perkembangan sejarah Indonesia.

3. Faktor Ekonomi sebagai Penyebab Migrasi

Faktor ekonomi merupakan penyebab migrasi yang paling dominan sepanjang sejarah.

Perbedaan kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan akses terhadap sumber daya mendorong masyarakat berpindah menuju daerah yang dianggap memiliki prospek kehidupan yang lebih baik.

Dalam sejarah Indonesia, perkembangan pusat-pusat perdagangan seperti Malaka, Banten, Makassar, Batavia, Surabaya, dan Medan menarik ribuan penduduk dari berbagai daerah untuk berdagang maupun bekerja.

Pada masa modern, berkembangnya kawasan industri, pusat jasa, dan ekonomi digital menyebabkan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar menjadi tujuan utama migrasi.

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi ekonomi tidak hanya meningkatkan mobilitas penduduk, tetapi juga mengubah struktur kelas sosial, pola pekerjaan, serta hubungan antara masyarakat desa dan kota.

4. Faktor Politik

Perubahan politik sering menjadi penyebab terjadinya migrasi dalam berbagai periode sejarah.

Perang, konflik bersenjata, perubahan pemerintahan, maupun kebijakan negara dapat memaksa masyarakat meninggalkan daerah asalnya.

Dalam sejarah Indonesia, berbagai konflik pada masa revolusi kemerdekaan, pemberontakan daerah, maupun kerusuhan sosial menyebabkan perpindahan penduduk ke wilayah yang dianggap lebih aman.

Selain migrasi akibat konflik, pemerintah juga pernah melaksanakan program **transmigrasi** sebagai kebijakan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan

wilayah. Program ini memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya.

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi politik memperlihatkan bagaimana kebijakan negara dapat membentuk pola permukiman baru sekaligus mengubah komposisi sosial masyarakat.

5. Faktor Lingkungan

Kondisi lingkungan alam menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi migrasi.

Bencana alam seperti letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, tsunami, gempa bumi, maupun perubahan iklim dapat mendorong masyarakat meninggalkan tempat tinggalnya.

Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan cincin api (*Ring of Fire*) memiliki sejarah panjang migrasi akibat bencana alam.

Sebagai contoh, letusan Gunung Tambora (1815), Krakatau (1883), Merapi, maupun tsunami Aceh (2004) menyebabkan perpindahan penduduk dalam jumlah besar.

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi akibat bencana tidak hanya mengubah persebaran penduduk, tetapi juga memengaruhi struktur ekonomi, hubungan sosial, serta pembentukan komunitas baru di daerah tujuan.

6. Faktor Sosial dan Budaya

Selain faktor ekonomi dan politik, migrasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya.

Keinginan memperoleh pendidikan yang lebih baik, mengikuti anggota keluarga, menikah, maupun

meningkatkan status sosial sering menjadi alasan masyarakat berpindah tempat tinggal.

Mobilitas sosial melalui pendidikan menjadi salah satu bentuk migrasi yang semakin berkembang pada era modern.

Banyak mahasiswa dari berbagai daerah datang ke kota-kota pendidikan seperti Yogyakarta, Bandung, Malang, atau Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan, sebagian memilih menetap di kota tersebut karena tersedia kesempatan kerja yang lebih luas.

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi pendidikan memperlihatkan hubungan erat antara perkembangan ilmu pengetahuan dengan perubahan struktur masyarakat.

7. Faktor Teknologi dan Globalisasi

Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi mempercepat mobilitas manusia.

Pada masa lalu, perjalanan antarpulau memerlukan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kini, perjalanan dapat dilakukan dalam hitungan jam melalui transportasi udara maupun laut modern.

Kemajuan teknologi informasi juga memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai peluang kerja, pendidikan, dan investasi di berbagai daerah bahkan negara lain.

Globalisasi mendorong meningkatnya migrasi tenaga kerja, mahasiswa, peneliti, maupun profesional antarnegara.

Dalam perspektif sejarah sosial, kemajuan teknologi telah mengubah pola migrasi dari yang sebelumnya bersifat lokal menjadi berskala nasional bahkan global.

8. Faktor Demografi

Pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan lahan dan lapangan kerja juga menjadi penyebab migrasi.

Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi cenderung mengalami tekanan terhadap sumber daya alam, perumahan, maupun kesempatan kerja.

Dalam sejarah Indonesia, Pulau Jawa menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah melaksanakan program transmigrasi sejak masa kolonial hingga era setelah kemerdekaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan demografi memengaruhi pola migrasi sekaligus membentuk interaksi baru antara masyarakat pendatang dengan masyarakat lokal.

9. Faktor Sejarah dan Jaringan Sosial

Migrasi sering kali berlangsung karena adanya jaringan sosial yang telah terbentuk sebelumnya.

Keluarga, kerabat, maupun komunitas yang telah menetap di suatu daerah menjadi sumber informasi sekaligus memberikan dukungan kepada calon migran.

Dalam sejarah Indonesia, komunitas perantau seperti Minangkabau, Bugis, Banjar, Madura, dan Batak memperlihatkan kuatnya peran jaringan sosial dalam mendorong migrasi.

Tradisi merantau pada masyarakat Minangkabau, misalnya, bukan sekadar perpindahan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari proses pendidikan sosial dan pembentukan identitas budaya.

Pendekatan sejarah sosial menunjukkan bahwa migrasi bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, tetapi juga oleh nilai budaya dan hubungan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

10. Analisis Sejarah Sosial terhadap Faktor Penyebab Migrasi

Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Faktor ekonomi, politik, lingkungan, sosial, budaya, teknologi, dan demografi tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berhubungan dalam membentuk keputusan seseorang atau kelompok untuk berpindah.

Pendekatan sejarah sosial juga menegaskan bahwa migrasi tidak hanya mengubah kehidupan para migran, tetapi juga mengubah masyarakat di daerah asal maupun daerah tujuan. Migrasi melahirkan proses akulturasi budaya, perubahan mata pencaharian, perkembangan kota, terbentuknya komunitas multietnis, serta berkembangnya identitas sosial baru.

Dengan demikian, migrasi merupakan salah satu kekuatan historis yang membentuk perkembangan masyarakat Indonesia sejak masa lampau hingga era globalisasi.

B. Dampak Migrasi terhadap Struktur Sosial

Migrasi merupakan salah satu kekuatan utama yang membentuk perubahan sosial dalam sejarah peradaban manusia. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain tidak hanya mengubah persebaran populasi, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial, sistem ekonomi, budaya, politik, serta identitas masyarakat. Dalam perspektif sejarah sosial, migrasi dipandang sebagai proses historis yang menghasilkan transformasi struktur sosial melalui interaksi antara masyarakat pendatang dengan masyarakat setempat.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh peradaban besar berkembang melalui mobilitas manusia. Jalur perdagangan, ekspansi kerajaan, kolonialisme, urbanisasi, hingga globalisasi telah mempercepat arus migrasi yang membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di Indonesia, migrasi telah berlangsung sejak masa prasejarah, berkembang pada masa kerajaan maritim, mengalami intensifikasi pada masa kolonial, dan semakin meningkat pada era modern melalui urbanisasi, transmigrasi, serta migrasi internasional.

Perubahan struktur sosial akibat migrasi tidak selalu berlangsung secara seragam. Dalam beberapa kasus, migrasi mendorong integrasi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi budaya. Namun, pada kondisi tertentu, migrasi juga dapat memunculkan persaingan sosial, ketimpangan ekonomi, bahkan konflik antarkelompok apabila tidak dikelola secara baik. Oleh karena itu, sejarah sosial berupaya

memahami migrasi sebagai proses yang menghasilkan perubahan sekaligus tantangan bagi masyarakat.

1. Pengertian Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan pola hubungan yang relatif tetap dalam kehidupan masyarakat yang mengatur kedudukan (*status*), peran (*role*), norma, lembaga sosial, serta hubungan antarkelompok.

Menurut Talcott Parsons, struktur sosial berfungsi menjaga keteraturan masyarakat melalui pembagian fungsi dan peran setiap anggotanya. Dalam kajian sejarah sosial, struktur sosial dipahami sebagai hasil perkembangan historis yang terus berubah sesuai dengan dinamika ekonomi, politik, budaya, dan teknologi.

Migrasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perubahan struktur sosial karena perpindahan penduduk mengubah komposisi masyarakat, distribusi tenaga kerja, hubungan kekuasaan, serta pola interaksi sosial.

2. Perspektif Sejarah Sosial terhadap Dampak Migrasi

Pendekatan sejarah sosial tidak memandang migrasi hanya sebagai perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sebagai proses yang menghasilkan perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Migrasi mempertemukan kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya, bahasa, agama, dan sistem nilai yang berbeda. Interaksi tersebut melahirkan berbagai bentuk adaptasi sosial, seperti akulturasi budaya, pembentukan komunitas baru, perubahan mata

pencarian, hingga berkembangnya identitas sosial yang lebih kompleks.

Dalam sejarah Indonesia, perkembangan kota-kota pelabuhan seperti Aceh, Banten, Makassar, Batavia, dan Surabaya memperlihatkan bagaimana migrasi menciptakan masyarakat multietnis yang menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya.

Dengan demikian, migrasi merupakan salah satu motor perubahan sosial yang memperkaya sekaligus mengubah struktur masyarakat.

3. Dampak Migrasi terhadap Komposisi Penduduk

Salah satu dampak paling nyata dari migrasi adalah perubahan komposisi penduduk pada suatu wilayah.

Daerah tujuan migrasi umumnya mengalami peningkatan jumlah penduduk, sedangkan daerah asal mengalami pengurangan penduduk usia produktif.

Dalam sejarah Indonesia, urbanisasi menuju kota-kota besar telah meningkatkan kepadatan penduduk di wilayah perkotaan. Sebaliknya, beberapa daerah pedesaan mengalami penurunan jumlah tenaga kerja produktif akibat perpindahan penduduk ke kota.

Perubahan komposisi penduduk ini memengaruhi kebutuhan akan perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan demografi menjadi salah satu faktor yang membentuk struktur masyarakat modern.

4. Dampak terhadap Stratifikasi Sosial

Migrasi turut memengaruhi sistem stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, maupun kekuasaan.

Migran yang berhasil memperoleh pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan dapat mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas. Sebaliknya, sebagian migran menghadapi keterbatasan akses terhadap pekerjaan layak sehingga berada pada kelompok ekonomi rentan.

Pada masa kolonial, perpindahan tenaga kerja ke pusat-pusat perkebunan dan pertambangan melahirkan kelas buruh yang memiliki posisi sosial berbeda dengan pemilik modal maupun birokrat kolonial.

Pada era modern, urbanisasi juga mendorong munculnya kelas menengah perkotaan, pekerja sektor informal, serta kelompok profesional yang semakin beragam.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan stratifikasi sosial menunjukkan bahwa migrasi tidak hanya memindahkan penduduk, tetapi juga mengubah posisi sosial mereka dalam masyarakat.

5. Dampak terhadap Hubungan Antarkelompok

Migrasi mempertemukan masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, agama, bahasa, maupun budaya yang berbeda.

Interaksi tersebut dapat menghasilkan berbagai bentuk hubungan sosial.

Pertama, asimilasi, yaitu proses ketika kelompok pendatang secara bertahap mengadopsi budaya masyarakat setempat.

Kedua, akulturasi, yaitu percampuran budaya tanpa menghilangkan identitas budaya masing-masing.

Ketiga, integrasi sosial, yaitu terciptanya kehidupan bersama yang harmonis melalui kerja sama dan saling menghormati.

Namun demikian, apabila terdapat ketimpangan ekonomi, diskriminasi, atau persaingan memperoleh sumber daya, migrasi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam perspektif sejarah sosial, kualitas hubungan antarkelompok lebih banyak ditentukan oleh kondisi sosial dan ekonomi daripada oleh perbedaan budaya itu sendiri.

6. Dampak terhadap Kehidupan Ekonomi

Migrasi memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi masyarakat.

Penduduk yang berpindah umumnya membawa keterampilan, pengetahuan, pengalaman kerja, serta jaringan sosial yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di daerah tujuan.

Dalam sejarah Indonesia, perkembangan kota-kota pelabuhan tidak terlepas dari kedatangan para pedagang, pengrajin, maupun pekerja dari berbagai daerah.

Migrasi juga memperluas pasar tenaga kerja dan mempercepat pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah penduduk di daerah tujuan dapat menimbulkan persaingan memperoleh pekerjaan sehingga memunculkan pengangguran apabila pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja secara optimal.

7. Dampak terhadap Perubahan Budaya

Migrasi menjadi sarana penting dalam penyebaran budaya.

Perpindahan penduduk menyebabkan terjadinya pertukaran bahasa, makanan, pakaian, seni, teknologi, serta tradisi sosial.

Sebagai contoh, berbagai kuliner Nusantara yang kini dikenal secara nasional berkembang melalui proses migrasi masyarakat antardaerah. Demikian pula berbagai kesenian, bahasa, dan tradisi mengalami penyebaran melalui mobilitas penduduk.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan budaya akibat migrasi merupakan proses yang bersifat dinamis dan berlangsung secara terus-menerus.

Budaya masyarakat Indonesia saat ini merupakan hasil interaksi panjang antara berbagai kelompok etnis yang bermigrasi selama berabad-abad.

8. Dampak terhadap Identitas Sosial

Migrasi juga memengaruhi pembentukan identitas sosial masyarakat.

Migran tidak hanya membawa identitas asalnya, tetapi juga membangun identitas baru melalui interaksi dengan masyarakat di daerah tujuan.

Banyak komunitas perantau di Indonesia tetap mempertahankan bahasa, adat, dan tradisi daerah asal, sekaligus beradaptasi dengan budaya setempat.

Kondisi tersebut melahirkan identitas ganda, yaitu sebagai anggota kelompok etnis tertentu sekaligus sebagai warga masyarakat di daerah tujuan.

Dalam perspektif sejarah sosial, identitas sosial merupakan hasil proses adaptasi yang terus berkembang sesuai dengan pengalaman hidup masyarakat.

9. Dampak terhadap Urbanisasi dan Modernisasi

Migrasi menjadi salah satu pendorong utama urbanisasi.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota mempercepat pertumbuhan kawasan perkotaan sekaligus mendorong modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Kota berkembang menjadi pusat industri, perdagangan, pendidikan, teknologi, dan pemerintahan.

Namun demikian, urbanisasi yang berlangsung terlalu cepat juga menimbulkan berbagai persoalan sosial, seperti permukiman kumuh, kemacetan, pengangguran, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan tekanan terhadap lingkungan.

Dalam perspektif sejarah sosial, perkembangan kota menunjukkan bahwa migrasi selalu membawa peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat.

10. Analisis Sejarah Sosial terhadap Dampak Migrasi

Pendekatan sejarah sosial menempatkan migrasi sebagai salah satu faktor utama perubahan masyarakat.

Perubahan struktur sosial akibat migrasi tidak hanya terlihat pada aspek demografi, tetapi juga pada hubungan antarkelompok, sistem ekonomi, pola budaya, stratifikasi sosial, serta pembentukan identitas masyarakat.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mobilitas penduduk telah membentuk masyarakat yang semakin beragam dan dinamis. Kota-kota besar berkembang menjadi ruang pertemuan berbagai etnis, budaya, dan profesi yang menghasilkan inovasi sekaligus membutuhkan mekanisme integrasi sosial yang kuat.

Oleh karena itu, sejarah sosial tidak memandang migrasi hanya sebagai perpindahan geografis, melainkan sebagai proses transformasi masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan.

C. Studi Kasus: Urbanisasi di Indonesia

Urbanisasi merupakan salah satu bentuk migrasi internal yang paling dominan dalam sejarah Indonesia modern. Perpindahan penduduk dari wilayah pedesaan menuju kawasan perkotaan telah berlangsung sejak masa kolonial dan terus berkembang hingga saat ini. Dalam perspektif sejarah sosial, urbanisasi tidak hanya dipahami sebagai perpindahan penduduk secara geografis, tetapi juga sebagai proses transformasi masyarakat yang mengubah struktur sosial, ekonomi, budaya, dan identitas masyarakat Indonesia.

Perkembangan kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, Makassar, dan Yogyakarta menunjukkan bahwa urbanisasi menjadi bagian

penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kota-kota tersebut berkembang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri, dan jasa yang menarik penduduk dari berbagai daerah.

Sejarah sosial memandang urbanisasi sebagai proses yang melibatkan interaksi antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. Interaksi tersebut menghasilkan perubahan dalam pola kehidupan masyarakat, hubungan sosial, struktur pekerjaan, serta pembentukan komunitas yang semakin multikultural.

1. Pengertian Urbanisasi

Urbanisasi adalah proses meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan akibat perpindahan penduduk dari desa ke kota maupun karena pertumbuhan alami penduduk perkotaan.

Dalam kajian sejarah sosial, urbanisasi dipahami sebagai perubahan historis yang berkaitan dengan industrialisasi, modernisasi, perkembangan transportasi, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Kingsley Davis (1965), urbanisasi merupakan salah satu indikator utama perubahan masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Perubahan tersebut tidak hanya meningkatkan jumlah penduduk kota, tetapi juga mengubah cara hidup masyarakat secara keseluruhan.

Di Indonesia, urbanisasi berkembang seiring perubahan sistem ekonomi, mulai dari ekonomi kolonial berbasis perkebunan hingga ekonomi modern berbasis industri, perdagangan, dan jasa.

2. Sejarah Urbanisasi di Indonesia

a. Masa Kolonial

Urbanisasi di Indonesia mulai berkembang secara signifikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda.

Pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, perkebunan, kawasan industri, serta pusat administrasi kolonial menyebabkan kota-kota seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Medan, dan Makassar berkembang pesat.

Kota menjadi pusat kegiatan ekonomi sehingga menarik tenaga kerja dari berbagai daerah.

Dalam perspektif sejarah sosial, urbanisasi pada masa kolonial juga menciptakan struktur sosial baru yang terdiri atas birokrat kolonial, pedagang, buruh pelabuhan, pekerja perkebunan, dan masyarakat pribumi yang bekerja di sektor informal.

Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kota menjadi ruang interaksi berbagai kelompok etnis, seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Batak, Tionghoa, Arab, India, maupun masyarakat Eropa.

b. Masa Awal Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, pembangunan nasional semakin memperkuat fungsi kota sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi.

Perbaikan sistem pendidikan, berkembangnya lembaga pemerintahan, serta munculnya industri nasional meningkatkan arus perpindahan penduduk menuju kota.

Jakarta sebagai ibu kota negara mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Dalam perspektif sejarah sosial, urbanisasi pada masa ini menjadi bagian dari upaya masyarakat memperoleh kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan dan kesempatan kerja.

c. Era Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pembangunan ekonomi dan industrialisasi mempercepat proses urbanisasi.

Pertumbuhan kawasan industri di Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Surabaya, Batam, dan berbagai kota lainnya menarik jutaan tenaga kerja dari pedesaan.

Selain pembangunan industri, meningkatnya akses pendidikan tinggi dan sektor jasa memperbesar arus migrasi menuju perkotaan.

Urbanisasi menjadi salah satu ciri utama transformasi masyarakat Indonesia menuju masyarakat industri.

d. Era Reformasi dan Globalisasi

Pada era Reformasi, urbanisasi semakin dipercepat oleh perkembangan teknologi informasi, investasi, ekonomi kreatif, dan digitalisasi.

Kota tidak lagi hanya menjadi pusat industri, tetapi juga pusat inovasi, pendidikan tinggi, perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan ekonomi digital.

Munculnya kota-kota metropolitan serta kawasan megapolitan seperti Jabodetabek

menunjukkan semakin kompleksnya kehidupan perkotaan Indonesia.

Dalam perspektif sejarah sosial, globalisasi memperluas ruang mobilitas penduduk sehingga urbanisasi kini berlangsung dalam skala nasional maupun internasional.

3. Faktor Penyebab Urbanisasi di Indonesia

Urbanisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

a. Faktor Ekonomi

Kesempatan kerja di sektor industri, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif menjadi daya tarik utama perpindahan penduduk menuju kota.

Perbedaan tingkat pendapatan antara desa dan kota mendorong masyarakat mencari kehidupan yang lebih sejahtera.

b. Faktor Pendidikan

Kota memiliki akses pendidikan yang lebih lengkap, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi.

Banyak mahasiswa yang datang ke kota untuk menempuh pendidikan dan kemudian memilih menetap karena tersedia peluang kerja.

c. Faktor Infrastruktur

Transportasi, komunikasi, pelayanan kesehatan, dan fasilitas publik yang lebih baik menjadikan kota sebagai pusat aktivitas masyarakat.

d. Faktor Modernisasi

Perkembangan teknologi, gaya hidup, media massa, dan budaya populer turut mendorong

masyarakat untuk berpindah ke kota.

Dalam perspektif sejarah sosial, urbanisasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang berkembang secara bertahap sepanjang sejarah Indonesia.

4. Dampak Urbanisasi terhadap Kehidupan Sosial

Urbanisasi memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat Indonesia.

a. Perubahan Struktur Pekerjaan

Perpindahan penduduk dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa menyebabkan perubahan struktur ekonomi masyarakat.

Banyak masyarakat desa beralih profesi menjadi buruh pabrik, pegawai, pedagang, pengemudi transportasi daring, maupun pekerja sektor informal.

b. Perubahan Struktur Keluarga

Kehidupan perkotaan mendorong berkembangnya keluarga inti (*nuclear family*) dibandingkan keluarga besar (*extended family*).

Mobilitas kerja yang tinggi juga mengubah pola hubungan antaranggota keluarga.

c. Meningkatnya Keberagaman Sosial

Urbanisasi mempertemukan masyarakat dari berbagai daerah, etnis, agama, dan budaya.

Kota berkembang menjadi ruang multikultural yang memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, bahasa, makanan, maupun tradisi.

d. Perubahan Gaya Hidup

Perkembangan teknologi, konsumsi media digital, serta budaya modern memengaruhi pola kehidupan masyarakat perkotaan.

Hubungan sosial menjadi lebih terbuka, namun dalam beberapa kasus juga lebih individualistik dibandingkan masyarakat pedesaan.

e. Permasalahan Sosial Akibat Urbanisasi

Selain memberikan manfaat, urbanisasi juga menghadirkan berbagai tantangan.

1) Permukiman Kumuh

Pertumbuhan penduduk yang cepat sering kali tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan yang memadai sehingga muncul kawasan permukiman padat dan kumuh.

2) Pengangguran

Tidak semua migran memperoleh pekerjaan sesuai harapan.

Persaingan tenaga kerja menyebabkan sebagian penduduk bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang tidak menentu.

3) Kemacetan dan Kepadatan Penduduk

Pertumbuhan kendaraan dan jumlah penduduk yang tinggi meningkatkan tekanan terhadap sistem transportasi perkotaan.

4) Kesenjangan Sosial

Urbanisasi memperlihatkan perbedaan yang mencolok antara kelompok masyarakat

berpenghasilan tinggi dengan masyarakat miskin perkotaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, kesenjangan tersebut merupakan bagian dari perubahan struktur masyarakat yang harus dipahami dalam konteks pembangunan ekonomi.

5. Urbanisasi dalam Perspektif Sejarah Sosial

Sejarah sosial memandang urbanisasi sebagai proses transformasi masyarakat yang berlangsung secara bertahap.

Urbanisasi mengubah pola hubungan sosial dari masyarakat agraris yang didasarkan pada hubungan kekerabatan menjadi masyarakat perkotaan yang lebih heterogen dan profesional.

Masyarakat kota membangun hubungan berdasarkan pekerjaan, organisasi, pendidikan, dan kepentingan ekonomi.

Selain itu, urbanisasi mempercepat lahirnya kelas menengah, berkembangnya organisasi masyarakat sipil, meningkatnya mobilitas sosial, serta terbentuknya identitas masyarakat urban yang lebih terbuka terhadap perubahan.

Namun demikian, sejarah sosial juga menunjukkan bahwa kehidupan perkotaan memerlukan mekanisme integrasi sosial yang kuat agar keberagaman masyarakat tidak berkembang menjadi konflik sosial.

6. Studi Kasus: Urbanisasi Jakarta sebagai Cermin Perubahan Sosial Indonesia

Jakarta merupakan contoh paling nyata bagaimana urbanisasi membentuk perubahan sosial di Indonesia. Sejak masa kolonial ketika masih bernama Batavia, kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan yang menarik penduduk dari berbagai wilayah Nusantara maupun luar negeri. Setelah kemerdekaan, status Jakarta sebagai ibu kota negara semakin memperkuat fungsinya sebagai pusat administrasi, industri, pendidikan, dan jasa.

Arus urbanisasi yang terus meningkat menjadikan Jakarta sebagai kota multietnis yang dihuni oleh masyarakat Jawa, Sunda, Betawi, Minangkabau, Batak, Bugis, Madura, Bali, Tionghoa, dan berbagai kelompok lainnya. Keberagaman ini memperkaya dinamika sosial sekaligus menuntut adanya kemampuan masyarakat untuk hidup berdampingan dalam lingkungan yang plural.

Dari perspektif sejarah sosial, Jakarta menunjukkan bahwa urbanisasi mampu menciptakan peluang mobilitas sosial melalui pendidikan, pekerjaan, dan kewirausahaan. Namun, di sisi lain, urbanisasi juga menghadirkan tantangan berupa kemacetan, permukiman padat, ketimpangan ekonomi, polusi lingkungan, serta meningkatnya kebutuhan terhadap layanan publik. Pengalaman Jakarta memperlihatkan bahwa pembangunan perkotaan tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebijakan yang

berorientasi pada pemerataan, keberlanjutan, dan penguatan kohesi sosial.

Kesimpulan

Migrasi merupakan bagian penting dalam perubahan sosial karena perpindahan penduduk tidak hanya mengubah persebaran manusia, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi, budaya, hubungan sosial, dan struktur masyarakat. Migrasi dapat didorong oleh berbagai faktor, seperti kesempatan ekonomi, kondisi politik, lingkungan, pendidikan, perkembangan teknologi, demografi, serta jaringan sosial. Faktor-faktor tersebut sering kali saling berkaitan dalam menentukan keputusan masyarakat untuk berpindah.

Perpindahan penduduk juga membawa perubahan bagi daerah asal maupun daerah tujuan. Migrasi dapat membuka peluang mobilitas sosial, memperluas kegiatan ekonomi, mempertemukan berbagai budaya, serta membentuk komunitas dan identitas sosial baru. Di sisi lain, migrasi juga dapat menimbulkan persoalan berupa persaingan pekerjaan, kesenjangan sosial, kepadatan penduduk, dan konflik apabila perubahan tersebut tidak diikuti dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam mengelolanya.

Urbanisasi menjadi salah satu bentuk migrasi yang paling terlihat dalam perkembangan masyarakat Indonesia. Sejak masa kolonial hingga era modern, pertumbuhan kota sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, industri, pendidikan, dan jasa telah menarik penduduk dari berbagai daerah. Perkembangan tersebut mengubah pola pekerjaan,

kehidupan keluarga, hubungan antarkelompok, dan gaya hidup masyarakat sekaligus membentuk kota-kota yang semakin beragam.

Dengan demikian, migrasi dan urbanisasi perlu dipahami sebagai proses historis yang terus membentuk masyarakat Indonesia. Keduanya memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi, pertukaran budaya, dan mobilitas sosial, sekaligus menghadirkan tantangan dalam pemerataan kesejahteraan, integrasi sosial, dan pembangunan perkotaan. Kajian sejarah sosial membantu memahami perubahan tersebut dengan melihat hubungan antara mobilitas penduduk dan perkembangan masyarakat dari masa ke masa.

Studi Reflektif

1. Mengapa migrasi dapat menjadi salah satu pendorong perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat?
2. Bagaimana faktor ekonomi, politik, lingkungan, dan sosial memengaruhi terjadinya migrasi?
3. Bagaimana migrasi dapat mengubah struktur sosial dan hubungan antarkelompok di daerah tujuan?
4. Mengapa urbanisasi berkembang semakin pesat seiring dengan industrialisasi dan modernisasi di Indonesia?
5. Bagaimana migrasi dan urbanisasi dapat memberikan peluang sekaligus menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat?

BAB XII:

AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL

A. Peran Agama dalam Perubahan Sosial

Agama merupakan salah satu unsur budaya paling mendasar yang telah menyertai kehidupan manusia sejak masa prasejarah hingga era modern. Sebagai sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta, agama tidak hanya berfungsi sebagai pedoman spiritual, tetapi juga menjadi kekuatan sosial yang turut membentuk arah perubahan masyarakat sepanjang sejarah. Dalam kajian sejarah sosial, agama dipahami bukan sekadar institusi ritual, melainkan sebagai bagian integral dari struktur sosial yang berinteraksi dengan aspek ekonomi, politik, hukum, dan budaya masyarakat.

Sejarah mencatat bahwa hampir seluruh peradaban besar dunia, mulai dari Mesir Kuno, Mesopotamia, India, Tiongkok, hingga Nusantara, berkembang dengan agama sebagai salah satu pilar utama tatanan sosialnya. Di Indonesia, kedatangan Hindu-Buddha, Islam, dan Kristen membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan, sistem pendidikan, hukum, seni, maupun pola hubungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, memahami peran agama dalam perubahan sosial menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat menjadi pendorong sekaligus penyeimbang dinamika masyarakat.

Secara umum, para sosiolog dan sejarawan memandang hubungan antara agama dan perubahan sosial

bersifat dua arah. Di satu sisi, agama dapat menjadi kekuatan pendorong (dynamic force) yang melahirkan transformasi sosial. Di sisi lain, agama juga dapat berfungsi sebagai kekuatan pemelihara (conservative force) yang mempertahankan tatanan dan nilai yang telah mapan dalam masyarakat.

1. Pengertian Peran Agama dalam Perubahan Sosial

Peran agama dalam perubahan sosial dapat dipahami sebagai kontribusi nilai, ajaran, lembaga, dan tokoh keagamaan dalam memengaruhi proses transformasi struktur, pola pikir, serta perilaku masyarakat dari satu kondisi menuju kondisi yang baru. Peran ini dapat berlangsung secara langsung, misalnya melalui fatwa, gerakan reformasi keagamaan, atau kebijakan lembaga agama, maupun secara tidak langsung melalui internalisasi nilai moral dan etika yang membentuk pandangan hidup masyarakat.

Emile Durkheim menegaskan bahwa agama memiliki fungsi sosial sebagai representasi kolektif yang mengikat individu ke dalam suatu komunitas moral. Dalam perspektif ini, perubahan pada cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan agama akan selalu berdampak pada perubahan relasi sosial di sekitarnya. Dengan demikian, agama dan masyarakat berada dalam hubungan yang saling memengaruhi, bukan hubungan satu arah.

2. Agama sebagai Kekuatan Pendorong Perubahan Sosial

Dalam banyak peristiwa sejarah, agama tampil sebagai kekuatan yang mendorong lahirnya perubahan sosial secara signifikan.

Pertama, nilai etika dan moral keagamaan sering menjadi landasan gerakan reformasi sosial, seperti gerakan penghapusan perbudakan maupun gerakan keadilan sosial yang berakar pada ajaran kasih dan persaudaraan.

Kedua, lembaga pendidikan keagamaan turut berperan sebagai sarana mobilitas sosial. Pesantren, madrasah, dan sekolah misi pada masa kolonial memberikan akses pendidikan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit menjangkau pendidikan formal, sehingga melahirkan generasi terpelajar baru.

Ketiga, gerakan keagamaan menjadi basis penting pergerakan nasional Indonesia. Organisasi seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama tidak hanya berperan dalam bidang keagamaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan menjadi wadah perlawanan terhadap kolonialisme.

Max Weber, melalui karyanya tentang etika Protestan, menunjukkan bagaimana nilai keagamaan dapat mendorong etos kerja baru yang pada akhirnya turut melahirkan semangat kapitalisme modern di Eropa. Contoh ini memperlihatkan bahwa perubahan cara

pandang keagamaan dapat berdampak luas hingga ke struktur ekonomi masyarakat.

3. Agama sebagai Kekuatan Pemelihara Stabilitas Sosial

Selain berperan sebagai pendorong perubahan, agama juga dapat berfungsi menjaga stabilitas dan kesinambungan tatanan sosial. Ritual, norma, dan ajaran keagamaan memberikan legitimasi terhadap struktur sosial yang telah berlaku, sekaligus memperkuat solidaritas antaranggota masyarakat.

Pada masyarakat kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, misalnya, konsep keagamaan tentang kekuasaan raja sebagai titisan dewa memberikan legitimasi kuat terhadap tatanan sosial dan politik yang berlaku. Demikian pula ritual keagamaan dalam masyarakat tradisional berfungsi memperkuat apa yang oleh Durkheim disebut sebagai solidaritas mekanis, yaitu ikatan sosial yang lahir dari kesamaan keyakinan dan nilai.

Namun demikian, fungsi pemelihara ini juga dapat berubah menjadi penghambat perubahan apabila ajaran keagamaan ditafsirkan secara kaku sehingga menolak nilai-nilai baru yang berkembang dalam masyarakat. Dalam kondisi tersebut, ketegangan antara pemeliharaan tradisi dan tuntutan perubahan zaman menjadi dinamika yang khas dalam sejarah sosial keagamaan.

4. Perspektif Teoretis tentang Hubungan Agama dan Perubahan Sosial

Beberapa tokoh memberikan sumbangan penting dalam memahami hubungan agama dan perubahan sosial. Max Weber memandang agama sebagai salah satu variabel yang dapat memengaruhi arah perkembangan ekonomi dan rasionalisasi masyarakat. Emile Durkheim menekankan fungsi integratif agama dalam menjaga kohesi sosial. Clifford Geertz, melalui kajiannya tentang masyarakat Jawa, menempatkan agama sebagai sistem budaya yang memberi makna dan pedoman tindakan bagi pemeluknya, sebagaimana tampak dalam perbedaan varian keagamaan santri, abangan, dan priyayi. Sementara itu, Peter Berger menggambarkan agama sebagai sacred canopy yang melegitimasi tatanan sosial, namun juga berpotensi menjadi sumber perubahan ketika tafsir keagamaan mengalami pergeseran seiring perubahan zaman.

Keempat perspektif tersebut menunjukkan bahwa agama tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai pendorong atau penghambat perubahan sosial. Peran agama bersifat kontekstual, bergantung pada bagaimana nilai-nilai keagamaan ditafsirkan, dipraktikkan, dan diinteraksikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada suatu masa.

5. Analisis Sejarah Sosial terhadap Peran Agama dalam Perubahan Sosial

Dalam perspektif sejarah sosial, peran agama dalam perubahan sosial perlu dipahami secara dialektis, yaitu

sebagai kekuatan yang dapat mendorong sekaligus menahan perubahan tergantung pada konteks historisnya. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa agama pernah menjadi kekuatan integratif yang menyatukan masyarakat lintas wilayah, sekaligus pernah pula menjadi sumber ketegangan ketika berhadapan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu.

Pendekatan sejarah sosial menempatkan agama bukan sebagai variabel yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari jalinan hubungan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, memahami peran agama dalam perubahan sosial memerlukan kajian yang memperhatikan konteks ruang, waktu, serta interaksi agama dengan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang melingkupinya.

B. Konflik dan Harmoni Sosial Berbasis Agama

Agama merupakan bagian dari kehidupan sosial yang berpengaruh terhadap pembentukan identitas, nilai, solidaritas, dan hubungan antarkelompok. Durkheim memandang agama bukan hanya sebagai persoalan keyakinan individual, tetapi sebagai sistem kepercayaan dan praktik yang dapat mempersatukan individu dalam suatu komunitas moral (Durkheim, 1995). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki dimensi sosial yang kuat karena mampu membentuk rasa kebersamaan sekaligus identitas kolektif dalam masyarakat.

Dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama seperti Indonesia, hubungan antarkelompok keagamaan tidak selalu berlangsung dalam satu bentuk. Pada suatu kondisi,

perbedaan agama dapat berjalan berdampingan dengan kerja sama, toleransi, dan solidaritas sosial. Pada kondisi lain, identitas agama dapat terlibat dalam ketegangan dan konflik, terutama ketika berhubungan dengan persoalan politik, ekonomi, etnisitas, ketimpangan sosial, dan perebutan kekuasaan. Pengalaman konflik komunal di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan agama sering berkelindan dengan faktor sosial dan politik yang lebih luas (van Klinken, 2007).

Dari perspektif sejarah sosial, konflik dan harmoni berbasis agama perlu dipahami sebagai bagian dari proses perubahan masyarakat. Perhatian tidak hanya diarahkan pada peristiwa konflik, tetapi juga pada keadaan masyarakat sebelum konflik, perubahan hubungan antarkelompok, pengalaman masyarakat ketika konflik berlangsung, serta usaha membangun kembali kehidupan bersama setelah konflik berakhir.

1. Konsep Konflik dan Harmoni Sosial Berbasis Agama

Konflik dan harmoni merupakan dua bentuk hubungan sosial yang dapat muncul dalam kehidupan masyarakat. Keduanya tidak bersifat tetap karena hubungan antarkelompok dapat berubah mengikuti kondisi ekonomi, politik, budaya, dan struktur sosial pada suatu masa.

a. Pengertian Konflik Sosial Berbasis Agama

Konflik sosial berbasis agama dapat dipahami sebagai pertentangan antara individu atau kelompok yang dalam perkembangannya melibatkan identitas, simbol, lembaga, maupun kepentingan keagamaan. Keterlibatan

agama dalam konflik tidak selalu berarti bahwa ajaran atau perbedaan teologis menjadi penyebab utama. Dalam banyak peristiwa, identitas agama berinteraksi dengan kepentingan dan persoalan sosial lainnya.

Konflik sendiri merupakan bagian dari hubungan sosial. Coser (1956) menjelaskan bahwa konflik tidak selalu berakhir pada kehancuran hubungan sosial. Dalam kondisi tertentu, konflik dapat memperjelas batas kelompok dan memperkuat solidaritas di antara anggota kelompok tersebut. Jika dikaitkan dengan agama, solidaritas internal yang semakin kuat dapat memberikan ikatan sosial bagi anggotanya, tetapi pada saat yang sama dapat mempertegas batas antara kelompok sendiri dengan kelompok lain.

Konflik juga tidak selalu diwujudkan melalui kekerasan. Perbedaan pandangan, kepentingan, dan identitas dapat tetap berada dalam batas kehidupan sosial yang wajar apabila terdapat mekanisme untuk mengelolanya. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika perbedaan berkembang menjadi prasangka, diskriminasi, segregasi, mobilisasi kelompok, atau tindakan kekerasan.

b. Pengertian Harmoni Sosial Berbasis Agama

Harmoni sosial berbasis agama merupakan keadaan ketika masyarakat dengan latar belakang keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan, saling menghormati, dan membangun hubungan sosial tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing. Harmoni tidak berarti bahwa seluruh kelompok harus memiliki pandangan yang sama. Perbedaan tetap ada, tetapi

masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelolanya dalam kehidupan bersama.

Berger (1967) menjelaskan bahwa agama memiliki kemampuan memberikan makna dan legitimasi terhadap kehidupan sosial. Nilai dan pandangan keagamaan dapat membantu individu memahami posisinya dalam masyarakat sekaligus memberikan pedoman dalam bertindak. Dalam kehidupan masyarakat majemuk, nilai tersebut dapat menjadi salah satu dasar untuk mengembangkan penghormatan, kepedulian, dan tanggung jawab terhadap sesama.

Di Indonesia, harmoni juga berkembang melalui pengalaman hidup bersama dalam lingkungan yang beragam. Penelitian Hariyanto (2022) pada masyarakat Cigugur menunjukkan bahwa hubungan komunitas Sunda Wiwitan dengan umat beragama lainnya dibangun melalui toleransi, keterbukaan, kerja sama, dan dialog.

c. Hubungan antara Konflik dan Harmoni

Konflik dan harmoni tidak selalu berada dalam dua kondisi yang sepenuhnya terpisah. Masyarakat yang pernah mengalami konflik dapat kembali membangun hubungan sosial melalui rekonsiliasi, sedangkan masyarakat yang sebelumnya hidup harmonis dapat mengalami ketegangan ketika terjadi perubahan politik, ekonomi, maupun sosial.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa harmoni bukan keadaan yang terbentuk dengan sendirinya. Harmoni merupakan proses yang terus dibangun melalui interaksi, kepercayaan, keadilan, toleransi, dan kemampuan masyarakat menyelesaikan perbedaan.

Demikian pula konflik memiliki proses historis yang perlu ditelusuri untuk memahami bagaimana suatu ketegangan berkembang menjadi pertentangan yang lebih luas.

2. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial Berbasis Agama

Konflik yang melibatkan identitas agama biasanya tidak disebabkan oleh satu faktor. Faktor sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sejarah dapat saling berhubungan hingga menciptakan kondisi yang memungkinkan munculnya konflik.

a. Menkuatnya Identitas Kelompok

Agama merupakan salah satu sumber identitas kolektif yang kuat. Kesamaan keyakinan, ritual, simbol, dan pengalaman keagamaan dapat menumbuhkan rasa memiliki di antara anggota kelompok. Dalam pemikiran Durkheim, praktik dan kepercayaan bersama memiliki fungsi penting dalam memperkuat solidaritas kelompok.

Solidaritas tersebut pada dasarnya memiliki fungsi positif dalam menjaga kehidupan masyarakat. Persoalan dapat muncul ketika identitas kelompok berkembang menjadi batas sosial yang terlalu tegas. Pembagian masyarakat berdasarkan kategori “kelompok sendiri” dan “kelompok lain” dapat memperbesar jarak sosial, terutama ketika hubungan antarkelompok telah dipengaruhi prasangka atau pengalaman konflik sebelumnya.

b. Politisasi Identitas Agama

Agama juga dapat berhubungan dengan kekuasaan politik. Identitas keagamaan dapat

digunakan untuk membangun dukungan, memperkuat legitimasi, maupun memobilisasi kelompok masyarakat. Dalam keadaan seperti itu, persaingan politik yang pada awalnya berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dapat memperoleh dimensi keagamaan.

Van Klinken (2007) menunjukkan bahwa sejumlah kekerasan komunal di Indonesia pada masa transisi demokrasi tidak dapat dilepaskan dari perubahan politik dan persaingan kekuasaan pada tingkat lokal. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya melihat hubungan antara elite politik, institusi lokal, dan mobilisasi identitas ketika menganalisis konflik komunal.

c. Ketimpangan Ekonomi dan Persaingan Sumber Daya

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga dapat memperbesar ketegangan antarkelompok. Persaingan dalam memperoleh pekerjaan, tanah, akses perdagangan, pendidikan, maupun sumber daya lainnya dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Ketika kelompok yang bersaing memiliki identitas agama atau etnis yang berbeda, persoalan ekonomi dapat berkembang menjadi pertentangan identitas.

Kondisi tersebut terlihat dalam kajian mengenai konflik Maluku. Krisandi et al. (2013) menunjukkan bahwa konflik yang melibatkan komunitas Muslim dan Kristen tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi dan politik yang berhubungan dengan sentimen kelompok. Dengan demikian, perbedaan agama

merupakan bagian dari konflik, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menjelaskan terjadinya kekerasan.

d. Perubahan Demografi dan Migrasi

Migrasi penduduk dapat mengubah komposisi sosial suatu wilayah. Kehadiran kelompok pendatang dapat membawa perubahan terhadap pola permukiman, pekerjaan, perdagangan, serta hubungan sosial masyarakat. Perubahan tersebut dapat memperkaya kehidupan masyarakat melalui pertukaran ekonomi dan budaya, tetapi juga dapat melahirkan persaingan apabila berhubungan dengan akses terhadap sumber daya.

Karena itu, perubahan demografi perlu ditempatkan sebagai bagian dari konteks sejarah suatu masyarakat. Analisis konflik yang hanya melihat identitas agama tanpa memperhatikan perubahan komposisi penduduk dan struktur sosial berisiko menyederhanakan persoalan yang sebenarnya lebih kompleks.

e. Prasangka, Stereotip, dan Segregasi Sosial

Prasangka dapat berkembang ketika interaksi antara kelompok masyarakat terbatas. Suatu kelompok kemudian mengenal kelompok lain melalui anggapan atau gambaran yang diwariskan daripada melalui hubungan langsung. Jika keadaan tersebut berlangsung lama, jarak sosial dapat semakin kuat.

Segregasi juga dapat muncul dalam pola permukiman, pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Dalam kasus Maluku, segregasi sosial yang telah memiliki akar sejarah menjadi

semakin kuat ketika konflik berlangsung (Krisandi et al., 2013). Keadaan semacam ini membuat pemulihan hubungan masyarakat membutuhkan waktu karena perdamaian tidak cukup hanya dengan menghentikan kekerasan.

f. Perubahan Politik dan Lemahnya Pengelolaan Konflik

Perubahan politik yang berlangsung cepat dapat memengaruhi keseimbangan hubungan antarkelompok. Ketika institusi negara, aparat keamanan, atau mekanisme penyelesaian konflik tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif, ketegangan lokal dapat berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Masa transisi setelah Reformasi 1998 merupakan salah satu periode penting dalam konteks tersebut. Perubahan struktur kekuasaan membuka ruang demokratisasi, tetapi pada saat yang sama sejumlah wilayah mengalami ketidakstabilan dan konflik komunal. Ristanti (2022) menempatkan kondisi politik pasca-Reformasi sebagai salah satu konteks penting dalam memahami berkembangnya konflik Poso.

3. Konflik Berbasis Agama dalam Sejarah Indonesia

Keragaman agama di Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Hubungan perdagangan, penyebaran agama, kolonialisme, migrasi, pembentukan negara, dan perubahan politik telah mempertemukan berbagai kelompok dengan latar belakang keyakinan yang berbeda. Dalam banyak tempat, perbedaan tersebut

berkembang melalui kehidupan bersama, tetapi pada periode tertentu juga muncul konflik komunal.

a. Konflik Maluku

Konflik Maluku yang berkembang sejak 1999 merupakan salah satu konflik komunal besar pada masa awal Reformasi. Kekerasan melibatkan komunitas Muslim dan Kristen serta menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas, perpindahan penduduk, dan perubahan hubungan sosial masyarakat. Konflik tersebut kemudian berkembang melalui berbagai rangkaian kekerasan yang berlangsung selama beberapa tahun.

Meskipun identitas agama tampak kuat dalam konflik, latar belakangnya jauh lebih kompleks. Persoalan ekonomi, politik, sentimen kelompok, segregasi sosial, dan kepentingan elite lokal ikut memengaruhi perkembangan konflik (Krisandi et al., 2013). Dari perspektif sejarah sosial, keadaan tersebut menunjukkan bahwa konflik perlu dipahami dengan menelusuri perubahan hubungan masyarakat sebelum kekerasan terjadi.

b. Konflik Poso

Konflik Poso di Sulawesi Tengah juga berkembang pada periode transisi setelah Reformasi. Konflik tersebut melibatkan komunitas Muslim dan Kristen dalam beberapa fase kekerasan. Dampaknya tidak hanya berupa korban dan kerusakan fisik, tetapi

juga terganggunya hubungan sosial antara masyarakat yang sebelumnya hidup dalam wilayah yang sama.

Proses penyelesaian konflik melibatkan dialog antara kelompok yang bertikai dengan keterlibatan tokoh agama dan pemerintah. Salah satu tahap pentingnya adalah tercapainya Deklarasi Malino yang menjadi bagian dari proses penghentian konflik dan pemulihan keamanan (Ristanti, 2022).

Pengalaman Poso menunjukkan bahwa konflik yang membawa identitas agama perlu ditempatkan dalam perubahan sosial dan politik yang melingkupinya. Dengan cara tersebut, sejarah sosial tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang berkonflik, tetapi juga menjelaskan mengapa hubungan antarkelompok berubah dan bagaimana masyarakat mengalami perubahan tersebut.

c. Dampak Konflik terhadap Kehidupan Masyarakat

Konflik komunal memberikan dampak yang lebih luas daripada kerusakan fisik. Hubungan sosial yang sebelumnya terbentuk melalui kehidupan bertetangga, perdagangan, pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas masyarakat dapat mengalami perubahan ketika rasa percaya digantikan oleh rasa takut dan kecurigaan.

Konflik juga dapat menghasilkan segregasi permukiman serta membatasi ruang interaksi. Pada bidang ekonomi, aktivitas perdagangan dan pekerjaan terganggu, sementara perpindahan penduduk dapat mengubah struktur ekonomi lokal. Dalam bidang

pendidikan, konflik dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi perjumpaan antara anak-anak dari kelompok yang berbeda.

Dampak lainnya adalah terbentuknya ingatan sosial mengenai konflik. Pengalaman kekerasan dapat terus hidup dalam ingatan individu, keluarga, maupun komunitas. Jika tidak diikuti proses rekonsiliasi yang baik, pengalaman tersebut dapat diwariskan dan memengaruhi hubungan antarkelompok pada generasi berikutnya.

4. Agama sebagai Kekuatan dalam Membangun Harmoni Sosial

Pembahasan mengenai agama dalam sejarah sosial tidak hanya berkaitan dengan konflik. Agama juga memiliki nilai, lembaga, dan jaringan sosial yang dapat mendukung terbentuknya solidaritas dan kehidupan bersama.

a. Nilai Keagamaan sebagai Dasar Perdamaian

Agama mengandung nilai moral yang mengatur hubungan individu dengan sesama. Nilai kemanusiaan, kepedulian, perdamaian, dan tanggung jawab sosial dapat menjadi dasar bagi tindakan yang memperkuat kehidupan bersama.

Dalam perspektif Berger (1967), agama memberikan kerangka makna yang membantu masyarakat memahami kehidupan dan tatanan sosialnya. Kerangka tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan sosial ketika nilai keagamaan diterjemahkan menjadi kepedulian terhadap kelompok lain, bantuan

kemanusiaan, pelayanan sosial, dan berbagai bentuk solidaritas.

b. Toleransi Antarumat Beragama

Toleransi bukan berarti menyamakan seluruh keyakinan, tetapi memberikan ruang kepada setiap kelompok untuk menjalankan keyakinannya sekaligus menghormati hak kelompok lain. Sikap tersebut menjadi penting dalam masyarakat yang memiliki keragaman agama.

Pengalaman Cigugur memberikan contoh bagaimana toleransi dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Hariyanto (2022) menemukan adanya penghormatan terhadap perbedaan, keterbukaan, kerja sama, serta ruang dialog antara komunitas Sunda Wiwitan dan umat beragama lainnya. Praktik tersebut menunjukkan bahwa harmoni lebih dari sekadar tidak adanya konflik karena di dalamnya terdapat hubungan dan kerja sama nyata.

c. Dialog Antaragama

Dialog menjadi salah satu sarana untuk membangun pemahaman antarkelompok. Melalui dialog, masyarakat dapat mengenali pandangan kelompok lain, membicarakan persoalan bersama, dan mencari jalan keluar ketika terjadi perbedaan.

Dialog tidak selalu harus berbentuk forum formal. Musyawarah warga, kegiatan sosial, pendidikan, gotong royong, maupun kerja sama dalam menghadapi persoalan lingkungan dapat menjadi ruang pertemuan lintas agama. Semakin terbuka ruang interaksi, semakin besar kesempatan masyarakat

membangun hubungan berdasarkan pengalaman langsung daripada prasangka.

d. Peran Tokoh dan Lembaga Keagamaan

Tokoh agama memiliki posisi penting karena pandangan dan tindakannya dapat memengaruhi masyarakat. Dalam kondisi konflik, tokoh agama dapat berperan sebagai mediator dan membuka komunikasi antara kelompok yang bertikai.

Pengalaman penyelesaian konflik Poso memperlihatkan pentingnya dialog yang melibatkan tokoh lokal dari kelompok Muslim dan Kristen (Ristanti, 2022). Hal tersebut memperlihatkan bahwa otoritas keagamaan tidak hanya dapat berfungsi dalam kehidupan ritual, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemulihan hubungan sosial.

Lembaga keagamaan memiliki fungsi serupa melalui pendidikan, pelayanan sosial, kegiatan kemanusiaan, dan jaringan masyarakat. Aktivitas semacam ini menciptakan ruang yang memungkinkan nilai agama diterjemahkan menjadi tindakan sosial.

e. Pancasila sebagai Landasan Kehidupan Bersama

Dalam konteks Indonesia, kehidupan masyarakat beragama juga berkaitan dengan Pancasila sebagai dasar kehidupan bersama. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa ditempatkan bersama kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Susunan nilai tersebut menunjukkan bahwa kehidupan beragama tidak dapat dilepaskan dari penghormatan terhadap

kemanusiaan dan kehidupan masyarakat yang majemuk.

Pada masyarakat Cigugur, nilai Pancasila terlihat melalui toleransi dan keterbukaan, kerja sama antarumat beragama, serta dialog dalam membicarakan persoalan sosial maupun keagamaan (Hariyanto, 2022). Dengan demikian, Pancasila dapat dipahami tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai nilai yang dapat diterapkan dalam hubungan sosial masyarakat.

5. Rekonsiliasi Pascakonflik Berbasis Agama

Berakhirnya kekerasan tidak berarti seluruh persoalan sosial yang ditimbulkan konflik telah selesai. Masyarakat yang mengalami konflik membutuhkan proses rekonsiliasi untuk memulihkan kepercayaan, membangun kembali hubungan, dan menciptakan ruang kehidupan bersama.

a. Penghentian Kekerasan dan Pemulihan Keamanan

Keamanan merupakan kondisi awal yang diperlukan dalam proses rekonsiliasi. Masyarakat sulit membangun kembali kehidupan sosial ketika masih menghadapi ancaman kekerasan. Penghentian konflik memberi kesempatan bagi masyarakat untuk kembali menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, keagamaan, dan kehidupan sehari-hari.

Peran negara diperlukan untuk memastikan keamanan dan penegakan hukum. Akan tetapi, rekonsiliasi tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pendekatan keamanan karena hubungan sosial yang

telah rusak juga membutuhkan pemulihan pada tingkat masyarakat.

b. Pemulihan Kepercayaan Antarkelompok

Konflik dapat meninggalkan rasa takut, trauma sosial, dan ketidakpercayaan. Pemulihan hubungan membutuhkan proses yang bertahap karena masyarakat perlu kembali memiliki pengalaman berinteraksi secara damai dengan kelompok yang sebelumnya dipandang sebagai lawan.

Kerja sama ekonomi, pendidikan, kegiatan sosial, pertemuan warga, dan aktivitas kemasyarakatan dapat membuka kembali ruang interaksi. Melalui hubungan tersebut, masyarakat secara perlahan dapat membangun kembali kepercayaan.

c. Peran Pemerintah, Tokoh Agama, dan Masyarakat

Rekonsiliasi membutuhkan keterlibatan berbagai unsur. Pemerintah dapat menyediakan kebijakan, keamanan, dan mekanisme hukum, sedangkan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu membangun komunikasi pada tingkat komunitas.

Dalam kasus Maluku, penyelesaian konflik melibatkan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lembaga adat, dan berbagai gerakan akar rumput (Krisandi et al., 2013). Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perdamaian membutuhkan keterlibatan masyarakat karena merekalah yang menjalani kembali hubungan sosial setelah kekerasan berakhir.

d. Kearifan Lokal dalam Rekonsiliasi

Masyarakat Indonesia memiliki berbagai tradisi sosial yang dapat digunakan sebagai modal rekonsiliasi. Musyawarah, gotong royong, ikatan adat, dan tradisi persaudaraan dapat menjadi ruang untuk mempertemukan kelompok yang sebelumnya mengalami ketegangan.

Kearifan lokal menjadi penting karena penyelesaian formal tidak selalu mampu memulihkan hubungan sehari-hari. Perdamaian menjadi lebih kuat ketika masyarakat sendiri memiliki mekanisme untuk menjaga hubungan dan menyelesaikan persoalan yang muncul.

e. Keadilan Sosial sebagai Dasar Perdamaian

Rekonsiliasi juga membutuhkan keadilan. Konflik dapat muncul kembali apabila persoalan ketimpangan, diskriminasi, perebutan sumber daya, atau ketidakadilan yang pernah menjadi sumber ketegangan tidak diselesaikan.

Karena itu, perdamaian perlu berjalan bersama penegakan hukum, pemerataan kesempatan, perlindungan hak warga, dan pembangunan yang tidak membedakan kelompok berdasarkan agama maupun identitas sosial lainnya. Harmoni yang dibangun di atas kondisi sosial yang adil memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.

6. Analisis Sejarah Sosial terhadap Konflik dan Harmoni Beragama

Pendekatan sejarah sosial memberikan ruang untuk memahami konflik dan harmoni secara lebih luas.

Agama tidak ditempatkan sebagai faktor tunggal yang menentukan hubungan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang berinteraksi dengan ekonomi, politik, budaya, etnisitas, dan kekuasaan.

a. Konflik sebagai Proses Historis

Konflik mempunyai latar belakang, perkembangan, dan dampak. Kondisi masyarakat sebelum konflik perlu dipelajari untuk mengetahui perubahan yang menyebabkan hubungan antarkelompok menjadi tegang. Begitu pula proses selama dan setelah konflik perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan tersebut.

Dengan pendekatan tersebut, konflik tidak dipahami sebagai peristiwa yang muncul secara tiba-tiba. Konflik Maluku dan Poso, misalnya, perlu ditempatkan dalam konteks perubahan politik dan sosial Indonesia pada masa transisi Reformasi, bukan hanya berdasarkan identitas agama pihak yang terlibat (van Klinken, 2007).

b. Agama sebagai Bagian dari Struktur Sosial

Agama memiliki hubungan dengan berbagai unsur kehidupan masyarakat. Geertz (1960), melalui kajiannya tentang masyarakat Jawa, memperlihatkan keterkaitan antara kehidupan keagamaan dengan struktur sosial, kebudayaan, ekonomi, dan orientasi politik. Meskipun kategorisasi yang dikembangkannya kemudian memperoleh berbagai kritik dan pembaruan, kajian tersebut tetap penting dalam perkembangan studi sosial mengenai agama di Indonesia.

Perspektif tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam kehidupan keagamaan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari perubahan masyarakat. Begitu pula konflik yang menggunakan identitas agama perlu dianalisis bersama perubahan sosial yang berlangsung pada waktu yang sama.

c. Masyarakat sebagai Aktor Sejarah

Sejarah sosial tidak hanya menempatkan pemerintah, elite politik, atau pemimpin agama sebagai aktor utama. Masyarakat biasa juga memiliki pengalaman dan peran penting dalam proses konflik maupun perdamaian.

Masyarakat dapat menjadi korban kekerasan, mengalami perpindahan, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi perubahan hubungan dengan tetangganya. Pada saat yang sama, masyarakat juga dapat menjadi pelaku perdamaian melalui kegiatan sosial, kerja sama, dialog, dan berbagai usaha untuk membangun kembali kehidupan bersama.

Cara pandang tersebut membuat kajian konflik lebih dekat dengan pengalaman sosial masyarakat. Sejarah tidak hanya menjelaskan kapan konflik dimulai dan berakhir, tetapi juga bagaimana konflik mengubah kehidupan sehari-hari.

d. Harmoni sebagai Proses Sosial dan Historis

Harmoni tidak dapat dipahami hanya sebagai keadaan tanpa kekerasan. Masyarakat dapat terlihat damai tetapi masih memiliki segregasi, prasangka, dan ketidakpercayaan. Karena itu, harmoni membutuhkan

hubungan sosial yang memungkinkan masyarakat berinteraksi secara terbuka dan setara.

Pengalaman Cigugur memperlihatkan bahwa toleransi, keterbukaan, kerja sama, dan dialog dapat berkembang dalam kehidupan masyarakat dengan latar belakang keagamaan yang berbeda (Hariyanto, 2022). Harmoni dalam konteks tersebut merupakan hasil dari praktik sosial yang terus dijalankan.

Dengan demikian, konflik dan harmoni berbasis agama merupakan bagian dari proses sejarah masyarakat. Agama dapat membentuk solidaritas dan identitas kelompok, tetapi hubungan antarkelompok tetap dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengalaman Maluku, Poso, dan Cigugur menunjukkan bahwa keberagaman agama tidak dengan sendirinya menghasilkan konflik ataupun harmoni. Keduanya terbentuk melalui proses sejarah dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan.

C. Analisis Peran Agama dalam Sejarah Indonesia

Agama memiliki kedudukan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Sejak masa kerajaan hingga Indonesia modern, agama tidak hanya berkembang sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga berhubungan dengan kekuasaan, pendidikan, perdagangan, kebudayaan, organisasi sosial, dan kehidupan politik. Perkembangan Hindu-Buddha, Islam, Kristen, serta keberadaan berbagai kepercayaan lokal membentuk kehidupan sosial yang beragam pada setiap wilayah dan periode.

Dalam perspektif sejarah sosial, perkembangan agama tidak cukup dipahami sebagai pergantian sistem kepercayaan atau munculnya kerajaan bercorak keagamaan. Perhatian juga perlu diberikan pada cara masyarakat menerima, menafsirkan, dan menyesuaikan ajaran agama dengan kondisi sosial dan kebudayaan setempat. Ricklefs (2006) menunjukkan bahwa perkembangan Islam di Jawa, misalnya, merupakan proses historis yang panjang dan melibatkan pertemuan antara tradisi Islam dengan kebudayaan Jawa. Pendekatan semacam ini memperlihatkan bahwa perubahan agama juga merupakan bagian dari perubahan masyarakat.

1. Agama dalam Masyarakat Nusantara Pra-Kolonial

Kehidupan keagamaan masyarakat Nusantara sebelum kolonialisme terbentuk melalui proses yang panjang. Kepercayaan lokal yang berkembang dalam masyarakat kemudian berinteraksi dengan Hindu-Buddha dan Islam. Interaksi tersebut tidak selalu menghilangkan tradisi sebelumnya, tetapi sering menghasilkan penyesuaian dan pembentukan praktik keagamaan yang memiliki karakter lokal.

a. Kepercayaan Lokal dan Kehidupan Masyarakat

Sebelum berkembangnya agama-agama besar, masyarakat Nusantara telah memiliki sistem kepercayaan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, alam, serta kekuatan yang dianggap berada di luar kehidupan manusia. Kepercayaan tersebut berhubungan dengan ritual, kepemimpinan, pertanian, hubungan kekerabatan, serta berbagai tahap kehidupan masyarakat.

Ritual dalam masyarakat tidak hanya memiliki fungsi spiritual. Pelaksanaannya juga menjadi ruang berkumpul, memperkuat hubungan antaranggotanya, dan mewariskan nilai dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Dari sudut pandang sejarah sosial, praktik keagamaan dengan demikian menjadi bagian dari cara masyarakat membangun solidaritas dan mempertahankan keteraturan sosial.

Masuknya agama-agama baru tidak serta-merta menghapus seluruh unsur kepercayaan yang telah berkembang sebelumnya. Sebagian tradisi mengalami penyesuaian dan memperoleh pemaknaan baru. Proses tersebut kemudian menjadi salah satu ciri perkembangan kehidupan keagamaan di Nusantara.

b. Hindu-Buddha dan Pembentukan Struktur Sosial Kerajaan

Pengaruh Hindu-Buddha berkembang melalui hubungan masyarakat Nusantara dengan jaringan perdagangan dan kebudayaan Asia. Perkembangan tersebut kemudian berkaitan dengan munculnya kerajaan seperti Kutai, Tarumanagara, Sriwijaya, Mataram Kuno, Singhasari, dan Majapahit.

Agama memiliki hubungan erat dengan kehidupan kerajaan. Konsep kekuasaan raja, pembangunan tempat suci, pelaksanaan ritual, dan kehidupan kaum keagamaan menjadi bagian dari tatanan sosial dan politik. Pengaruh Hindu-Buddha juga terlihat pada perkembangan sastra, seni, bahasa, arsitektur, dan pendidikan.

Meskipun menerima pengaruh dari luar, masyarakat Nusantara tidak sekadar meniru kebudayaan India. Unsur Hindu-Buddha mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan setempat. Hal tersebut menghasilkan bentuk kehidupan sosial-keagamaan yang memiliki karakter tersendiri di berbagai wilayah Nusantara.

c. Islamisasi dan Perubahan Masyarakat Nusantara

Islamisasi merupakan salah satu proses penting dalam perubahan sosial masyarakat Nusantara. Penyebaran Islam berlangsung secara bertahap melalui jaringan perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, hubungan antarelite, serta perkembangan pusat-pusat kekuasaan Islam. Karena berlangsung melalui berbagai jalur, proses tersebut tidak terjadi dalam bentuk dan waktu yang sama di seluruh wilayah.

Di Jawa, Islamisasi berkembang melalui interaksi dengan tradisi masyarakat yang telah terbentuk sebelumnya. Ricklefs (2006) menjelaskan terbentuknya suatu sintesis antara identitas Islam dan tradisi spiritual Jawa yang berkembang melalui proses panjang sejak masa Islamisasi hingga awal abad ke-19. Artinya, masuknya Islam tidak hanya menghasilkan perubahan keagamaan, tetapi juga membentuk hubungan baru antara agama dan kebudayaan masyarakat.

Berkembangnya kerajaan dan kesultanan Islam juga memengaruhi kehidupan ekonomi dan politik. Kota-kota pelabuhan menjadi pusat perdagangan

sekaligus ruang pertemuan pedagang, ulama, penguasa, dan masyarakat dari berbagai daerah. Masjid, pesantren, dan jaringan ulama kemudian berkembang sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial.

2. Agama dan Perubahan Sosial pada Masa Kolonial

Kolonialisme membawa perubahan besar terhadap struktur kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan ekonomi, birokrasi, pendidikan, dan kekuasaan kolonial ikut memengaruhi kehidupan keagamaan. Pada periode ini, agama berkembang bukan hanya sebagai identitas spiritual, tetapi juga sebagai sumber solidaritas dan pembentukan jaringan sosial.

a. Agama dan Perlawanan terhadap Kolonialisme

Dalam sejumlah perlawanan terhadap kolonialisme, agama menjadi salah satu unsur yang membangun solidaritas dan memberikan legitimasi moral kepada masyarakat. Tokoh agama memiliki pengaruh karena kedudukannya tidak terbatas sebagai pembimbing spiritual, tetapi juga sebagai pemimpin sosial.

Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada 1825–1830 menjadi salah satu contoh hubungan antara agama dan perlawanan terhadap kolonialisme. Gerakan Diponegoro memiliki dimensi keagamaan yang kuat, tetapi konflik tersebut juga berhubungan dengan perubahan politik, ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat Jawa. Karena itu, perlawanan Diponegoro tidak tepat apabila hanya dijelaskan sebagai perang keagamaan. Kajian Peter Carey mengenai Diponegoro

menempatkan perang tersebut dalam perubahan besar masyarakat Jawa akibat semakin kuatnya campur tangan kolonial pada awal abad ke-19.

Agama dalam konteks tersebut menyediakan bahasa moral yang dapat digunakan masyarakat untuk menilai kekuasaan kolonial. Pada saat yang sama, ikatan keagamaan juga dapat memperkuat hubungan antara pemimpin gerakan dan masyarakat yang terlibat dalam perlawanan.

b. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Pesantren berkembang sebagai salah satu lembaga penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Selain mengajarkan ilmu agama, pesantren membentuk hubungan sosial antara kiai, santri, keluarga, dan masyarakat. Hubungan tersebut membuat pesantren memiliki pengaruh yang melampaui fungsi pendidikan.

Kiai dapat menjadi rujukan masyarakat dalam persoalan agama maupun kehidupan sosial, sedangkan santri yang telah menyelesaikan pendidikan dapat kembali ke daerahnya dan mendirikan lembaga pendidikan baru. Pola tersebut membentuk jaringan sosial-keagamaan yang menghubungkan masyarakat dari berbagai wilayah.

Pada masa kolonial, perkembangan pendidikan juga dipengaruhi oleh sekolah pemerintah dan sekolah yang didirikan lembaga misi Kristen. Kehadiran berbagai bentuk pendidikan tersebut membuka akses terhadap pengetahuan baru dan turut membentuk kelompok masyarakat terdidik. Pendidikan kemudian

menjadi salah satu ruang penting tempat agama dan modernisasi bertemu.

c. Pembaruan Keagamaan dan Perubahan Masyarakat

Memasuki abad ke-19 dan awal abad ke-20, hubungan masyarakat Nusantara dengan dunia luar semakin berkembang. Perjalanan haji, jaringan ulama, perkembangan percetakan, dan pendidikan mempercepat pertukaran gagasan keagamaan. Kondisi tersebut mendorong munculnya perdebatan mengenai pembaruan, tradisi, pendidikan, dan kehidupan masyarakat.

Ricklefs (2007) memperlihatkan bahwa masyarakat Jawa pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 mengalami perubahan dan polarisasi dalam kehidupan keagamaannya. Perkembangan pendidikan, kolonialisme, pembaruan Islam, serta perubahan sosial membentuk orientasi keagamaan yang semakin beragam. Kehidupan agama kemudian semakin berkaitan dengan organisasi, pendidikan, dan pandangan politik.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kolonialisme tidak menghentikan perkembangan kehidupan keagamaan. Sebaliknya, perjumpaan dengan kekuasaan kolonial dan gagasan baru turut mendorong masyarakat membentuk jaringan dan organisasi yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan pergerakan nasional.

3. Agama dalam Pergerakan Nasional Indonesia

Awal abad ke-20 menjadi periode penting dalam sejarah Indonesia karena organisasi modern mulai berkembang di Hindia Belanda. Agama menjadi salah satu dasar pembentukan organisasi yang tidak hanya bergerak dalam kehidupan keagamaan, tetapi juga pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik.

a. Sarekat Islam dan Mobilisasi Masyarakat

Sarekat Islam merupakan salah satu organisasi massa penting dalam pergerakan nasional. Perkembangannya memperlihatkan hubungan antara identitas keagamaan, kepentingan ekonomi, solidaritas sosial, dan munculnya kesadaran politik masyarakat bumiputra.

Sarekat Islam berkembang dari organisasi yang memiliki kepentingan ekonomi menuju gerakan dengan jangkauan sosial dan politik yang semakin luas. Wilandra dan Emalia (2022) menjelaskan bahwa Sarekat Islam berkembang menjadi representasi gerakan sosial masyarakat pribumi dan mengalami perubahan pemikiran dari bentuk gerakan yang masih dipengaruhi gagasan Ratu Adil menuju sosialisme dan reformisme Islam.

Perkembangan tersebut menunjukkan perubahan cara masyarakat melakukan gerakan sosial. Perlawanan yang sebelumnya lebih banyak berlangsung secara lokal mulai berkembang melalui organisasi modern dengan kepengurusan, keanggotaan, pertemuan, pendidikan, dan jaringan antardaerah. Sarekat Islam dengan demikian ikut membuka ruang

bagi tumbuhnya kesadaran sosial dan politik masyarakat.

b. Muhammadiyah dan Pembaruan Sosial

Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada 1912. Organisasi ini berkembang dengan menempatkan pembaruan pendidikan, keagamaan, dan kegiatan sosial sebagai bagian penting gerakannya. Pendidikan modern menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.

Peran Muhammadiyah kemudian berkembang melalui sekolah, pelayanan kesehatan, kegiatan sosial, dan berbagai lembaga kemasyarakatan. Kajian sejarah mengenai kontribusi Muhammadiyah menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki peran penting dalam perkembangan pendidikan Indonesia dan menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang utama gerakan sosial-keagamaannya (Pahlevi et al., 2024).

Perkembangan Muhammadiyah menunjukkan perubahan bentuk aktivitas keagamaan pada awal abad ke-20. Nilai agama tidak hanya diterapkan melalui kegiatan ritual, tetapi diterjemahkan ke dalam organisasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan sosial. Dengan cara tersebut, agama menjadi salah satu kekuatan yang mendorong perubahan kehidupan masyarakat.

c. Nahdlatul Ulama dan Penguatan Jaringan Pesantren

Nahdlatul Ulama (NU) berdiri pada 1926 dan berkembang dari jaringan ulama serta pesantren.

Kehadirannya berkaitan dengan usaha mempertahankan dan mengembangkan tradisi keagamaan yang telah tumbuh dalam kehidupan masyarakat Muslim, khususnya melalui hubungan antara kiai, pesantren, santri, dan masyarakat.

Kiai mempunyai kedudukan penting dalam jaringan tersebut karena hubungan mereka dengan masyarakat telah terbentuk melalui pendidikan, dakwah, ritual, dan kehidupan sosial. Pesantren kemudian menjadi salah satu basis yang memungkinkan hubungan tersebut bertahan dan berkembang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam perkembangannya, NU tidak hanya bergerak dalam kehidupan keagamaan. Organisasi ini terlibat dalam pendidikan, kegiatan sosial, kebangsaan, dan pada periode tertentu kehidupan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa jaringan keagamaan dapat berkembang menjadi kekuatan sosial yang memiliki pengaruh luas dalam masyarakat.

d. Agama dan Pembentukan Kesadaran Kebangsaan

Organisasi keagamaan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk belajar menjalankan organisasi modern. Pertemuan, pendidikan, penerbitan, kegiatan sosial, dan jaringan antardaerah memperluas hubungan masyarakat melampaui batas desa maupun wilayah tempat tinggalnya.

Laffan (2003) menunjukkan bahwa perkembangan identitas Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari hubungan intelektual dan jaringan umat

Islam Nusantara dengan dunia yang lebih luas. Hubungan tersebut ikut memengaruhi pembentukan pemikiran keagamaan dan identitas masyarakat Muslim pada masa kolonial.

Dalam konteks tersebut, kesadaran keagamaan dan kebangsaan tidak selalu berkembang sebagai dua proses yang bertentangan. Pengalaman berada di bawah kolonialisme, berkembangnya pendidikan, dan terbentuknya organisasi modern membuat identitas agama dapat berjalan bersama dengan pembentukan kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas.

4. Agama dalam Kehidupan Indonesia Pasca-Kemerdekaan

Kemerdekaan Indonesia pada 1945 membuka fase baru dalam hubungan agama, negara, dan masyarakat. Persoalan yang dihadapi tidak lagi hanya berkaitan dengan kolonialisme, tetapi juga bagaimana masyarakat yang memiliki keragaman agama membangun kehidupan dalam satu negara.

a. Agama dan Pembentukan Negara

Hubungan agama dan negara menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan dalam proses pembentukan Indonesia. Para pendiri negara menghadapi kebutuhan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat beragama sekaligus mempertahankan persatuan dalam masyarakat yang memiliki latar belakang keyakinan berbeda.

Pancasila kemudian menjadi dasar negara dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama yang ditempatkan bersama nilai kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal tersebut membentuk kerangka hubungan agama dan negara yang khas dalam kehidupan Indonesia.

Perdebatan mengenai agama dan negara tidak berhenti setelah kemerdekaan. Organisasi dan partai politik berbasis agama ikut terlibat dalam kehidupan politik, khususnya pada masa Demokrasi Liberal. Hubungan tersebut kemudian mengalami perubahan mengikuti perkembangan Demokrasi Terpimpin, Orde Baru, dan Reformasi.

b. Agama pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, negara menjalankan kontrol politik yang kuat terhadap organisasi masyarakat dan partai politik. Aktivitas politik berbasis agama berada dalam struktur politik yang dibatasi pemerintah, meskipun kehidupan sosial-keagamaan tetap berkembang.

Di sisi lain, perkembangan pendidikan dan ekonomi menghasilkan kelompok masyarakat terdidik baru. Ekspresi keagamaan juga berkembang di lingkungan kampus, perkotaan, organisasi sosial, dan kelas menengah. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan terhadap politik formal tidak berarti kehidupan keagamaan dalam masyarakat berhenti mengalami perkembangan.

Menjelang akhir Orde Baru, hubungan pemerintah dengan kelompok Muslim juga mengalami perubahan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan agama dan negara tidak bersifat tetap, tetapi

dipengaruhi oleh perkembangan politik dan perubahan struktur sosial.

c. Organisasi Keagamaan dan Kehidupan Sosial

Peran agama setelah kemerdekaan tidak hanya terlihat dalam politik. Organisasi keagamaan terus mengembangkan sekolah, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, lembaga sosial, serta berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut memperlihatkan bahwa pengaruh agama terhadap perubahan sosial sering berlangsung melalui institusi yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial menjadi ruang tempat nilai keagamaan diterjemahkan menjadi tindakan sosial.

Karena itu, analisis peran agama dalam sejarah Indonesia tidak cukup dilakukan dengan melihat partai politik atau hubungan elite agama dengan pemerintah. Kehidupan masyarakat sehari-hari juga perlu ditempatkan sebagai bagian penting dari sejarah agama.

5. Agama pada Era Reformasi dan Demokratisasi

Reformasi 1998 membawa perubahan besar terhadap kehidupan politik Indonesia. Kebebasan berserikat, kebebasan pers, demokratisasi, dan desentralisasi membuka ruang yang lebih luas bagi berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi dan komunitas keagamaan.

a. Terbukanya Ruang Ekspresi Keagamaan

Reformasi memberikan ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat untuk membentuk organisasi, media, lembaga pendidikan, dan berbagai gerakan sosial berbasis agama. Ekspresi keagamaan menjadi semakin beragam dan lebih mudah hadir dalam ruang publik.

Keterbukaan tersebut membawa dua kemungkinan. Di satu sisi, masyarakat memperoleh ruang lebih luas untuk menjalankan aktivitas keagamaan dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Di sisi lain, keterbukaan juga melahirkan perdebatan mengenai hubungan agama dan politik, pluralisme, hak kelompok minoritas, dan penggunaan identitas agama dalam kompetisi politik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokratisasi tidak mengurangi peran agama. Sebaliknya, perubahan sistem politik memberikan ruang baru bagi agama untuk hadir dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk yang semakin beragam.

b. Agama dan Perkembangan Masyarakat Sipil

Organisasi keagamaan memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat sipil Indonesia. Jaringan pendidikan, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan kelompok intelektual menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik.

Hefner (2000) menggunakan konsep *civil Islam* untuk menjelaskan berkembangnya kelompok dan pemikiran Muslim yang mendukung demokrasi, pluralisme, masyarakat sipil, dan kehidupan kewargaan

di Indonesia. Dalam pandangannya, keterlibatan Islam dalam kehidupan publik tidak selalu mengarah pada pembentukan negara agama, tetapi juga dapat mendukung perkembangan demokrasi.

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa agama dan demokrasi tidak harus ditempatkan sebagai dua kekuatan yang bertentangan. Organisasi keagamaan dapat menjadi bagian dari penguatan masyarakat sipil ketika mendorong pendidikan, partisipasi warga, penghormatan terhadap perbedaan, dan kehidupan publik yang terbuka.

c. Agama di Tengah Globalisasi dan Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi komunikasi mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan pengetahuan agama. Jika sebelumnya pengetahuan keagamaan banyak diperoleh melalui keluarga, sekolah, pesantren, gereja, pura, atau lembaga keagamaan lainnya, internet dan media sosial membuka akses terhadap sumber yang jauh lebih luas.

Perubahan tersebut juga memengaruhi otoritas keagamaan. Masyarakat dapat mengikuti ceramah, diskusi, pendidikan, maupun komunitas agama tanpa harus berada dalam ruang fisik yang sama. Tokoh agama juga dapat menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.

Pada saat yang sama, keterbukaan informasi membawa persoalan baru. Informasi yang tidak terverifikasi, ujaran kebencian, prasangka, dan narasi yang mempertentangkan kelompok dapat menyebar

dengan cepat. Karena itu, perkembangan teknologi menjadi bagian baru dalam dinamika hubungan antara agama dan perubahan sosial.

6. Analisis Sejarah Sosial terhadap Peran Agama di Indonesia

Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa agama tidak memiliki satu fungsi yang tetap. Pada periode tertentu agama menjadi bagian dari legitimasi kekuasaan, sedangkan pada periode lain agama menjadi sumber perlawanan, pendidikan, organisasi sosial, pelayanan masyarakat, politik, dan pembentukan masyarakat sipil.

1. Agama sebagai Pembentuk Identitas Sosial

Agama menjadi salah satu unsur yang membentuk identitas individu dan kelompok. Identitas tersebut berkembang melalui keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, ritual, organisasi, dan pengalaman historis masyarakat.

Geertz (1960) melalui *The Religion of Java* menggambarkan kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Jawa dengan kategorisasi abangan, santri, dan priyayi. Meskipun kategorisasi tersebut kemudian banyak diperdebatkan, karya Geertz menjadi salah satu kajian klasik yang memperlihatkan hubungan antara kehidupan agama, struktur sosial, kebudayaan, dan orientasi masyarakat.

Perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa identitas tersebut tidak bersifat tetap. Ricklefs (2007) menelusuri perubahan dan polarisasi masyarakat Jawa sejak abad ke-19 dan memperlihatkan bahwa identitas keagamaan terus berubah mengikuti perkembangan

pendidikan, politik, dan kehidupan sosial. Dengan demikian, identitas agama perlu dipahami sebagai hasil proses sejarah, bukan kategori yang tidak mengalami perubahan.

2. Agama sebagai Jaringan Sosial

Agama membentuk jaringan sosial yang dapat menghubungkan masyarakat melampaui lingkungan tempat tinggalnya. Pesantren menghubungkan kiai dan santri dari berbagai wilayah, organisasi keagamaan menghubungkan anggotanya melalui struktur kelembagaan, sedangkan perjalanan haji dan jaringan intelektual menghubungkan masyarakat Nusantara dengan dunia yang lebih luas.

Laffan (2003) memperlihatkan pentingnya hubungan lintas wilayah dalam pembentukan identitas Islam pada masa kolonial. Jaringan tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan, pengetahuan, dan pengalaman keagamaan yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat Indonesia.

Pada masa modern, jaringan keagamaan berkembang melalui sekolah, perguruan tinggi, organisasi sosial, lembaga kemanusiaan, dan media digital. Bentuknya berubah, tetapi kemampuannya menghubungkan masyarakat tetap menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial.

3. Agama sebagai Penggerak Perubahan Sosial

Peran agama sebagai penggerak perubahan terlihat dalam berbagai bidang kehidupan. Sarekat Islam menggunakan jaringan organisasi untuk

membangun gerakan sosial dan politik masyarakat bumiputra (Wilandra & Emalia, 2022), sedangkan Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai salah satu sarana pembaruan masyarakat (Pahlevi et al., 2024).

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa nilai keagamaan dapat diterjemahkan menjadi tindakan sosial melalui organisasi dan lembaga. Agama dengan demikian tidak hanya berada pada tingkat gagasan atau ritual, tetapi dapat memengaruhi pendidikan, ekonomi, pelayanan sosial, dan partisipasi masyarakat.

Peran tersebut terus berubah mengikuti kebutuhan zaman. Bentuk gerakan sosial keagamaan pada masa kolonial tentu berbeda dengan masa Reformasi, tetapi keduanya menunjukkan kemampuan organisasi agama untuk menyesuaikan aktivitasnya dengan perubahan masyarakat.

4. Agama sebagai Pemelihara Kesenambungan Sosial

Agama juga memiliki fungsi dalam mempertahankan nilai dan tradisi yang diwariskan antargenerasi. Ritual, perayaan keagamaan, pendidikan, organisasi, dan kehidupan keluarga menjadi sarana pewarisan nilai kepada generasi berikutnya.

Kesenambungan tersebut tidak berarti bahwa tradisi agama selalu dipertahankan tanpa perubahan. Ricklefs (2006) menunjukkan bahwa hubungan antara Islam dan tradisi Jawa sendiri mengalami proses pembentukan dan perubahan dalam waktu yang

panjang. Dengan demikian, tradisi dapat dipertahankan sekaligus ditafsirkan kembali sesuai dengan kondisi masyarakat.

Hal tersebut menjelaskan mengapa praktik keagamaan dapat memiliki bentuk berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Sejarah lokal, struktur masyarakat, serta pengalaman sosial turut memengaruhi bagaimana suatu agama dipahami dan dijalankan.

5. Agama, Negara, dan Masyarakat

Hubungan agama, negara, dan masyarakat Indonesia berubah mengikuti konteks sejarah. Pada masa kerajaan, agama dapat menjadi sumber legitimasi kekuasaan. Pada masa kolonial, jaringan keagamaan dapat menjadi ruang pendidikan, solidaritas, dan perlawanan. Setelah kemerdekaan, hubungan tersebut berkembang melalui perdebatan dasar negara, partai politik, kebijakan pemerintah, dan organisasi masyarakat.

Pada masa Reformasi, hubungan tersebut semakin terbuka dan kompleks. Hefner (2000) memperlihatkan bahwa masyarakat sipil Muslim memiliki arti penting dalam perkembangan demokratisasi Indonesia. Peran agama dalam kehidupan politik dengan demikian tidak hanya berbentuk perjuangan memperoleh kekuasaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui penguatan masyarakat sipil, pendidikan, partisipasi warga, dan dukungan terhadap demokrasi.

Dari perspektif sejarah sosial, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa agama selalu berinteraksi dengan kondisi masyarakat. Agama dapat memengaruhi struktur sosial, tetapi pada saat yang sama praktik dan organisasi keagamaan juga berubah karena perkembangan ekonomi, politik, pendidikan, teknologi, dan kebudayaan.

Dengan demikian, sejarah agama di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perubahan masyarakat. Agama pernah menjadi sumber legitimasi kekuasaan, membentuk jaringan perdagangan dan pendidikan, menjadi bagian dari perlawanan kolonial, mendorong pembentukan organisasi modern, serta terlibat dalam perkembangan masyarakat sipil dan demokrasi. Perannya tidak bersifat tunggal dan tidak selalu sama pada setiap periode. Pendekatan sejarah sosial membantu memahami perubahan tersebut dengan melihat hubungan antara agama, struktur sosial, dan pengalaman masyarakat dalam konteks ruang dan waktu yang berbeda.

Kesimpulan

Agama memiliki peran penting dalam perubahan sosial karena tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual, tetapi juga berinteraksi dengan struktur sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Dalam perjalanan sejarah, agama dapat menjadi kekuatan yang mendorong perubahan sekaligus mempertahankan nilai, solidaritas, dan keteraturan sosial dalam masyarakat.

Hubungan agama dengan kehidupan sosial juga dapat melahirkan dinamika konflik dan harmoni. Konflik yang melibatkan identitas agama tidak selalu bersumber dari perbedaan keyakinan, tetapi dapat berkaitan dengan faktor politik, ekonomi, migrasi, ketimpangan, dan perubahan sosial. Pengalaman Maluku dan Poso memperlihatkan kompleksitas tersebut, sedangkan kehidupan masyarakat Cigugur menunjukkan bahwa toleransi, dialog, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat menjadi dasar terbentuknya harmoni sosial.

Dalam sejarah Indonesia, peran agama terus mengalami perubahan sejak masyarakat Nusantara pra-kolonial, masa kolonial, pergerakan nasional, kemerdekaan, hingga era Reformasi. Agama turut membentuk identitas dan jaringan sosial, pendidikan, perlawanan terhadap kolonialisme, organisasi modern, kesadaran kebangsaan, serta perkembangan masyarakat sipil. Dengan demikian, kajian sejarah sosial membantu memahami bahwa peran agama tidak bersifat tetap, tetapi selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat pada setiap periode sejarah.

Studi Reflektif

1. Mengapa agama dapat berperan sebagai pendorong perubahan sekaligus pemelihara keteraturan sosial dalam masyarakat?
2. Mengapa konflik yang melibatkan identitas agama tidak dapat dijelaskan hanya berdasarkan perbedaan keyakinan?

3. Bagaimana toleransi, dialog, dan rekonsiliasi dapat membantu membangun kembali hubungan sosial setelah terjadinya konflik?
4. Bagaimana peran agama mengalami perubahan dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga Indonesia modern?
5. Bagaimana organisasi dan lembaga keagamaan berperan dalam perubahan sosial dan pembentukan kehidupan masyarakat Indonesia?

BAB XIII:

GERAKAN SOSIAL

Dinamika Perlawanan, Transformasi, Dan Perubahan Sosial Dari Dunia Kuno Hingga Era Digital

Sejarah masyarakat pada hakikatnya merupakan sejarah tentang perubahan. Perubahan tersebut tidak berlangsung secara alamiah ataupun semata-mata ditentukan oleh perkembangan ekonomi, politik, maupun teknologi, melainkan dibentuk melalui tindakan kolektif masyarakat yang berupaya mempertahankan, menolak, atau mentransformasikan tatanan sosial yang dianggap tidak adil. Dalam konteks inilah gerakan sosial (*social movements*) menjadi salah satu kekuatan historis yang paling menentukan dalam membentuk arah perkembangan peradaban manusia. Hampir setiap fase penting dalam sejarah dunia—mulai dari pemberontakan budak pada masa Romawi Kuno, gerakan keagamaan pada Abad Pertengahan, revolusi politik pada abad ke-18, gerakan buruh pada era industrialisasi, hingga aktivisme digital pada abad ke-21—memperlihatkan bahwa perubahan sosial tidak hanya dihasilkan oleh keputusan elite atau institusi negara, tetapi oleh mobilisasi kolektif masyarakat yang berjuang memperjuangkan kepentingan, identitas, maupun nilai-nilai tertentu (Tilly, 2004; Tarrow, 2022).

Dalam kajian sejarah sosial, gerakan sosial dipahami sebagai manifestasi hubungan yang dinamis antara struktur sosial, distribusi kekuasaan, budaya, serta tindakan kolektif.

Perspektif ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai objek perubahan, melainkan sebagai aktor historis yang secara aktif membentuk proses sejarah melalui berbagai bentuk resistensi, negosiasi, dan inovasi sosial. Pandangan tersebut memperluas pendekatan historiografi tradisional yang cenderung berfokus pada tokoh besar, perang, atau pergantian rezim politik, menuju perhatian yang lebih besar terhadap pengalaman kelompok-kelompok sosial, masyarakat akar rumput, komunitas lokal, perempuan, buruh, petani, masyarakat adat, hingga kelompok-kelompok minoritas yang selama ini sering terpinggirkan dalam penulisan sejarah (Hobsbawm, 1959; Burke, 2005).

Pemahaman mengenai gerakan sosial juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan seiring berkembangnya ilmu-ilmu sosial. Pada tahap awal, gerakan sosial sering dipersepsikan sebagai bentuk perilaku kolektif yang bersifat irasional, spontan, dan muncul akibat disorganisasi sosial. Perspektif ini berkembang melalui karya-karya awal seperti teori *collective behavior* dan *structural strain* yang menekankan pentingnya kondisi krisis sosial sebagai pemicu mobilisasi massa (Smelser, 1962). Namun, perkembangan penelitian sejak dekade 1970-an menunjukkan bahwa gerakan sosial justru merupakan aktivitas yang rasional, terorganisasi, dan memiliki strategi politik yang kompleks. Melalui teori *Resource Mobilization*, McCarthy dan Zald (1977) menegaskan bahwa keberhasilan suatu gerakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya ketidakpuasan masyarakat, tetapi terutama oleh kemampuan aktor mengorganisasi sumber daya, membangun

kepemimpinan, mengelola jaringan, dan memperoleh legitimasi publik.

Selanjutnya, perhatian para ilmuwan bergeser pada pentingnya peluang politik (*political opportunity structure*), proses pembingkaihan isu (*framing process*), dan konstruksi identitas kolektif sebagai faktor utama yang menentukan muncul maupun berkembangnya gerakan sosial (McAdam, 1982; Snow & Benford, 1988). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak lagi dipahami sekadar sebagai reaksi terhadap ketidakadilan, melainkan sebagai proses sosial yang melibatkan produksi makna, negosiasi identitas, pembentukan solidaritas, dan kompetisi wacana dalam ruang publik. Dengan demikian, gerakan sosial merupakan fenomena multidimensional yang hanya dapat dipahami melalui integrasi perspektif sejarah, sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan studi budaya.

Memasuki abad ke-21, dinamika gerakan sosial semakin kompleks seiring berkembangnya globalisasi, demokratisasi, dan revolusi teknologi informasi. Kehadiran internet dan media sosial telah mengubah pola mobilisasi kolektif dari model organisasi yang bersifat hierarkis menuju jaringan (*networked movements*) yang lebih fleksibel, horizontal, dan transnasional. Manuel Castells (2013) menunjukkan bahwa jaringan komunikasi digital memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia membangun solidaritas secara cepat, mendistribusikan informasi secara *real time*, serta mengorganisasi aksi kolektif tanpa bergantung sepenuhnya pada organisasi formal.

Fenomena seperti *Arab Spring*, *Occupy Wall Street*, *Black Lives Matter*, *Fridays for Future*, hingga *MeToo* memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi arena baru dalam kontestasi politik, perjuangan identitas, serta pembentukan opini publik global. Di sisi lain, perkembangan ini memunculkan berbagai perdebatan mengenai efektivitas aktivisme digital, penyebaran disinformasi, polarisasi politik, hingga fenomena *slacktivism*, yaitu partisipasi simbolik yang tidak selalu menghasilkan perubahan sosial substantif (Morozov, 2011).

Dalam konteks Indonesia, sejarah gerakan sosial memiliki akar yang panjang dan beragam. Perlawanan terhadap kolonialisme, kebangkitan organisasi modern seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, gerakan buruh, organisasi perempuan, perjuangan mahasiswa, Reformasi 1998, hingga berbagai gerakan masyarakat sipil kontemporer menunjukkan bahwa transformasi politik dan sosial Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tindakan kolektif masyarakat. Gerakan-gerakan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan tidak pernah berlangsung secara linear, melainkan melalui proses negosiasi, konflik, kompromi, dan adaptasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, budaya, agama, teknologi, serta konfigurasi kekuasaan pada setiap periode sejarah.

Bab ini mengajak pembaca memahami gerakan sosial sebagai bagian integral dari sejarah sosial yang menjelaskan bagaimana masyarakat membangun, mempertahankan, maupun mengubah struktur sosial sepanjang perjalanan

sejarah. Pembahasan tidak hanya menelusuri perkembangan gerakan sosial dari dunia kuno hingga era digital, tetapi juga mengkaji evolusi teori, perdebatan konseptual, serta berbagai studi empiris yang menunjukkan bahwa gerakan sosial merupakan proses historis yang selalu berubah mengikuti dinamika zaman. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis gerakan sosial secara kritis sebagai fenomena historis yang lahir dari interaksi antara struktur, agensi, budaya, teknologi, dan kekuasaan, sekaligus memahami perannya sebagai salah satu motor utama perubahan sosial dalam masyarakat.

A. Konsep Dasar Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian sejarah sosial karena menjelaskan bagaimana masyarakat merespons perubahan, mempertahankan kepentingan, serta menciptakan transformasi terhadap tatanan yang berlaku. Meskipun istilah *social movement* telah digunakan secara luas dalam sosiologi, sejarah, ilmu politik, dan antropologi, para ahli belum mencapai definisi tunggal yang sepenuhnya disepakati. Perbedaan tersebut muncul karena gerakan sosial berkembang dalam konteks sejarah yang terus berubah, sementara pendekatan teoretis yang digunakan untuk menjelaskannya juga mengalami evolusi. Konsekuensinya, gerakan sosial lebih tepat dipahami sebagai konsep yang bersifat dinamis daripada kategori yang memiliki batas-batas tetap (Della Porta & Diani, 2020).

Pandangan awal mengenai gerakan sosial banyak dipengaruhi oleh teori perilaku kolektif (*collective behavior*). Perspektif ini melihat mobilisasi massa sebagai respons spontan terhadap ketidakstabilan sosial, disorganisasi, atau krisis yang mengganggu keseimbangan masyarakat. Dalam kerangka tersebut, aksi kolektif dipandang sebagai gejala yang lahir dari tekanan struktural sehingga perilaku massa sering dikaitkan dengan irasionalitas dan lemahnya kontrol sosial (Smelser, 1962). Pendekatan ini memberi kontribusi penting dalam menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan munculnya konflik, tetapi cenderung mereduksi kapasitas aktor sebagai subjek yang mampu merancang strategi, membangun organisasi, serta menentukan tujuan politik secara sadar.

Perkembangan penelitian sejak dekade 1970-an mengubah arah pemikiran tersebut. McCarthy dan Zald (1977) menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial lebih dipengaruhi oleh kemampuan mengelola sumber daya daripada sekadar besarnya ketidakpuasan masyarakat. Organisasi, kepemimpinan, jaringan sosial, akses terhadap pendanaan, legitimasi, dan kemampuan komunikasi menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan mobilisasi. Perspektif *Resource Mobilization* memperlihatkan bahwa gerakan sosial beroperasi melalui proses yang rasional, terencana, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan politik.

Perubahan berikutnya muncul melalui *Political Process Theory* yang dikembangkan oleh McAdam (1982) dan diperluas oleh Tarrow (2022). Pendekatan ini

menempatkan struktur peluang politik (*political opportunity structure*) sebagai variabel utama yang memengaruhi lahirnya aksi kolektif. Gerakan sosial berkembang ketika konfigurasi kekuasaan membuka ruang bagi partisipasi, muncul perpecahan di antara elite, atau kapasitas negara mengalami pelemahan. Dengan demikian, keberhasilan suatu gerakan tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan internal organisasi, melainkan dipengaruhi oleh hubungan yang terus berubah antara masyarakat dan institusi politik.

Kajian mutakhir memperluas pembahasan menuju dimensi budaya dan konstruksi makna. Snow dan Benford (1988) memperkenalkan konsep framing untuk menjelaskan bagaimana aktor gerakan membangun interpretasi bersama terhadap suatu persoalan sehingga mampu membangkitkan solidaritas kolektif. Gerakan sosial berkembang melalui proses pembentukan narasi yang memberi makna terhadap pengalaman masyarakat, mengidentifikasi penyebab ketidakadilan, serta menawarkan arah perubahan yang dianggap layak diperjuangkan. Dalam perspektif ini, keberhasilan mobilisasi sangat bergantung pada kemampuan membangun resonansi antara pesan gerakan dengan nilai, identitas, dan pengalaman publik.

Perhatian terhadap identitas semakin menguat melalui teori *New Social Movements*. Touraine (1981) dan Melucci (1996) menjelaskan bahwa gerakan kontemporer semakin sering berpusat pada isu lingkungan, gender, hak asasi manusia, keberagaman budaya, perdamaian, serta identitas komunitas. Orientasi tersebut berbeda dari gerakan klasik

yang didominasi perjuangan ekonomi dan konflik kelas. Perubahan tersebut mencerminkan transformasi masyarakat industri menuju masyarakat pascaindustri, ketika perebutan makna, pengakuan, dan kualitas hidup memperoleh posisi yang semakin penting dalam ruang publik.

Meskipun demikian, dikotomi antara gerakan “*old*” dan “*new*” memunculkan perdebatan akademik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa isu ekonomi, distribusi sumber daya, dan ketimpangan kelas tetap menjadi fondasi banyak gerakan kontemporer. Gerakan lingkungan, misalnya, sering berkaitan dengan konflik penguasaan lahan, akses terhadap sumber daya alam, maupun ketidakadilan pembangunan. Demikian pula gerakan identitas kerap beririsan dengan persoalan ekonomi politik. Castells (2013) bahkan berpendapat bahwa jaringan komunikasi digital telah mempertemukan berbagai tuntutan tersebut ke dalam ruang kolektif yang lebih cair sehingga batas antara gerakan kelas, identitas, dan demokrasi menjadi semakin kabur.

Dalam perspektif sejarah sosial, gerakan sosial dapat dipahami sebagai proses tindakan kolektif yang berlangsung secara berkelanjutan, memiliki orientasi terhadap perubahan atau pertahanan tatanan sosial, dibangun melalui jaringan sosial, serta didukung oleh identitas bersama yang memberikan arah bagi mobilisasi. Definisi ini sejalan dengan Della Porta dan Diani (2020) yang memandang gerakan sosial sebagai interaksi berkesinambungan antara individu, organisasi, dan kelompok informal yang terhubung melalui

solidaritas kolektif dan terlibat dalam konflik politik maupun budaya.

Berdasarkan perkembangan konseptual tersebut, terdapat beberapa karakteristik utama yang membedakan gerakan sosial dari bentuk aksi kolektif lainnya. Pertama, gerakan sosial memiliki tujuan yang relatif jelas, baik berupa perubahan kebijakan, transformasi nilai, maupun perlindungan terhadap hak tertentu. Kedua, mobilisasi berlangsung melalui jaringan sosial yang memungkinkan koordinasi lintas individu maupun organisasi. Ketiga, terdapat identitas kolektif yang membangun rasa memiliki terhadap tujuan bersama. Keempat, aksi berlangsung secara berkesinambungan sehingga berbeda dari kerumunan spontan atau protes sesaat. Kelima, gerakan sosial selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, baik melalui negosiasi, kompetisi, resistensi, maupun kolaborasi (Tarrow, 2022; Tilly & Tarrow, 2015).

Dari sudut pandang sejarah, gerakan sosial sebaiknya dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur dan agensi. Struktur menciptakan peluang, hambatan, dan ketimpangan yang membentuk konteks tindakan kolektif. Agensi menjelaskan kapasitas individu maupun kelompok dalam menafsirkan realitas, menyusun strategi, membangun solidaritas, serta memobilisasi dukungan. Hubungan keduanya bersifat dialektis: perubahan struktur memengaruhi pola gerakan sosial, sementara keberhasilan gerakan sosial mampu mengubah struktur politik, ekonomi, dan budaya yang melingkupinya. Perspektif tersebut memberi landasan

analitis yang lebih komprehensif untuk memahami evolusi gerakan sosial dari dunia kuno hingga era digital, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu motor utama perubahan dalam sejarah masyarakat.

B. Perkembangan Pemikiran Teori Gerakan Sosial

Pemahaman mengenai gerakan sosial berkembang melalui proses intelektual yang panjang dan mencerminkan perubahan orientasi ilmu-ilmu sosial dalam membaca hubungan antara masyarakat, kekuasaan, dan perubahan sejarah. Tidak ada satu teori yang mampu menjelaskan seluruh dinamika gerakan sosial karena setiap pendekatan lahir dari konteks sosial-politik tertentu dan berupaya menjawab persoalan yang berbeda. Oleh sebab itu, perkembangan teori gerakan sosial lebih tepat dipahami sebagai evolusi paradigma yang saling melengkapi sekaligus saling mengkritik daripada sebagai rangkaian teori yang saling menggantikan.

1. Teori Perilaku Kolektif (*Collective Behavior Theory*)

Kajian modern mengenai gerakan sosial berakar pada teori perilaku kolektif yang berkembang pada pertengahan abad ke-20. Tradisi ini dipengaruhi oleh pemikiran psikologi massa Gustave Le Bon (1895), kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Neil J. Smelser (1962). Gerakan sosial dipandang sebagai bentuk perilaku kolektif yang muncul ketika struktur sosial mengalami ketegangan (*structural strain*), norma

kehilangan efektivitas, dan masyarakat menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian.

Dalam perspektif ini, mobilisasi massa dipahami sebagai respons terhadap disorganisasi sosial. Ketidakpuasan yang meluas menciptakan kondisi psikologis yang mendorong individu bergabung dalam aksi kolektif. Smelser (1962) mengidentifikasi enam prasyarat yang memungkinkan lahirnya gerakan sosial, meliputi kondusivitas struktural, tekanan struktural, berkembangnya keyakinan umum, faktor pemicu, mobilisasi peserta, dan lemahnya kontrol sosial.

Kontribusi utama teori ini terletak pada kemampuannya menjelaskan hubungan antara krisis sosial dan munculnya mobilisasi masyarakat. Namun, berbagai penelitian kemudian menunjukkan keterbatasannya. Pendekatan ini terlalu menekankan spontanitas, sehingga kurang memperhatikan kapasitas organisasi, kepemimpinan, strategi politik, serta kemampuan aktor dalam merencanakan tindakan kolektif. Kritik tersebut menjadi titik awal lahirnya paradigma baru yang lebih menempatkan masyarakat sebagai aktor rasional.

2. Teori Deprivasi Relatif (*Relative Deprivation Theory*)

Pada dekade 1960-an, perhatian ilmuwan bergeser menuju persepsi ketidakadilan sebagai faktor pendorong mobilisasi. Ted Robert Gurr (1970) berpendapat bahwa gerakan sosial muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata yang mereka alami. Ketimpangan tersebut melahirkan rasa frustrasi

yang berkembang menjadi kemarahan kolektif dan akhirnya mendorong tindakan politik.

Pendekatan ini menjelaskan mengapa kemiskinan absolut tidak selalu menghasilkan pemberontakan, sedangkan kelompok yang mengalami penurunan kesejahteraan relatif justru lebih sering melakukan perlawanan. Meski demikian, penelitian empiris memperlihatkan bahwa rasa ketidakpuasan belum tentu berkembang menjadi gerakan sosial. Banyak masyarakat hidup dalam kondisi yang sangat timpang tanpa menghasilkan mobilisasi kolektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidakpuasan merupakan kondisi yang diperlukan, tetapi belum cukup untuk menjelaskan lahirnya suatu gerakan.

3. Teori Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*)

Perubahan paling signifikan terjadi melalui karya McCarthy dan Zald (1977). Mereka menggeser fokus analisis dari penyebab psikologis menuju kapasitas organisasi. Gerakan sosial dipandang sebagai aktivitas rasional yang memerlukan kepemimpinan, jaringan, pendanaan, legitimasi, media komunikasi, dan dukungan institusional.

Paradigma ini mengubah cara ilmuwan memahami aksi kolektif. Keberhasilan suatu gerakan tidak lagi diukur berdasarkan intensitas ketidakpuasan masyarakat, melainkan kemampuan mengorganisasi berbagai sumber daya yang tersedia. Organisasi gerakan diperlakukan layaknya institusi yang mengembangkan strategi,

membangun aliansi, serta mengelola konflik secara sistematis.

Meskipun memberi kontribusi besar terhadap analisis organisasi gerakan, teori ini sering dikritik karena terlalu menekankan aspek material dan manajerial. Budaya, emosi, identitas, simbol, serta nilai-nilai yang membentuk solidaritas kolektif memperoleh perhatian yang relatif terbatas.

4. Teori Proses Politik (*Political Process Theory*)

Douglas McAdam (1982) memperluas perspektif sebelumnya dengan menunjukkan bahwa peluang politik memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lahirnya gerakan sosial. Menurutnya, organisasi yang kuat tidak akan berkembang apabila sistem politik tertutup, sementara kelompok dengan sumber daya terbatas dapat memperoleh keberhasilan ketika struktur kekuasaan mengalami perubahan.

Sidney Tarrow (2022) kemudian memperjelas konsep *political opportunity structure* sebagai perubahan dalam konfigurasi politik yang membuka ruang bagi tindakan kolektif, seperti melemahnya legitimasi pemerintah, munculnya konflik antarelite, perubahan kebijakan negara, atau meningkatnya akses terhadap partisipasi politik.

Pendekatan ini berhasil menjelaskan mengapa gerakan sosial sering berkembang pada periode transisi politik, revolusi, maupun demokratisasi. Namun demikian, konsep peluang politik sering dianggap terlalu

luas sehingga sulit diukur secara konsisten dalam berbagai konteks sejarah.

5. Teori *Framing*

Sejak akhir 1980-an, perhatian ilmuwan mulai bergeser menuju dimensi budaya. Snow dan Benford (1988) memperkenalkan teori framing untuk menjelaskan bagaimana aktor gerakan membangun makna bersama terhadap suatu persoalan. Menurut mereka, masyarakat tidak otomatis tergerak oleh fakta objektif. Mobilisasi berkembang ketika suatu isu berhasil didefinisikan sebagai persoalan publik yang mendesak serta layak diperjuangkan.

Framing mencakup tiga proses utama, yaitu *diagnostic framing* (mengidentifikasi masalah), *prognostic framing* (merumuskan solusi), dan *motivational framing* (membangun dorongan untuk bertindak). Perspektif ini menunjukkan bahwa narasi, simbol, bahasa, dan representasi memiliki posisi strategis dalam membangun solidaritas.

Pendekatan *framing* memperkaya studi gerakan sosial karena menjelaskan bagaimana identitas dan budaya membentuk tindakan kolektif. Walaupun demikian, sejumlah peneliti mengingatkan bahwa fokus yang terlalu besar pada konstruksi makna dapat mengurangi perhatian terhadap ketimpangan ekonomi dan struktur kekuasaan yang tetap memengaruhi kehidupan masyarakat.

6. Teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement Theory*)

Perubahan masyarakat pascaindustri mendorong lahirnya paradigma baru yang dikembangkan oleh Alain Touraine (1981) dan Alberto Melucci (1996). Mereka mengamati bahwa gerakan kontemporer semakin banyak berorientasi pada lingkungan hidup, feminisme, hak asasi manusia, perdamaian, identitas budaya, serta keberagaman sosial.

Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa konflik sosial tidak lagi didominasi persoalan kelas sebagaimana dijelaskan oleh tradisi Marxis klasik. Perebutan makna, pengakuan identitas, kualitas hidup, dan kontrol terhadap produksi pengetahuan menjadi arena perjuangan yang semakin menentukan dalam masyarakat modern.

Walaupun demikian, pemisahan antara gerakan lama dan gerakan baru sering diperdebatkan. Banyak penelitian memperlihatkan bahwa isu identitas tetap berkaitan erat dengan distribusi sumber daya, ketimpangan ekonomi, dan relasi kekuasaan. Dengan demikian, kedua dimensi tersebut lebih tepat dipahami sebagai spektrum yang saling beririsan daripada kategori yang sepenuhnya terpisah.

7. Pendekatan *Contentious Politics* dan Gerakan Sosial Digital

Perkembangan teori mutakhir semakin menekankan pentingnya hubungan dinamis antara negara, masyarakat,

dan jaringan transnasional. Tilly dan Tarrow (2015) memperkenalkan konsep contentious politics untuk menjelaskan berbagai bentuk kontestasi politik yang melibatkan aksi kolektif, mulai dari demonstrasi, revolusi, pemberontakan, hingga gerakan sipil. Fokus analisis bergeser dari organisasi menuju proses interaksi yang terus berubah antara berbagai aktor sosial.

Transformasi berikutnya dipicu oleh revolusi digital. Castells (2013) menunjukkan bahwa internet telah membentuk pola mobilisasi baru melalui jaringan komunikasi horizontal yang melampaui batas geografis. Informasi bergerak secara cepat, kepemimpinan menjadi lebih terdesentralisasi, dan solidaritas dapat dibangun dalam skala global. Fenomena seperti *Arab Spring*, *Black Lives Matter*, dan *MeToo* memperlihatkan bagaimana ruang digital menjadi arena penting bagi produksi wacana, mobilisasi massa, serta pembentukan opini publik.

Walaupun menawarkan peluang demokratisasi yang luas, gerakan digital memunculkan persoalan baru berupa polarisasi, disinformasi, pengawasan digital, hingga slacktivism, yaitu bentuk partisipasi simbolik yang memiliki dampak politik terbatas (Morozov, 2011). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi memperluas kapasitas mobilisasi sekaligus menciptakan tantangan baru bagi keberlanjutan aksi kolektif.

Secara keseluruhan, perkembangan teori gerakan sosial memperlihatkan pergeseran dari penjelasan yang berpusat pada krisis sosial menuju pendekatan yang mengintegrasikan organisasi, peluang politik, konstruksi budaya, identitas, jaringan, dan teknologi digital. Evolusi

tersebut memperkaya pemahaman mengenai gerakan sosial sebagai proses historis yang dibentuk oleh interaksi antara struktur, agensi, makna, serta perubahan konteks global. Bagi kajian sejarah sosial, kerangka teoritis ini menjadi landasan untuk menjelaskan mengapa pola gerakan masyarakat terus berubah dari dunia kuno hingga era digital tanpa kehilangan fungsinya sebagai salah satu penggerak utama transformasi sosial.

C. Gerakan Sosial Dunia Kuno

Gerakan sosial sering diasosiasikan dengan perkembangan masyarakat modern, terutama setelah Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Pandangan tersebut kurang mencerminkan realitas sejarah. Bukti-bukti arkeologis, historiografi klasik, dan kajian sejarah komparatif menunjukkan bahwa tindakan kolektif telah hadir sejak peradaban kuno sebagai respons terhadap dominasi politik, eksploitasi ekonomi, ketimpangan sosial, maupun perubahan keagamaan. Bentuk organisasinya memang berbeda dari gerakan sosial kontemporer karena belum memiliki organisasi formal, ideologi yang sistematis, ataupun jaringan komunikasi yang luas. Meskipun demikian, berbagai aksi kolektif pada masa kuno memperlihatkan unsur-unsur dasar gerakan sosial berupa solidaritas kelompok, kepemimpinan, tujuan bersama, dan upaya mengubah hubungan kekuasaan (Tilly & Tarrow, 2015).

1. Pemberontakan Budak di Romawi

Perbudakan merupakan salah satu fondasi utama ekonomi Kekaisaran Romawi. Jutaan budak bekerja di

sektor pertanian, pertambangan, rumah tangga, dan militer tanpa memiliki hak hukum maupun kebebasan pribadi. Sistem tersebut menghasilkan produktivitas ekonomi yang tinggi, tetapi pada saat yang sama menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Ketika eksploitasi mencapai tingkat tertentu, berbagai bentuk perlawanan berkembang, mulai dari pelarian individu hingga pemberontakan bersenjata berskala besar (Bradley, 1989; Tatum, 1991).

Dalam perspektif sejarah sosial, pemberontakan budak mencerminkan konflik struktural antara kelompok yang menguasai sumber daya dan kelompok yang mengalami subordinasi. Hubungan kekuasaan dibangun melalui kekerasan, sementara stabilitas politik bergantung pada kemampuan negara mempertahankan sistem tersebut. Oleh karena itu, setiap pemberontakan budak memiliki makna yang melampaui persoalan militer karena menggugat legitimasi tatanan sosial Romawi.

2. Pemberontakan Spartacus

Pemberontakan Spartacus (73–71 SM) merupakan salah satu gerakan sosial paling terkenal dalam dunia kuno. Spartacus, seorang gladiator keturunan Thrakia, memimpin pelarian sekitar tujuh puluh budak dari sekolah gladiator di Capua. Dalam waktu singkat, gerakan tersebut berkembang menjadi pasukan yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang dan berhasil mengalahkan beberapa legiun Romawi sebelum akhirnya dihancurkan oleh pasukan Marcus Licinius Crassus (Cowan, 2017).

Penafsiran terhadap pemberontakan Spartacus berkembang cukup dinamis. Sejarawan klasik menggambarkan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara Romawi. Sebaliknya, historiografi modern menempatkan Spartacus sebagai simbol perjuangan melawan penindasan sosial. Bradley (1989) mengingatkan bahwa interpretasi tersebut perlu dilakukan secara hati-hati karena bukti sejarah tidak menunjukkan adanya program politik yang terstruktur untuk membangun tatanan masyarakat baru (Tatum, 1991). Tujuan utama gerakan ini kemungkinan lebih dekat pada upaya memperoleh kebebasan daripada menggulingkan Kekaisaran Romawi.

Pandangan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara simbol historis dan realitas historis. Spartacus memang berkembang menjadi ikon perjuangan kaum tertindas, terutama dalam tradisi Marxis pada abad ke-19 dan ke-20. Namun, makna simbolik yang lahir kemudian tidak selalu identik dengan tujuan awal gerakan tersebut. Dari perspektif sejarah sosial, pemberontakan Spartacus memperlihatkan bahwa identitas kolektif dapat terbentuk melalui pengalaman eksploitasi yang sama, meskipun berasal dari latar belakang etnis, bahasa, dan wilayah yang berbeda.

3. Pemberontakan Petani di Tiongkok

Perlawanan petani merupakan fenomena yang berulang dalam sejarah Tiongkok kuno. Sistem agraria yang bertumpu pada pajak tinggi, kerja paksa, konsentrasi kepemilikan tanah, serta korupsi birokrasi sering memicu

mobilisasi masyarakat pedesaan. Salah satu contoh penting ialah Pemberontakan Serban Kuning (*Yellow Turban Rebellion*) pada tahun 184 M yang dipimpin Zhang Jue pada akhir Dinasti Han Timur (Lewis, 2007).

Gerakan tersebut berkembang melalui perpaduan antara ketidakpuasan ekonomi dan keyakinan religius. Ajaran Taoisme memberikan legitimasi moral terhadap perubahan politik melalui gagasan bahwa Dinasti Han telah kehilangan *Mandate of Heaven*. Konsep tersebut memiliki pengaruh besar dalam tradisi politik Tiongkok karena menghubungkan legitimasi kekuasaan dengan kesejahteraan rakyat. Ketika pemerintah dianggap gagal memenuhi tanggung jawabnya, pemberontakan memperoleh justifikasi moral sebagai sarana memulihkan keseimbangan kosmis (Ebrey, 2010).

Pengalaman Tiongkok memperlihatkan bahwa gerakan sosial agraris tidak dapat dijelaskan semata melalui kemiskinan. Faktor budaya, agama, struktur birokrasi, dan legitimasi politik membentuk konfigurasi yang mendorong masyarakat melakukan tindakan kolektif. Temuan ini sejalan dengan perkembangan teori gerakan sosial modern yang menempatkan identitas, nilai, dan konstruksi makna sebagai bagian penting dari proses mobilisasi.

4. Gerakan Keagamaan Awal

Agama menjadi salah satu sumber mobilisasi sosial paling berpengaruh dalam sejarah dunia kuno. Kemunculan agama Kristen pada abad pertama Masehi merupakan contoh yang sering dibahas dalam sejarah

sosial. Pada tahap awal, komunitas Kristen berkembang sebagai kelompok minoritas yang menawarkan nilai kesetaraan spiritual, solidaritas komunitas, dan kritik terhadap praktik kekuasaan yang dianggap bertentangan dengan ajaran moral. Kondisi tersebut memunculkan ketegangan dengan otoritas Romawi yang memandang komunitas baru tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan kultus kekaisaran (Stark, 1996).

Dalam perspektif sosiologi sejarah, penyebaran agama Kristen tidak berlangsung semata karena doktrin teologis, melainkan dipengaruhi oleh jaringan sosial yang luas, hubungan antarkomunitas, mobilitas penduduk, dan kemampuan membangun solidaritas di tengah masyarakat perkotaan Kekaisaran Romawi. Analisis Stark (1996) menunjukkan bahwa jaringan interpersonal memiliki peran penting dalam mempercepat penyebaran gerakan keagamaan, jauh sebelum konsep mobilisasi sumber daya dirumuskan dalam teori gerakan sosial modern.

Fenomena serupa juga dapat ditemukan pada berbagai gerakan keagamaan di Timur Tengah, India, maupun Asia Timur. Dalam banyak kasus, agama berfungsi sebagai sumber legitimasi moral yang memperkuat solidaritas kolektif, mengartikulasikan kritik terhadap ketidakadilan, serta membangun harapan mengenai tatanan sosial yang lebih adil.

Gerakan sosial dunia kuno memperlihatkan bahwa tindakan kolektif telah menjadi bagian integral dari perkembangan peradaban manusia. Perbudakan, ketimpangan agraria, dominasi politik, dan perubahan

keyakinan merupakan faktor yang berulang dalam berbagai wilayah dengan bentuk ekspresi yang berbeda. Perbedaan konteks sejarah menghasilkan variasi strategi perjuangan, sedangkan pola dasarnya tetap memperlihatkan hubungan antara ketimpangan struktur sosial, pembentukan solidaritas, kepemimpinan, dan pencarian legitimasi.

Dari perspektif sejarah sosial, gerakan-gerakan tersebut belum dapat disamakan sepenuhnya dengan gerakan sosial modern karena belum berkembang organisasi permanen, ideologi politik yang sistematis, maupun ruang publik sebagaimana dikenal saat ini. Meski demikian, pengalaman dunia kuno menunjukkan bahwa masyarakat selalu memiliki kapasitas untuk merespons ketidakadilan melalui tindakan kolektif. Kesenambungan inilah yang menjelaskan mengapa gerakan sosial tetap hadir dalam berbagai periode sejarah dengan bentuk, aktor, dan tujuan yang terus mengalami transformasi mengikuti perubahan struktur masyarakat.

D. Gerakan Sosial Abad Pertengahan

Abad Pertengahan merupakan periode yang sering dipersepsikan sebagai masa stagnasi sosial akibat dominasi sistem feodal dan kuatnya pengaruh institusi keagamaan. Penilaian tersebut semakin banyak dipertanyakan dalam kajian sejarah modern. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa masyarakat abad pertengahan mengalami perubahan yang dinamis, ditandai oleh pertumbuhan kota, perkembangan perdagangan, transformasi ekonomi agraris, serta meningkatnya intensitas konflik antara masyarakat

dengan elite politik maupun keagamaan. Dalam konteks tersebut, gerakan sosial berkembang sebagai respons terhadap perubahan struktur ekonomi, distribusi kekuasaan, dan pencarian legitimasi moral dalam kehidupan publik (Hilton, 1973; Wickham, 2005).

Berbeda dari gerakan pada dunia kuno yang banyak dipicu oleh sistem perbudakan, konflik sosial pada abad pertengahan lebih sering berkaitan dengan hubungan feodal. Kepemilikan tanah menjadi sumber utama kekuasaan, sedangkan sebagian besar penduduk hidup sebagai petani yang terikat pada kewajiban kerja, pembayaran pajak, dan berbagai bentuk pelayanan kepada tuan tanah. Ketimpangan tersebut menciptakan ruang bagi munculnya aksi kolektif yang menuntut perubahan terhadap hubungan sosial yang dianggap semakin membebani kehidupan masyarakat pedesaan.

1. Gerakan Petani di Eropa

Salah satu bentuk gerakan sosial paling menonjol pada abad pertengahan ialah pemberontakan petani. Gerakan ini berkembang di berbagai wilayah Eropa dengan karakteristik yang berbeda sesuai konteks lokal. Contoh yang paling banyak dikaji adalah *English Peasants' Revolt* tahun 1381 dan *German Peasants' War* tahun 1524–1525, meskipun konflik terakhir telah memasuki awal periode modern (Hilton, 1973).

Pemberontakan Petani Inggris dipicu oleh kombinasi tekanan ekonomi, pajak yang meningkat akibat Perang Seratus Tahun, serta perubahan hubungan kerja setelah pandemi Black Death. Berkurangnya jumlah

tenaga kerja meningkatkan posisi tawar petani, sementara pemerintah berupaya mempertahankan struktur feodal melalui pembatasan upah dan mobilitas penduduk. Ketegangan tersebut berkembang menjadi mobilisasi besar yang dipimpin Wat Tyler dan didukung oleh khotbah radikal John Ball, yang mempertanyakan legitimasi hierarki sosial melalui gagasan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan (Dobson, 1983).

Dari perspektif sejarah sosial, gerakan ini mencerminkan perubahan dalam kesadaran politik masyarakat pedesaan. Tuntutan yang diajukan tidak sekadar berkaitan dengan pengurangan pajak, melainkan menyentuh persoalan hak, kebebasan, dan keadilan sosial. Walaupun pemberontakan berhasil dipadamkan, pemerintah secara bertahap menghadapi kesulitan mempertahankan sistem feodal dalam bentuk sebelumnya. Dengan demikian, dampak historis gerakan tersebut jauh melampaui hasil politik jangka pendek.

2. Gerakan Keagamaan sebagai Kritik Sosial

Institusi keagamaan memiliki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat abad pertengahan. Gereja mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, moralitas, hingga legitimasi politik. Dominasi tersebut melahirkan berbagai gerakan keagamaan yang berupaya mengoreksi praktik-praktik yang dianggap menyimpang dari ajaran agama.

Gerakan *Waldensian* pada abad ke-12 dan *Lollard* di Inggris pada abad ke-14 merupakan contoh penting kritik terhadap akumulasi kekayaan gereja, korupsi

rohaniwan, dan pembatasan akses masyarakat terhadap ajaran keagamaan (Lambert, 2002). Kelompok-kelompok tersebut menekankan kehidupan sederhana, pembacaan kitab suci dalam bahasa lokal, serta hubungan langsung antara individu dan Tuhan.

Dalam historiografi lama, gerakan-gerakan tersebut sering diposisikan sebagai penyimpangan doktrinal. Kajian sejarah sosial memberikan pembacaan yang lebih luas. Kritik terhadap institusi keagamaan berkaitan erat dengan perubahan ekonomi, berkembangnya kota, meningkatnya literasi, serta munculnya kelompok sosial baru yang menginginkan ruang partisipasi lebih besar dalam kehidupan keagamaan dan politik. Dengan demikian, agama berfungsi sebagai bahasa moral yang mengartikulasikan tuntutan sosial, sementara konflik yang berkembang melibatkan persoalan distribusi otoritas, pengetahuan, dan legitimasi kekuasaan.

3. Reformasi Sosial dan Perubahan Struktur Masyarakat

Menjelang akhir abad pertengahan, perubahan sosial berlangsung semakin intensif. Pertumbuhan perdagangan internasional, berkembangnya kota-kota dagang, munculnya kelas menengah, serta meningkatnya mobilitas penduduk mengubah keseimbangan antara aristokrasi feodal, gereja, dan masyarakat. Kondisi tersebut melahirkan berbagai gagasan reformasi yang kemudian membuka jalan menuju transformasi besar pada awal era modern.

Salah satu momentum penting adalah Reformasi Protestan yang dipelopori Martin Luther pada tahun 1517. Meskipun sering dibahas sebagai gerakan keagamaan, reformasi tersebut memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Kritik terhadap praktik indulgensi berkembang menjadi perdebatan mengenai otoritas gereja, kebebasan berkeyakinan, pendidikan, dan hubungan antara negara dengan agama (MacCulloch, 2004).

Max Weber (2002) kemudian menunjukkan bahwa perubahan nilai keagamaan berkontribusi terhadap berkembangnya etos kerja, rasionalitas ekonomi, dan transformasi masyarakat Eropa menuju kapitalisme modern. Interpretasi Weber memicu perdebatan panjang karena sejumlah sejarawan menilai bahwa perkembangan kapitalisme telah dimulai sebelum Reformasi. Meskipun demikian, perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sosial pada akhir abad pertengahan tidak dapat dijelaskan melalui satu faktor tunggal. Interaksi antara ekonomi, agama, politik, dan budaya membentuk proses transformasi yang kompleks.

Gerakan sosial pada abad pertengahan memperlihatkan perubahan penting dibandingkan periode sebelumnya. Konflik sosial tidak lagi didominasi oleh perlawanan terhadap perbudakan, melainkan berkembang dalam konteks masyarakat feodal yang ditandai oleh hubungan patronase, kepemilikan tanah, dan otoritas keagamaan. Perubahan struktur ekonomi menciptakan kelompok-kelompok sosial baru dengan kepentingan yang semakin beragam, sementara meningkatnya literasi dan jaringan perdagangan

mempercepat penyebaran gagasan mengenai keadilan, hak, dan legitimasi kekuasaan.

Dari perspektif teori gerakan sosial, berbagai peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa mobilisasi kolektif lahir melalui interaksi antara tekanan struktural, peluang politik, jaringan sosial, dan konstruksi makna. Para petani memanfaatkan solidaritas komunitas pedesaan, para pemimpin agama membangun legitimasi melalui bahasa moral, sedangkan perubahan ekonomi memperluas ruang bagi lahirnya aktor-aktor sosial baru. Dinamika tersebut menjadi fondasi bagi berbagai revolusi politik, gerakan buruh, dan gerakan demokrasi yang berkembang pada era modern. Dengan kata lain, abad pertengahan merupakan fase transisional yang membentuk pola hubungan antara masyarakat dan kekuasaan yang terus berkembang hingga masa kontemporer.

E. Gerakan Sosial Era Modern

Era modern menandai perubahan mendasar dalam sejarah gerakan sosial. Sejak akhir abad ke-18, dunia mengalami transformasi yang mengubah hubungan antara negara, masyarakat, ekonomi, dan individu. Revolusi politik menggugat legitimasi monarki absolut, industrialisasi menggeser struktur ekonomi agraris menuju kapitalisme industri, sementara lahirnya negara-bangsa membentuk identitas politik baru. Perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk gerakan sosial yang semakin terorganisasi, memiliki orientasi ideologis yang jelas, serta mampu memengaruhi pembentukan institusi politik modern. Dalam

konteks inilah gerakan sosial berkembang dari aksi lokal yang bersifat sporadis menjadi kekuatan politik yang mampu mengubah struktur masyarakat dalam skala nasional bahkan global (Tilly, 2004).

1. Revolusi Amerika

Revolusi Amerika (1775–1783) sering dipandang sebagai tonggak lahirnya demokrasi konstitusional modern. Konflik antara tiga belas koloni Inggris di Amerika Utara dan pemerintah Inggris dipicu oleh persoalan perpajakan, representasi politik, serta pembatasan otonomi kolonial. Slogan *No Taxation Without Representation* mencerminkan tuntutan terhadap hak politik yang dianggap melekat pada setiap warga negara (Wood, 1992).

Dari perspektif sejarah sosial, Revolusi Amerika memperlihatkan perubahan penting dalam konsep legitimasi kekuasaan. Otoritas politik tidak lagi dipahami sebagai hak turun-temurun yang bersumber dari monarki, melainkan berasal dari persetujuan rakyat. Gagasan John Locke mengenai hak kodrati (*natural rights*) memberikan dasar filosofis bagi perubahan tersebut. Meskipun demikian, revolusi ini belum sepenuhnya menghadirkan kesetaraan sosial. Perbudakan masih dipertahankan di banyak wilayah, hak politik perempuan belum diakui, dan masyarakat adat tetap berada di luar struktur kewarganegaraan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi modern berkembang melalui proses yang bertahap dan penuh kontradiksi (Nash, 2005).

2. Revolusi Prancis

Jika Revolusi Amerika memperjuangkan kemerdekaan kolonial, Revolusi Prancis (1789) mengguncang fondasi masyarakat feodal Eropa. Krisis fiskal, ketimpangan sosial, serta monopoli politik kaum bangsawan dan gereja menciptakan kondisi yang mendorong mobilisasi masyarakat. Deklarasi *Rights of Man and of the Citizen* menegaskan prinsip kebebasan, persamaan, dan kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi negara modern (Doyle, 2018).

Pengaruh Revolusi Prancis melampaui batas wilayah Prancis. Ide mengenai kewarganegaraan, hak sipil, dan partisipasi politik menyebar ke berbagai kawasan melalui perang, diplomasi, maupun pertukaran intelektual. Pada saat yang sama, revolusi ini memperlihatkan kompleksitas perubahan sosial. Fase Teror (*Reign of Terror*) memperlihatkan bagaimana perjuangan atas nama kebebasan dapat berubah menjadi kekerasan politik ketika kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bahwa perubahan sosial selalu melibatkan tarik-menarik antara idealisme dan praktik kekuasaan.

3. Revolusi Industri

Revolusi Industri yang berkembang di Inggris sejak akhir abad ke-18 mengubah struktur ekonomi dunia secara fundamental. Produksi berbasis mesin meningkatkan produktivitas, mempercepat urbanisasi, dan melahirkan kelas pekerja industri dalam jumlah besar. Bersamaan

dengan itu, hubungan kerja menjadi semakin impersonal karena didasarkan pada mekanisme pasar dan kepemilikan modal (Hobsbawm, 1962).

Karl Polanyi (1944) menilai bahwa kapitalisme industri menciptakan proses *disembedding*, yaitu terlepasnya aktivitas ekonomi dari hubungan sosial tradisional. Tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas yang diperdagangkan melalui mekanisme pasar. Perubahan tersebut meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghasilkan jam kerja panjang, upah rendah, pekerjaan anak, dan kondisi kerja yang membahayakan. Situasi inilah yang kemudian melahirkan berbagai bentuk perlawanan kolektif dari kalangan pekerja.

4. Gerakan Buruh

Gerakan buruh berkembang sebagai respons terhadap konsekuensi sosial industrialisasi. Pada tahap awal, aksi protes diwujudkan melalui penghancuran mesin oleh kelompok Luddite di Inggris pada awal abad ke-19. Gerakan tersebut sering dipahami sebagai penolakan terhadap teknologi, padahal sasaran utamanya adalah sistem produksi yang menghilangkan mata pencaharian dan memperburuk kondisi kerja (Thompson, 1963).

Perkembangan berikutnya ditandai oleh pembentukan serikat pekerja (*trade unions*), pemogokan massal, dan tuntutan terhadap perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Isu yang diperjuangkan mencakup pembatasan jam kerja, peningkatan upah, keselamatan kerja, serta hak berorganisasi. Gerakan buruh kemudian menjadi salah satu aktor utama dalam pembentukan

negara kesejahteraan (*welfare state*) di berbagai negara Eropa pada abad ke-20. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa hak-hak pekerja merupakan hasil perjuangan sosial yang panjang, bukan sekadar produk kebijakan pemerintah.

5. Sosialisme sebagai Gerakan Emansipasi

Industrialisasi juga melahirkan kritik intelektual terhadap kapitalisme. Karl Marx dan Friedrich Engels (1848/2010) berpendapat bahwa sejarah masyarakat merupakan sejarah pertentangan kelas antara mereka yang menguasai alat produksi dan mereka yang menjual tenaga kerja. Dalam kerangka tersebut, gerakan buruh dipandang sebagai kekuatan historis yang berpotensi mentransformasikan sistem kapitalisme menuju masyarakat tanpa kelas.

Pemikiran Marx memberi pengaruh besar terhadap perkembangan gerakan sosial pada abad ke-19 dan ke-20. Walaupun demikian, implementasi sosialisme berkembang dalam berbagai bentuk. Tradisi sosial demokrasi di Eropa Barat lebih menekankan reformasi melalui mekanisme parlementer, sedangkan revolusi di Rusia dan Tiongkok menempuh jalur yang berbeda dengan menempatkan negara sebagai aktor utama perubahan. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa sosialisme bukanlah gagasan yang tunggal, melainkan spektrum pemikiran yang terus berkembang sesuai konteks sejarah masing-masing negara (Kolakowski, 1978).

6. Nasionalisme

Modernitas juga melahirkan nasionalisme sebagai salah satu gerakan sosial paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Benedict Anderson (2006) menjelaskan bangsa sebagai *imagined community*, yaitu komunitas politik yang dibangun melalui kesadaran kolektif, bahasa, pendidikan, media cetak, dan pengalaman sejarah bersama. Perspektif ini menunjukkan bahwa identitas nasional merupakan konstruksi historis yang terus mengalami pembentukan.

Pada abad ke-19, nasionalisme menjadi kekuatan yang mendorong penyatuan Jerman dan Italia sekaligus menginspirasi berbagai gerakan antikolonial di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di sisi lain, nasionalisme juga memiliki sisi paradoks. Semangat pembebasan mampu berubah menjadi ekspansi politik, eksklusivisme etnis, bahkan konflik internasional ketika identitas nasional diposisikan secara sempit. Oleh karena itu, sejarah nasionalisme memperlihatkan bahwa suatu ideologi dapat menjadi sarana emansipasi maupun instrumen dominasi, bergantung pada bagaimana gagasan tersebut diartikulasikan dalam praktik politik.

Gerakan sosial era modern memperlihatkan perubahan mendasar dalam karakter tindakan kolektif. Revolusi politik memperluas konsep kewarganegaraan, industrialisasi membentuk kelas sosial baru, gerakan buruh memperjuangkan keadilan ekonomi, sosialisme menawarkan kritik sistemik terhadap kapitalisme, sedangkan nasionalisme membangun identitas politik yang melampaui ikatan feodal.

Keseluruhan proses tersebut menunjukkan bahwa modernitas bukan sekadar perkembangan teknologi atau pertumbuhan ekonomi, melainkan arena kontestasi gagasan mengenai kebebasan, kesetaraan, hak, dan legitimasi kekuasaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, periode modern menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan sosial kontemporer. Organisasi yang semakin mapan, ideologi yang lebih sistematis, media massa yang berkembang pesat, serta meningkatnya partisipasi publik menciptakan bentuk mobilisasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Perubahan tersebut menandai transisi menuju masyarakat modern yang menjadikan gerakan sosial sebagai salah satu mekanisme utama dalam proses demokratisasi dan perubahan sosial.

F. Gerakan Sosial Abad XX

Abad ke-20 merupakan periode yang mengubah lanskap gerakan sosial secara fundamental. Dua perang dunia, dekolonisasi, Perang Dingin, pertumbuhan negara kesejahteraan, perluasan pendidikan, serta kemajuan media massa membentuk ruang politik yang berbeda dari abad sebelumnya. Mobilisasi masyarakat tidak lagi didominasi oleh tuntutan ekonomi dan konflik kelas sebagaimana terlihat pada masa industrialisasi. Perjuangan mulai diarahkan pada kesetaraan ras, hak perempuan, demokrasi, kebebasan sipil, perlindungan lingkungan, serta pengakuan terhadap martabat manusia. Perubahan orientasi tersebut menunjukkan bahwa gerakan sosial berkembang mengikuti transformasi struktur

masyarakat dan perluasan makna keadilan dalam kehidupan modern (Tarrow, 2022).

1. Civil Rights Movement

Salah satu gerakan sosial paling berpengaruh pada abad ke-20 adalah *Civil Rights Movement* di Amerika Serikat. Gerakan ini berkembang pada dekade 1950-an hingga 1960-an sebagai respons terhadap segregasi rasial yang dilegalkan melalui berbagai kebijakan diskriminatif di negara-negara bagian selatan. Putusan *Brown v. Board of Education* (1954), aksi boikot bus Montgomery, demonstrasi damai, serta *March on Washington* tahun 1963 menjadi tonggak penting dalam perjuangan tersebut (Branch, 1988).

Kepemimpinan Martin Luther King Jr. memperkenalkan strategi perlawanan tanpa kekerasan yang dipengaruhi oleh pemikiran Mahatma Gandhi. Pendekatan ini menempatkan legitimasi moral sebagai sumber kekuatan politik. Tujuannya bukan menghancurkan lawan, melainkan mengubah kesadaran publik melalui aksi damai yang memperlihatkan ketidakadilan secara terbuka.

Keberhasilan gerakan ini mendorong lahirnya *Civil Rights Act* (1964) dan *Voting Rights Act* (1965). Meski demikian, kesetaraan hukum tidak secara otomatis menghapus ketimpangan sosial. Kajian sejarah menunjukkan bahwa diskriminasi rasial tetap bertahan dalam bentuk yang lebih kompleks melalui kesenjangan ekonomi, pendidikan, perumahan, maupun sistem peradilan pidana (Morris, 1984). Temuan tersebut

memperlihatkan bahwa perubahan institusi memerlukan transformasi budaya dan struktur sosial secara lebih luas.

2. Gerakan Feminisme

Gerakan feminisme berkembang melalui beberapa gelombang yang memiliki fokus berbeda sesuai konteks zamannya. Gelombang pertama pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 berpusat pada hak politik, terutama hak memilih (*women's suffrage*). Gelombang kedua pada dekade 1960–1980 memperluas agenda menuju kesetaraan di bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan reproduksi, dan kehidupan keluarga. Gelombang berikutnya menghadirkan perhatian terhadap keberagaman identitas, pengalaman perempuan, dan hubungan antara gender dengan ras, kelas sosial, maupun budaya (Evans, 2015).

Simone de Beauvoir (1949/2011) memberikan kontribusi penting melalui gagasan bahwa identitas perempuan dibentuk oleh konstruksi sosial, bukan oleh kodrat biologis semata. Pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi landasan berbagai penelitian mengenai relasi gender dan kekuasaan.

Dalam perspektif sejarah sosial, feminisme merupakan proses panjang yang memperluas definisi kewarganegaraan. Perjuangannya melampaui akses terhadap hak politik dan memasuki wilayah representasi, distribusi sumber daya, serta pengakuan terhadap pengalaman hidup perempuan sebagai bagian dari sejarah manusia. Dinamika internal feminisme sendiri memperlihatkan adanya perdebatan mengenai strategi

perjuangan, konsep kesetaraan, serta hubungan antara pengalaman perempuan di negara maju dan negara berkembang.

3. Gerakan Anti-Apartheid

Afrika Selatan menjadi salah satu contoh paling jelas mengenai perjuangan melawan diskriminasi yang dilembagakan oleh negara. Kebijakan apartheid sejak 1948 memisahkan penduduk berdasarkan kategori ras dan membatasi hak politik mayoritas penduduk kulit hitam. Kondisi tersebut melahirkan gerakan yang dipimpin oleh berbagai organisasi, terutama *African National Congress* (ANC), dengan tokoh sentral Nelson Mandela (Mandela, 1994).

Perjuangan anti-apartheid berlangsung melalui kombinasi aksi massa, advokasi internasional, boikot ekonomi, tekanan diplomatik, dan negosiasi politik. Berakhirnya sistem apartheid pada awal 1990-an menunjukkan bahwa perubahan sosial sering lahir melalui interaksi antara tekanan domestik dan solidaritas global. Walaupun rezim apartheid berhasil dihapus, Afrika Selatan masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial yang berakar dari sejarah kolonialisme dan segregasi.

4. Gerakan Mahasiswa

Mahasiswa menjadi aktor penting dalam berbagai perubahan politik abad ke-20. Peristiwa Mei 1968 di Prancis memperlihatkan bagaimana gerakan mahasiswa mampu mengguncang legitimasi pemerintah sekaligus

memengaruhi diskursus mengenai demokrasi, pendidikan, dan kebebasan berekspresi (Ross, 2002). Mobilisasi serupa berkembang di berbagai negara dengan karakteristik yang berbeda, termasuk gerakan antiperang di Amerika Serikat, protes prodemokrasi di Korea Selatan, serta gerakan Reformasi 1998 di Indonesia.

Kekuatan utama gerakan mahasiswa terletak pada kapasitas intelektual, akses terhadap jaringan komunikasi, serta kemampuan membangun koalisi dengan kelompok masyarakat lainnya. Namun, efektivitas gerakan tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks politik, tingkat represi negara, dan keberhasilan menghubungkan agenda kampus dengan persoalan publik yang lebih luas.

5. Gerakan Lingkungan

Perhatian terhadap krisis ekologis berkembang pesat sejak terbitnya *Silent Spring* karya Rachel Carson (1962). Buku tersebut mengungkap dampak penggunaan pestisida terhadap ekosistem dan memicu perubahan cara masyarakat memahami hubungan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Gerakan lingkungan kemudian berkembang menjadi agenda global melalui Konferensi Stockholm tahun 1972, pembentukan berbagai organisasi lingkungan, serta meningkatnya perhatian terhadap perubahan iklim dan keanekaragaman hayati. Ulrich Beck (1992) menjelaskan fenomena tersebut melalui konsep *risk society*, yaitu masyarakat modern yang menghadapi risiko-risiko global sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi dan industrialisasi.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa isu lingkungan melampaui persoalan konservasi alam. Konflik ekologis berkaitan erat dengan distribusi sumber daya, hak masyarakat adat, keadilan antargenerasi, dan model pembangunan yang dianut suatu negara.

6. Gerakan Hak Asasi Manusia

Setelah Perang Dunia II, perlindungan terhadap martabat manusia memperoleh perhatian yang semakin besar. Pengesahan *Universal Declaration of Human Rights* (1948) memberikan kerangka normatif bagi berbagai gerakan yang memperjuangkan kebebasan sipil, hak politik, hak ekonomi, serta perlindungan kelompok rentan.

Perkembangan organisasi transnasional seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* memperlihatkan bahwa advokasi hak asasi manusia semakin melampaui batas negara. Di sisi lain, penerapan prinsip hak asasi manusia sering memunculkan perdebatan mengenai universalisme, relativisme budaya, kedaulatan negara, serta standar ganda dalam politik internasional (Donnelly, 2013). Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan arena kontestasi moral dan politik yang terus berkembang.

Gerakan sosial abad ke-20 memperlihatkan perluasan spektrum perjuangan masyarakat. Isu ras, gender, demokrasi, pendidikan, lingkungan, dan hak asasi manusia berkembang menjadi agenda yang memiliki pengaruh global. Perubahan tersebut mencerminkan transformasi masyarakat modern

yang semakin dipengaruhi oleh pendidikan, media massa, organisasi internasional, serta jaringan komunikasi lintas negara.

Dalam perspektif sejarah sosial, abad ke-20 menandai pergeseran penting dari mobilisasi yang berorientasi pada redistribusi ekonomi menuju perjuangan yang menggabungkan tuntutan redistribusi, pengakuan identitas, partisipasi politik, dan perlindungan hak-hak universal. Pergeseran ini tidak menghapus konflik kelas sebagaimana dijelaskan oleh tradisi Marxian, melainkan memperlihatkan bahwa ketidakadilan hadir dalam berbagai dimensi yang saling berkelindan. Evolusi tersebut menjadi fondasi bagi gerakan sosial abad ke-21 yang berkembang melalui jaringan digital, solidaritas transnasional, dan ruang publik global.

G. Gerakan Sosial Indonesia

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa gerakan sosial merupakan salah satu kekuatan utama yang membentuk perjalanan bangsa. Kolonialisme, eksploitasi ekonomi, diskriminasi politik, serta perubahan struktur sosial mendorong lahirnya berbagai bentuk mobilisasi masyarakat sejak awal abad ke-20. Dinamika tersebut berkembang melalui organisasi modern, jaringan pendidikan, media cetak, komunitas keagamaan, organisasi perempuan, gerakan mahasiswa, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan politik Indonesia tidak dapat dipahami semata melalui pergantian elite pemerintahan, melainkan melalui interaksi antara negara, masyarakat, dan berbagai kelompok sosial yang terus

memperjuangkan ruang partisipasi dalam kehidupan publik (Ricklefs, 2008).

1. Gerakan Pekerja pada Masa Kolonial

Perkembangan kapitalisme kolonial sejak akhir abad ke-19 mengubah struktur ekonomi Hindia Belanda melalui perluasan perkebunan, pertambangan, industri gula, jaringan kereta api, pelabuhan, dan birokrasi kolonial. Transformasi tersebut melahirkan kelompok pekerja upahan dalam jumlah yang semakin besar, terutama di kawasan perkotaan dan sentra produksi. Meskipun membuka kesempatan kerja baru, sistem ekonomi kolonial dibangun di atas relasi yang sangat timpang. Upah rendah, jam kerja panjang, pengawasan yang ketat, serta pembatasan hak-hak pekerja menciptakan kondisi yang mendorong lahirnya kesadaran kolektif terhadap kepentingan bersama (Furnivall, 1944).

Kesadaran tersebut berkembang seiring meningkatnya pendidikan modern, pertumbuhan pers, dan mobilitas antardaerah. Para pekerja mulai membentuk organisasi sebagai sarana memperjuangkan perbaikan kondisi kerja sekaligus menyampaikan aspirasi politik. Salah satu organisasi awal yang memiliki pengaruh besar ialah *Staatsspoor en Tramweg Personeel Bond* (SSTP), serikat pekerja pegawai kereta api yang menjadi wadah artikulasi kepentingan buruh transportasi. Kehadiran serikat-serikat pekerja menandai perubahan penting dalam pola perlawanan masyarakat. Aksi kolektif tidak lagi bergantung pada pemberontakan bersenjata, melainkan memanfaatkan organisasi, rapat umum, penerbitan surat

kabar, petisi, dan pemogokan sebagai instrumen perjuangan (Shiraishi, 1990).

Memasuki dekade 1920-an, gerakan pekerja semakin terhubung dengan organisasi politik yang berkembang di Hindia Belanda. Pengaruh gagasan sosialisme, nasionalisme, dan antikolonialisme memperluas orientasi perjuangan buruh dari persoalan kesejahteraan menuju tuntutan perubahan sistem politik kolonial. Hubungan antara organisasi buruh dengan Sarekat Islam, *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV), dan kemudian Partai Komunis Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan ekonomi dan perjuangan politik berkembang dalam ruang yang saling berkaitan (McVey, 1965). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelas pekerja menjadi salah satu aktor penting dalam pembentukan kesadaran nasional.

Pemerintah kolonial merespons perkembangan tersebut melalui pengawasan yang semakin ketat. Aktivitas organisasi buruh diawasi oleh aparat keamanan, tokoh-tokoh pergerakan ditangkap atau dibuang, sedangkan berbagai aksi pemogokan dibatasi melalui regulasi kolonial. Kebijakan represif memang mampu melemahkan sejumlah organisasi, tetapi tidak menghapus jaringan solidaritas yang telah terbentuk. Pengalaman menghadapi represi justru memperkuat kesadaran bahwa eksploitasi ekonomi berkaitan erat dengan struktur kekuasaan kolonial.

Dalam perspektif sejarah sosial, gerakan pekerja kolonial menunjukkan bahwa perubahan politik Indonesia

berakar pada dinamika masyarakat yang mengalami transformasi ekonomi. Buruh menjadi kelompok sosial yang mengembangkan identitas kolektif berdasarkan pengalaman eksploitasi, kemudian menerjemahkannya ke dalam organisasi modern dan aksi politik. Proses tersebut memperluas basis sosial nasionalisme Indonesia sekaligus memperkenalkan praktik-praktik mobilisasi massa yang kelak menjadi karakter penting berbagai gerakan sosial pada masa berikutnya (Ricklefs, 2008; Cribb, 2000).

2. Gerakan Petani Banten

Gerakan petani Banten merupakan salah satu contoh penting perlawanan masyarakat pedesaan terhadap dominasi kolonial pada akhir abad ke-19. Pemberontakan Banten tahun 1888 berkembang di tengah meningkatnya tekanan ekonomi akibat kebijakan pajak, kerja paksa, perubahan sistem penguasaan tanah, serta melemahnya posisi elite lokal dalam struktur pemerintahan kolonial. Kondisi tersebut menciptakan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat desa dan membentuk landasan sosial bagi munculnya aksi kolektif (Kartodirdjo, 1966).

Berbeda dengan organisasi modern yang berkembang di wilayah perkotaan, mobilisasi petani Banten bertumpu pada jaringan ulama, pesantren, dan komunitas keagamaan. Kepemimpinan para kiai memiliki legitimasi moral yang kuat sehingga mampu mengintegrasikan kepentingan ekonomi, identitas keagamaan, dan solidaritas komunitas ke dalam satu gerakan perlawanan. Agama berfungsi sebagai kerangka interpretasi terhadap ketidakadilan yang dialami

masyarakat sekaligus menjadi sumber legitimasi bagi tindakan kolektif. Oleh karena itu, pemberontakan Banten tidak dapat dipahami semata sebagai konflik keagamaan, melainkan sebagai respons sosial terhadap perubahan struktur ekonomi dan politik yang dipaksakan oleh pemerintah kolonial (Kartodirdjo, 1966).

Analisis sejarah sosial menunjukkan bahwa gerakan petani Banten memperlihatkan hubungan erat antara struktur agraria dan dinamika resistensi masyarakat. Penetrasi administrasi kolonial hingga tingkat desa mengurangi otonomi komunitas lokal, sementara kebijakan ekonomi memperbesar kerentanan petani terhadap kemiskinan. Dalam situasi tersebut, jaringan sosial yang telah terbentuk melalui institusi keagamaan menyediakan saluran komunikasi, kepemimpinan, dan mekanisme koordinasi yang memungkinkan mobilisasi berlangsung secara luas. Faktor-faktor tersebut menjelaskan mengapa pemberontakan mampu berkembang dengan cepat meskipun berlangsung dalam kondisi pengawasan kolonial yang ketat.

Pemerintah kolonial menanggapi pemberontakan melalui operasi militer dan penindakan hukum terhadap para pemimpin gerakan. Represi tersebut berhasil menghentikan pemberontakan dalam jangka pendek, tetapi tidak menghilangkan akar persoalan yang melatarbelakanginya. Sebaliknya, pengalaman kolektif masyarakat Banten menjadi bagian penting dari memori perlawanan terhadap kolonialisme dan memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan memiliki kapasitas politik

yang signifikan dalam menghadapi dominasi negara kolonial.

Kontribusi gerakan petani Banten terhadap sejarah Indonesia terletak pada kemampuannya memperlihatkan bahwa perlawanan rakyat tidak selalu lahir dari kelompok terdidik atau organisasi modern. Solidaritas komunitas, kepemimpinan religius, dan ketimpangan agraria mampu membentuk gerakan sosial yang efektif dalam menantang struktur kekuasaan kolonial. Pengalaman tersebut kemudian menjadi salah satu referensi historis bagi perkembangan berbagai gerakan rakyat pada awal abad ke-20, terutama ketika organisasi nasional mulai menghubungkan isu agraria, keadilan sosial, dan perjuangan kemerdekaan dalam agenda politik yang lebih luas (Ricklefs, 2008; Elson, 2008).

3. Pergerakan Nasional

Lahirnya Pergerakan Nasional merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia modern. Kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20 memperluas akses pendidikan bagi sebagian kecil masyarakat bumiputra. Pendidikan melahirkan kelompok intelektual baru yang mulai mempertanyakan legitimasi kolonialisme dan memperkenalkan gagasan mengenai kemajuan, persatuan, serta kebangsaan (Nagazumi, 1972).

Berbeda dengan berbagai perlawanan lokal pada abad sebelumnya, Pergerakan Nasional menampilkan orientasi politik yang lebih luas. Mobilisasi tidak lagi terbatas pada wilayah atau identitas kedaerahan, melainkan diarahkan pada pembentukan komunitas

politik yang kemudian dikenal sebagai bangsa Indonesia. Perubahan ini menunjukkan transformasi dari resistensi berbasis lokal menuju gerakan yang memiliki kesadaran nasional.

Dalam perspektif *Political Process Theory*, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perubahan struktur kolonial yang membuka ruang terbatas bagi pendidikan, organisasi, dan komunikasi. Ruang tersebut dimanfaatkan oleh kaum terpelajar untuk membangun jaringan, menyebarkan gagasan, serta membentuk organisasi yang menjadi fondasi gerakan kebangsaan.

4. Budi Utomo

Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 sering dipandang sebagai awal kebangkitan nasional. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA) dengan dukungan pemikiran Dr. Wahidin Sudirohusodo. Fokus awal Budi Utomo berada pada pengembangan pendidikan, kebudayaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bumiputra (Nagazumi, 1972).

Dalam historiografi Indonesia, Budi Utomo sering memperoleh posisi simbolik sebagai pelopor nasionalisme modern. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa organisasi ini pada tahap awal masih didominasi elite priyayi Jawa dan belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Shiraishi, 1990). Basis sosial yang relatif terbatas menyebabkan pengaruh politiknya berkembang secara bertahap.

Dari sudut pandang sejarah sosial, signifikansi Budi Utomo terletak pada kemampuannya memperkenalkan bentuk organisasi modern, kepemimpinan kolektif, administrasi yang sistematis, dan penggunaan pendidikan sebagai instrumen perubahan sosial. Karakter tersebut kemudian memengaruhi perkembangan berbagai organisasi nasional pada periode berikutnya.

5. Sarekat Islam

Apabila Budi Utomo berkembang dari kalangan elite terdidik, Sarekat Islam menunjukkan pola mobilisasi yang jauh lebih luas. Organisasi ini berawal dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan Haji Samanhudi pada 1911 dan berkembang pesat di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Keanggotaan Sarekat Islam mencakup pedagang, ulama, buruh, petani, serta masyarakat perkotaan dari berbagai daerah (Shiraishi, 1990).

Keberhasilan Sarekat Islam menunjukkan pentingnya identitas kolektif dalam membangun solidaritas sosial. Nilai-nilai keagamaan berfungsi sebagai kerangka moral (*collective action frame*) yang memperkuat kohesi organisasi sekaligus memberikan legitimasi terhadap kritik atas ketidakadilan kolonial. Dari perspektif *Resource Mobilization Theory*, jaringan perdagangan, masjid, pendidikan Islam, dan media cetak menjadi sumber daya strategis yang mempercepat perluasan organisasi.

Perjalanan Sarekat Islam juga memperlihatkan dinamika internal yang kompleks. Perbedaan orientasi politik antara kelompok nasionalis, Islam, dan sosialis

menghasilkan fragmentasi organisasi pada dekade 1920-an. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keberagaman ideologi dapat memperkaya gerakan sosial sekaligus menghadirkan tantangan terhadap konsolidasi organisasi.

6. Pergerakan Perempuan

Perempuan Indonesia memainkan peran penting dalam sejarah gerakan sosial, meskipun kontribusinya lama kurang memperoleh perhatian dalam historiografi konvensional. Pemikiran Raden Ajeng Kartini pada awal abad ke-20 membuka ruang diskusi mengenai pendidikan perempuan, kesetaraan kesempatan, dan pembaruan sosial melalui karya-karya yang kemudian dihimpun dalam *Habis Gelap Terbitlah Terang* (Kartini, 1911/2005).

Perkembangan organisasi perempuan semakin terlihat melalui Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta pada tahun 1928 yang mempertemukan berbagai organisasi dengan latar belakang sosial dan ideologi yang beragam. Agenda yang diperjuangkan mencakup pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan, kesejahteraan keluarga, serta partisipasi dalam kehidupan kebangsaan (Blackburn, 2004).

Kajian sejarah kontemporer menunjukkan bahwa gerakan perempuan Indonesia berkembang melalui negosiasi yang kompleks antara nilai-nilai lokal, agama, nasionalisme, dan modernitas. Oleh karena itu, feminisme Indonesia memiliki karakter yang berbeda dibandingkan perkembangan gerakan perempuan di Eropa maupun Amerika Utara. Perbedaan konteks historis menghasilkan

strategi perjuangan yang lebih beragam dan berakar pada pengalaman sosial masyarakat Indonesia.

7. Reformasi 1998

Reformasi 1998 merupakan salah satu titik balik terbesar dalam sejarah politik Indonesia setelah kemerdekaan. Krisis ekonomi Asia, meningkatnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru, praktik korupsi, pembatasan kebebasan politik, serta melemahnya legitimasi negara menciptakan peluang politik yang mempercepat mobilisasi masyarakat (Aspinall, 2005).

Gerakan mahasiswa menjadi aktor utama yang mendorong perubahan melalui demonstrasi, konsolidasi antarkampus, serta pembentukan aliansi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil. Peristiwa pendudukan Gedung DPR/MPR dan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya rezim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade.

Dalam perspektif teori gerakan sosial, Reformasi 1998 menunjukkan interaksi antara peluang politik, mobilisasi sumber daya, pemingkakan isu demokrasi, dan meluasnya dukungan publik. Perubahan rezim tidak muncul sebagai akibat dari satu faktor tunggal, melainkan melalui akumulasi tekanan ekonomi, dinamika elite politik, gerakan mahasiswa, media massa, organisasi masyarakat sipil, serta perubahan sikap sebagian institusi negara.

8. Gerakan Masyarakat Sipil

Era Reformasi membuka ruang yang lebih luas bagi berkembangnya masyarakat sipil (*civil society*). Berbagai organisasi nonpemerintah, komunitas advokasi, organisasi lingkungan, lembaga antikorupsi, kelompok disabilitas, organisasi masyarakat adat, dan komunitas digital memperluas partisipasi warga dalam proses demokrasi (Hefner, 2000).

Perkembangan teknologi informasi mempercepat transformasi bentuk mobilisasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi berlangsung secara cepat, memperluas jaringan solidaritas, dan mempermudah koordinasi aksi kolektif. Di sisi lain, ruang digital menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi politik, serta meningkatnya praktik manipulasi opini publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi digital membuka peluang partisipasi yang lebih besar sekaligus menghadirkan bentuk-bentuk baru kontestasi kekuasaan.

Sejarah gerakan sosial Indonesia memperlihatkan perubahan orientasi yang berlangsung secara bertahap. Pada masa kolonial, perjuangan diarahkan pada pembebasan nasional dan penghapusan dominasi kolonial. Setelah kemerdekaan, perhatian bergeser menuju demokratisasi, keadilan sosial, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, pemberantasan korupsi, dan penguatan partisipasi warga negara. Perubahan agenda tersebut mencerminkan dinamika masyarakat yang terus berkembang mengikuti tantangan zamannya.

Dalam perspektif sejarah sosial, keberhasilan gerakan sosial di Indonesia tidak pernah ditentukan oleh satu variabel tunggal. Pendidikan memperluas kesadaran politik, organisasi menyediakan kapasitas mobilisasi, identitas kolektif memperkuat solidaritas, peluang politik membuka ruang perubahan, sedangkan media mempercepat penyebaran gagasan. Interaksi antarunsur tersebut membentuk proses historis yang kompleks dan sering kali berlangsung melalui negosiasi, konflik, kompromi, maupun adaptasi.

Pengalaman Indonesia juga menunjukkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada perubahan institusi politik. Konsolidasi demokrasi memerlukan masyarakat sipil yang aktif, ruang publik yang inklusif, penghormatan terhadap keberagaman, serta kemampuan negara menjamin keadilan bagi seluruh warga. Dengan demikian, gerakan sosial tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan aspirasi masyarakat sekaligus menjadi indikator vitalitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

H. Gerakan Sosial Era Digital

Transformasi digital merupakan salah satu perubahan paling signifikan dalam sejarah gerakan sosial sejak Revolusi Industri. Internet, media sosial, komputasi bergerak (*mobile computing*), dan kecerdasan buatan telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, membangun solidaritas, mengorganisasi aksi kolektif, serta memengaruhi proses politik. Jika gerakan sosial pada abad ke-19 bergantung pada organisasi formal dan media cetak, gerakan abad ke-21

berkembang melalui jaringan digital yang lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan melampaui batas negara. Perubahan tersebut memperluas kapasitas mobilisasi sekaligus menghadirkan persoalan baru mengenai kualitas demokrasi, kredibilitas informasi, pengawasan digital, dan distribusi kekuasaan dalam ruang siber (Castells, 2013).

1. Media Sosial sebagai Infrastruktur Gerakan Sosial

Media sosial mengubah logika komunikasi politik dari pola yang terpusat menuju jaringan horizontal. Platform seperti *Facebook*, *X* (sebelumnya *Twitter*), *Instagram*, *YouTube*, *TikTok*, dan berbagai aplikasi pesan instan memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik kepada jutaan pengguna. Proses ini mempercepat pembentukan solidaritas, memperluas jangkauan mobilisasi, serta menurunkan biaya koordinasi aksi kolektif (Bennett & Segerberg, 2023).

Dalam perspektif teori gerakan sosial, media sosial berfungsi sebagai sumber daya strategis yang memperkuat kapasitas organisasi. Informasi mengenai demonstrasi, petisi, penggalangan dana, maupun pelaporan pelanggaran hak asasi manusia dapat diproduksi dan didistribusikan secara cepat tanpa bergantung pada media arus utama. Perubahan ini memperluas peluang bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap ruang publik.

Meski demikian, media sosial bukan ruang yang netral. Algoritma platform memengaruhi distribusi informasi melalui mekanisme personalisasi konten, sehingga perhatian publik sering diarahkan oleh logika

komersial maupun kepentingan politik tertentu. Akibatnya, ruang digital dapat memperkuat partisipasi demokratis sekaligus memperbesar polarisasi sosial (Van Dijck, Poell, & de Waal, 2018).

2. *Hashtag Activism*

Kemunculan *hashtag activism* menandai perubahan penting dalam strategi komunikasi gerakan sosial. Tanda pagar (*hashtag*) berfungsi sebagai mekanisme pengelompokan isu sekaligus simbol identitas kolektif yang memudahkan individu menemukan komunitas dengan kepentingan serupa. Kampanye seperti *BringBackOurGirls*, *FridaysForFuture*, *BlackLivesMatter*, dan *MeToo* menunjukkan bahwa simbol digital dapat berkembang menjadi ruang mobilisasi global (Bonilla & Rosa, 2015).

Dalam perspektif framing theory, penggunaan hashtag berperan membangun makna bersama terhadap suatu persoalan. Narasi yang ringkas dan mudah diingat mempercepat penyebaran pesan serta memperkuat resonansi emosional di kalangan masyarakat. Namun, efektivitas *hashtag activism* sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan kampanye digital dengan aksi nyata di tingkat lokal maupun nasional.

3. *Arab Spring*

Arab Spring (2010–2012) sering dijadikan contoh penting mengenai hubungan antara teknologi digital dan perubahan politik. Gelombang protes yang berkembang di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan beberapa negara

Timur Tengah dipicu oleh ketidakpuasan terhadap otoritarianisme, pengangguran, korupsi, dan kesenjangan ekonomi. Media sosial membantu penyebaran informasi, mempercepat koordinasi demonstrasi, serta menarik perhatian komunitas internasional (Howard & Hussain, 2013).

Meski demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa media digital bukan penyebab utama revolusi. Faktor ekonomi, struktur politik, kapasitas organisasi masyarakat sipil, serta respons aparat keamanan tetap menentukan arah perkembangan gerakan. Pengalaman Arab Spring memperlihatkan bahwa teknologi berfungsi sebagai katalisator, sedangkan perubahan politik tetap bergantung pada konfigurasi kekuasaan yang lebih luas (Lynch, 2012).

4. *Occupy Wall Street*

Gerakan *Occupy Wall Street* yang muncul di Amerika Serikat pada tahun 2011 mengangkat kritik terhadap meningkatnya ketimpangan ekonomi setelah krisis finansial global 2008. Slogan “*We are the 99%*” berhasil membingkai persoalan distribusi kekayaan sebagai isu publik yang memperoleh perhatian internasional (Gitlin, 2012).

Berbeda dari organisasi politik tradisional, *Occupy Wall Street* mengembangkan struktur yang relatif horizontal tanpa kepemimpinan tunggal. Model tersebut memperkuat partisipasi demokratis, tetapi pada saat yang sama menghadapi kesulitan dalam mempertahankan koordinasi jangka panjang. Pengalaman ini

memperlihatkan bahwa fleksibilitas organisasi digital sering berhadapan dengan tantangan institusional ketika gerakan berupaya mengubah kebijakan publik secara berkelanjutan.

5. *Black Lives Matter*

Black Lives Matter (BLM) berkembang sejak 2013 sebagai respons terhadap kekerasan aparat kepolisian terhadap warga Afrika-Amerika. Gerakan ini memperoleh momentum global setelah kematian George Floyd pada tahun 2020. Video yang beredar melalui media sosial memicu demonstrasi di berbagai negara dan memperluas diskusi mengenai diskriminasi rasial, reformasi kepolisian, serta keadilan sosial (Taylor, 2016).

Keberhasilan BLM menunjukkan bahwa bukti visual memiliki kekuatan besar dalam membangun empati publik. Dokumentasi digital mempercepat proses pembingkai isu dan memperluas tekanan terhadap institusi negara. Fenomena tersebut memperlihatkan hubungan erat antara teknologi komunikasi, opini publik, dan legitimasi politik dalam masyarakat kontemporer.

6. *MeToo*

Gerakan *MeToo* berkembang menjadi salah satu kampanye global paling berpengaruh dalam isu kekerasan seksual. Berawal dari kerja advokasi Tarana Burke, gerakan ini memperoleh perhatian luas pada tahun 2017 ketika jutaan perempuan membagikan pengalaman mereka melalui media sosial (Burke, 2018).

Dalam perspektif sejarah sosial, *MeToo* memperlihatkan bagaimana pengalaman individual dapat berubah menjadi kesadaran kolektif melalui ruang digital. Narasi personal berkembang menjadi gerakan transnasional yang mendorong perubahan regulasi, kebijakan organisasi, serta budaya kerja di berbagai negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengalaman sehari-hari memiliki kapasitas politik ketika memperoleh ruang untuk dibagikan dan diakui secara luas.

7. Demokrasi Digital

Perkembangan teknologi informasi memperluas peluang partisipasi warga melalui petisi daring, konsultasi publik, *crowdsourcing*, dan kampanye digital. Demokrasi digital mempercepat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan (Coleman, 2017).

Meskipun demikian, demokrasi digital menghadapi berbagai tantangan. Penyebaran disinformasi, manipulasi algoritma, echo chamber, serta campur tangan aktor politik melalui operasi informasi menunjukkan bahwa kualitas partisipasi tidak selalu meningkat seiring bertambahnya akses teknologi. Oleh karena itu, demokrasi digital memerlukan literasi digital, tata kelola platform yang akuntabel, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

8. Slacktivism atau Aktivisme?

Perdebatan mengenai efektivitas gerakan digital melahirkan istilah *slacktivism*, yaitu bentuk partisipasi

yang berhenti pada tindakan simbolik seperti menyukai (*like*), membagikan (*share*), atau memberi komentar tanpa keterlibatan lebih lanjut (Morozov, 2011). Kritik ini berpendapat bahwa partisipasi digital sering menciptakan ilusi keterlibatan politik.

Sebaliknya, penelitian Bennett dan Segerberg (2023) menunjukkan bahwa aktivitas daring dapat menjadi tahap awal pembentukan jaringan yang berkembang menjadi aksi kolektif di dunia nyata. Efektivitas gerakan digital bergantung pada kemampuannya menghubungkan ruang virtual dengan organisasi, advokasi, dan tindakan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, perdebatan antara slacktivism dan aktivisme sebaiknya dipahami sebagai spektrum partisipasi, bukan sebagai dua kategori yang saling meniadakan.

9. *Artificial Intelligence* dan Masa Depan Gerakan Sosial

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) membuka babak baru dalam sejarah gerakan sosial. AI mampu membantu analisis data, penerjemahan bahasa, pemetaan jejaring, pengelolaan kampanye, hingga deteksi pelanggaran hak asasi manusia melalui analisis citra satelit dan data terbuka. Teknologi ini meningkatkan kapasitas organisasi dalam mengelola informasi dan menjangkau masyarakat secara lebih efektif.

Di sisi lain, AI menghadirkan tantangan serius. *Deepfake*, otomatisasi propaganda, *bot* politik, pengawasan berbasis pengenalan wajah (*facial*

recognition), serta manipulasi informasi melalui sistem generatif berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap ruang demokrasi (Zuboff, 2019). Persoalan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi selalu menghasilkan peluang sekaligus risiko.

Era digital mengubah bentuk gerakan sosial dari organisasi yang berpusat pada struktur hierarkis menuju jaringan yang bersifat adaptif, lintas batas, dan berbasis komunikasi real time. Perubahan tersebut mempercepat penyebaran gagasan, memperluas partisipasi publik, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengawasi kekuasaan. Namun, transformasi digital juga menghadirkan persoalan baru berupa disinformasi, manipulasi algoritma, pengawasan digital, dan fragmentasi ruang publik.

Dalam perspektif sejarah sosial, teknologi tidak menentukan arah perubahan secara otomatis. Dampak media digital bergantung pada hubungan antara inovasi teknologi, kapasitas organisasi, budaya politik, institusi demokrasi, dan kualitas literasi masyarakat. Oleh karena itu, masa depan gerakan sosial tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi secara etis, inklusif, dan bertanggung jawab dalam memperjuangkan keadilan sosial.

I. Analisis Gerakan Sosial Kontemporer

Perkembangan gerakan sosial pada abad ke-21 menunjukkan bahwa perubahan masyarakat tidak lagi dapat dijelaskan melalui satu paradigma tunggal. Globalisasi,

revolusi digital, meningkatnya mobilitas manusia, perubahan struktur ekonomi, krisis lingkungan, dan kemajuan kecerdasan buatan telah mengubah medan perjuangan sosial secara mendasar. Dalam situasi tersebut, para ilmuwan memperdebatkan berbagai pertanyaan penting: apakah media sosial memperkuat demokrasi atau justru memperdalam polarisasi? Apakah politik identitas menggeser perjuangan kelas? Apakah aktivisme digital mampu menghasilkan perubahan nyata? Bagaimana populisme memengaruhi mobilisasi masyarakat? Apakah demokrasi deliberatif masih relevan di tengah derasnya arus informasi digital? Bagaimana jaringan transnasional mengubah hubungan antara gerakan lokal dan politik global? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut belum mencapai konsensus karena setiap perspektif menawarkan argumentasi yang didukung oleh bukti empiris yang berbeda.

1. Apakah Media Sosial Memperkuat Demokrasi?

Pandangan optimistis menempatkan media sosial sebagai instrumen demokratisasi. *Platform* digital memperluas akses informasi, memudahkan koordinasi aksi kolektif, dan memperbesar peluang kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk menyampaikan aspirasi politik. Castells (2013) menjelaskan bahwa jaringan digital memungkinkan terbentuknya *networked social movements* yang mampu berkembang secara cepat tanpa bergantung pada organisasi birokratis.

Sebaliknya, pendekatan yang lebih kritis menilai bahwa media sosial juga menciptakan persoalan serius bagi demokrasi. Algoritma *platform* mendorong

penyebaran konten yang memancing emosi, memperkuat *echo chamber*, serta mempermudah disinformasi dan manipulasi opini publik (Sunstein, 2017). Zuboff (2019) menambahkan bahwa model bisnis platform digital menghasilkan bentuk baru pengawasan melalui pengumpulan data perilaku pengguna (*surveillance capitalism*), sehingga ruang digital menjadi arena persaingan antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa teknologi tidak memiliki karakter yang bersifat intrinsik. Dampaknya ditentukan oleh tata kelola platform, kualitas institusi demokrasi, literasi digital masyarakat, dan regulasi negara. Oleh karena itu, hubungan antara media sosial dan demokrasi bersifat kontingen, bukan deterministik.

2. Gerakan Identitas versus Gerakan Kelas

Salah satu perdebatan paling intens dalam teori gerakan sosial berkaitan dengan orientasi perjuangan. Tradisi Marxian memandang ketimpangan ekonomi sebagai akar utama konflik sosial. Eksploitasi dalam sistem kapitalisme menghasilkan pertentangan antara pemilik modal dan kelas pekerja sehingga redistribusi sumber daya menjadi agenda utama perubahan sosial (Marx & Engels, 1848/2010).

Perkembangan masyarakat kontemporer memperlihatkan munculnya gerakan yang berpusat pada ras, gender, etnis, agama, orientasi seksual, disabilitas, dan masyarakat adat. Nancy Fraser (2003) menjelaskan bahwa ketidakadilan modern tidak hanya berkaitan

dengan distribusi ekonomi (*redistribution*), melainkan juga dengan pengakuan sosial (*recognition*). Axel Honneth (1995) bahkan menempatkan perjuangan memperoleh pengakuan sebagai fondasi utama konflik sosial modern.

Perdebatan tersebut sering dipresentasikan sebagai pertentangan antara politik identitas dan politik kelas. Namun, berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemisahan tersebut kurang memadai. Pengalaman perempuan pekerja, kelompok minoritas miskin, atau masyarakat adat yang menghadapi eksploitasi sumber daya memperlihatkan bahwa identitas dan kelas sering beririsan dalam pengalaman sosial yang sama. Pendekatan interseksional kemudian berkembang untuk menjelaskan bagaimana berbagai bentuk ketidakadilan saling berhubungan, bukan berdiri secara terpisah (Crenshaw, 1989).

3. Aktivisme Digital: Transformasi atau Ilusi?

Perkembangan media digital memunculkan optimisme mengenai lahirnya bentuk baru partisipasi politik. Bennett dan Segerberg (2023) menjelaskan bahwa *connective action* memungkinkan individu terlibat dalam gerakan sosial melalui jaringan digital tanpa memerlukan struktur organisasi yang kaku. Model ini mempercepat mobilisasi dan memperluas partisipasi publik.

Sebaliknya, Morozov (2011) mengingatkan bahwa partisipasi digital sering berhenti pada tindakan simbolik yang tidak menghasilkan perubahan institusional. Fenomena ini dikenal sebagai *slacktivism*. Memberikan

tanda suka, membagikan unggahan, atau mengganti foto profil memang menunjukkan dukungan moral, tetapi belum tentu berkontribusi terhadap perubahan kebijakan.

Bukti empiris memperlihatkan hasil yang beragam. *Arab Spring*, *Black Lives Matter*, dan *MeToo* menunjukkan bahwa media digital mampu mempercepat mobilisasi masyarakat. Di sisi lain, banyak kampanye digital menghilang setelah perhatian publik bergeser. Dengan demikian, efektivitas aktivisme digital lebih tepat dipahami sebagai persoalan kapasitas organisasi dalam menghubungkan ruang daring dengan aksi kolektif di dunia nyata.

4. Populisme dan Mobilisasi Politik

Populisme berkembang menjadi salah satu fenomena politik paling menonjol dalam dua dekade terakhir. Cas Mudde (2007) mendefinisikan populisme sebagai ideologi tipis (*thin-centered ideology*) yang membagi masyarakat ke dalam dua kelompok yang dianggap saling berlawanan, yaitu “rakyat yang murni” dan “elite yang korup”. Narasi tersebut sering digunakan untuk membangun solidaritas politik melalui penyederhanaan persoalan sosial yang kompleks.

Sebagian ilmuwan menilai populisme mampu memperluas partisipasi kelompok yang selama ini kurang terwakili dalam sistem politik. Perspektif lain menunjukkan bahwa populisme dapat melemahkan institusi demokrasi ketika legitimasi politik dipusatkan pada figur pemimpin dan bukan pada mekanisme konstitusional (Müller, 2016).

Dalam konteks gerakan sosial, populisme memperlihatkan hubungan yang ambigu. Ia dapat memperkuat mobilisasi masyarakat terhadap ketimpangan sosial, tetapi juga berpotensi memperbesar polarisasi dan eksklusivisme identitas apabila perbedaan politik diposisikan sebagai ancaman terhadap keberadaan kelompok lain.

5. Demokrasi Deliberatif

Teori demokrasi deliberatif menawarkan pendekatan yang berbeda terhadap perubahan sosial. Habermas (1996) berpendapat bahwa legitimasi demokrasi lahir melalui proses diskusi publik yang rasional, terbuka, dan inklusif. Keputusan politik memperoleh legitimasi ketika dibangun melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan melalui dominasi kekuasaan.

Perkembangan media digital membuka peluang bagi perluasan ruang deliberasi. Forum daring, konsultasi publik, dan partisipasi digital memungkinkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan. Namun, ruang digital juga menghadapi tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi algoritma, dan fragmentasi opini publik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah komunikasi digital benar-benar mendukung deliberasi atau justru memperlemah kualitas diskursus demokratis.

6. Gerakan Transnasional

Globalisasi mengubah karakter gerakan sosial dari yang sebelumnya berorientasi nasional menjadi semakin transnasional. Isu perubahan iklim, hak asasi manusia, migrasi, kesetaraan gender, dan keadilan ekonomi melampaui batas negara sehingga memerlukan jaringan solidaritas internasional. Keck dan Sikkink (1998) menjelaskan bahwa *transnational advocacy networks* memungkinkan organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan lembaga internasional bekerja sama dalam memperjuangkan agenda bersama.

Gerakan transnasional memperluas kapasitas advokasi melalui pertukaran informasi, tekanan diplomatik, dan kampanye global. Di sisi lain, pendekatan ini menghadapi tantangan berupa perbedaan konteks budaya, kepentingan politik nasional, kesenjangan sumber daya, dan kritik bahwa agenda global kadang kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat lokal. Oleh sebab itu, keberhasilan gerakan transnasional bergantung pada kemampuannya menghubungkan solidaritas global dengan realitas sosial di tingkat lokal.

Perdebatan kontemporer menunjukkan bahwa gerakan sosial tidak dapat dijelaskan melalui dikotomi sederhana seperti digital versus konvensional, identitas versus kelas, ataupun lokal versus global. Perubahan sosial berlangsung melalui interaksi yang dinamis antara struktur politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan kapasitas organisasi masyarakat. Setiap konteks sejarah menghasilkan

konfigurasi yang berbeda sehingga tidak ada model tunggal yang dapat menjelaskan seluruh fenomena gerakan sosial.

Dari perspektif sejarah sosial, evolusi gerakan sosial sejak dunia kuno hingga era digital memperlihatkan kesinambungan dalam satu aspek fundamental: masyarakat terus membangun tindakan kolektif ketika menghadapi ketidakadilan, ketimpangan, atau krisis legitimasi. Yang berubah adalah bentuk organisasi, media mobilisasi, bahasa politik, dan ruang perjuangan. Oleh karena itu, memahami gerakan sosial memerlukan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan sejarah, sosiologi, ilmu politik, antropologi, studi komunikasi, dan ilmu data. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika masyarakat yang semakin kompleks pada abad ke-21.

Pembahasan pada bab ini menunjukkan bahwa gerakan sosial mengalami transformasi yang sangat panjang, mulai dari pemberontakan budak di dunia kuno hingga mobilisasi berbasis kecerdasan buatan pada abad ke-21. Perubahan tersebut tidak berlangsung secara linear ataupun mengikuti pola yang seragam. Setiap periode sejarah menghadirkan konfigurasi baru yang dipengaruhi oleh struktur ekonomi, perubahan politik, perkembangan budaya, inovasi teknologi, serta kapasitas aktor dalam membangun tindakan kolektif. Oleh karena itu, penjelasan yang hanya bertumpu pada satu teori cenderung menyederhanakan realitas historis.

Tradisi *Collective Behavior* menempatkan perubahan sosial sebagai respons terhadap tekanan struktural dan disorganisasi masyarakat (Smelser, 1962). Pendekatan ini

memberi perhatian pada kondisi yang memicu munculnya aksi kolektif, tetapi kurang menjelaskan mengapa kelompok yang menghadapi tekanan serupa sering menghasilkan respons yang berbeda.

Resource Mobilization Theory kemudian menggeser fokus analisis menuju kapasitas organisasi dalam menghimpun sumber daya, membangun kepemimpinan, dan mengelola jaringan pendukung (McCarthy & Zald, 1977). Perspektif ini menjelaskan bahwa keberhasilan gerakan tidak hanya ditentukan oleh besarnya ketidakpuasan, melainkan juga oleh kemampuan mengubah sumber daya menjadi kekuatan politik.

Selanjutnya, *Political Process Theory* menunjukkan bahwa peluang politik, fragmentasi elite, perubahan kebijakan negara, dan tingkat represi sangat memengaruhi dinamika gerakan sosial (Tarrow, 2022). Gerakan berkembang ketika struktur politik menyediakan ruang yang memungkinkan mobilisasi memperoleh legitimasi dan dukungan publik.

Pendekatan *New Social Movements* memperluas analisis ke ranah identitas, budaya, gaya hidup, lingkungan, gender, dan hak asasi manusia. Touraine (1981) serta Melucci (1996) menunjukkan bahwa masyarakat pascaindustri melahirkan bentuk perjuangan yang berorientasi pada produksi makna, pengakuan identitas, dan kualitas kehidupan. Sementara itu, Castells (2013) menegaskan bahwa revolusi digital membentuk jaringan komunikasi baru yang mengubah logika mobilisasi kolektif melalui ruang siber.

Berdasarkan perkembangan tersebut, bab ini mengusulkan Model Integratif Perkembangan Gerakan Sosial sebagai kerangka konseptual untuk memahami evolusi gerakan sosial secara komprehensif. Model ini terdiri atas lima komponen yang saling berinteraksi.

Pertama, struktur sosial mencakup sistem ekonomi, konfigurasi politik, ketimpangan sosial, institusi hukum, dan distribusi sumber daya. Struktur membentuk peluang sekaligus hambatan bagi munculnya gerakan sosial.

Kedua, aktor kolektif meliputi individu, komunitas, organisasi, jaringan masyarakat sipil, media, dan organisasi transnasional. Aktor berperan menerjemahkan pengalaman ketidakadilan menjadi tindakan kolektif melalui kepemimpinan, koordinasi, dan solidaritas.

Ketiga, budaya menyediakan kerangka interpretasi terhadap realitas sosial. Nilai, agama, identitas, simbol, narasi sejarah, dan memori kolektif membentuk legitimasi moral yang memperkuat mobilisasi. Dalam perspektif *framing theory*, keberhasilan gerakan bergantung pada kemampuan membangun makna yang memperoleh resonansi di tengah masyarakat (Snow & Benford, 1988).

Keempat, teknologi berfungsi sebagai infrastruktur komunikasi. Perkembangannya berlangsung dari tradisi lisan, manuskrip, mesin cetak, surat kabar, radio, televisi, internet, media sosial, hingga kecerdasan buatan. Teknologi mengubah kecepatan penyebaran informasi, pola koordinasi, dan skala mobilisasi, tetapi tidak menentukan arah perubahan secara otomatis.

Kelima, relasi kekuasaan merupakan arena tempat seluruh proses tersebut berlangsung. Negara, korporasi, organisasi internasional, dan masyarakat sipil terus berinteraksi melalui negosiasi, konflik, kompromi, maupun kolaborasi. Gerakan sosial pada akhirnya merupakan proses yang terus membentuk sekaligus dibentuk oleh konfigurasi kekuasaan.

Kelima komponen tersebut saling memengaruhi secara dinamis. Perubahan pada satu unsur akan menghasilkan penyesuaian pada unsur lainnya. Dengan demikian, gerakan sosial lebih tepat dipahami sebagai sistem adaptif yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat daripada sebagai respons yang dipicu oleh satu faktor tunggal.

Kesimpulan

Bab ini menjelaskan evolusi gerakan sosial dari dunia kuno hingga era digital melalui perspektif sejarah sosial dan teori gerakan sosial kontemporer. Pembahasan diawali dengan konsep dasar gerakan sosial, perkembangan teori klasik hingga modern, kemudian diikuti analisis historis mengenai gerakan pada dunia kuno, Abad Pertengahan, era modern, abad ke-20, Indonesia, dan era digital.

Kajian menunjukkan bahwa bentuk gerakan sosial berubah mengikuti perkembangan struktur masyarakat. Perbudakan melahirkan pemberontakan budak, feodalisme memunculkan gerakan petani, industrialisasi melahirkan gerakan buruh, demokratisasi memperkuat perjuangan hak

sipil, sedangkan revolusi digital membentuk jaringan mobilisasi global yang berbasis teknologi informasi.

Berbagai teori memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai proses tersebut. Ketidakadilan struktural menjelaskan munculnya konflik, sumber daya menentukan kapasitas organisasi, peluang politik membuka ruang perubahan, budaya membangun identitas kolektif, sedangkan teknologi mempercepat penyebaran informasi dan koordinasi aksi. Seluruh unsur tersebut berinteraksi dalam proses sejarah yang kompleks.

Studi Reflektif

1. Mengapa gerakan sosial terus muncul dalam setiap periode sejarah meskipun struktur masyarakat mengalami perubahan?
2. Bagaimana hubungan antara ketimpangan sosial, identitas kolektif, dan peluang politik dalam menjelaskan keberhasilan suatu gerakan sosial?
3. Apakah media sosial telah memperluas kualitas demokrasi atau justru memperkuat polarisasi politik? Jelaskan berdasarkan bukti empiris.
4. Bagaimana teori Marx, Resource Mobilization, Political Process, dan New Social Movements menjelaskan fenomena Black Lives Matter atau #MeToo?
5. Mengapa sebagian gerakan sosial berhasil menghasilkan perubahan institusional, sedangkan sebagian lainnya berhenti sebagai simbol perlawanan?

6. Bagaimana Artificial Intelligence dapat memperkuat sekaligus mengancam perkembangan gerakan sosial pada masa depan?
7. Apakah gerakan sosial di Indonesia lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, identitas, agama, atau peluang politik? Berikan argumentasi berdasarkan contoh sejarah.
8. Sejauh mana globalisasi mengubah hubungan antara gerakan sosial lokal dan jaringan transnasional?

Studi Kasus

Reformasi Indonesia 1998 dalam Perspektif Teori Gerakan Sosial

Reformasi 1998 merupakan salah satu contoh paling penting untuk memahami hubungan antara struktur, aktor, budaya, teknologi, dan kekuasaan. Krisis ekonomi Asia 1997 memperburuk kondisi sosial-ekonomi Indonesia melalui meningkatnya inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Pada saat yang sama, legitimasi pemerintahan Orde Baru melemah akibat praktik korupsi, pembatasan kebebasan politik, dan sentralisasi kekuasaan (Aspinall, 2005).

Gerakan mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut melalui konsolidasi antarkampus, demonstrasi, diskusi publik, serta kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil. Media massa dan jaringan komunikasi mempercepat penyebaran informasi mengenai aksi demonstrasi dan kekerasan terhadap masyarakat. Perubahan sikap sebagian elite politik serta melemahnya dukungan

terhadap pemerintah memperbesar peluang terjadinya transisi politik.

Jika dianalisis menggunakan Model Integratif Perkembangan Gerakan Sosial, Reformasi 1998 memperlihatkan interaksi lima komponen utama. Krisis ekonomi menjadi tekanan struktural. Mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat bertindak sebagai aktor kolektif. Nilai demokrasi, keadilan, dan reformasi membentuk legitimasi budaya. Teknologi komunikasi memperluas koordinasi aksi. Pergeseran konfigurasi kekuasaan akhirnya membuka jalan bagi perubahan politik nasional.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak lahir dari satu penyebab tunggal. Transformasi politik merupakan hasil interaksi berbagai faktor yang berkembang secara simultan. Analisis tersebut memperkuat kesimpulan utama bab ini bahwa gerakan sosial merupakan proses historis yang dinamis, multidimensional, dan selalu dipengaruhi oleh hubungan antara struktur, aktor, budaya, teknologi, serta kekuasaan.

Bacaan Lanjutan

Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, resistance, and regime change in Indonesia*. Stanford University Press.

Castells, M. (2013). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. John Wiley & Sons.

- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative perspectives on social movements. Political opportunities*.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age*. Cambridge University Press.
- Snow, D. A., Soule, S. A., Kriesi, H., & McCammon, H. J. (Eds.). (2023). *The Wiley Blackwell companion to social movements*. John Wiley & Sons.
- Tarrow, S. (2022). *Power in movement. Social movements and contentious politics (3rd ed.)*. Cambridge University Press.

Referensi

- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (Rev. ed.)*. Verso London.
- Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
- Beck, U. (1992). *Risk society: Towards a new modernity (Vol. 17)*. Sage.
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2023). *The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics*. In *Handbook of digital politics (pp. 287-338)*. Edward Elgar Publishing.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.

- Bloch, M. (2014). *Feudal Society*. Routledge & Kegan Paul.
- Bonilla, Y., & Rosa, J. (2015). #Ferguson: Digital Protest, Hashtag Ethnography, and the Racial Politics of Social Media. *American Ethnologist*, 42(1), 4–17. <https://doi.org/10.1111/amet.12112>
- Bradley, K. R. (1989). *Slavery and Rebellion in the Roman World, 140–70 BC*. Indiana University Press.
- Branch, T. (1988). *Parting the Waters: America in the King Years, 1954–1963*. Simon & Schuster.
- Burke, T. (2018). *Unbound: My Story of Liberation and the Birth of the Me Too Movement*. Flatiron Books.
- Burke, P. (2005). *History and Social Theory (2nd ed.)*. Polity Press.
- Carson, R. (1962). *Silent Spring*. Houghton Mifflin.
- Castells, M. (2013). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Coleman, S. (2017). *Can the Internet Strengthen Democracy?* Polity Press.
- Cowan, R. (2017). *Roman Legionary 109–58 BC: The Age of Marius, Sulla and Pompey the Great (Vol. 182)*. Bloomsbury Publishing.
- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. University of Chicago Legal Forum, 1989(1), 139–167.
- de Beauvoir, S. (1949/2011). *The Second Sex*. Vintage.
- Della Porta, D., & Diani, M. (2020). *Social Movements: An Introduction (3rd ed.)*. Wiley-Blackwell.

- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice (3rd ed.)*. Cornell University Press.
- Doyle, W. (2018). *The Oxford History of the French Revolution (3rd ed.)*. Oxford University Press.
- Ebrey, P. B. (2010). *The Cambridge Illustrated History of China (2nd ed.)*. Cambridge University Press.
- Eisenstein, E. L. (1979). *The Printing Press as an Agent of Change*. Cambridge University Press.
- Evans, S. M. (2015). *Tidal Wave: How Women Changed America at Century's End*. Free Press.
- Fraser, N. (2003). *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange*. Verso.
- Gitlin, T. (2012). *Occupy Nation*. HarperCollins.
- Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. MIT Press.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hilton, R. H. (1973). *Bond Men Made Free: Medieval Peasant Movements and the English Rising of 1381*. Routledge.
- Hobsbawm, E. J. (1962). *The Age of Revolution: Europe 1789–1848*. Weidenfeld & Nicolson.
- Hobsbawm, E. J. (1959). *Primitive Rebels*. Manchester University Press.
- Honneth, A. (1995). *The Struggle for Recognition*. Polity Press.

- Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). *Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Kartini, R. A. (1911/2005). *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Balai Pustaka.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. Cornell University Press.
- Kolakowski, L. (1978). *Main Currents of Marxism*. Oxford University Press.
- Lambert, M. (2002). *Medieval Heresy: Popular Movements from the Gregorian Reform to the Reformation (3rd ed.)*. Blackwell.
- Le Bon, G. (1895). *The Crowd: A Study of the Popular Mind*.
- Lewis, M. E. (2007). *The Early Chinese Empires: Qin and Han*. Harvard University Press.
- Locke, J. (1689/1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Lynch, M. (2012). *The Arab Uprising*. PublicAffairs.
- MacCulloch, D. (2003). *The Reformation*. Viking.
- Mandela, N. (1994). *Long Walk to Freedom*. Little, Brown and Company.
- Marx, K., & Engels, F. (1848/2010). *Manifesto of the Communist Party*. Penguin Classics.
- McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930–1970*. University of Chicago Press.

- McAdam, D., McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1996). *Comparative perspectives on social movements. Political opportunities.*
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241.
- Melucci, A. (1996). *Challenging codes: Collective action in the information age.* Cambridge University Press.
- Morris, A. D. (1984). *The Origins of the Civil Rights Movement: Black Communities Organizing for Change.* Free Press.
- Morozov, E. (2011). *The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom.* PublicAffairs.
- Mudde, C. (2007). *Populist Radical Right Parties in Europe.* Cambridge University Press.
- Müller, J.-W. (2016). *What Is Populism?* University of Pennsylvania Press.
- Nagazumi, A. (1972). *The Dawn of Indonesian Nationalism: The Early Years of the Budi Utomo, 1908–1918.* Institute of Developing Economies.
- Nash, G. B. (2005). *The Unknown American Revolution.* Viking.
- Pirenne, H. (1956). *Medieval Cities: Their Origins and the Revival of Trade.* Princeton University Press.
- Plutarch. *Life of Crassus.* Dalam Parallel Lives.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation.* Farrar & Rinehart.

- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1200 (4th ed.)*. Palgrave Macmillan.
- Ross, K. (2002). *May '68 and Its Afterlives*. University of Chicago Press.
- Scott, T., & Scribner, R. W. (Eds.). (1991). *The German Peasants' War: A History in Documents*. Humanities Press.
- Shiraishi, T. (1990). *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912–1926*. Cornell University Press.
- Smelser, N. J. (1962). *Theory of Collective Behavior*. Free Press.
- Snow, D. A., & Benford, R. D. (1988). Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization. *International Social Movement Research*, 1, 197–217.
- Stark, R. (1996). *The Rise of Christianity*. Princeton University Press.
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Tarrow, S. (2022). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (3rd ed.)*. Cambridge University Press.
- Tatum, W. J. (1991). [Review of Slavery and Rebellion in the Roman World, 140 B.C.-70 B.C., by K. R. Bradley]. *Classical Philology*, 86(3), 252–258. <http://www.jstor.org/stable/269571>
- Taylor, K.-Y. (2016). *From #BlackLivesMatter to Black Liberation*. Haymarket Books.
- Thompson, E. P. (1963). *The Making of the English Working Class*. Victor Gollancz.

- Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). *Contentious Politics (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Touraine, A. (1981). *The Voice and the Eye: An Analysis of Social Movements*. Cambridge University Press.
- Van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). *The Platform Society*. Oxford University Press.
- Wood, G. S. (1992). *The Radicalism of the American Revolution*. Vintage Books.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs.

BAB XIV:

PRESENTASI HASIL PENELITIAN

A. Penyusunan laporan penelitian

Penyusunan laporan penelitian merupakan tahap akhir dalam proses penelitian yang berfungsi untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan penelitian secara sistematis, logis, dan ilmiah. Dalam kajian sejarah sosial, laporan penelitian tidak hanya menyajikan hasil analisis mengenai suatu peristiwa sejarah, tetapi juga menjelaskan proses penelitian, penggunaan sumber sejarah, metode analisis, serta interpretasi terhadap perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Melalui laporan penelitian, peneliti menyampaikan temuan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat akademik maupun publik.

Dalam tradisi akademik, laporan penelitian menjadi media utama dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Penelitian yang baik tidak akan memberikan kontribusi yang optimal apabila hasilnya tidak disusun dalam bentuk laporan yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, kemampuan menyusun laporan penelitian merupakan kompetensi penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa, khususnya dalam bidang Pendidikan Sejarah. Laporan penelitian yang baik memungkinkan pembaca memahami latar belakang penelitian, proses pengumpulan data, analisis yang dilakukan, hingga kesimpulan yang diperoleh secara runtut dan objektif.

Dalam perspektif sejarah sosial, penyusunan laporan penelitian memiliki karakteristik tersendiri karena objek kajiannya adalah dinamika kehidupan masyarakat. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan fakta sejarah, tetapi juga menganalisis hubungan antara struktur sosial, perubahan budaya, kondisi ekonomi, politik, dan pengalaman masyarakat dalam suatu periode tertentu. Oleh sebab itu, laporan penelitian sejarah sosial menuntut kemampuan berpikir kritis, analitis, dan interpretatif.

1. Pengertian Laporan Penelitian

Laporan penelitian adalah dokumen ilmiah yang memuat seluruh proses dan hasil penelitian secara sistematis berdasarkan kaidah metodologi ilmiah. Laporan tersebut menjadi bukti bahwa penelitian telah dilakukan sesuai dengan prosedur akademik yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.

Menurut John W. Creswell (2018), laporan penelitian merupakan sarana komunikasi ilmiah yang menjelaskan bagaimana suatu penelitian dilakukan, bagaimana data diperoleh, dianalisis, serta bagaimana hasil penelitian diinterpretasikan. Dalam penelitian sejarah sosial, laporan penelitian juga menjadi media untuk menyampaikan interpretasi terhadap perubahan sosial berdasarkan bukti-bukti historis yang valid.

Dengan demikian, laporan penelitian tidak sekadar menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga menunjukkan kualitas proses penelitian yang telah dilakukan.

2. Fungsi Laporan Penelitian

Laporan penelitian memiliki beberapa fungsi penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

a. Sebagai Media Komunikasi Ilmiah

Laporan penelitian menjadi sarana penyampaian hasil penelitian kepada dosen, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat ilmiah sehingga temuan penelitian dapat dipelajari dan dikembangkan lebih lanjut.

b. Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Akademik

Penyusunan laporan menunjukkan bahwa penelitian dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip metodologi ilmiah, mulai dari perumusan masalah hingga penyusunan kesimpulan.

c. Sebagai Dokumentasi Ilmiah

Laporan penelitian menjadi arsip akademik yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

d. Sebagai Dasar Pengambilan Kebijakan

Dalam penelitian sejarah sosial, hasil penelitian sering menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat dalam memahami perubahan sosial dan pelestarian nilai-nilai sejarah.

3. Karakteristik Laporan Penelitian yang Baik

Laporan penelitian yang berkualitas memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut.

a. Sistematis

Isi laporan disusun secara runtut sesuai dengan tahapan penelitian sehingga memudahkan pembaca memahami alur penelitian.

b. Objektif

Peneliti menyajikan fakta berdasarkan data yang diperoleh tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun prasangka.

c. Logis

Hubungan antara masalah penelitian, teori, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan harus tersusun secara rasional.

d. Akurat

Seluruh data yang digunakan harus berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Komunikatif

Bahasa yang digunakan harus jelas, efektif, menggunakan bahasa Indonesia baku, serta mengikuti kaidah penulisan ilmiah.

4. Struktur Umum Laporan Penelitian

Secara umum, laporan penelitian terdiri atas tiga bagian utama, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

a. Bagian Awal

Bagian awal meliputi:

- 1) Halaman judul;
- 2) Lembar pengesahan;
- 3) Pernyataan keaslian karya;
- 4) Kata pengantar;

- 5) Daftar isi;
- 6) Daftar tabel (jika ada);
- 7) Daftar gambar (jika ada);
- 8) Daftar lampiran.

b. Bagian Isi

Bagian isi biasanya terdiri atas:

- 1) Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) Bab II Kajian Pustaka, yang berisi landasan teori, penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir.
- 3) Bab III Metode Penelitian, yang menjelaskan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.
- 4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang menyajikan temuan penelitian beserta analisis berdasarkan teori.
- 5) Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

c. Bagian Akhir

Bagian akhir meliputi:

- 1) Daftar pustaka;
- 2) Lampiran;
- 3) Riwayat hidup penulis (sesuai ketentuan institusi).

5. Penyusunan Laporan Penelitian Sejarah Sosial

Dalam penelitian sejarah sosial, laporan penelitian memiliki beberapa karakteristik khusus.

Pertama, penggunaan sumber sejarah harus dijelaskan secara rinci, baik sumber primer maupun sumber sekunder.

Kedua, kritik sumber perlu dijelaskan agar pembaca mengetahui proses seleksi terhadap keabsahan data sejarah.

Ketiga, interpretasi sejarah harus didasarkan pada hubungan sebab-akibat yang didukung oleh bukti empiris.

Keempat, pembahasan harus menunjukkan keterkaitan antara fakta sejarah dengan teori-teori sosial yang relevan.

Dengan demikian, laporan penelitian sejarah sosial tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

6. Prinsip Etika dalam Penyusunan Laporan Penelitian

Etika penelitian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan laporan ilmiah.

Beberapa prinsip etika yang harus diperhatikan antara lain:

- a. menyajikan data secara jujur;
- b. menghindari plagiarisme;
- c. mencantumkan seluruh sumber rujukan secara benar;
- d. menjaga kerahasiaan informan apabila diperlukan;
- e. tidak memanipulasi hasil penelitian.
- f. Dalam perspektif akademik, integritas ilmiah menjadi indikator utama kualitas seorang peneliti.

7. Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penyusunan Laporan

Mahasiswa sering menghadapi beberapa kendala dalam menyusun laporan penelitian, antara lain:

- a. rumusan masalah tidak konsisten dengan tujuan penelitian;
- b. pembahasan tidak menjawab rumusan masalah;
- c. teori tidak digunakan untuk menganalisis data;
- d. kesimpulan hanya mengulang hasil penelitian tanpa sintesis;
- e. penggunaan sitasi dan daftar pustaka tidak sesuai standar;
- f. kesalahan tata bahasa dan format penulisan.

Pemahaman terhadap kesalahan-kesalahan tersebut penting agar laporan penelitian memenuhi standar akademik yang berlaku.

8. Pemanfaatan Teknologi dalam Penyusunan Laporan

Perkembangan teknologi digital mempermudah proses penyusunan laporan penelitian.

Berbagai perangkat lunak dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pengolahan data;
- b. manajemen referensi (misalnya Mendeley, Zotero, atau EndNote);
- c. pemeriksaan tata bahasa;
- d. pengecekan kesamaan naskah (*similarity checking*);
- e. penyusunan tabel, grafik, dan ilustrasi.

Dalam penelitian sejarah sosial, teknologi digital juga mendukung akses terhadap arsip daring,

perpustakaan digital, serta koleksi sejarah yang telah terdigitalisasi.

9. Perspektif Sejarah Sosial dalam Penyusunan Laporan Penelitian

Dalam sejarah sosial, laporan penelitian bukan sekadar dokumentasi hasil penelitian, tetapi merupakan bentuk rekonstruksi ilmiah terhadap kehidupan masyarakat pada masa lalu. Peneliti dituntut mampu menghubungkan fakta-fakta sejarah dengan teori sosial sehingga menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai perubahan sosial.

Laporan penelitian yang baik harus memperlihatkan hubungan antara individu, kelompok sosial, struktur masyarakat, serta konteks sejarah yang melatarbelakangi suatu peristiwa. Dengan demikian, penelitian sejarah sosial tidak berhenti pada penyusunan kronologi, tetapi memberikan pemahaman mengenai proses perubahan masyarakat secara lebih mendalam.

B. Teknik Presentasi Ilmiah

Presentasi ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi akademik yang bertujuan menyampaikan hasil penelitian, gagasan, atau pemikiran ilmiah kepada audiens secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam dunia akademik, presentasi ilmiah menjadi bagian penting dari proses diseminasi ilmu pengetahuan, baik dalam seminar, konferensi, sidang skripsi, maupun forum diskusi ilmiah. Melalui presentasi, peneliti tidak hanya menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga

mempertanggungjawabkan metode, data, analisis, dan kesimpulan yang diperoleh kepada komunitas ilmiah.

Dalam penelitian sejarah sosial, presentasi ilmiah memiliki karakteristik tersendiri. Peneliti tidak hanya memaparkan kronologi suatu peristiwa sejarah, tetapi juga menjelaskan dinamika perubahan sosial, hubungan antaraktor, serta interpretasi terhadap fakta sejarah berdasarkan teori yang digunakan. Oleh karena itu, presentasi hasil penelitian sejarah sosial memerlukan kemampuan analisis, argumentasi, serta komunikasi yang baik agar hasil penelitian dapat dipahami secara komprehensif oleh audiens.

Kemampuan melakukan presentasi ilmiah merupakan salah satu kompetensi penting bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah. Selain menjadi syarat akademik dalam penyelesaian studi, keterampilan ini juga dibutuhkan dalam profesi sebagai pendidik, peneliti, maupun praktisi yang harus mampu menyampaikan gagasan secara efektif kepada berbagai kalangan.

1. Pengertian Presentasi Ilmiah

Presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil penelitian atau kajian ilmiah kepada audiens menggunakan media komunikasi yang sistematis, berbasis data, serta mengikuti kaidah akademik.

Menurut John W. Creswell (2018), hasil penelitian tidak hanya harus ditulis dalam bentuk laporan, tetapi juga dikomunikasikan secara efektif kepada masyarakat ilmiah agar dapat memperoleh masukan, kritik, dan pengembangan lebih lanjut.

Dalam perspektif sejarah sosial, presentasi ilmiah merupakan sarana untuk menyampaikan rekonstruksi sejarah berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber sejarah dan teori sosial sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan masyarakat.

2. Tujuan Presentasi Ilmiah

Presentasi ilmiah memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

a. Mengomunikasikan Hasil Penelitian

Presentasi menjadi media untuk menyampaikan temuan penelitian kepada dosen, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat akademik secara jelas dan sistematis.

b. Mempertanggungjawabkan Penelitian

Peneliti menjelaskan metode, sumber data, proses analisis, serta alasan ilmiah yang mendasari kesimpulan penelitian.

c. Memperoleh Masukan Akademik

Melalui sesi tanya jawab dan diskusi, peneliti memperoleh kritik serta saran yang dapat digunakan untuk menyempurnakan penelitian.

d. Mengembangkan Kemampuan Komunikasi Akademik

Presentasi melatih kemampuan berpikir kritis, menyusun argumen, dan menjawab pertanyaan secara ilmiah.

3. Persiapan Presentasi Ilmiah

Keberhasilan presentasi sangat dipengaruhi oleh persiapan yang matang. Beberapa langkah yang perlu dilakukan meliputi:

a. Memahami Isi Penelitian

Presenter harus menguasai seluruh bagian penelitian, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode, hasil, pembahasan, hingga kesimpulan. Penguasaan materi akan meningkatkan kepercayaan diri serta memudahkan dalam menjawab pertanyaan audiens.

b. Menentukan Tujuan Presentasi

Isi presentasi perlu disesuaikan dengan jenis kegiatan, seperti seminar proposal, seminar hasil, sidang skripsi, atau seminar ilmiah. Penyesuaian ini membantu menentukan fokus penyampaian materi.

c. Menyusun Alur Presentasi

Materi sebaiknya disusun secara runtut agar mudah dipahami oleh audiens. Struktur yang sistematis akan mempermudah penyampaian argumen dan hasil penelitian.

d. Berlatih Presentasi

Latihan sebelum pelaksanaan presentasi membantu mengatur waktu, meningkatkan kelancaran penyampaian, dan mengurangi rasa gugup.

4. Struktur Presentasi Hasil Penelitian

Secara umum, presentasi ilmiah terdiri atas beberapa bagian berikut.

a. Pembukaan

Presenter membuka presentasi dengan memperkenalkan diri, menyampaikan judul penelitian, serta menjelaskan tujuan presentasi.

b. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian dilakukan serta permasalahan yang ingin dikaji.

c. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Presenter menyampaikan fokus penelitian agar audiens memahami arah pembahasan.

d. Metode Penelitian

Bagian ini memuat pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

e. Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan berdasarkan data yang diperoleh, dilengkapi dengan tabel, gambar, peta, atau dokumen pendukung jika diperlukan.

f. Pembahasan

Presenter menghubungkan hasil penelitian dengan teori, penelitian terdahulu, serta konteks sejarah sosial yang relevan.

g. Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian akhir berisi jawaban atas rumusan masalah serta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya atau implementasi hasil penelitian.

5. Penggunaan Media Presentasi

Media presentasi berfungsi membantu audiens memahami isi penelitian.

Media yang umum digunakan meliputi:

- a. Microsoft PowerPoint;
- b. Google Slides;
- c. infografik;
- d. peta sejarah;
- e. foto arsip;
- f. diagram;
- g. tabel;
- h. grafik.

Dalam penelitian sejarah sosial, penggunaan foto dokumentasi, peta wilayah, arsip sejarah, dan ilustrasi kronologi sangat membantu menjelaskan perubahan sosial yang diteliti.

Media presentasi hendaknya sederhana, konsisten, mudah dibaca, dan tidak memuat teks yang terlalu panjang. Prinsip utama adalah bahwa media mendukung penjelasan presenter, bukan menggantikannya.

6. Teknik Penyampaian Presentasi

Kemampuan menyampaikan materi merupakan aspek penting dalam presentasi ilmiah.

Beberapa teknik yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Komunikasi Verbal

Gunakan bahasa Indonesia yang baik, baku, jelas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan istilah yang tidak dijelaskan atau bahasa yang terlalu informal.

b. Komunikasi Nonverbal

Kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan postur tubuh yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi serta membangun interaksi dengan audiens.

c. Manajemen Waktu

Presenter harus mampu menyampaikan seluruh materi sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. Penyampaian yang terlalu cepat dapat mengurangi pemahaman audiens, sedangkan penyampaian yang terlalu lambat berisiko tidak menyelesaikan seluruh materi.

d. Penguasaan Audiens

Presenter perlu menjaga perhatian audiens dengan penyampaian yang runtut, intonasi suara yang jelas, serta penggunaan contoh-contoh yang relevan.

7. Teknik Menjawab Pertanyaan

Sesi tanya jawab merupakan bagian penting dari presentasi ilmiah karena menunjukkan kemampuan peneliti dalam mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya.

Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah:

- a. mendengarkan pertanyaan hingga selesai;
- b. memastikan maksud pertanyaan dipahami dengan benar;
- c. menjawab berdasarkan data penelitian, teori, dan bukti ilmiah;
- d. menghindari jawaban yang bersifat emosional atau defensif;

- e. mengakui keterbatasan penelitian apabila terdapat pertanyaan di luar ruang lingkup penelitian.

Dalam penelitian sejarah sosial, jawaban hendaknya didasarkan pada interpretasi terhadap sumber sejarah dan teori yang digunakan, bukan sekadar opini pribadi.

10. Etika dalam Presentasi Ilmiah

Presentasi ilmiah harus dilakukan dengan menjunjung tinggi etika akademik.

Beberapa prinsip etika yang perlu diterapkan meliputi:

- a. menyampaikan data secara jujur;
- b. mencantumkan sumber kutipan dan ilustrasi;
- c. menghargai pendapat dan kritik audiens;
- d. menghindari plagiarisme;
- e. menjaga sikap profesional selama presentasi dan diskusi.

Etika akademik merupakan bagian penting dari integritas ilmiah yang harus dimiliki setiap peneliti.

11. Presentasi Penelitian Sejarah Sosial

Dalam penelitian sejarah sosial, presentasi tidak hanya menampilkan kronologi peristiwa, tetapi juga menjelaskan hubungan antara fakta sejarah dengan perubahan struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

Presenter perlu menunjukkan bagaimana teori sosial digunakan untuk menganalisis data sejarah sehingga menghasilkan interpretasi yang ilmiah. Selain itu, penggunaan sumber primer seperti arsip, dokumen, surat

kabar, foto sejarah, atau hasil wawancara perlu dijelaskan untuk memperkuat validitas penelitian.

Mahasiswa Pendidikan Sejarah juga perlu menghubungkan hasil penelitian dengan konteks pembelajaran sejarah sehingga temuan penelitian memiliki nilai akademik sekaligus manfaat praktis bagi dunia pendidikan.

C. Diskusi Hasil Penelitian

Diskusi hasil penelitian merupakan tahapan penting dalam proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mengkaji, menginterpretasikan, dan mengevaluasi temuan penelitian melalui forum akademik. Dalam penelitian sejarah sosial, diskusi hasil penelitian tidak hanya menjadi sarana untuk memaparkan data yang diperoleh, tetapi juga untuk menjelaskan makna historis dari temuan tersebut dengan menghubungkannya pada teori, konsep, serta penelitian terdahulu. Melalui proses diskusi, peneliti memperoleh kesempatan untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya sekaligus menerima masukan yang dapat meningkatkan kualitas karya ilmiah.

Dalam tradisi akademik, diskusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berkembang melalui dialog, kritik, argumentasi, dan verifikasi terhadap hasil penelitian. Oleh karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya mampu menyusun laporan penelitian dan mempresentasikannya, tetapi juga harus memiliki kemampuan berdiskusi secara ilmiah. Kemampuan tersebut

mencerminkan sikap ilmiah yang terbuka terhadap kritik, mampu menyampaikan argumentasi secara logis, serta menghargai perbedaan pendapat.

Dalam kajian sejarah sosial, diskusi memiliki peran yang lebih kompleks karena objek penelitian berupa kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan lingkungan. Interpretasi terhadap suatu peristiwa sejarah dapat berbeda antarpeneliti, selama didasarkan pada sumber sejarah yang sah dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, diskusi hasil penelitian menjadi ruang akademik untuk menguji validitas interpretasi tersebut.

1. Pengertian Diskusi Hasil Penelitian

Diskusi hasil penelitian adalah proses komunikasi ilmiah yang dilakukan untuk membahas, mengkaji, dan mengevaluasi temuan penelitian melalui pertukaran pendapat berdasarkan data, teori, dan metode ilmiah.

Menurut Creswell (2018), diskusi merupakan bagian dari proses interpretasi penelitian yang menjelaskan makna hasil penelitian, hubungannya dengan teori, serta kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Dalam perspektif sejarah sosial, diskusi hasil penelitian berfungsi untuk menguji sejauh mana interpretasi terhadap fakta sejarah mampu menjelaskan dinamika perubahan masyarakat secara objektif dan komprehensif.

2. Tujuan Diskusi Hasil Penelitian

Diskusi hasil penelitian memiliki beberapa tujuan penting.

a. Menguji Validitas Temuan Penelitian

Melalui diskusi, hasil penelitian memperoleh tanggapan dari dosen, peneliti, maupun mahasiswa lain sehingga kekuatan dan kelemahan penelitian dapat diidentifikasi.

b. Menyempurnakan Interpretasi Penelitian

Masukan dari peserta diskusi membantu peneliti memperluas sudut pandang dalam menjelaskan fenomena sejarah sosial.

c. Mengembangkan Pemikiran Kritis

Diskusi mendorong mahasiswa untuk menganalisis data secara lebih mendalam serta menyusun argumentasi yang didukung oleh bukti empiris.

d. Membangun Tradisi Akademik

Diskusi menjadi media pembelajaran kolaboratif yang memperkuat budaya ilmiah melalui dialog yang terbuka, objektif, dan saling menghargai.

3. Prinsip-Prinsip Diskusi Ilmiah

Diskusi hasil penelitian harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akademik.

a. Berbasis Bukti

Setiap pendapat yang disampaikan harus didukung oleh data penelitian, sumber sejarah, teori, atau hasil penelitian terdahulu.

e. Objektif

Argumentasi disampaikan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau asumsi yang tidak memiliki dasar ilmiah.

f. Terbuka terhadap Kritik

Peneliti perlu menerima kritik sebagai bagian dari proses penyempurnaan penelitian, bukan sebagai bentuk penolakan terhadap hasil penelitiannya.

g. Menghormati Perbedaan Pendapat

Perbedaan interpretasi merupakan hal yang wajar dalam penelitian sejarah sosial selama didukung oleh argumentasi yang logis dan bukti yang memadai.

4. Tahapan Diskusi Hasil Penelitian

Diskusi hasil penelitian umumnya berlangsung melalui beberapa tahapan.

a. Penyampaian Ringkasan Penelitian

Peneliti menjelaskan tujuan penelitian, metode, hasil utama, dan kesimpulan secara singkat agar peserta memahami konteks penelitian.

b. Penyampaian Pertanyaan dan Tanggapan

Peserta diskusi memberikan pertanyaan, kritik, maupun saran yang berkaitan dengan aspek metodologi, teori, analisis, maupun kesimpulan penelitian.

c. Klarifikasi oleh Peneliti

Peneliti memberikan penjelasan berdasarkan data dan teori yang digunakan sehingga argumentasi yang disampaikan tetap berada dalam koridor ilmiah.

d. Penyusunan Simpulan Diskusi

Hasil diskusi dirangkum sebagai bahan evaluasi dan dasar penyempurnaan laporan penelitian.

5. Teknik Menyampaikan Argumentasi

Kemampuan menyampaikan argumentasi menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam diskusi ilmiah.

Beberapa teknik yang perlu diperhatikan meliputi:

- a. menyampaikan pendapat secara sistematis;
- b. menggunakan bahasa ilmiah yang jelas;
- c. menghubungkan argumen dengan teori yang digunakan;
- d. menyajikan bukti berupa data penelitian atau sumber sejarah;
- e. menghindari argumentasi yang bersifat emosional.

Dalam penelitian sejarah sosial, argumentasi harus menunjukkan hubungan antara fakta sejarah, teori sosial, dan interpretasi yang dibangun oleh peneliti.

6. Menanggapi Kritik dan Pertanyaan

Salah satu tantangan dalam diskusi hasil penelitian adalah kemampuan menerima dan menanggapi kritik.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. mendengarkan pertanyaan secara utuh;
- b. memahami inti persoalan yang ditanyakan;
- c. menjawab berdasarkan hasil penelitian;
- d. memberikan penjelasan yang logis dan didukung referensi;
- e. mengakui keterbatasan penelitian apabila diperlukan.

Sikap terbuka terhadap kritik mencerminkan integritas akademik dan komitmen terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

7. Diskusi Hasil Penelitian dalam Kajian Sejarah Sosial

Penelitian sejarah sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan penelitian sejarah politik atau sejarah militer. Fokus utama penelitian sejarah sosial adalah kehidupan masyarakat, perubahan struktur sosial, hubungan antarkelompok, budaya, ekonomi, gender, agama, etnisitas, migrasi, serta dinamika kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu, dalam diskusi hasil penelitian sejarah sosial, beberapa aspek berikut perlu mendapat perhatian.

Pertama, validitas sumber sejarah. Peneliti harus mampu menjelaskan asal-usul sumber, proses kritik sumber, dan alasan memilih sumber tersebut.

Kedua, penggunaan teori sosial. Teori harus digunakan sebagai alat analisis, bukan sekadar menjadi bagian dari kajian pustaka.

Ketiga, interpretasi historis. Peneliti perlu menunjukkan hubungan sebab-akibat, perubahan, dan kesinambungan dalam fenomena sosial yang diteliti.

Keempat, relevansi penelitian. Temuan penelitian sebaiknya dikaitkan dengan isu-isu sosial kontemporer sehingga memiliki kontribusi akademik maupun praktis.

Dengan demikian, diskusi hasil penelitian sejarah sosial tidak hanya menguji keakuratan fakta, tetapi juga kualitas analisis dan interpretasi peneliti.

8. Etika dalam Diskusi Ilmiah

Diskusi ilmiah harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika akademik.

Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi:

- a. menghargai setiap peserta diskusi;
- b. menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif;
- c. menghindari serangan terhadap pribadi peneliti;
- d. memberikan kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pendapat;
- e. menggunakan data dan referensi secara jujur;
- f. mengakui kontribusi peneliti lain melalui sitasi yang benar.

Etika diskusi menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga proses pertukaran gagasan berlangsung secara produktif.

9. Refleksi dan Tindak Lanjut Hasil Diskusi

Tahap akhir diskusi adalah melakukan refleksi terhadap seluruh masukan yang diperoleh.

Peneliti perlu mengidentifikasi bagian-bagian penelitian yang memerlukan revisi, baik pada aspek metodologi, analisis, penggunaan teori, maupun penulisan laporan. Masukan yang relevan kemudian diintegrasikan ke dalam naskah penelitian sebagai bentuk penyempurnaan.

Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, proses refleksi ini penting karena membentuk kebiasaan melakukan

evaluasi diri (*self-evaluation*) dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dalam konteks penelitian sejarah sosial, refleksi juga membantu peneliti menghasilkan interpretasi yang lebih mendalam, seimbang, dan didukung oleh bukti historis yang kuat.

Kesimpulan

Presentasi hasil penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian ilmiah karena menjadi sarana untuk menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil penelitian kepada masyarakat akademik. Proses ini mencakup penyusunan laporan yang sistematis, penyampaian hasil penelitian secara jelas, serta diskusi untuk menguji dan memperkuat temuan yang telah diperoleh.

Dalam penelitian sejarah sosial, penyajian hasil penelitian tidak hanya memaparkan fakta dan kronologi, tetapi juga menjelaskan hubungan antara sumber sejarah, teori sosial, dan interpretasi terhadap perubahan masyarakat. Presentasi yang baik membutuhkan penguasaan materi, penggunaan media yang sesuai, kemampuan berargumentasi berdasarkan bukti, serta kesiapan dalam menerima pertanyaan dan kritik akademik.

Diskusi hasil penelitian kemudian menjadi ruang untuk memperkaya interpretasi dan mengevaluasi kekuatan maupun keterbatasan penelitian. Masukan yang diperoleh dapat digunakan untuk menyempurnakan laporan dan memperkuat argumentasi. Kemampuan menyusun laporan, mempresentasikan hasil, dan berdiskusi secara ilmiah pada akhirnya menjadi bagian dari keterampilan akademik

mahasiswa dalam menghasilkan serta mengomunikasikan penelitian sejarah sosial secara bertanggung jawab.

Studi Reflektif

1. Mengapa hasil penelitian perlu disusun dan dipresentasikan secara sistematis?
2. Bagaimana sumber sejarah dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam presentasi penelitian?
3. Mengapa kemampuan menerima dan menanggapi kritik penting dalam diskusi ilmiah?
4. Bagaimana diskusi akademik dapat membantu memperbaiki interpretasi hasil penelitian sejarah sosial?
5. Apa hubungan antara penyusunan laporan, presentasi ilmiah, dan diskusi dalam proses penelitian sejarah sosial?

BAB XV:

REFLEKSI DAN REVIEW MATERI

A. Review Materi Semester

Review materi semester merupakan tahapan penting dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk meninjau kembali seluruh konsep, teori, dan hasil pembelajaran yang telah dipelajari selama satu semester. Dalam pembelajaran Sejarah Sosial, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengulangan materi, tetapi juga sebagai proses sintesis untuk memahami keterkaitan antarperistiwa sejarah, dinamika masyarakat, serta perubahan sosial yang terjadi dari waktu ke waktu. Melalui kegiatan review, mahasiswa diharapkan mampu membangun pemahaman yang lebih komprehensif, menghubungkan berbagai konsep yang telah dipelajari, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap fenomena sosial historis.

Dalam perspektif pembelajaran di perguruan tinggi, review materi merupakan bagian dari proses refleksi akademik yang bertujuan memperkuat penguasaan konsep sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, maupun praktik pembelajaran sejarah. Sejarah sosial tidak hanya dipahami sebagai kumpulan fakta masa lalu, tetapi sebagai kajian mengenai perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, gender, migrasi, dan globalisasi. Oleh karena itu, kegiatan review perlu dilakukan secara

integratif sehingga mahasiswa dapat melihat hubungan antartopik yang telah dipelajari.

1. Hakikat Sejarah Sosial

Pada awal perkuliahan, mahasiswa mempelajari konsep dasar sejarah sosial sebagai cabang historiografi yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama kajian. Berbeda dengan sejarah politik yang berorientasi pada negara atau tokoh besar, sejarah sosial mengkaji kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan antarkelompok, struktur sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, agama, dan berbagai bentuk perubahan sosial.

Kajian sejarah sosial berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan historiografi tradisional yang lebih menonjolkan aspek politik dan elite. Tokoh-tokoh seperti Marc Bloch, Lucien Febvre, dan Fernand Braudel melalui Mazhab Annales memperluas cakupan sejarah dengan memasukkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya sebagai bagian penting dalam analisis sejarah. Di Indonesia, pendekatan ini kemudian dikembangkan oleh sejarawan seperti Sartono Kartodirdjo dan Kuntowijoyo, yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses sejarah.

Pemahaman terhadap hakikat sejarah sosial menjadi dasar bagi seluruh pembahasan pada bab-bab berikutnya.

2. Perubahan Sosial sebagai Benang Merah Pembelajaran

Salah satu konsep utama yang dipelajari selama satu semester adalah perubahan sosial. Seluruh materi dalam buku ajar ini pada dasarnya menjelaskan bagaimana

masyarakat mengalami perubahan akibat interaksi berbagai faktor internal maupun eksternal.

Mahasiswa mempelajari bahwa perubahan sosial dapat berlangsung secara lambat (*evolusi*) maupun cepat (*revolusi*), serta dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, pendidikan, agama, maupun interaksi dengan masyarakat lain.

Dengan memahami teori perubahan sosial dari para ahli seperti Auguste Comte, Émile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber, mahasiswa memperoleh kerangka konseptual untuk menganalisis berbagai fenomena sejarah secara lebih sistematis.

3. Hubungan Struktur Sosial dan Kehidupan Masyarakat

Pembelajaran sejarah sosial juga menekankan pentingnya memahami struktur sosial sebagai kerangka yang mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat.

Mahasiswa telah mempelajari konsep stratifikasi sosial, mobilitas sosial, diferensiasi sosial, serta pembentukan lembaga-lembaga sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif sejarah sosial, perubahan struktur sosial tidak pernah berlangsung secara terpisah dari perubahan ekonomi, politik, maupun budaya. Oleh sebab itu, setiap peristiwa sejarah harus dipahami dalam konteks hubungan antareleman tersebut.

4. Perkembangan Historiografi Sosial

Selama perkuliahan, mahasiswa juga mempelajari perkembangan historiografi dari pendekatan tradisional menuju historiografi modern.

Perubahan tersebut ditandai dengan semakin luasnya objek penelitian sejarah yang tidak lagi berfokus pada raja, perang, atau negara, tetapi juga pada kehidupan masyarakat biasa, kelompok perempuan, petani, buruh, komunitas lokal, dan kelompok marginal lainnya.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa sejarah merupakan hasil interaksi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya karya tokoh-tokoh besar.

5. Integrasi Tema-tema Sejarah Sosial

Berbagai tema yang dipelajari selama satu semester saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan analisis.

Mahasiswa telah mengkaji:

- a. perubahan sosial;
- b. globalisasi;
- c. modernisasi;
- d. migrasi;
- e. urbanisasi;
- f. gender;
- g. etnisitas;
- h. identitas sosial;
- i. agama;
- j. konflik dan integrasi sosial;
- k. penelitian sejarah sosial.

Seluruh tema tersebut memperlihatkan bahwa perubahan masyarakat terjadi melalui proses yang

kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi.

Sebagai contoh, urbanisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan modernisasi, globalisasi, perubahan struktur keluarga, serta pembentukan identitas sosial baru.

Demikian pula, pembahasan mengenai gender tidak dapat dipisahkan dari perubahan budaya, pendidikan, politik, maupun perkembangan gerakan sosial.

6. Relevansi Sejarah Sosial terhadap Kehidupan Kontemporer

Salah satu tujuan utama mempelajari sejarah sosial adalah memahami berbagai persoalan masyarakat masa kini melalui perspektif historis.

Permasalahan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, konflik identitas, perubahan budaya, transformasi digital, urbanisasi, maupun globalisasi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil proses sejarah yang panjang.

Melalui pendekatan sejarah sosial, mahasiswa dapat melihat hubungan antara masa lalu dan masa kini sehingga mampu memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Dengan demikian, sejarah sosial memiliki relevansi yang tinggi dalam mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan.

7. Penguatan Kompetensi Mahasiswa

Selama mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan telah mengembangkan berbagai kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap akademik.

Kompetensi tersebut meliputi:

- a. Memahami konsep-konsep dasar sejarah sosial;
- b. Menganalisis perubahan masyarakat secara historis;
- c. Menggunakan teori sosial sebagai alat analisis;
- d. Melakukan penelitian sejarah secara sistematis;
- e. Menyusun laporan penelitian ilmiah;
- f. Mempresentasikan hasil penelitian;
- g. Berdiskusi secara akademik;
- h. Mengembangkan sikap kritis, objektif, dan menghargai keberagaman.

Kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah sebagai calon pendidik, peneliti, maupun praktisi sejarah.

8. Tantangan Kajian Sejarah Sosial pada Era Digital

Perkembangan teknologi informasi menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi kajian sejarah sosial.

Digitalisasi arsip, perpustakaan daring, basis data sejarah, serta penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) membuka akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber sejarah.

Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, manipulasi sejarah, dan rendahnya literasi digital menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh sejarawan.

Mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan melakukan kritik sumber, verifikasi data, serta memanfaatkan teknologi digital secara bertanggung jawab dalam penelitian sejarah.

9. Sintesis Pembelajaran Sejarah Sosial

Secara keseluruhan, materi yang telah dipelajari selama satu semester menunjukkan bahwa sejarah sosial merupakan disiplin ilmu yang menjelaskan dinamika masyarakat melalui pendekatan multidisipliner. Sejarah sosial tidak hanya merekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa setiap fenomena sosial memiliki dimensi historis yang penting untuk dikaji. Perspektif tersebut akan membantu mahasiswa dalam melakukan penelitian, menyusun pembelajaran sejarah yang kontekstual, serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial di masyarakat.

Dengan demikian, review materi semester bukan sekadar pengulangan isi perkuliahan, melainkan proses membangun pemahaman yang utuh mengenai sejarah sebagai ilmu yang relevan untuk memahami masa lalu, menjelaskan masa kini, dan memberikan arah bagi masa depan.

B. Diskusi Umum

Diskusi umum merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi karena memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengintegrasikan pengetahuan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta mengomunikasikan hasil analisis secara ilmiah. Dalam mata kuliah Sejarah Sosial, diskusi umum tidak hanya menjadi sarana untuk mengulang materi yang telah dipelajari, tetapi juga menjadi media untuk menghubungkan konsep-konsep sejarah dengan realitas sosial kontemporer. Melalui diskusi, mahasiswa diajak memahami bahwa sejarah bukan sekadar catatan mengenai masa lalu, melainkan ilmu yang memberikan landasan dalam menganalisis perubahan masyarakat pada masa kini dan merumuskan arah pembangunan sosial pada masa depan.

Dalam perspektif sejarah sosial, setiap peristiwa sejarah merupakan hasil interaksi berbagai faktor, seperti ekonomi, politik, budaya, agama, teknologi, lingkungan, dan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, diskusi umum harus mampu menghubungkan berbagai faktor tersebut secara komprehensif. Mahasiswa tidak hanya diminta menjelaskan fakta sejarah, tetapi juga menganalisis hubungan sebab-akibat, kesinambungan (*continuity*), perubahan (*change*), serta relevansi suatu peristiwa dengan kondisi masyarakat saat ini.

Diskusi yang berkualitas juga mencerminkan budaya akademik yang sehat. Forum diskusi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat berdasarkan bukti, menghargai perbedaan

pandangan, serta membangun argumentasi yang logis. Dengan demikian, diskusi menjadi bagian dari proses pembentukan kompetensi akademik sekaligus karakter ilmiah yang diperlukan oleh calon pendidik dan peneliti sejarah.

1. Hakikat Diskusi dalam Pembelajaran Sejarah Sosial

Diskusi merupakan metode pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses belajar. Melalui diskusi, mahasiswa tidak hanya menerima informasi dari dosen, tetapi juga membangun pengetahuan melalui pertukaran gagasan, analisis, dan refleksi terhadap berbagai persoalan sejarah.

Menurut Vygotsky (1978), pembelajaran berlangsung secara optimal melalui interaksi sosial. Pengetahuan berkembang ketika individu berdialog, bertukar pengalaman, dan membangun pemahaman bersama. Dalam konteks sejarah sosial, diskusi menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan berpikir historis (*historical thinking*) serta kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*).

Melalui diskusi, mahasiswa belajar melihat suatu peristiwa sejarah dari berbagai perspektif sehingga terhindar dari cara pandang yang sempit dan deterministik.

2. Tujuan Diskusi Umum

Diskusi umum dalam mata kuliah Sejarah Sosial memiliki beberapa tujuan utama.

Pertama, mengintegrasikan seluruh materi yang telah dipelajari selama satu semester sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dinamika perubahan masyarakat.

Kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis terhadap berbagai persoalan sosial historis.

Ketiga, melatih kemampuan komunikasi ilmiah dalam menyampaikan pendapat secara sistematis dan argumentatif.

Keempat, membangun sikap terbuka terhadap berbagai perspektif ilmiah sebagai bagian dari budaya akademik.

Kelima, menghubungkan teori sejarah sosial dengan realitas sosial kontemporer sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual.

3. Prinsip-Prinsip Diskusi Akademik

Agar diskusi menghasilkan pembelajaran yang bermakna, beberapa prinsip akademik perlu diterapkan.

a. Berbasis Bukti

Setiap pendapat yang disampaikan harus didukung oleh data sejarah, teori sosial, hasil penelitian, atau referensi ilmiah yang relevan.

b. Berpikir Kritis

Mahasiswa perlu menganalisis informasi secara mendalam, mengidentifikasi hubungan sebab-akibat, serta mengevaluasi berbagai sudut pandang sebelum menarik kesimpulan.

c. Menghargai Perbedaan Pendapat

Dalam kajian sejarah sosial, perbedaan interpretasi merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, setiap peserta diskusi harus menghargai pendapat orang lain selama didukung oleh argumentasi ilmiah.

d. Bersikap Objektif

Diskusi hendaknya berorientasi pada pencarian kebenaran ilmiah, bukan pada membenaran pendapat pribadi.

4. Tema-Tema Diskusi Integratif

Sebagai penutup mata kuliah, diskusi dapat diarahkan pada berbagai tema yang mengintegrasikan seluruh materi perkuliahan.

Beberapa tema yang dapat dibahas antara lain:

- a. perubahan sosial di Indonesia pada era digital;
- b. pengaruh globalisasi terhadap identitas budaya masyarakat;
- c. hubungan antara migrasi, urbanisasi, dan perubahan struktur sosial;
- d. peran pendidikan dalam perubahan sosial;
- e. dinamika gender dalam perkembangan masyarakat Indonesia;
- f. konflik, integrasi, dan kohesi sosial;
- g. agama sebagai agen perubahan sosial;
- h. pelestarian sejarah lokal di tengah modernisasi;
- i. tantangan historiografi sosial pada abad ke-21.

Melalui tema-tema tersebut, mahasiswa dapat menerapkan konsep-konsep sejarah sosial dalam menganalisis persoalan yang berkembang di masyarakat.

5. Teknik Membangun Argumentasi dalam Diskusi

Kemampuan menyampaikan argumentasi merupakan kompetensi penting dalam diskusi akademik.

Argumentasi yang baik memiliki beberapa karakteristik.

Pertama, disusun secara logis dan sistematis.

Kedua, didukung oleh fakta sejarah maupun data empiris.

Ketiga, menggunakan teori sosial sebagai landasan analisis.

Keempat, mampu menunjukkan hubungan antara masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan pada masa depan.

Dalam kajian sejarah sosial, argumentasi yang kuat tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengapa peristiwa tersebut terjadi, bagaimana prosesnya berlangsung, dan apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

6. Peran Dosen sebagai Fasilitator Diskusi

Dalam pembelajaran berbasis diskusi, dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan jalannya diskusi agar tetap berada pada koridor akademik.

Peran dosen meliputi:

- a. merumuskan pertanyaan pemantik;
- b. mengarahkan diskusi agar tetap fokus pada topik;
- c. membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan fakta sejarah;
- d. memberikan klarifikasi terhadap konsep yang kurang dipahami;

- e. mendorong seluruh mahasiswa berpartisipasi secara aktif;
- f. memberikan umpan balik terhadap kualitas argumentasi mahasiswa.

Dengan demikian, dosen tidak mendominasi diskusi, tetapi menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif.

7. Diskusi sebagai Sarana Penguatan Berpikir Historis

Salah satu tujuan utama pembelajaran sejarah adalah mengembangkan kemampuan berpikir historis.

Dalam forum diskusi, mahasiswa dilatih untuk:

- a. memahami konteks sejarah suatu peristiwa;
- b. membedakan fakta dan interpretasi;
- c. mengidentifikasi hubungan sebab-akibat;
- d. menganalisis perubahan dan keberlanjutan (*change and continuity*);
- e. membandingkan berbagai perspektif sejarah;
- f. menyusun interpretasi berdasarkan bukti sejarah.

Kemampuan tersebut sangat penting bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah karena akan menjadi dasar dalam penelitian maupun pembelajaran sejarah di sekolah.

8. Relevansi Diskusi terhadap Kehidupan Kontemporer

Diskusi sejarah sosial memiliki nilai strategis karena membantu mahasiswa memahami berbagai persoalan masyarakat masa kini.

Misalnya, fenomena urbanisasi dapat dianalisis menggunakan konsep migrasi dan perubahan struktur

sosial. Isu intoleransi dapat dikaji melalui pembahasan mengenai agama, konflik, dan integrasi sosial. Perkembangan media digital dapat dipahami melalui teori globalisasi dan modernisasi.

Dengan demikian, sejarah sosial memberikan perspektif bahwa setiap persoalan kontemporer memiliki akar sejarah yang perlu dipahami sebelum dirumuskan solusi yang tepat.

9. Refleksi Akhir Pembelajaran

Diskusi umum pada akhir semester menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan refleksi terhadap seluruh proses pembelajaran.

Refleksi tersebut mencakup:

- a. konsep-konsep yang telah dikuasai;
- b. keterampilan yang telah berkembang;
- c. kesulitan yang masih dihadapi;
- d. manfaat pembelajaran bagi kehidupan akademik maupun profesional;
- e. rencana pengembangan kompetensi pada masa mendatang.

Melalui refleksi, mahasiswa diharapkan menyadari bahwa belajar sejarah sosial bukan hanya untuk memperoleh nilai akademik, tetapi juga untuk membentuk cara berpikir yang kritis, objektif, dan humanis dalam memahami masyarakat.

C. Jurnal Refleksi Pembelajaran

Jurnal refleksi pembelajaran merupakan salah satu bentuk evaluasi diri yang dilakukan secara sistematis untuk

memahami pengalaman belajar, mengidentifikasi perkembangan kompetensi, serta merencanakan perbaikan pada proses pembelajaran berikutnya. Dalam pendidikan tinggi, khususnya pada mata kuliah Sejarah Sosial, jurnal refleksi tidak hanya berfungsi sebagai catatan pengalaman mahasiswa selama mengikuti perkuliahan, tetapi juga menjadi media untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berpikir reflektif, dan kesadaran akademik (*academic self-awareness*). Melalui kegiatan refleksi, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana pengetahuan yang diperoleh selama satu semester membentuk cara pandang mereka terhadap dinamika masyarakat, perubahan sosial, dan relevansi sejarah dalam kehidupan kontemporer.

Dalam perspektif pendidikan modern, refleksi merupakan bagian dari pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student-centered learning*). Refleksi memungkinkan mahasiswa mengevaluasi proses belajar, mengenali kekuatan dan kelemahan diri, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, kemampuan melakukan refleksi menjadi penting karena tidak hanya mendukung keberhasilan akademik, tetapi juga membentuk karakter sebagai calon pendidik yang mampu melakukan evaluasi dan pengembangan diri secara berkelanjutan.

Dalam kajian sejarah sosial, refleksi memiliki makna yang lebih luas. Mahasiswa diajak untuk melihat bahwa setiap peristiwa sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga mengandung

nilai, pelajaran, dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan masa kini. Oleh karena itu, jurnal refleksi pembelajaran menjadi jembatan antara pemahaman konseptual dengan pengalaman belajar yang bersifat personal maupun profesional.

1. Pengertian Jurnal Refleksi Pembelajaran

Jurnal refleksi pembelajaran adalah catatan akademik yang berisi hasil pemikiran mahasiswa mengenai pengalaman belajar, pemahaman konsep, tantangan yang dihadapi, serta rencana pengembangan diri setelah mengikuti proses pembelajaran.

Menurut Donald A. Schön (1983), refleksi merupakan proses berpikir secara sadar terhadap pengalaman yang telah dialami untuk memperoleh pemahaman baru dan meningkatkan kualitas tindakan pada masa mendatang. Dalam konteks pendidikan, refleksi membantu mahasiswa menghubungkan teori dengan praktik serta membangun kebiasaan belajar sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Pada mata kuliah Sejarah Sosial, jurnal refleksi menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menilai bagaimana konsep-konsep yang dipelajari, seperti perubahan sosial, globalisasi, modernisasi, gender, etnisitas, migrasi, dan agama, memengaruhi cara mereka memahami dinamika masyarakat Indonesia maupun dunia.

2. Tujuan Jurnal Refleksi Pembelajaran

Penyusunan jurnal refleksi memiliki beberapa tujuan utama.

a. Mengevaluasi Proses Pembelajaran

Mahasiswa melakukan penilaian terhadap pengalaman belajar selama satu semester, termasuk keberhasilan, kendala, dan strategi yang digunakan dalam memahami materi.

b. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Reflektif

Melalui refleksi, mahasiswa belajar menghubungkan pengalaman belajar dengan teori serta mengidentifikasi makna dari proses pembelajaran yang telah berlangsung.

c. Meningkatkan Kesadaran Diri

Jurnal refleksi membantu mahasiswa mengenali kemampuan, minat, dan kebutuhan pengembangan diri sebagai calon pendidik maupun peneliti sejarah.

d. Merencanakan Pengembangan Kompetensi

Hasil refleksi menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah untuk meningkatkan kemampuan akademik, penelitian, komunikasi, maupun keterampilan profesional.

3. Komponen Jurnal Refleksi Pembelajaran

Agar jurnal refleksi memberikan manfaat yang optimal, penyusunannya perlu memuat beberapa komponen berikut.

a. Deskripsi Pengalaman Belajar

Mahasiswa menjelaskan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, termasuk aktivitas diskusi, presentasi, penugasan, maupun penelitian.

b. Analisis Pembelajaran

Mahasiswa menganalisis materi yang dianggap paling bermakna serta menjelaskan alasan pentingnya materi tersebut bagi pengembangan wawasan sejarah sosial.

c. Evaluasi Diri

Mahasiswa mengidentifikasi kekuatan yang telah dimiliki serta aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran.

d. Rencana Tindak Lanjut

Mahasiswa menyusun langkah konkret untuk meningkatkan kompetensi pada masa mendatang, seperti memperdalam literatur, meningkatkan kemampuan penelitian, atau mengembangkan keterampilan komunikasi ilmiah.

4. Refleksi terhadap Materi Sejarah Sosial

Selama satu semester, mahasiswa telah mempelajari berbagai konsep penting dalam sejarah sosial. Refleksi terhadap materi tidak hanya berupa pengulangan isi pembelajaran, tetapi juga analisis mengenai keterkaitan antar konsep.

Sebagai contoh, mahasiswa dapat merefleksikan bahwa perubahan sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti globalisasi, modernisasi, migrasi, perkembangan teknologi, perubahan struktur ekonomi, maupun dinamika budaya. Mahasiswa juga dapat memahami bahwa sejarah sosial memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan historiografi

tradisional karena menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses sejarah.

Refleksi semacam ini membantu mahasiswa membangun pemahaman yang bersifat integratif dan kontekstual.

5. Refleksi terhadap Pengalaman Penelitian

Selain mempelajari teori, mahasiswa juga telah diperkenalkan pada proses penelitian sejarah sosial, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan sumber sejarah, analisis data, penyusunan laporan penelitian, hingga presentasi hasil penelitian.

Melalui jurnal refleksi, mahasiswa dapat mengevaluasi pengalaman tersebut, misalnya:

- a. kesulitan dalam menemukan sumber primer;
- b. tantangan melakukan kritik sumber;
- c. pengalaman menggunakan teori sosial dalam analisis data;
- d. manfaat diskusi ilmiah dalam menyempurnakan penelitian.

Refleksi ini penting karena membantu mahasiswa memahami bahwa penelitian merupakan proses pembelajaran yang memerlukan ketekunan, ketelitian, dan integritas akademik.

6. Pengembangan Sikap Akademik

Pembelajaran sejarah sosial tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap akademik.

Melalui jurnal refleksi, mahasiswa dapat mengevaluasi perkembangan sikap seperti:

- a. berpikir kritis;
- b. objektivitas dalam menganalisis data;
- c. keterbukaan terhadap kritik;
- d. kemampuan bekerja sama dalam diskusi kelompok;
- e. penghargaan terhadap keberagaman perspektif.

Sikap-sikap tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan profesi sebagai pendidik, peneliti, maupun anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

7. Relevansi Pembelajaran terhadap Kehidupan Nyata

Salah satu aspek penting dalam refleksi adalah menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa dapat merefleksikan bagaimana pemahaman mengenai sejarah sosial membantu menjelaskan berbagai persoalan kontemporer, seperti:

- a. ketimpangan sosial;
- b. urbanisasi;
- c. perubahan budaya akibat globalisasi;
- d. konflik identitas;
- e. toleransi antarumat beragama;
- f. transformasi masyarakat digital.

Dengan demikian, sejarah sosial tidak dipahami sebagai ilmu yang hanya mempelajari masa lalu, tetapi sebagai disiplin ilmu yang memberikan perspektif dalam memahami dan merespons berbagai tantangan sosial masa kini.

8. Strategi Menulis Jurnal Refleksi yang Efektif

Agar jurnal refleksi memiliki kualitas akademik yang baik, beberapa prinsip berikut perlu diperhatikan.

- a. Ditulis secara jujur berdasarkan pengalaman belajar.
- b. Menghubungkan pengalaman dengan teori atau konsep yang telah dipelajari.
- c. Menggunakan bahasa ilmiah yang jelas dan sistematis.
- d. Menyampaikan analisis, bukan sekadar deskripsi pengalaman.
- e. Menutup refleksi dengan rencana pengembangan diri yang realistis.

Melalui prinsip-prinsip tersebut, jurnal refleksi menjadi dokumen akademik yang menggambarkan perkembangan kompetensi mahasiswa secara komprehensif.

9. Refleksi sebagai Pembelajaran Sepanjang Hayat

Pada akhirnya, refleksi merupakan bagian dari proses *lifelong learning*. Seorang sejarawan maupun pendidik sejarah dituntut untuk terus belajar, mengevaluasi diri, dan memperbarui pengetahuan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan dinamika masyarakat.

Kebiasaan menulis jurnal refleksi akan membantu mahasiswa mengembangkan budaya belajar yang mandiri, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran bahwa proses belajar tidak berhenti setelah mata kuliah berakhir. Dalam konteks sejarah sosial, refleksi juga mendorong mahasiswa untuk terus mengaitkan

pengalaman masa lalu dengan tantangan masa kini dan peluang masa depan.

Dengan demikian, jurnal refleksi bukan sekadar tugas akademik, tetapi menjadi sarana pembentukan identitas sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki integritas, kepekaan sosial, dan tanggung jawab ilmiah.

Kesimpulan

Refleksi dan review materi menjadi bagian akhir pembelajaran Sejarah Sosial yang menghubungkan kembali berbagai konsep dan tema yang telah dipelajari selama satu semester. Pembahasan mengenai perubahan sosial, struktur masyarakat, globalisasi, modernisasi, migrasi, gender, etnisitas, agama, hingga penelitian sejarah sosial menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses sejarah yang kompleks dan saling berkaitan. Review materi membantu mahasiswa melihat hubungan antartema tersebut secara lebih utuh, bukan sebagai pembahasan yang berdiri sendiri.

Diskusi umum memperkuat proses tersebut melalui pertukaran gagasan, argumentasi berbasis bukti, dan pembahasan berbagai persoalan sosial dari perspektif sejarah. Melalui diskusi, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir historis dan kritis sekaligus memahami bahwa perbedaan interpretasi merupakan bagian dari proses akademik selama didukung oleh sumber dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jurnal refleksi melengkapi proses pembelajaran dengan memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menilai perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akademiknya. Refleksi terhadap materi, pengalaman penelitian, diskusi, dan berbagai kegiatan pembelajaran dapat membantu mahasiswa mengenali capaian maupun aspek yang masih perlu dikembangkan. Keseluruhan proses tersebut menempatkan pembelajaran Sejarah Sosial tidak hanya sebagai upaya memahami kehidupan masyarakat pada masa lalu, tetapi juga sebagai dasar untuk membaca perubahan sosial masa kini serta mengembangkan kemampuan akademik sebagai calon pendidik dan peneliti sejarah.

Studi Reflektif

1. Bagaimana berbagai materi yang dipelajari selama satu semester saling berkaitan dalam menjelaskan perubahan masyarakat?
2. Mengapa diskusi dan perbedaan interpretasi penting dalam pembelajaran Sejarah Sosial?
3. Bagaimana perspektif sejarah sosial dapat digunakan untuk memahami persoalan masyarakat pada masa kini?
4. Apa manfaat refleksi terhadap pengalaman belajar dan penelitian bagi pengembangan kemampuan akademik mahasiswa?
5. Setelah mempelajari Sejarah Sosial selama satu semester, pemahaman atau keterampilan apa yang paling berkembang dan masih perlu ditingkatkan?

PENUTUP

Buku ajar Sejarah Sosial ini disusun sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat melalui perspektif sejarah sosial. Berbeda dengan historiografi tradisional yang lebih menitikberatkan pada peristiwa politik, pergantian kekuasaan, atau tokoh-tokoh besar, sejarah sosial menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses sejarah. Dengan pendekatan ini, mahasiswa diajak untuk memahami bahwa sejarah merupakan hasil interaksi yang kompleks antara individu, kelompok, struktur sosial, ekonomi, budaya, agama, politik, lingkungan, dan perkembangan teknologi yang berlangsung secara dinamis dari masa ke masa.

Materi yang disajikan dalam buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pengenalan konsep dasar sejarah sosial, perkembangan historiografi sosial, teori-teori perubahan sosial, metode penelitian sejarah sosial, hingga berbagai tema kontemporer seperti globalisasi, gender, etnisitas, migrasi, agama, dan penelitian sejarah sosial. Pada bagian akhir, buku ini juga membahas keterampilan akademik yang diperlukan oleh mahasiswa, seperti penyusunan laporan penelitian, presentasi ilmiah, diskusi hasil penelitian, serta refleksi pembelajaran. Susunan materi tersebut diharapkan mampu membangun pemahaman yang komprehensif mengenai sejarah sosial sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir historis, analitis, kritis, dan reflektif.

Sejarah sosial memberikan pemahaman bahwa setiap perubahan dalam masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses historis yang panjang. Fenomena seperti urbanisasi, globalisasi, perubahan identitas sosial, perkembangan teknologi digital, perubahan peran gender, konflik sosial, hingga transformasi budaya merupakan bagian dari dinamika sejarah yang terus berlangsung. Oleh karena itu, mempelajari sejarah sosial bukan sekadar mempelajari masa lalu, tetapi juga memahami akar permasalahan masa kini serta merumuskan alternatif solusi bagi kehidupan masyarakat di masa depan.

Bagi mahasiswa Pendidikan Sejarah, penguasaan sejarah sosial memiliki arti yang sangat penting. Seorang calon pendidik sejarah tidak hanya dituntut menguasai fakta-fakta sejarah, tetapi juga mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat, kesinambungan (*continuity*), perubahan (*change*), serta keterkaitan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kompetensi tersebut menjadi bekal dalam menyusun pembelajaran sejarah yang kontekstual, mengembangkan penelitian yang berkualitas, serta menumbuhkan kesadaran sejarah (*historical consciousness*) pada peserta didik.

Selain itu, pembelajaran sejarah sosial memiliki kontribusi strategis dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan sosial, penghargaan terhadap keberagaman, gotong royong, solidaritas, demokrasi, serta tanggung jawab sosial merupakan bagian dari pembelajaran sejarah sosial yang sangat relevan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Dengan memahami

perjalanan sejarah masyarakat, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan sikap yang inklusif, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Di era globalisasi dan transformasi digital, kajian sejarah sosial menghadapi tantangan sekaligus peluang baru. Digitalisasi arsip, perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta meningkatnya akses terhadap sumber-sumber sejarah membuka kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan penelitian sejarah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menuntut kemampuan literasi digital, kritik sumber, serta etika akademik agar informasi sejarah yang digunakan tetap valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, mahasiswa perlu terus mengembangkan kompetensi metodologis dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan zaman.

Penyusunan buku ajar ini juga diharapkan dapat mendukung implementasi pembelajaran berbasis Outcome-Based Education (OBE), yang menekankan ketercapaian kompetensi lulusan melalui integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Seluruh materi dirancang agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep-konsep sejarah sosial, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam penelitian, pembelajaran sejarah, maupun analisis terhadap berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi berlanjut pada kemampuan

menghasilkan solusi dan kontribusi nyata bagi kehidupan sosial.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan, baik dari sisi cakupan materi maupun kedalaman pembahasan. Perkembangan ilmu sejarah, ilmu sosial, dan metodologi penelitian akan terus melahirkan perspektif-perspektif baru yang perlu diakomodasi dalam penyempurnaan buku ini pada masa mendatang. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari dosen, mahasiswa, peneliti, maupun pembaca sangat diharapkan demi peningkatan kualitas buku ajar ini.

Akhirnya, penulis berharap buku ajar Sejarah Sosial ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kajian sejarah dan perubahan sosial. Lebih dari itu, buku ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa sejarah bukan sekadar rekaman masa lalu, melainkan sumber pembelajaran yang memberikan inspirasi, kebijaksanaan, dan arah dalam menghadapi tantangan kehidupan masa kini serta membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memahami sejarah sosial secara kritis dan kontekstual, diharapkan lahir generasi yang memiliki integritas akademik, kepedulian sosial, wawasan kebangsaan, serta komitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat Indonesia yang demokratis, inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pesan Akhir kepada Mahasiswa

Mempelajari sejarah sosial bukanlah sekadar menghafal peristiwa, tanggal, atau nama tokoh, melainkan memahami perjalanan manusia dan masyarakat dalam menghadapi perubahan zaman. Jadikan setiap peristiwa sejarah sebagai sumber pembelajaran untuk membangun cara berpikir yang kritis, objektif, dan humanis. Teruslah mengembangkan rasa ingin tahu, kemampuan meneliti, serta keberanian untuk mengemukakan gagasan berdasarkan bukti ilmiah. Sebagai calon pendidik sejarah, Anda memiliki tanggung jawab untuk mewariskan nilai-nilai sejarah kepada generasi berikutnya, sehingga sejarah tidak hanya dikenang, tetapi juga dimaknai sebagai pedoman dalam membangun masa depan bangsa yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alley, M. (2013). *The Craft of Scientific Presentations* (2nd ed.). Springer.
- Anderson, B. (1991). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
- Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism* (Rev. ed.). Verso.
- Barth, F. (1969). *Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference*. Little, Brown and Company.
- Beauvoir, S. de. (1949). *The Second Sex*. Alfred A. Knopf.
- Beck, U. (2000). *What Is Globalization?* Polity Press.
- Berger, P. L. (1967). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. Doubleday.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge University Press.
- Bloch, M. (1949). *The Historian's Craft*. Manchester University Press.
- Bloch, M. (1953). *The Historian's Craft*. Manchester: Manchester University Press.
- Bloch, M. (1961). *Feudal Society*. Routledge & Kegan Paul.
- Bloch, M. (1992). *The historian's craft* (P. Putnam, Trans.). Manchester University Press.
- Bloch, M., & Febvre, L. (1990). *The Annales School: Critical Perspectives*. Routledge.

- Braudel, F. (1980). *On History*. Chicago: University of Chicago Press.
- Braudel, F. (1980). *On History*. University of Chicago Press.
- Braverman, H. (1974). *Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century*. Monthly Review Press.
- Breman, J. (1983). *Control of Land and Labour in Colonial Java*. Foris Publications.
- Brookfield, S. D. (2017). *Becoming a Critically Reflective Teacher* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Burke, P. (1990). *The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–89*. Polity Press.
- Burke, P. (2005). *History and social theory* (2nd ed.). Polity Press.
- Burke, P. (2015). *What is Cultural History?* (3rd ed.). Cambridge: Polity Press.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Blackwell.
- Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2020). *The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World* (6th ed.). Guilford Press.
- Chatterjee, P. (1993). *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton University Press.
- Childe, V. G. (1950). *The Urban Revolution*. Town Planning Review.
- Coser, L. A. (1956). *The functions of social conflict*. Free Press.

- Crenshaw, K. (1989). *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex*. University of Chicago Legal Forum.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Davis, K. (1965). *The Urbanization of the Human Population*. Scientific American, 213(3), 41–53.
- Dewey, J. (1933). *How We Think*. D.C. Heath and Company.
- Diamond, J. (1997). *Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies*. W.W. Norton & Company.
- Duby, G. (1978). *The Early Growth of the European Economy: Warriors and Peasants from the Seventh to the Twelfth Century*. Cornell University Press.
- Durkheim, É. (1893). *The Division of Labor in Society*.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. George Allen & Unwin.
- Durkheim, É. (1995). *The Elementary Forms of Religious Life*. Free Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1912).
- Elson, R. E. (1999). *The End of the Peasantry in Southeast Asia*. Palgrave Macmillan.
- Engels, F. (1845). *The Condition of the Working Class in England*.
- Fairbank, J. K. (1978). *The Chinese World Order: Traditional China's Foreign Relations*. Harvard University Press.
- Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Polity Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Pantheon Books.

- Frank, A. G. (1969). *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*. Monthly Review Press.
- Friedman, T. L. (2005). *The World Is Flat*. Farrar, Straus and Giroux.
- Furnivall, J.S. (1939). *Netherlands India: A Study of Plural Economy*.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. Free Press.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*.
- Geertz, C. (1963). *The Integrative Revolution: Primordial Sentiments and Civil Politics in the New States*. Free Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.
- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and Self-Identity*. Polity Press.
- Ginzburg, C. (1976). *The Cheese and the Worms: The Cosmos of a Sixteenth-Century Miller*. Johns Hopkins University Press.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. UI Press.
- Hall, J. W. (1966). *Japanese Feudalism*. Stanford University Press.
- Hariyanto, D. (2022). Pancasila dan relasi harmoni antar umat beragama pada komunitas Sunda Wiwitan di Cigugur. *Transformasi*, 4(2), 370–388.

- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Hobsbawm, E. (1984). *Worlds of Labour: Further Studies in the History of Labour*. Weidenfeld & Nicolson.
- Hobsbawm, E.J. (1962). *The Age of Revolution: 1789-1848*.
- Hodder, I. (2006). *Çatalhöyük: The Leopard's Tale*. Thames & Hudson.
- Hooks, B. (2000). *Feminism Is for Everybody: Passionate Politics*. South End Press.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies*. Princeton University Press.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Gramedia.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kelly, R. L. (2013). *The Lifeways of Hunter-Gatherers: The Foraging Spectrum*. Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development* (2nd ed.). Pearson Education.
- Krisandi, E., Setyono, B., & Utomo, T. C. (2013). Resolusi konflik komunal di Maluku pasca Reformasi. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(2), 96–101.
- Kuntowijoyo. (2013). *Metodologi Sejarah*. Tiara Wacana.

- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar ilmu sejarah*. Tiara Wacana.
- Laffan, M. F. (2003). *Islamic nationhood and colonial Indonesia: The umma below the winds*. RoutledgeCurzon.
- Lee, E. S. (1966). "A Theory of Migration." *Demography*, 3(1), 47–57.
- Lerner, G. (1986). *The Creation of Patriarchy*. Oxford University Press.
- Manning, P. (2013). *Migration in World History* (2nd ed.). Routledge.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The Communist Manifesto*.
- Moon, J. A. (2006). *Learning Journals: A Handbook for Reflective Practice and Professional Development* (2nd ed.). Routledge.
- Mulyana, D. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nitobe, I. (1905). *Bushido: The Soul of Japan*. Kodansha International.
- Oakley, A. (1972). *Sex, Gender and Society*. Temple Smith.
- Pahlevi, R., Badrudin, B., & Ulfiah, U. (2024). Muhammadiyah's contribution to educational development in Indonesia: A historical analysis. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 4(1).
<https://doi.org/10.15575/jis.v4i1.32306>
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.

- Postgate, J. N. (1992). *Early Mesopotamia: Society and Economy at the Dawn of History*. Routledge.
- Reid, A. (2011). *Indonesia Rising: The Repositioning of Asia's Third Giant*. ISEAS Publishing.
- Renfrew, C., & Bahn, P. (2016). *Archaeology: Theories, Methods, and Practice*. Thames & Hudson.
- Reynolds, G. (2019). *Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and Delivery* (3rd ed.). New Riders.
- Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic synthesis in Java: A history of Islamization from the fourteenth to the early nineteenth centuries*. EastBridge.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Polarising Javanese society: Islamic and other visions (c. 1830–1930)*. NUS Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c. 1200*. Palgrave Macmillan.
- Ristanti, D. N. (2022). Interreligious violent conflict resolution: Discoursing communal violence between Christians and Moslems in Poso City, Indonesia. *Hasanuddin Journal of Strategic and International Studies*, 1(1), 31–38.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge University Press.
- Said, E. (1978). *Orientalism*. Pantheon Books.
- Schmidt, K. (2000). Göbekli Tepe: A Stone Age Sanctuary in Southeastern Anatolia. *Neo-Lithics*.

- Schön, D. A. (1983). *The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action*. Basic Books.
- Scott, J. W. (1986). *Gender: A Useful Category of Historical Analysis*. *The American Historical Review*, 91(5), 1053–1075.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Skocpol, T. (1979). *States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge University Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sztompka, P. (1993). *The Sociology of Social Change*. Blackwell Publishing.
- Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). "An Integrative Theory of Intergroup Conflict." Dalam *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Brooks/Cole
- Thompson, E.P. (1963). *The Making of the English Working Class*. Victor Gollancz Ltd.
- Thompson, E.P. (1967). "Time, Work-Discipline, and Industrial Capitalism." *Past & Present*, 38, 56-97.
- Thompson, P. (1988). *The Voice of the Past: Oral History*. Oxford University Press.
- Thompson, P., & Bornat, J. (2017). *The voice of the past: Oral history* (4th ed.). Oxford University Press.
- Tilly, C. (1990). *Coercion, Capital, and European States, AD 990–1990*. Basil Blackwell.

- Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Tilly, L. A., & Scott, J. W. (1978). *Women, Work, and Family*. Holt, Rinehart and Winston.
- Tjondronegoro, S. M. P. (1999). *Sosiologi Agraria*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tosh, J. (2002). *The Pursuit of History*. Longman.
- Tosh, J. (2015). *The Pursuit of History* (6th ed.). Routledge.
- Trigger, B. G. (2003). *Understanding Early Civilizations: A Comparative Study*. Cambridge University Press.
- van Klinken, G. (2007). *Communal violence and democratization in Indonesia: Small town wars*. Routledge.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Vreede-de Stuers, C. (2008). *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Komunitas Bambu.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
- Weber, M. (1930). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Allen & Unwin.
- Weber, M. (2002). *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Routledge. (Karya asli diterbitkan tahun 1905).
- Wieringa, S. E. (2002). *Sexual Politics in Indonesia*. Palgrave Macmillan.
- Wilandra, S. S., & Emalia, I. (2022). Sarekat Islam sebagai gerakan sosial: Dari gerakan Ratu Adil ke sosialisme

- Islam. *Socio Historica: Journal of Islamic Social History*, 1(1), 54–72.
- Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts*. Temple University Press.
- Wollstonecraft, M. (1792). *A Vindication of the Rights of Woman*. J. Johnson.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Zelinsky, W. (1971). "The Hypothesis of the Mobility Transition." *Geographical Review*, 61(2), 219–249.

BIOGRAFI PENULIS



Egi Nurholis, S.Pd., M.Pd. merupakan dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Galuh. Penulis memiliki minat dan kepakaran pada bidang historiografi, sejarah sosial, pendidikan sejarah, metodologi penelitian sejarah, sejarah lokal, serta inovasi pembelajaran sejarah berbasis teknologi digital.

Dalam menjalankan tridarma perguruan tinggi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada bidang pendidikan, penulis mengampu berbagai mata kuliah, di antaranya **Sejarah Sosial, Sejarah Asia Tenggara, Kepariwisata Sejarah, Literasi Digital, Artificial Intelligence dan Transformasi Sejarawan, Inovasi Digital dalam Pembelajaran Sejarah**, serta mata kuliah lain yang berkaitan dengan kajian sejarah dan pendidikan sejarah. Selain mengajar, penulis juga aktif membimbing skripsi mahasiswa, mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education* (OBE), serta menyusun berbagai bahan ajar dan buku referensi untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran di perguruan tinggi.

Pada bidang penelitian, fokus kajian penulis meliputi sejarah sosial, sejarah lokal, pendidikan sejarah, historiografi, transformasi digital dalam pendidikan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan artifisial (*Artificial*

Intelligence) dalam pembelajaran sejarah. Berbagai hasil penelitian telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran sejarah yang kontekstual, inovatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Sebagai akademisi, penulis meyakini bahwa sejarah bukan sekadar rekonstruksi peristiwa masa lalu, tetapi merupakan sarana untuk memahami dinamika masyarakat, membangun kesadaran sejarah (*historical consciousness*), memperkuat identitas kebangsaan, serta menumbuhkan karakter yang kritis, humanis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang dilakukan selalu diarahkan pada pengembangan pembelajaran sejarah yang relevan dengan tantangan abad ke-21.

Buku ajar **Sejarah Sosial** ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi penulis dalam menyediakan sumber belajar yang sistematis, ilmiah, dan kontekstual bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah. Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa memahami berbagai dinamika perubahan sosial dalam perspektif sejarah serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi dosen, peneliti, guru sejarah, dan masyarakat luas.

Penulis senantiasa terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan yang konstruktif sebagai bagian dari upaya penyempurnaan karya ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan pendidikan sejarah.

SEJARAH SOSIAL

Memahami Dinamika Masyarakat & Perubahan Sosial



Buku Ajar Sejarah Sosial: Memahami Dinamika Masyarakat dan Perubahan Sosial disusun sebagai panduan pembelajaran bagi mahasiswa, khususnya Program Studi Pendidikan Sejarah, untuk memahami masyarakat sebagai aktor utama dalam proses sejarah. Buku ini tidak hanya membahas peristiwa-peristiwa masa lalu, tetapi juga mengkaji dinamika sosial yang membentuk kehidupan manusia melalui perspektif sejarah sosial yang kritis, kontekstual, dan interdisipliner.

Materi disajikan secara sistematis mulai dari konsep dasar sejarah sosial, teori dan metode penelitian, perkembangan masyarakat prasejarah, masyarakat kuno dan feodal, kolonialisme, revolusi sosial, globalisasi, gender, etnisitas, migrasi, agama, gerakan sosial, hingga penyusunan dan presentasi hasil penelitian serta refleksi pembelajaran. Setiap bab dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, contoh kasus, analisis, kesimpulan, dan studi reflektif untuk mendorong kemampuan berpikir historis dan analitis mahasiswa.

Buku ini menempatkan perubahan sosial sebagai benang merah pembahasan, dengan menekankan keterkaitan antara struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, gender, migrasi, dan globalisasi dalam membentuk kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Melalui pendekatan tersebut, pembaca diajak memahami bahwa sejarah bukan sekadar rangkaian fakta, melainkan sarana untuk menafsirkan perubahan sosial, menghargai keberagaman, serta merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, buku ini menjadi referensi yang relevan bagi mahasiswa, dosen, maupun pemerhati sejarah dan ilmu sosial dalam mengembangkan wawasan akademik sekaligus kepekaan terhadap dinamika kehidupan sosial.

